



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR
9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

PULAU PUNJUNG – 2025



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ~~9~~ TAHUN ~~2025~~

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2026.

Pasal 3

Penyusunan KUA serta PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal ...



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 9



Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 9 Tahun 2025
Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD	5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	7
1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045	9
1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029	9
1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP Nasional Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	9
1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan Renja PD	9
1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan APBD	10
1.3.6. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043	10
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	17
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	1
2.1.1. Aspek Geografi	1
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	19
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	19
2.1.4. Kondisi Demografi	23
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	25
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	42
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	42
2.3.2. Daya Saing SDM	48
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	49
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	50
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	52
2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN	153
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	153
2.5.2. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2024	155
2.6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	167



2.6.1. Permasalahan Pembangunan	167
2.6.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	173
2.6.3. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	175
2.6.4. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 182	
2.7. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN TAHUN 2024.....	184
2.8. CAPAIAN SDG'S TAHUN 2024.....	187
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	1
3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	7
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026.....	1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	4
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026.....	6
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	8
3.3. ARAH KEBIJAKAN KERANGKA PENDANAAN.....	18
2.3.1. Kebijakan Pendapatan.....	18
A. Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	18
B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19
C. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari "Lain-lain PAD yang sah".....	20
Pendapatan Transfer.....	20
▪ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	20
▪ Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	21
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27
2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah	23
2.3.3. Kebijakan Pembiayaan.....	26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	2
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	12
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.....	13
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026.....	18
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	19
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	30
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	44
4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	62
4.2.5. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	64
4.2.6. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	73
4.2.7. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	76
4.2.8. Inovasi Pembangunan Daerah	84
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	1



5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026.....	1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	2
6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA	2
6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH	5
BAB 7 PENUTUP	1



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong	2
Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	3
Tabel 2-3 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya	6
Tabel 2-4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya	12
Tabel 2-5 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan.....	13
Tabel 2-6 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan	14
Tabel 2-7 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya	15
Tabel 2-8 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya	17
Tabel 2-9 Nilai indeks risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023.....	19
Tabel 2-10 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya	21
Tabel 2-11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	23
Tabel 2-14 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)	33
Tabel 2-15 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 (Rupiah/Orang).....	34
Tabel 2-16 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2022-2023 (persen)	44
Tabel 2-17 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan Tahun 2018-2022.....	45
Tabel 2-18 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019-2023 (kWh/orang).....	50
Tabel 2-19 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	52
Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	53
Tabel 2-21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	53
Tabel 2-22 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	54
Tabel 2-23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	54
Tabel 2-24 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs).....	55
Tabel 2-25 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	56
Tabel 2-26 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	56
Tabel 2-27 Angka kematian bayi (AKB)	57
Tabel 2-28 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	58
Tabel 2-29 Prevalensi Stunting	59
Tabel 2-30 Prevalensi Malnutrisi	60
Tabel 2-31 Persentase Rumah Tangga PHBS	60
Tabel 2-32 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	61



Tabel 2-33 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	62
Tabel 2-34 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63
Tabel 2-35 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	63
Tabel 2-36 Visite Rate	64
Tabel 2-37 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	65
Tabel 2-38 Persentase UPT RSUD Terakreditasi.....	66
Tabel 2-39 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	67
Tabel 2-40 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik	68
Tabel 2-41 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	69
Tabel 2-42 Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	69
Tabel 2-43 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik.....	70
Tabel 2-44 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	71
Tabel 2-45 Persentase Kesesuaian Tata Ruang	72
Tabel 2-46 Cakupan permukiman layak huni	73
Tabel 2-47 Cakupan ketersediaan rumah layak huni.....	73
Tabel 2-48 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana.....	74
Tabel 2-49 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	75
Tabel 2-50 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	75
Tabel 2-51 25 Persentase lembaga adat yang aktif	125
Tabel 0-52 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	126
Tabel 0-53 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	126
Tabel 0-54 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan.....	127
Tabel 0-55 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	127
Tabel 0-56 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.....	128
Tabel 0-57 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	129
Tabel 0-58 Produksi Perikanan.....	129
Tabel 0-59 Jumlah kunjungan wisatawan.....	130
Tabel 0-60 Tingkat hunian akomodasi.....	130
Tabel 0-61 Jumlah pelaku ekonomi kreatif.....	131
Tabel 0-62 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina.....	131
Tabel 0-63 Produksi Sektor Pertanian.....	132
Tabel 0-64 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi.....	133
Tabel 0-65 Alat UTTP yang Beratanda tera sah	134
Tabel 0-66 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	135
Tabel 0-67 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	135
Tabel 0-68 Nilai LPPD	137
Tabel 0-69 Nilai SAKIP	139
Tabel 0-70 Nilai Reformasi Birokrasi.....	140



Tabel 0-71 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	141
Tabel 0-72 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	141
Tabel 0-73 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.....	142
Tabel 0-74 Rata-rata ketergantungan dana transfer	143
Tabel 0-75 Persentase SILPA terhadap APBD	143
Tabel 0-76 Indeks Profesionalitas ASN.....	144
Tabel 0-77 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	145
Tabel 0-78 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi.....	145
Tabel 0-79 Persentase kasus ASN yang tertangani	146
Tabel 0-80 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi.....	147
Tabel 0-81 Indeks inovasi daerah	148
Tabel 0-82 Tingkat Kapabilitas APIP	148
Tabel 0-83 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	149
Tabel 0-84 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)	149
Tabel 0-85 Capaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	150
Tabel 0-86 Persentase Pembinaan Partai Politik.....	150
Tabel 0-87 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	151
Tabel 0-88 Persentase Pembinaan LSM.....	152
Tabel 0-89 Jumlah Konflik Sosial	152
Tabel 0-90 Jumlah Penyakit Masyarakat.....	152



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	8
Gambar 1 -2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spasial).....	10
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	3
Gambar 2-2 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya.....	4
Gambar 2-3 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya	5
Gambar 2-4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya.....	7
Gambar 2-5 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya	8
Gambar 2-6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya.....	11
Gambar 2-7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	12
Gambar 2-8 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	14
Gambar 2-9 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini,



perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Dimana tujuan pembangunan tersebut terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dokumen Rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, serta dokumen perencanaan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), dimana setiap dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah selalu mempedomani dokumen perencanaan daerah Provinsi Sumatera Barat dan dokumen perencanaan nasional, selain itu sesuai dengan amanat peraturan daerah juga dituntut untuk memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selalu memiliki bersinergi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan telah berakhirnya perodesasi RPJPD Tahun 2005-2025 dan telah ditetapkannya RPJPD Tahun 2025-2025 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dimana dokumen ini akan menjadi pelaksanaan pembangunan 20 tahun ke depan untuk mendukung perwujudan visi Indonesia Emas tahun 2045.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tahap 5 (lima) tahun pertama dari Perodesasai RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Annisa Suci Ramadhani.S.H.,LL.M dan Leli Arni, S.Pd.,M.Si. Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD yang berpedoman pada RKP Tahun 2026 beserta program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maupun RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan asas otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada pasal 18 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan urusan konkuren, urusan ini dilakukan melalui pembagian kewenangan urusan pemerintahan mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Dengan demikian dengan adanya pembagian kewenangan ini setiap jenjang pemerintahan memiliki kewenangan yang jelas serta dapat menjalankan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mempedomani tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut dijelaskan tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diantaranya :

1. Tahapan persiapan Penyusunan RKPD (Minggu I Januari 2025)

Persiapan penyusunan RKPD diawali pada minggu I bulan Januari tahun 2025 dengan ditetapkannya Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 melalui keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/36/KPTS-BUP/2025 tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dilanjutkan dengan orientasi dan rapat pembahasan, serta pengumpulan data indikator kinerja.

2. Tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD (Minggu I Januari s.d. Minggu III Maret),

Tahapan ini diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD, Konsultasi publik Rancangan awal RKPD tahun 2026 tanggal 26 Februari 2025, dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD di kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2025, sejalan dengan penyusunan muatan Renja PD juga telah dilaksanakannya Forum Gabungan Perangkat Daerah pada tanggal 11 sampai dengan 29 Maret 2024.



3. Tahapan penyusunan Rancangan RKPD (Minggu III s.d IV Maret)

Tahapan ini dilakukan setelah OPD menyampaikan Rancangan Renja yang telah diformulasikan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Bapperida terhadap muatan Rancangan renja yang disampaikan, selain mempertimbangkan prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

4. Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten tanggal 27 Maret 2025.

Musrenbang RKPD di Kabupaten dihadiri oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, selain dihadiri oleh perangkat daerah, juga dihadiri oleh instansi vertikal, utusan Musrenbang kecamatan utusan Musrenbang Kecamatan, pemerintah nagari, serta daerah tetangga.

5. Tahapan perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan

- Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten
- penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan antara Bapperida Kabupaten Dharmasraya dengan Tim Fasilitasi RKPD Provinsi Sumatera Barat
- hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Adapun fokus utama fasilitasi ini adalah untuk menyepakati target pembangunan, serta sinkronisasi arah kebijakan pusat, provinsi Sumatera Barat dengan target pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

6. Tahapan penetapan RKPD (1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)

Sesuai peraturan perundang-undangan, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 telah ditetapkan pada 7 Hari setelah ditetapkannya RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dalam RKPD Tahun 2026 disusun dengan mensinergikan program strategis Sumatera Barat dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan pentahelix pelaku pembangunan.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 104); dan
 29. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

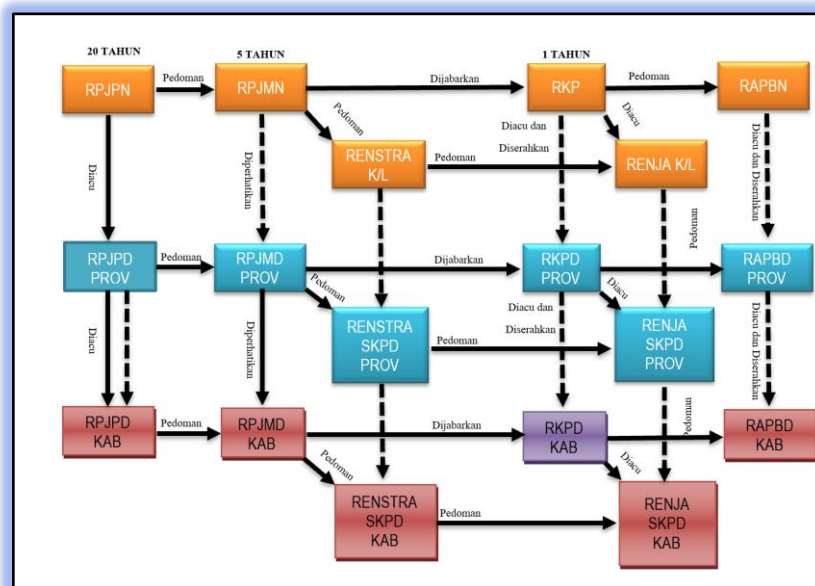
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RKPD, maka dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk juga

pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : Sesuai dengan hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan terdapat 2 (dua) bentuk perencanaan yaitu Perencanaan Pembangunan (sektoral), dan Perencanaan Keruangan (spasial). Dimana pada perencanaan pembangunan diarahkan pada fokus (prioritas pembangunan), sedangkan perencanaan keruangan diarahkan pada lokus (peruntukan kawasan). Adapun lebih detail mengenai hubungan antar dokumen dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1 -1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Berdasarkan bagan di atas terlihat bahwa selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan,



rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk program kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah RKP melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional RAPBN.

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan pada tahun perencanaan RPJMD.

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP Nasional Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dijelaskan bahwa SPPN satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan, diantaranya pada penyusunan RKP, dan RKPD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dimana pada penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan atas-bawah dan bawah-atas.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD



yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan APBD

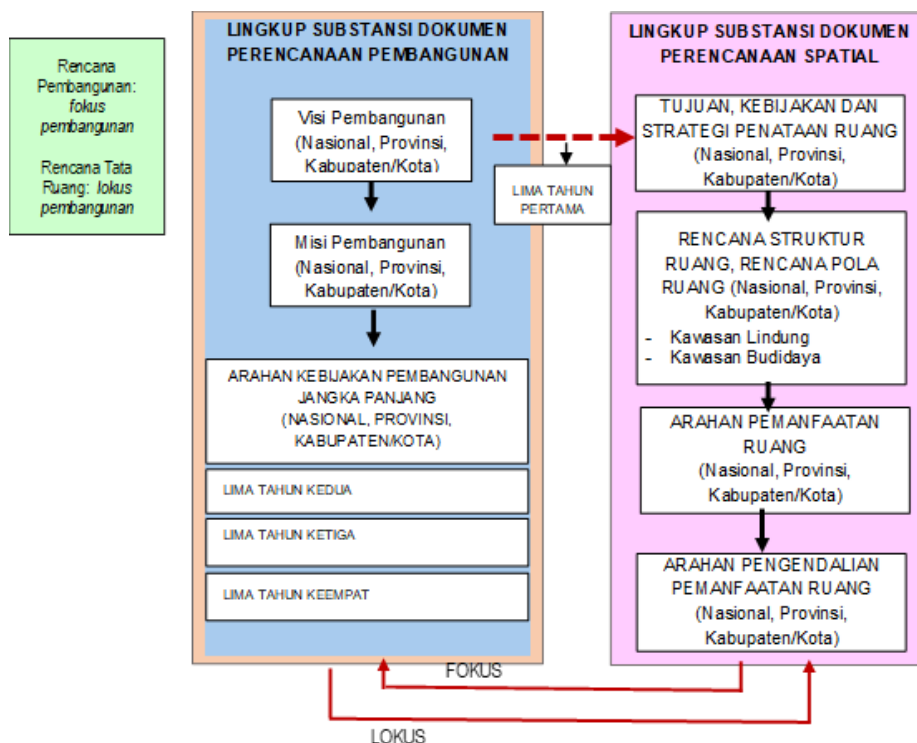
RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

1.3.6. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Dengan telah ditetapkan RTRW Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam indikasi program.

Dalam menentukan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026, dimana dokumen perencanaan sebagai focus dan dokumen tata ruang (spatial) sebagai locus. Penyusunan RKPD Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, sementara lokus memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043, terutama dari sisi pola ruang dan struktur tata ruang. Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan keruangan (spatial) dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1 -2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spasial)





Berdasarkan bagan-bagan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

1. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026.
3. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
4. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043.
5. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat RPJMD ini belum ditetapkan maka penyusunan RKPD



Tahun 2026 sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 periode tahun pertama (2025-2029); Selain itu RKPD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026; serta sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RKPD
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, terdiri dari tinjauan terhadap Kondisi Umum Daerah antara lain Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah untuk kondisi data realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selain itu juga memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 dan realisasi RPJMD serta permasalahan Pembangunan Daerah yang meliputi Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat rekapitulasi belanja berdasarkan prioritas pembangunan, urusan pemerintah daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan dimasing-masing perangkat daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, bab ini berisikan target kinerja Tahun 2026 yang diproyeksikan berdasarkan capaian RPJMD Tahun 2024, target kinerja tahun berjalan 2025 serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2026.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Gambaran umum kondisi daerah disajikan menggunakan gambar peta, grafik dan tabel untuk data 5 (lima) tahun terakhir, yaitu data tahun 2019 hingga tahun 2023, serta didukung penjelasan dan narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kondisi daerah serta beberapa indikator makro disandingkan capaian indikator nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai perbandingan capaian pembangunan dengan daerah yang lebih luas.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.



Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satellite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Dharmasraya per kecamatan dan banyak nagari serta jorong dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan wilayah administrasi dapat dilihat pada Gambar 2.1.

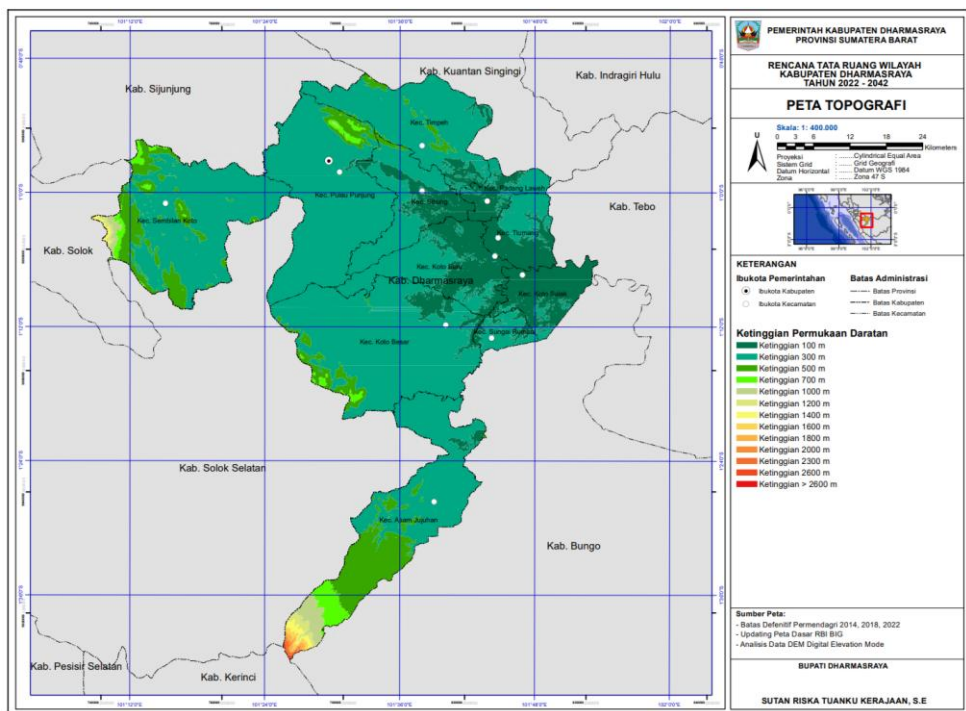
Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21,813	4
2	Pulau Punjung	43,835	6
3	Sungai Rumbai	4,950	4
4	Sitiung	18,459	4
5	Sembilan Koto	46,655	4
6	Timpeh	28,711	5
7	Koto Salak	12,212	5
8	Tiumang	11,243	4
9	Padang Laweh	7,184	4
10	Asam Jujuhan	43,280	5
11	Koto Besar	53,780	7
Kab. Dharmasraya		292.120	52

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

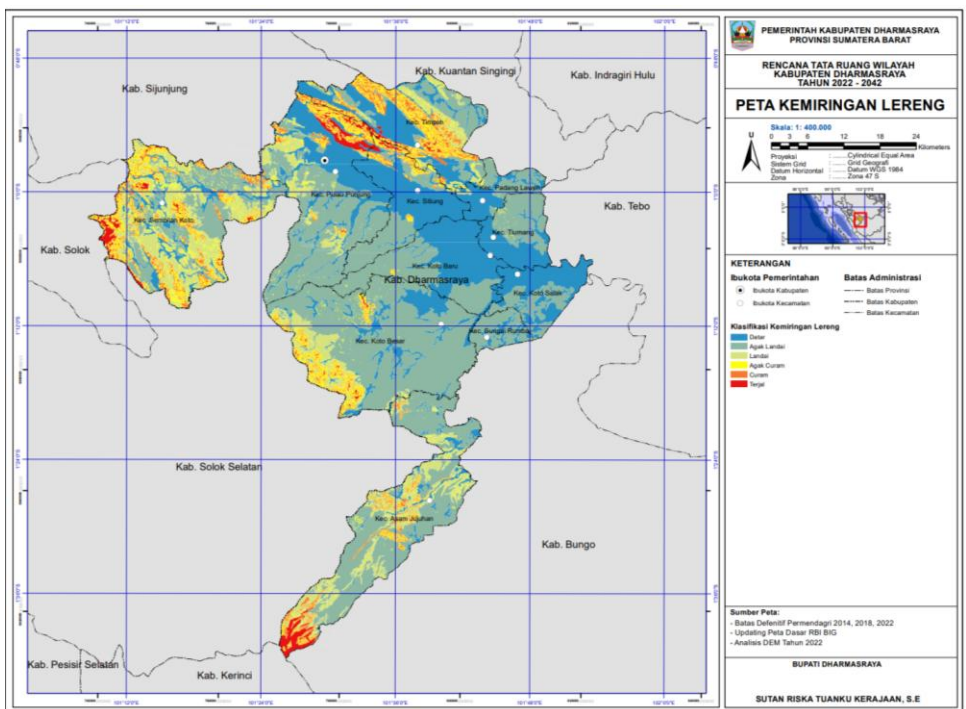


Gambar 2-2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-2 Peta Kelerenghan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



2.1.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya lebih kurang 60 sungai yang terdiri dari Sungai Besar dan anak sungai. Sungai paling besar dan panjang di Kabupaten Dharmasraya yaitu Sungai Batanghari yang termasuk dalam pengelolaan BWS V.

2.1.1.5. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2.1.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelean jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2-3 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	29.292	10,03
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	11.003	3,77
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	7.833	2,68
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	127.573	43,67
5	Latosol	Haplorthoxs	Ferralsols	16.107	5,51
6	Litosol	Tropeorthents	Lithosols	2.411	0,83
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	92.543	31,68
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	5.358	1,83
Total				292.120	100

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

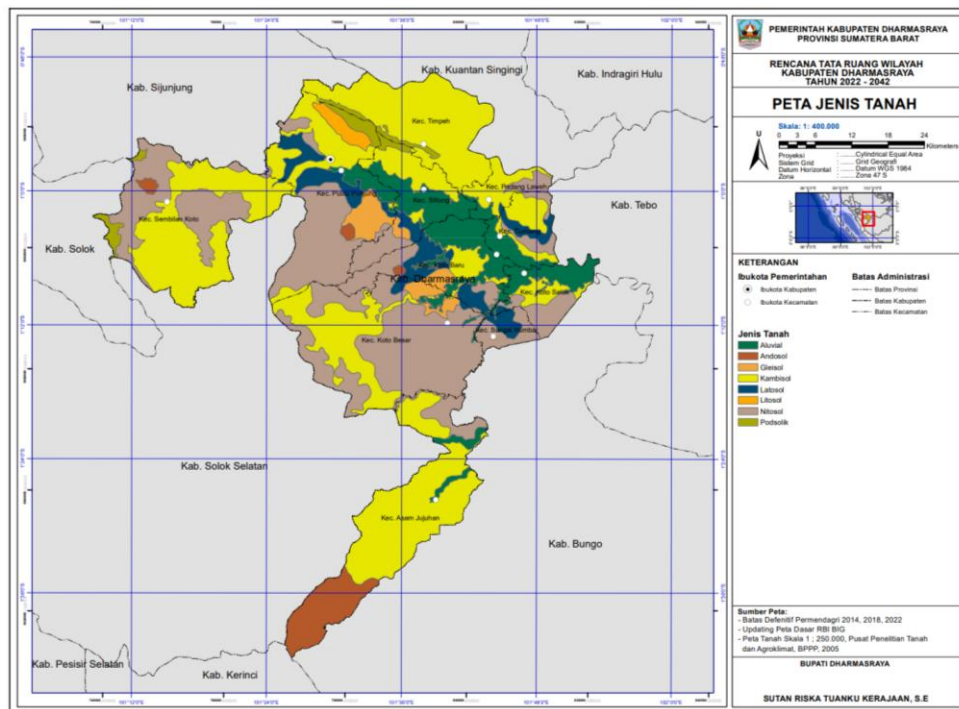
Dari data tabel di atas terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan

termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus.

Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organik rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organik. Adapun jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2-4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

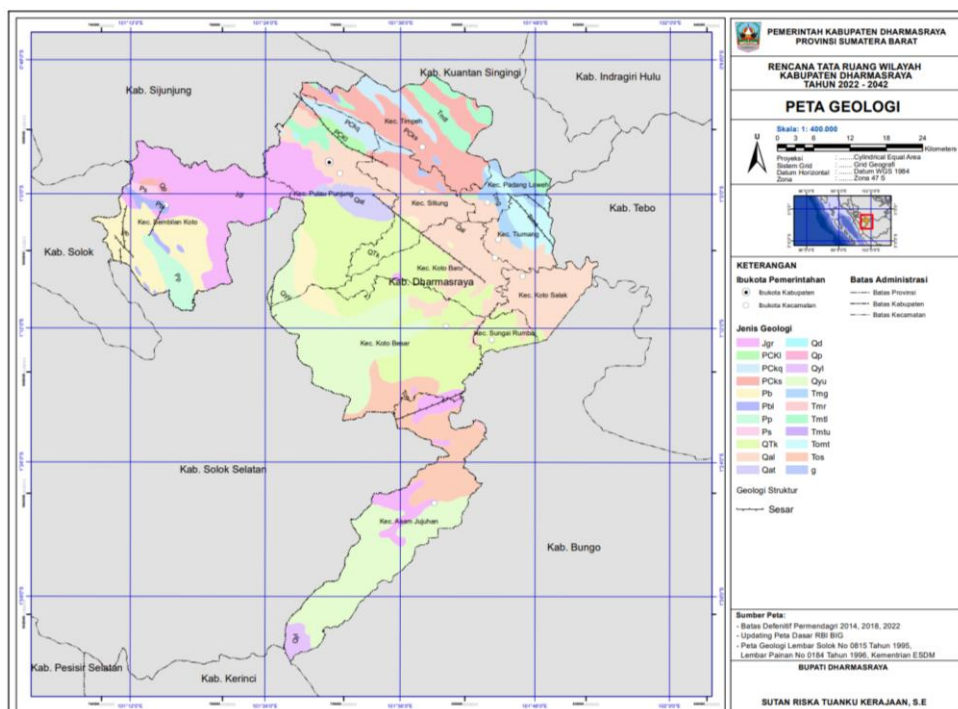
2.1.1.7. Geologi

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Endapan Undak
3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan
4. Lava
5. Formasi Kasai
6. Formasi Rantaukil
7. Formasi Telisa, Anggota bawah
8. Formasi Gumai
9. Formasi Talang Akar
10. Formasi Sinamar
11. Granit
12. Porfir Kuarsa
13. Granodiorit
14. Formasi Barisan, Anggota batugamping
15. Formasi Barisan
16. Formasi Pelepat
17. Diabas, Basal
18. Formasi Silungkang
19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah
20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih
21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2-5 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.8. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :



A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan sebaran luas (*extensive, moderately productive*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (*aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels*)

- Akifer produktif tinggi sampai sedang (*highly to moderately productive aquifers*)



Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (*aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater*)

- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (*poorly productive aquifers of local importance*)

Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka (*regions without exploitable groundwater*)

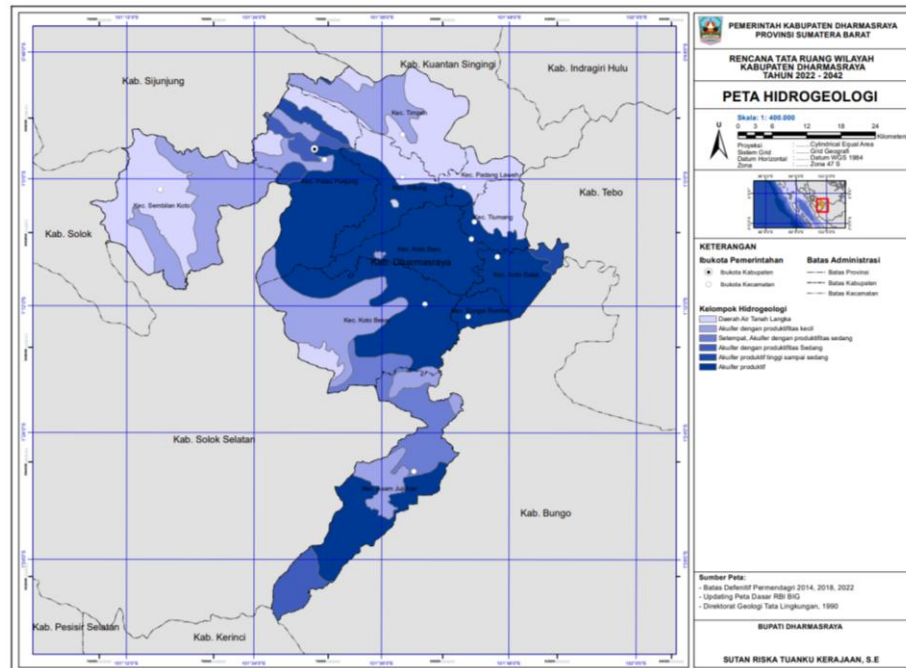
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Untuk lebih jelasnya kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2-6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.9. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 dan diupdating dengan data citra 2021 maka diperoleh hasil seperti berikut ini.

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 214.791 Ha (72,53% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.424 Ha (62,45%) dan karet seluas 21.874 Ha (7,49%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,47%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,12%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 58,757 Ha (20,11% dari luas wilayah).

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.026 Ha (1,70% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

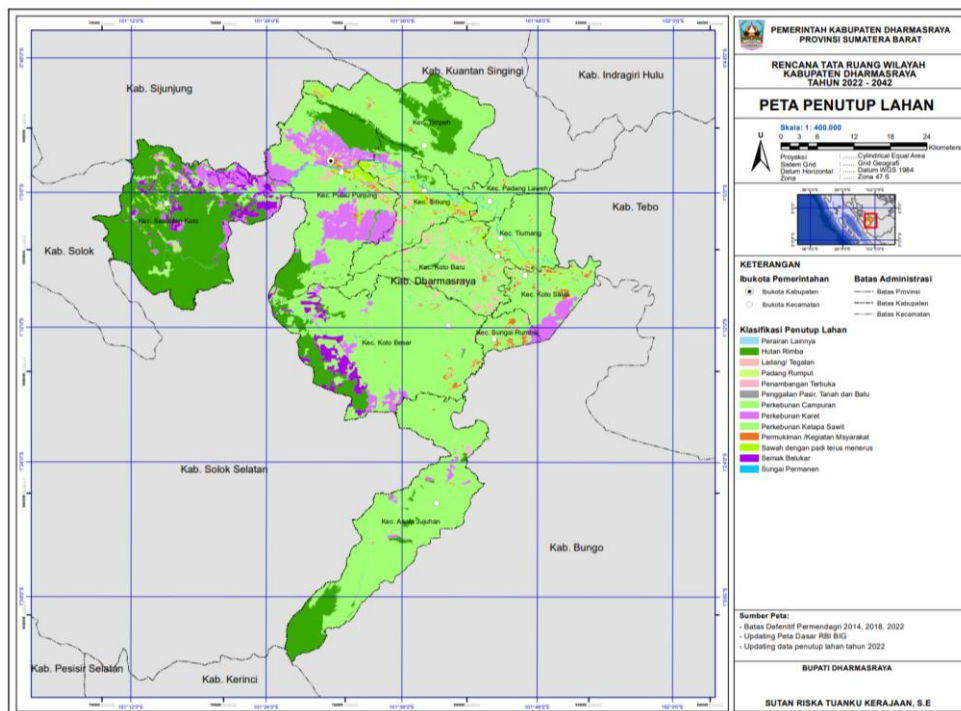
Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.8.

Tabel 2-4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman/ tempat kegiatan masyarakat	5,026	1.72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4,295	1.47
3	Perkebunan kelapa sawit	182,424	62.45
4	Perkebunan karet	21,874	7.49
5	Perkebunan campuran	3,087	1.06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0.12
7	Semak belukar	7,509	2.57
8	Ladang / tegalan/ palawija	6,198	2.12
9	Padang rumput/ alang-alang	219	0.08
10	Penambangan terbuka	137	0.05
11	Penampungan air	1	0.00
12	Bendungan	1	0.00
13	Danau	16	0.01
14	Empang	65	0.02
15	Hutan rimba	58,757	20.11
16	Irigasi	146	0.05
17	Sungai permanen	2,018	0.69
	Total Luas	292.120	100

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades pada RTRW Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



2.1.1.10. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.769 Ha (48,90% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan yaitu SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 80.819 Ha (28,24% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 48.272 Ha (16,74% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.409 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 150.213 Ha (51,10% dari luas wilayah).

Untuk lebih jelasnya peruntukan lahan berdasarkan status dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.9.

Tabel 2-5 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan Hutan	88.582,06	30,32
- Hutan Lindung (HL)	10.653,55	3,65
- Hutan Produksi (HP)	24.116,69	8,26
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	16.272,38	5,57
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.171,03	9,64
- Kawasan Cagar Alam	770,95	0,26
- Kawasan Suaka Alam	3,51	0,00
- Kawasan taman nasional (TN)	8.593,94	2,94
Perkebunan Besar	48.272	16,52
Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	7.895	2,70
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.526	0,86
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan-perundangan	147.270	50,41
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	158.387	49,59
Total Luas Kabupaten	292.120	100,00

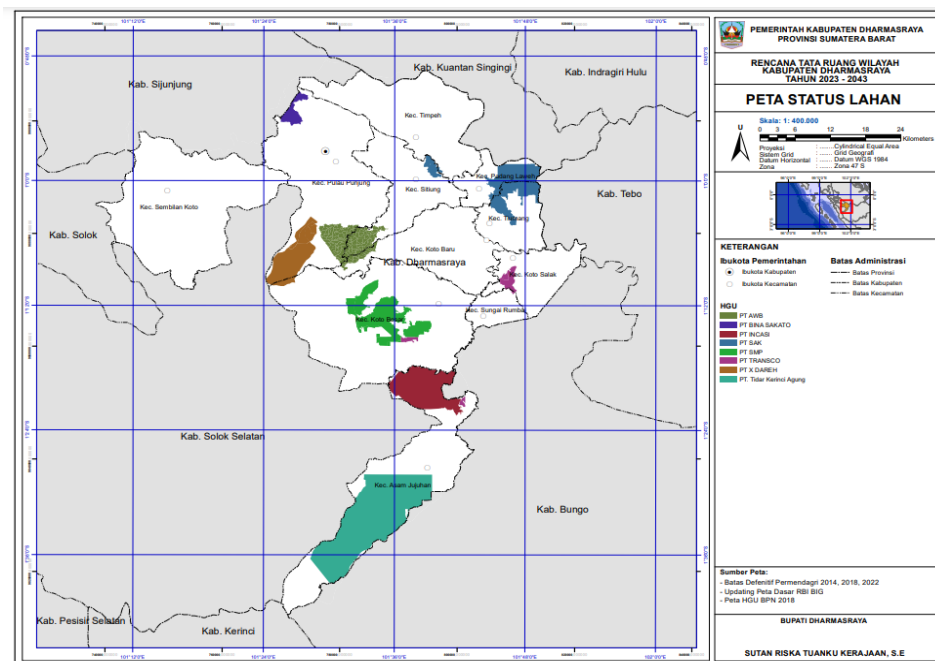
Sumber: SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Tabel 2-6 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

No	Kategori	Luas Ha	Proporasi Dari Luas Kabupaten
1	IUP Pertambangan	2.526	0,86 %
2	IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.526	0,86 %
3	IUP Eksplorasi Pertambangan	17.587	5,87%
4	Wilayah Pertambangan	292.120	100,00%

Sumber : dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-8 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.11. Kerawanan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.



Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

A. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsor gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pengelompokan gerakan tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2-7 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCKs), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh atau tumbang, lereng >	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung



No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
		(Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	25%, kekar dan sesar.	Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCKs), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCKs), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

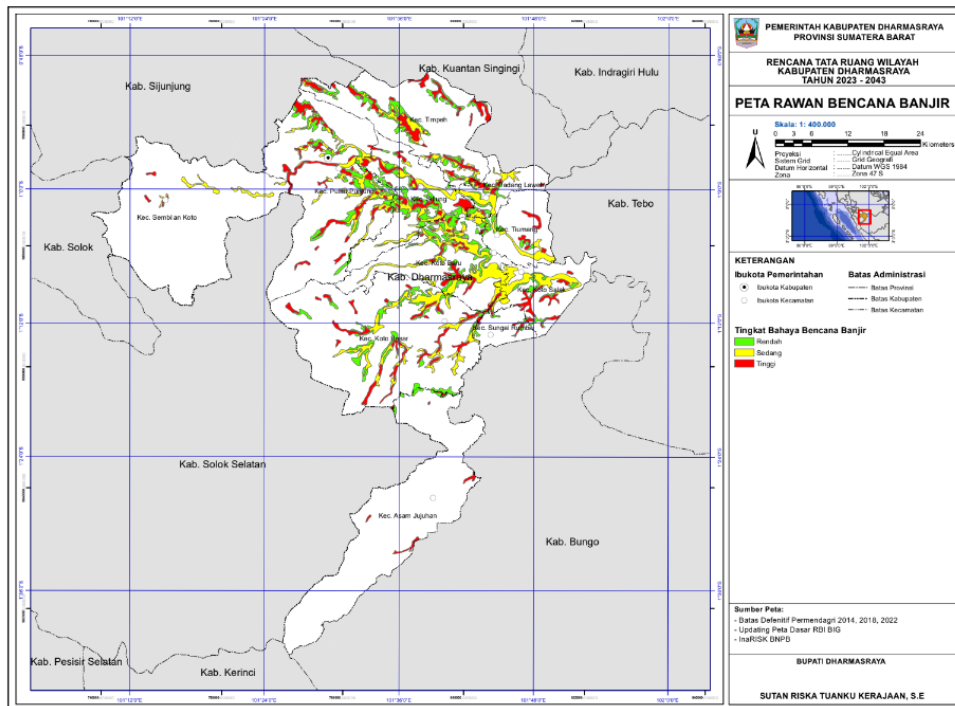
B. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 2-9 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

C. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

D. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2-8 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	FISIKA																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51



No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	421	8	520	19	305	9	20	12	16	51	25
2	KIMIA ORGANIK																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	2,4	2,0	1,6	2,0	3,2	3,5	2,8	3,4	1,56	1,92	2,44	2,86	3,1	4,5	2,8
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	7,2	7,3	6,9	7,1	7,1	6,1	6,7	7,2	4,0	4,7	5,9	5,3	6,8	7,0	6,3
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	2,152	1,574	3,617	11,92	0,882	12,14	0,4					1,229	4,869	1,551
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,000 92	0,0013 8	0,0016 6	0,0029 9	TTD	0,000 69	0,0005 4	0,001 72	0,0017 2	0,0016 3	0,0209 9	0,013 92	0,002 05	0,000 75
	Seng	Mg/L	0,05	5,440	5,821	0,377	0,299	0,297	0,114	0,334	0,135					3,947	0,648	0,074
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,02 3	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

- 1 = Sungai Batang Momongan Hulu
 2 = Sungai Batang Mimpi
 3 = Sungai Batang Siat Abai
 4 = Sungai Betung
 5 = Sungai Koto Balai & S. Batih
 6 = Sungai Pangian Hulu
 7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo
 8 = Sungai Kuranji&Btng Siat

- 9 = Sungai Batang Siat Hilir
 10 = Sungai Batang Timpeh
 11 = Sungai Muaro batang Momongan
 12 = Sungai Muaro Pangian
 13 = Sungai Batanghari (Hulu)
 14 = Sungai Batanghari (Tengah)
 15 = Sungai Batanghari (Hilir)



2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar di daratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batanghari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Ancaman bencana di Sumatera Barat diantaranya gempabumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca esktrim, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39. Namun untuk nilai indeks risiko bencana Kabupaten Dharmasraya berada di bawah angka Sumatera Barat, yaitu sebesar 137,69 yang dikategorikan sedang. Berdasarkan data Inarisk BNPB Kabupaten Dharmasraya nilai indeks risiko bencana periode 2020-2024 termasuk kedalam daerah rawan bencana kategori sedang, dengan nilai Indek Resiko Bencana terus mengalami penurunan dari 143,20 point (2020) menjadi 134,81 point pada tahun 2024. Untuk jelasnya perkembangan IRBI Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-9.

Tabel 2-9 Nilai indeks risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	IRBI Dharmasraya	Kategori
1	2015	143.20	sedang
2	2016	143.20	sedang
3	2017	143.20	sedang
4	2018	143.20	sedang
5	2019	143.20	sedang
6	2020	143.20	sedang
7	2021	137.69	sedang
8	2022	137.69	sedang
9	2023	141.50	sedang
10	2024	134,81	

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.



Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

a. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsor gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Adapun parameter gerakan tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-10.



Tabel 2-10 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh atau tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

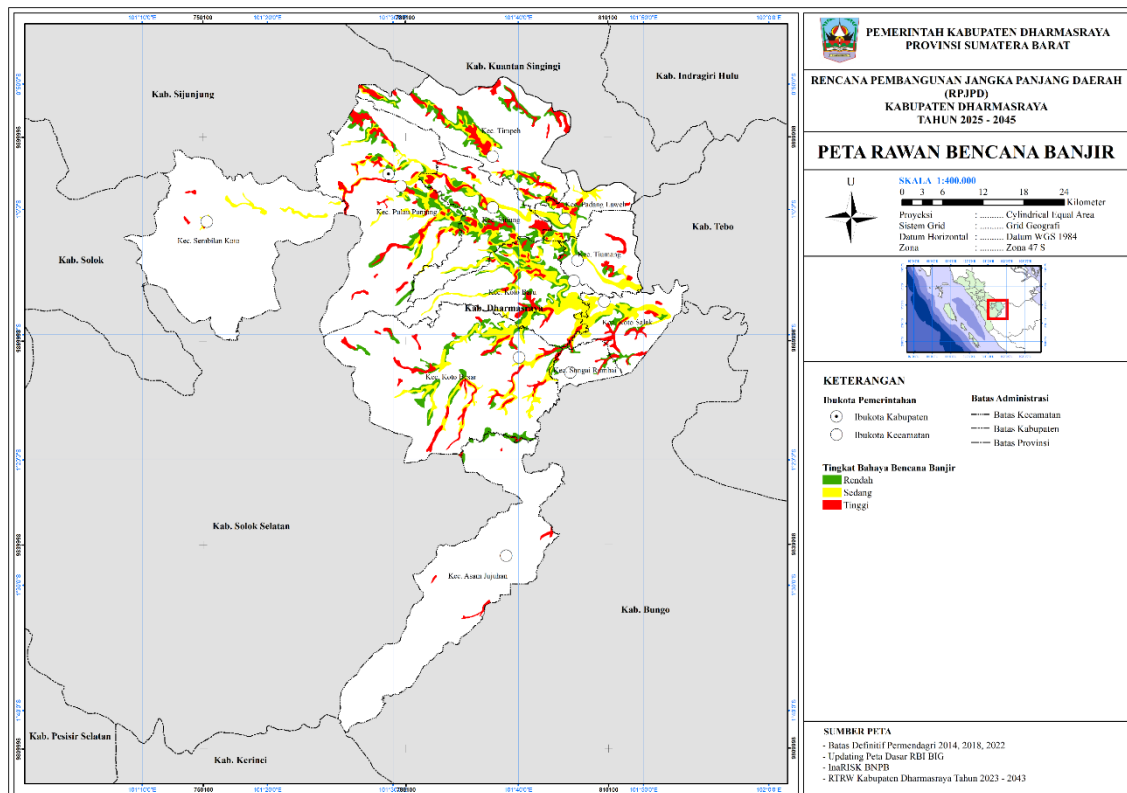
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021

b. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir. Untuk lebih jelasnya daerah rawan banjir di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2-11.



Gambar 2-10 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

c. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelereng, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

d. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.



2.1.4. Kondisi Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

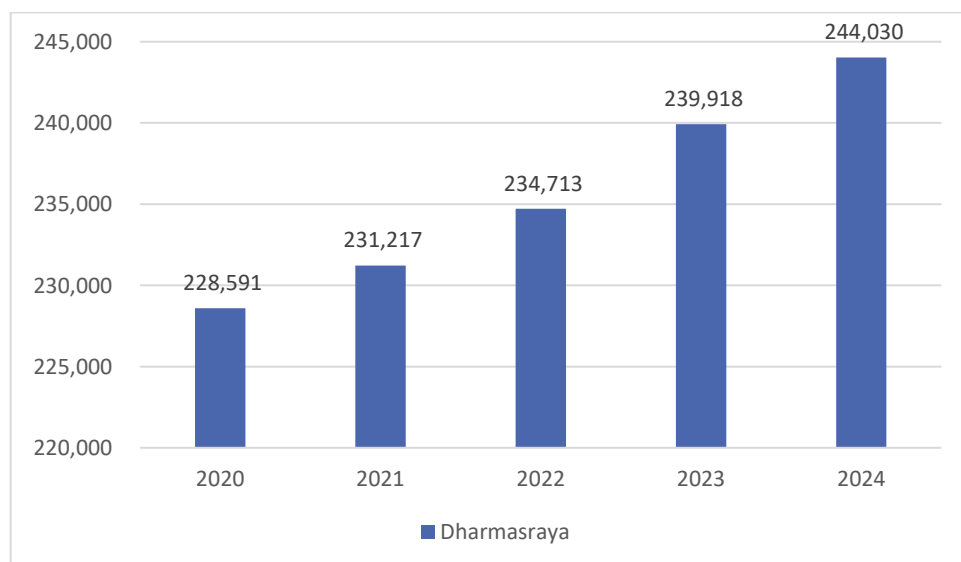
Laju Pertumbuhan penduduk digunakan untuk melihat dinamika kependudukan di suatu wilayah. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat adanya penambahan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 228.591 jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk menjadi 244.030 jiwa. Apabila dibandingkan antara laju pertumbuhan, maka laju pertumbuhan penduduk Dharmasraya masih lebih tinggi dibandingkan nasional dengan provinsi Sumatera Barat. Pertambahan penduduk di Dharmasraya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya penambahan penduduk oleh angka kelahiran maupun disebabkan oleh perpindahan penduduk yang masuk ke Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2-11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,01	1,58	0,70	1,06	1,04
Sumatera Barat	1,29	1,10	1,09	1,45	1,43
Dharmasraya	1,73	1,53	1,52	1,77	1,76

Sumber : BPS, Tahun 2025

**Gambar 2-11 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024**



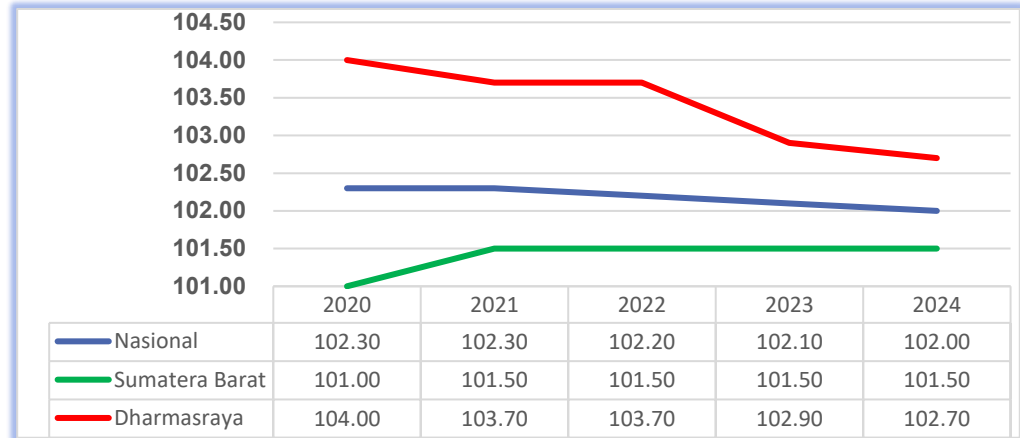
B. Rasio Penduduk

Rasio penduduk merupakan indikator yang memperbandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, apabila jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, maka



rasio akan menunjukkan lebih dari 100, namun apabila jumlah perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, maka rasio penduduk menunjukkan nilai kurang dari 100.

Gambar 2-12 Rasio Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



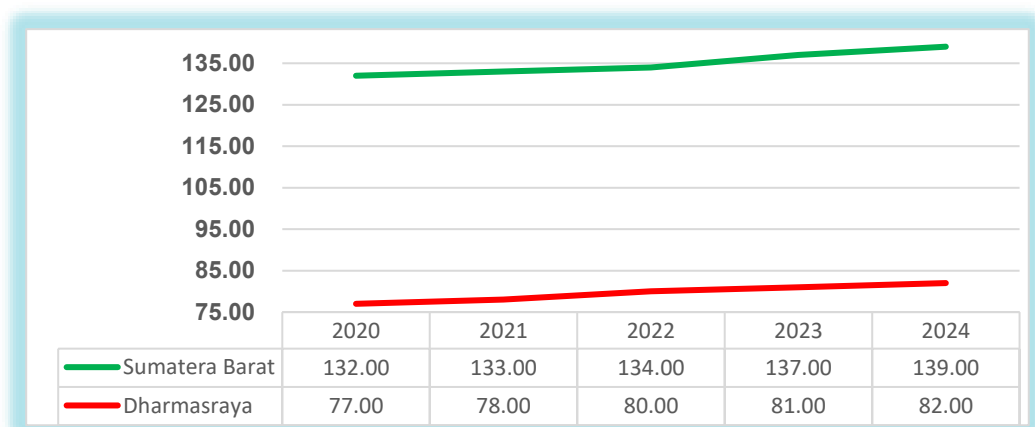
Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, maka pada ketiga wilayah di atas menunjukkan rasio penduduk di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

C. Kepadatan Penduduk

Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kepadatan penduduk selalu menunjukkan peningkatan kepadatan penduduk, dibandingkan dengan provinsi, maka Kepadatan penduduk Dharmasraya masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi sebagian besar pemanfaatan wilayah digunakan untuk lahan perkebunan.

Gambar 2-13 Kepadatan Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



Sumber : BPS, Tahun 2025



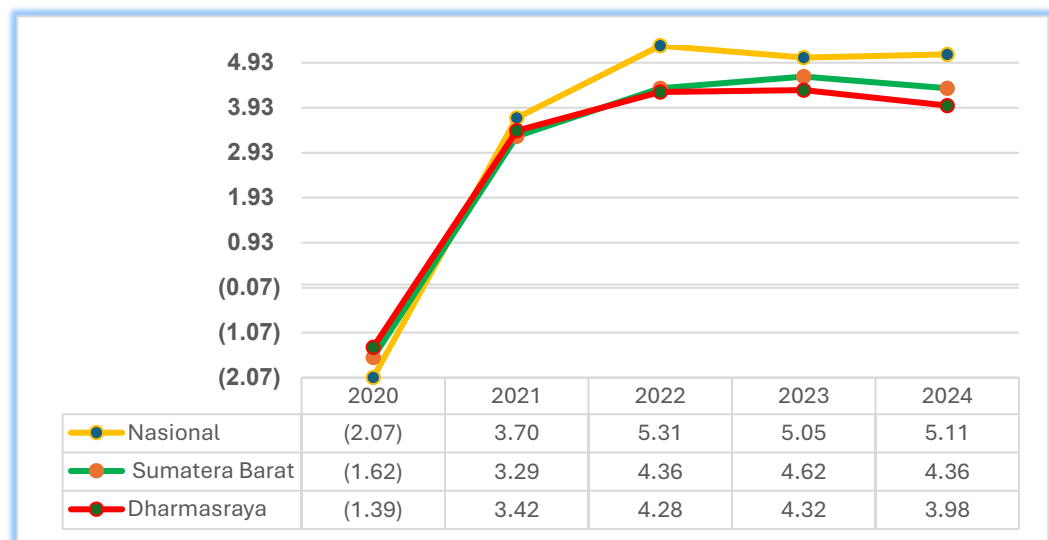
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan Tabel 2.10.

Gambar 2-14 Pertumbuhan Ekonomi (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya berkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19. Selanjutnya dari tahun 2021-2023 atau pasca pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif. Namun di tahun 2021 kembali tumbuh positif. pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.12.



Tabel 2-12 Nilai, Kontribusi, dan Petumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d 2024

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Rp juta)					Kontribusi (persen)					Pertumbuhan (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.139.969	2.254.377	2.299.422	2.367.215	2.418.000	28,71	29,24	28,60	28,22	28,83	(0,76)	5,35	2,00	2,95	2,15
B	Pertambangan dan Penggalian	564.964	464.576	471.523	482.551	463.340	7,58	6,03	5,86	5,75	5,52	0,69	(17,77)	1,50	2,34	(3,98)
C	Industri Pengolahan	406.790	436.466	443.531	451.345	458.110	5,46	5,66	5,52	5,38	5,46	(3,35)	7,30	1,62	1,76	1,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.208	1.245	1.287	1.339	1.400	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(6,52)	3,06	3,36	4,08	4,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	980	960	938	930	930	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	(2,08)	(2,04)	(2,27)	(0,88)	0,05
F	Konstruksi	980.207	1.021.066	1.041.881	1.105.433	1.157.170	13,15	13,24	12,96	13,18	13,80	(5,31)	4,17	2,04	6,10	4,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.054.774	1.103.408	1.167.864	1.229.913	1.298.350	14,15	14,31	14,53	14,66	15,48	(0,34)	4,61	5,84	5,31	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan	437.326	469.079	489.640	516.410	543.420	5,87	6,08	6,09	6,16	6,48	(13,18)	7,26	4,38	5,47	5,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.565	59.069	68.228	72.718	77.150	0,73	0,77	0,85	0,87	0,92	(15,19)	8,26	15,50	6,58	6,09
J	Informasi dan Komunikasi	648.765	695.212	738.919	797.145	841.980	8,70	9,02	9,19	9,50	10,04	7,89	7,16	6,29	7,88	5,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152.700	163.242	172.541	179.267	191.730	2,05	2,12	2,15	2,14	2,29	0,73	6,90	5,70	3,90	6,95
L	Real Estat	159.414	162.797	169.357	179.855	189.460	2,14	2,11	2,11	2,14	2,26	0,04	2,12	4,03	6,20	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	1.402	1.407	1.500	1.597	1.670	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(5,67)	0,33	6,63	6,45	4,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.647	463.697	537.435	546.615	593.230	6,06	6,01	6,68	6,52	7,07	(0,93)	2,67	15,90	1,71	8,53
P	Jasa Pendidikan	207.286	210.988	220.605	225.103	232.040	2,78	2,74	2,74	2,68	2,77	4,11	1,79	4,56	2,04	3,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.664	144.906	151.263	161.543	170.170	1,86	1,88	1,88	1,93	2,03	7,11	4,50	4,39	6,80	5,34
R, S, T, U	Jasa lainnya	54.308	57.204	63.757	68.167	73.010	0,73	0,74	0,79	0,81	0,87	(9,40)	5,33	11,46	6,92	7,10
TOTAL		7.454.968	7.709.700	8.039.690	8.387.147	8.711.160	100,00	100,00	100,00	100,00	103,86	(1,39)	3,42	4,28	4,32	3,86

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025



Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, yaitu sebesar 28,83 persen. Selanjutnya sektor kedua terbesar di tahun 2023 dalam pembentukan nilai PDRB adalah sektor perdagangan sebesar 15,48 dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,18 persen.

Dilihat dari tren perkembangan PDRB Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terlihat adanya perubahan kontribusi sektor yang cukup signifikan dalam membentuk nilai PDRB. Salah satu sektor dengan kontribusi turun yaitu sektor pertambangan, kontribusinya dari 7,58 persen di tahun 2020 turun menjadi 5,52 persen di tahun 2024.

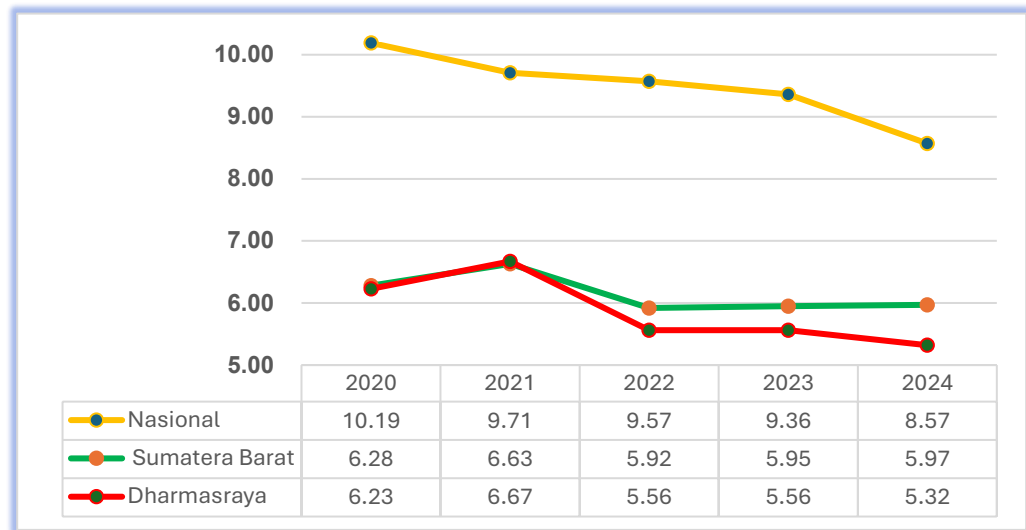
Sektor yang cukup meningkat kontribusinya diantaranya ada pada sektor konstruksi, dan sektor perdagangan sebagai sektor utama pembentuk nilai PDRB, masing-masing meningkat dari 14,05 persen menjadi 15,48 persen di tahun 2024, dan untuk sektor konstruksi juga memperlihatkan percepatan perkembangan dari 13,15 persen menjadi 13,80 di tahun 2024, sedangkan untuk sektor perdagangan juga meningkat dari 14,15 persen menjadi 15,48 persen. Adapun sektor yang cukup meningkat pesat yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dimana di tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 8,70 persen, naik menjadi 10,04 persen di tahun 2024. Sedangkan sektor lainnya cenderung tidak memperlihatkan perubahan kontribusi yang cukup signifikan.

B. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapat perkapita di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.15

Gambar 2- 16 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024(persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

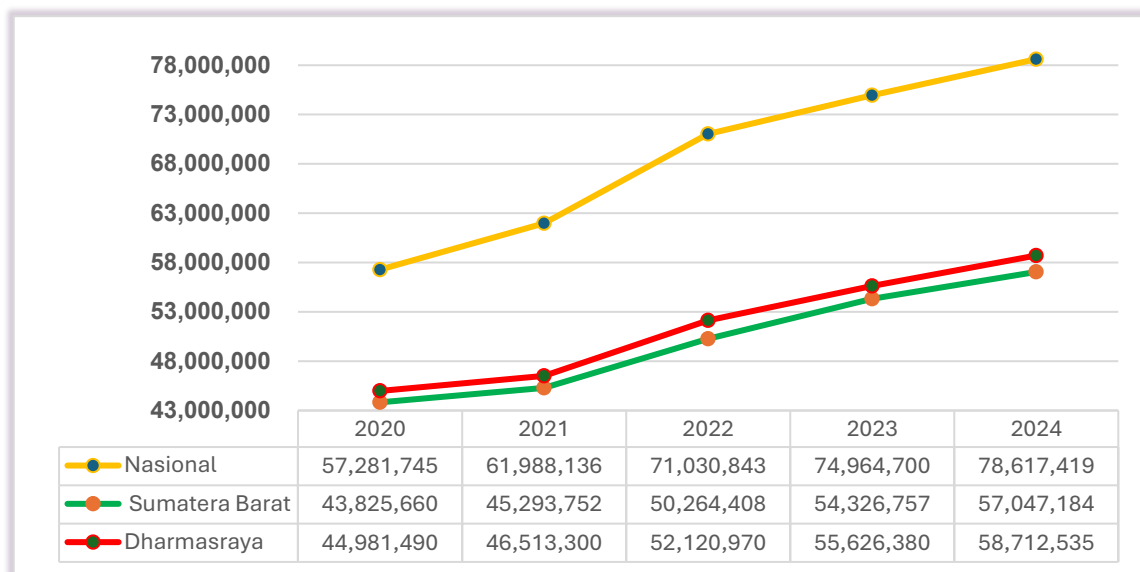
Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini, dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020-2024 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

C. PDRB perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Untuk lebih jelasnya PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2- 17 PDRB Perkapita (rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

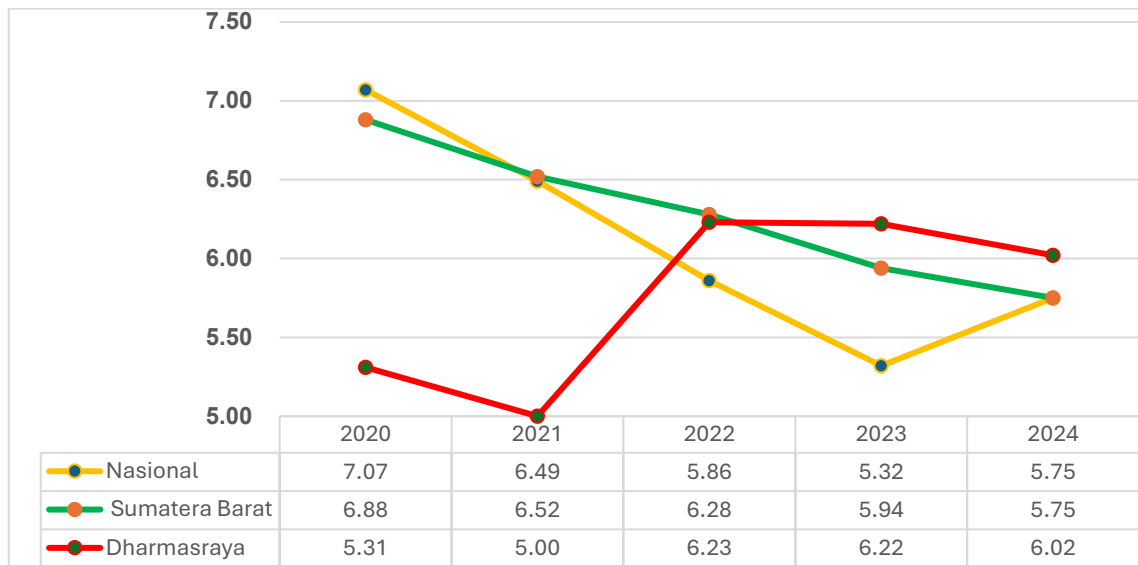
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari PDRN perkapita memperlihatkan perembangan yang cukup baik, PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya terlihat sudah berada di atas PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Namun masih berada di bawah PDRB perkapita nasional.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2- 18 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



Tingkat pengangguran terbuka di Dharmasraya dari tahun 2021 ke tahun 2022 terlihat meningkat.

E. Rasio Gini

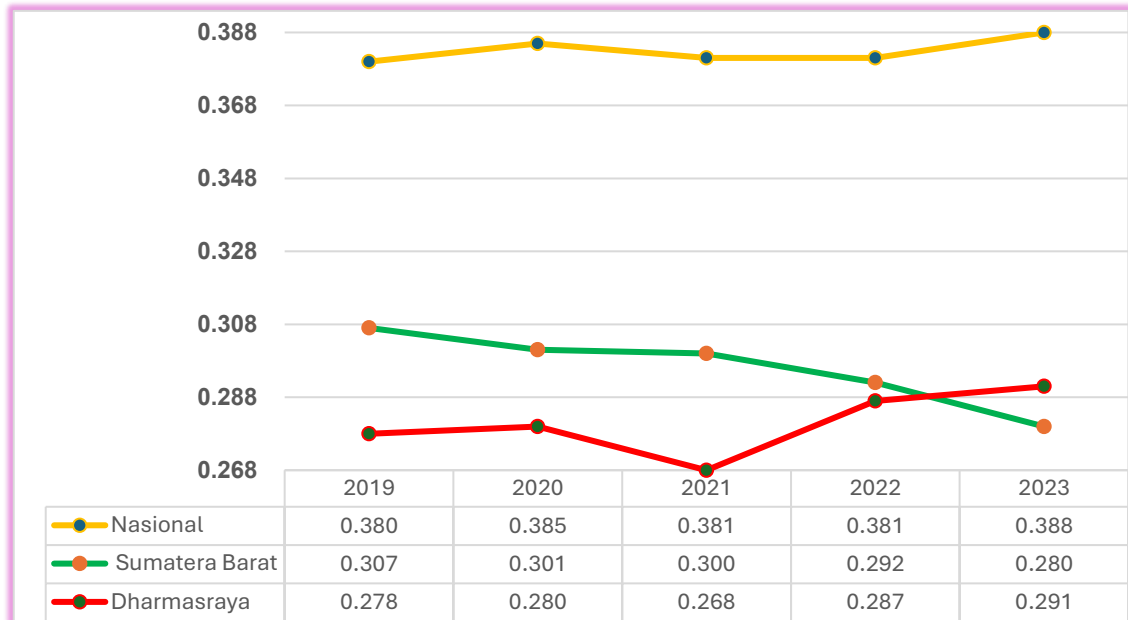
Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Untuk lebih jelasnya rasio gini Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.12

Gambar 2- 19 Rasio Gini Tahun 2019-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- Pengetahuan (knowledge)
- Standar hidup layak (decent standard of living)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

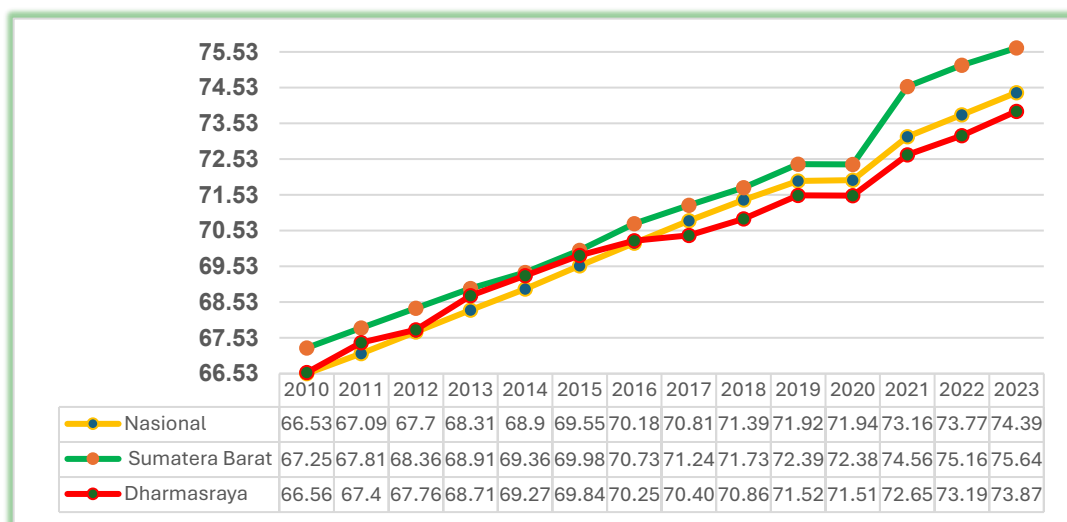


Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2- 20 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan ketiga wilayah tersebut dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tergolong pada kategori sedang. Dan mulai tahun 2016 hingga tahun 2023 secara bersamaan juga beralih menjadi kategori tinggi. Namun demikian IPM Dharnasraya hingga tahun 2015 masih berada di atas Provinsi, namun di tahun 2016 sudah berada di bawah Provinsi Sumatera Barat.



G. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kabupaten tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.

Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

- Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
- Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
- Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat terdapat penambahan kabupaten/kota sampel IHK, dimana sebelumnya hanya dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan saat ini terdapat penambahan di Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kabupaten/kota sampel IHK saat ini sudah berjumlah 4 daerah. Penambahan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pasca penyesuaian diagram timbang tahun dasar perhitungan inflasi menggunakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan hal tersebut, tracking inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan akan memperhitungkan kondisi dan risiko yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten tambahan tersebut. Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota sampel inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2-13 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)

Indikator	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasamana Barat
% mtm	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% ytd	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% yoy	2,57	2,43	1,38	2,28	3,73

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, Tahun 2024



Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,34 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,57 persen. Sementara itu dua indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen;

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Dharmasraya bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,25 persen.

H. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk/output. Semakin tinggi produktivitas maka semakin bagus rata-rata kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan cara membagi nilai PDRB ADHB pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2-14 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2022-2023 (Rupiah/Orang)

Indikator	Satuan	2022	2023
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/orang	91,19	108,04
<i>PDRB ADHB</i>	<i>juta rupiah</i>	12.233.469,95	13.345.769,26
<i>Jumlah Tenaga Kerja</i>	<i>orang</i>	134.147	123.524

Sumber : BPS Sumatera Barat, tahun 2024

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Dharmasraya terlihat adanya peningkatan dari 91,19 juta/orang naik menjadi 108,04 juta/orang. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan nilai PDRN yang cukup signifikan, namun disisi lain data menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja dari 134.147 orang menjadi 123.524 orang.

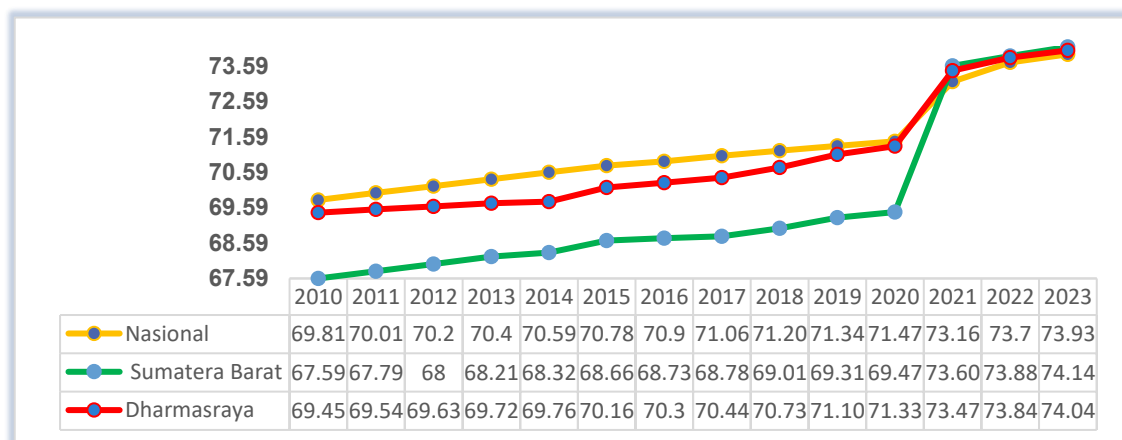
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH merupakan Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Idealnya UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun Usia Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2- 21 Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023 (Tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

UHH Kabupaten Dharmasraya meningkat seiring dengan perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat. Disini dapat dilihat UHH Dharmasraya dari tahun 2010 hingga 2020 lebih baik dibandingkan dengan Provinsi atau rata-rata selisih lebih tinggi sekitar 2 tahun. Namun setelah adanya perhitungan Usia Harapan Hidup Long Form Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020) terdapat penyesuaian perhitungan, sehingga UHH Dharmasraya sedikit di bawah Provinsi Sumbar namun tetap berada di atas nasional.

Hal ini menandakan status kesehatan masyarakat Dharmasraya sudah lebih baik dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.



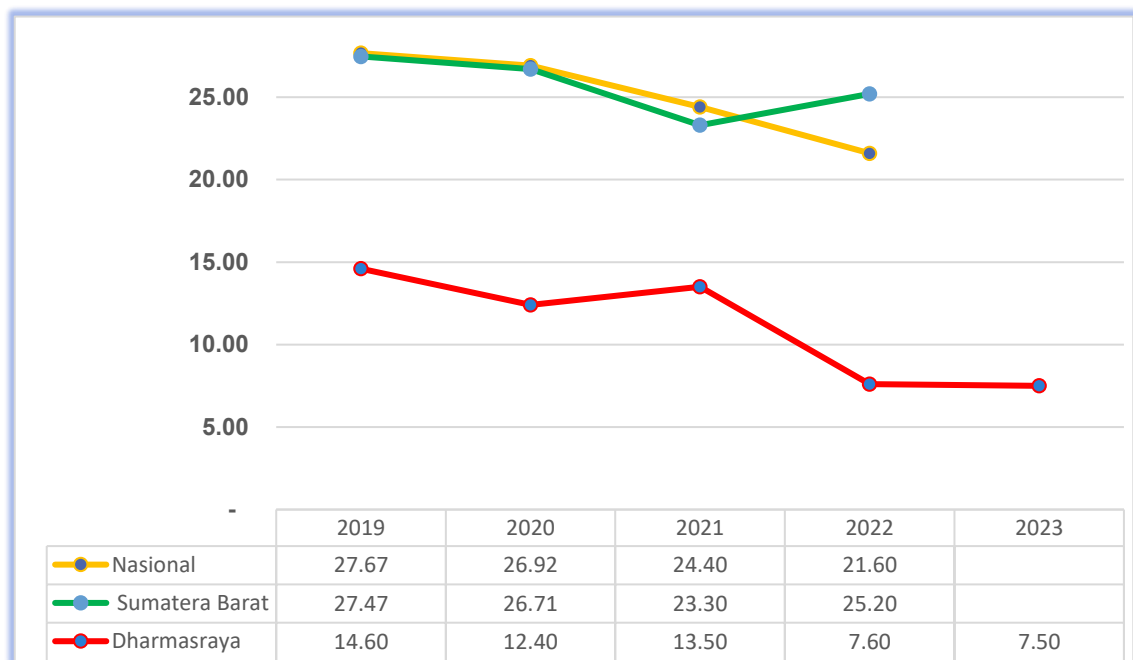
B. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010, maka stunting dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- Sangat pendek: Zscore < -3,0
- Pendek: Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Untuk lebih jelasnya Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

Gambar 2- 22. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya cukup terlihat baik, terutama jika dibandingkan capaian nasional dan provinsi, dimana jika angka ini semakin rendah, maka akan semakin baik. Dengan relatif rendahnya prevalensi stunting Dharmasraya tersebut. Adapun inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penurunan sekaligus pencegahan stunting ini adalah melalui pelaksanaan bapak/ibu angkat terhadap kasus stunting. Balita stunting secara umum tidak hanya



dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun makanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu program bapak/ibu angkat stunting lebih diprioritaskan bagi keluarga miskin. Sedangkan untuk upaya lain yang dilakukan adalah melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan oleh instansi terkait.

C. Keragaman Budaya

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten pertama yang menerima Transmigran yang terbesar di Sumatera Barat yang berasal dari Pulau Jawa. Beberapa satuan permukiman seperti Sitiung, Silago, dan Sungai Rumbai, sudah terbentuk sejak tahun 1975 sehingga hampir 50 tahun telah terjadi pembauran budaya antara suku Jawa, Sunda dan Minang. Dalam perjalanan waktu dengan semakin meningkatnya ekonomi Dharmasraya pada saat boom hasil perkebunan maka terjadi migrasi dari suku lainnya seperti Batak, dan Nias. Sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi indikator keberagaman budaya di Provinsi Sumatera Barat. Keragaman budaya ini diharapkan menghasilkan akulturasi budaya positif untuk pembangunan wilayah.

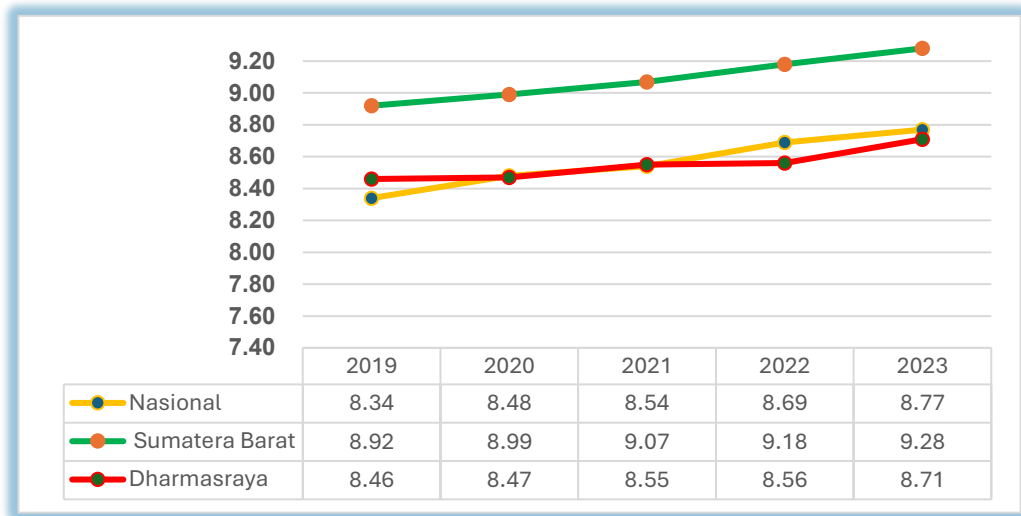
Banyak iven-iven kebudayaan yang telah diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya yang intinya ingin menunjukkan keragaman budaya lokal dan keharmonisan antar budaya seperti pelaksanaan iven Pamalayu, festival lintas budaya (multi etnis), dan budaya yang berkaitan dengan keagamaan. Dimasa yang akan datang jumlah kegiatan atau iven kebudayaan yang melibatkan berbagai suku dan etnis dapat menjadi tolak ukur keragaman budaya di Kabupaten Dharmasraya

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Gambar 2- 1 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



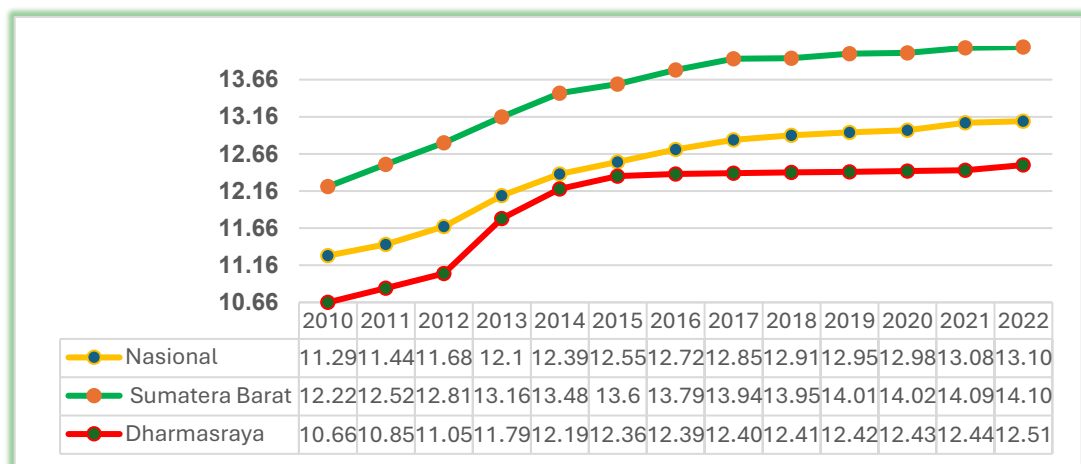
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2- 24 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

HLS Dharmasraya masih berada capaian nasional dan Provinsi Sumatera Barat, yaitu berada di 12,51 tahun. Ini dapat diartikan bahwa HLS Dharmasraya tahun 2023 rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah



selama 12,51 tahun, atau sudah menamatkan pendidikan SMA/MA/SMK namun belum menamatkan pendidikan D1. Sedangkan di tingkat nasional sudah menamatkan pendidikan setara D1, dan untuk Provinsi Sumatera Barat sudah setara menamatkan D2 atau kuliah di tahun kedua universitas.

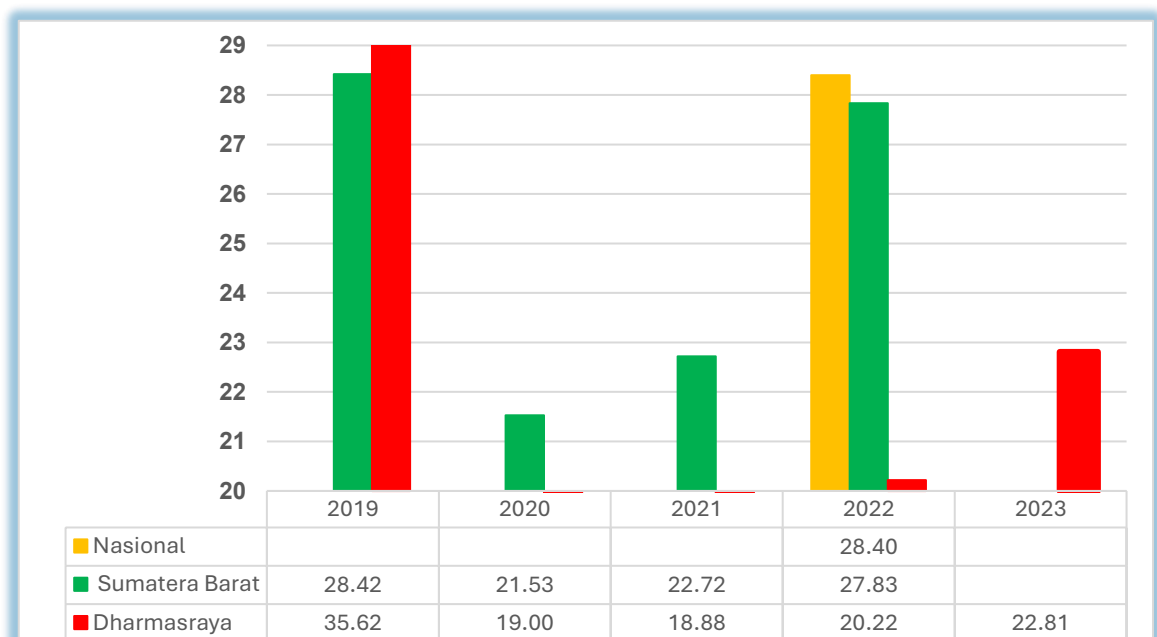
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Untuk lebih jelasnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.35.

Gambar 2- 225 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024



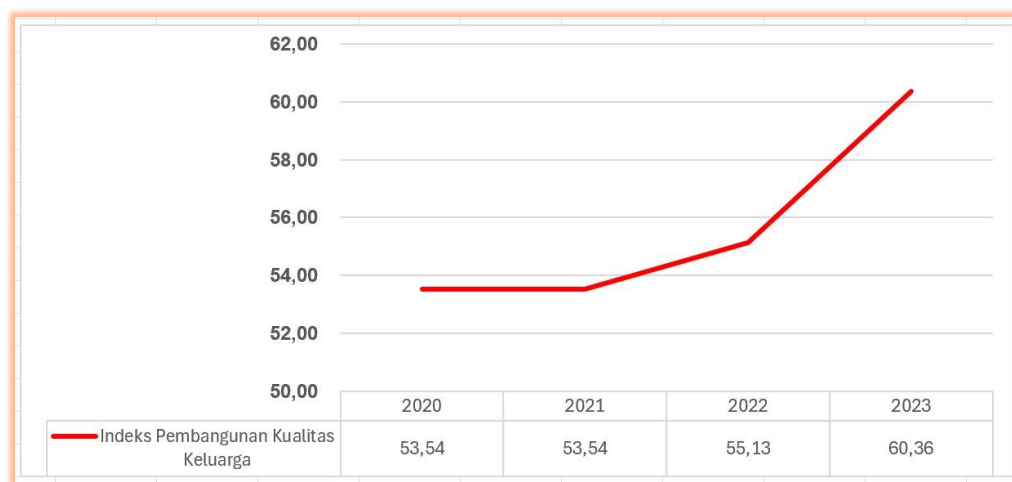
Dilihat dari capaian data di atas, maka terlihat bahwa cakupan BPJS ketenagakerjaan tahun 2022 baik di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Dharmasraya masih relatif rendah. Masih rendahnya komitmen sektor pekerja formal, sektor pekerja informal maupun sektor pekerja konstruksi untuk keikutsertaan pada BPJS ketenagakerjaan menggambarkan masih belum besarnya komitmen perusahaan akan kesehatan dan resiko kerja yang ada di dunia kerja pada umumnya. Jika dilihat berdasarkan tahun 2019 capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya sebesar 35,62, namun tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 19% dan tahun 2021 capaiannya sebesar 18%. Namun pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 22,81%.

2.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya gambaran terkait indeks pembangunan kualitas keluarga dapat dilihat pada Gambar 2.26.

Gambar 2- 3 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga



Sumber : Dinas SOSP3APPKB Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Dharmasraya meningkat dari tahun ke tahun dan mulai mengalami percepatan sejak tahun 2021. Indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas keluarga di



Kabupaten Dharmasraya baik dari segi kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Agar pembangunan di Kabupaten Dharmasraya maju yang berbudaya dan berkelanjutan maka kualitas keluarga menjadi pondasi utama pembangunan. Akselerasi ini terus diharapkan terjadi sampai tahun 2045 sehingga tercipta kualitas keluarga yang tinggi.

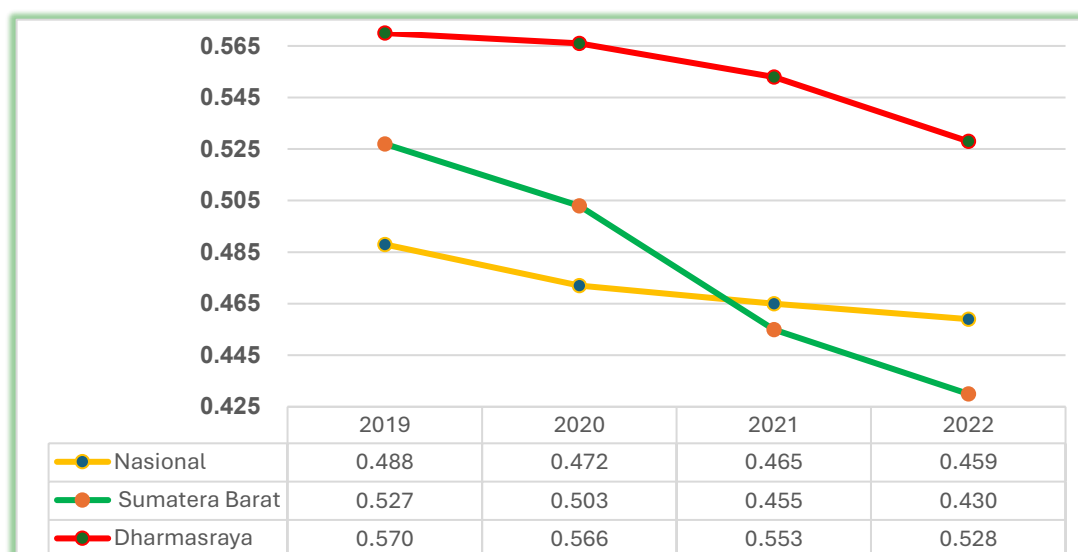
B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu

- e. Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari
 - indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)
 - proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20),
- f. Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari
 - indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas
 - persentase anggota legislatif
- g. Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili
Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada Gambar 2.27.

Gambar 2- 27 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024



Perkembangan IKG nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Dharmasraya menunjukkan penurunan nilai secara konsisten. Hal ini menunjukkan perkembangan yang membaik dengan menurunnya ketimpangan gender.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Ekspor Barang dan Jasa

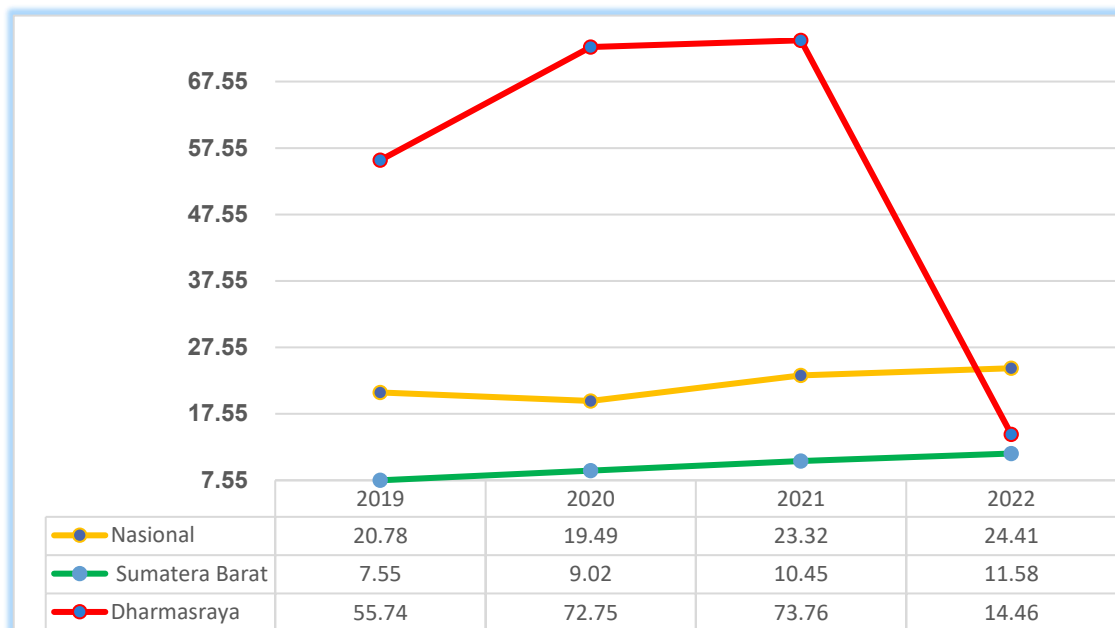
Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.²

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB kabupaten.

Dilihat dari sisi iterpretasinya, maka ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Ekspor barang dan jasa Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.28.

Gambar 2- 4. Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Peran nilai ekspor barang dan jasa di Dharmasraya cukup besar dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, bahkan tertinggi bisa mencapai 73,76 persen di tahun 2021, namun di tahun 2022 turun mencapai 14,46 persen. Hal ini dipicu oleh turunnya volume ekspor barang dan jasa di Tahun 2022.

B. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Dimana dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.

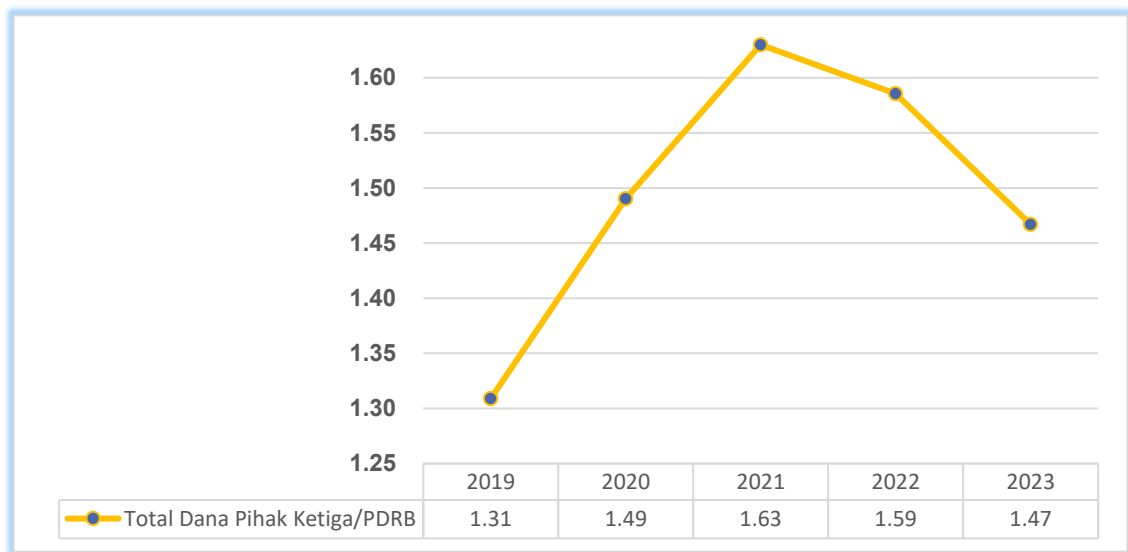
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Adapun Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.15. dan Gambar 2.18.

Tabel 2-15 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2022-2023 (persen)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (persen)	1,31	1,49	1,63	1,59	1,47
Total dana pihak ketiga (juta rupiah)	135.473,11	152.691,36	175.331,79	193.974,85	195.797,80
Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	10.349.563,17	10.245.774,26	10.756.664,94	12.233.469,95	13.345.769,26

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2- 29 Ekspor Barang Dan Jasa Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Dharmasraya cukup fluktuatif, berkisar antara 1,3 sampai 1,63 persen. Hal ini menggambarkan masih kecilnya DPK yang dikelola oleh perbankan di Dharmasraya dibandingkan nilai PDRB yang ada di tahun tersebut.

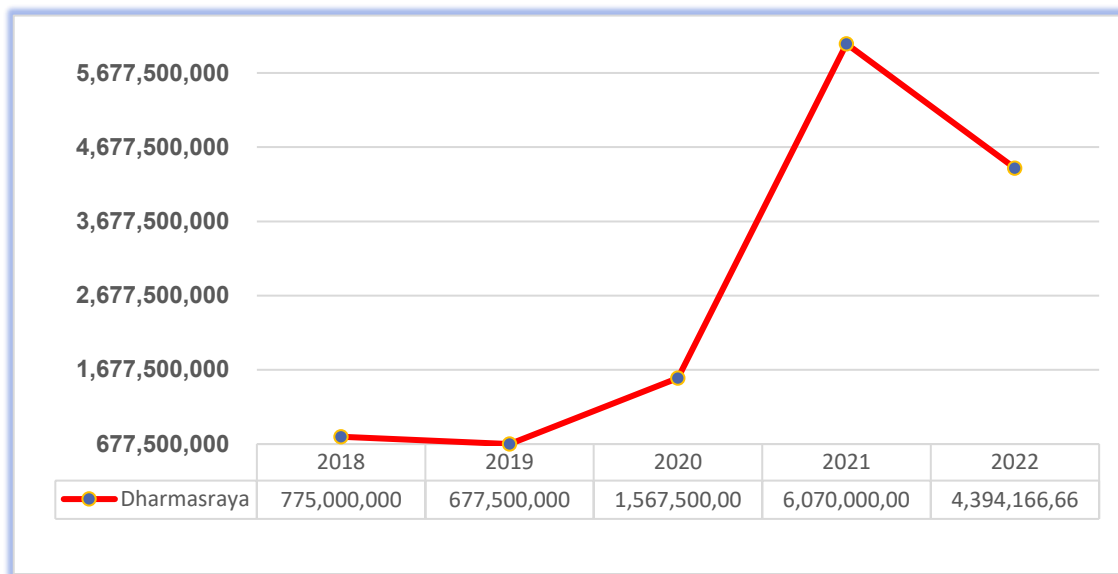
C. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya . Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata dapat dilihat pada gambar 2.30 dan tabel 2.16.



Gambar 2- 30 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah)



Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Tabel 2-16 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat	Juta rupiah	1.312.685	864.482,5	727.069,167	1.570.570	1.358.113,33
Dharmasraya	Juta rupiah	775	677,5	1.567,5	6.070	4.394,17
kontribusi	Persen	0,06	0,08	0,22	0,39	0,32

Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Perkembangan nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan. Namun apabila dibandingkan dengan nilai transaksi di Provinsi Sumatera Barat, maka kontribusi nilai saham Kabupaten Dharmasraya masih sangat kecil yaitu sekitar 0,32 persen.

D. Total Kredit/PDRB

Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

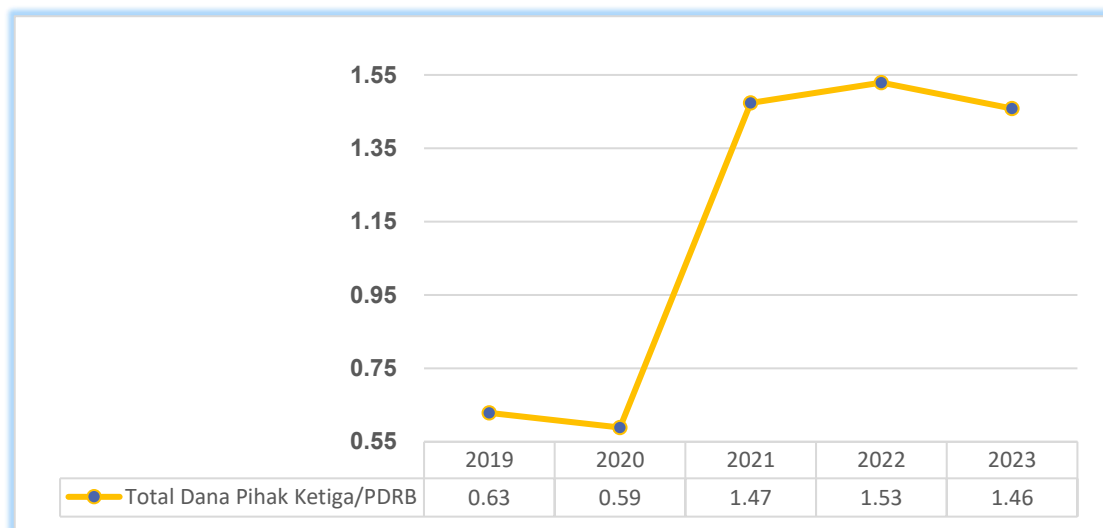
Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kab/kota.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Total Kredit /PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. Untuk lebih jelasnya Total Kredit /PDRB dapat dilihat pada Gambar 2.31.

Gambar 2- 31. Total Kredit /PDRB Tahun 2019-2022 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

Tidak jauh berbeda dengan dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan, total kredit yang dikelola oleh perbankan juga tergolong relatif kecil dibandingkan dengan PDRB yang ada di tahun tersebut

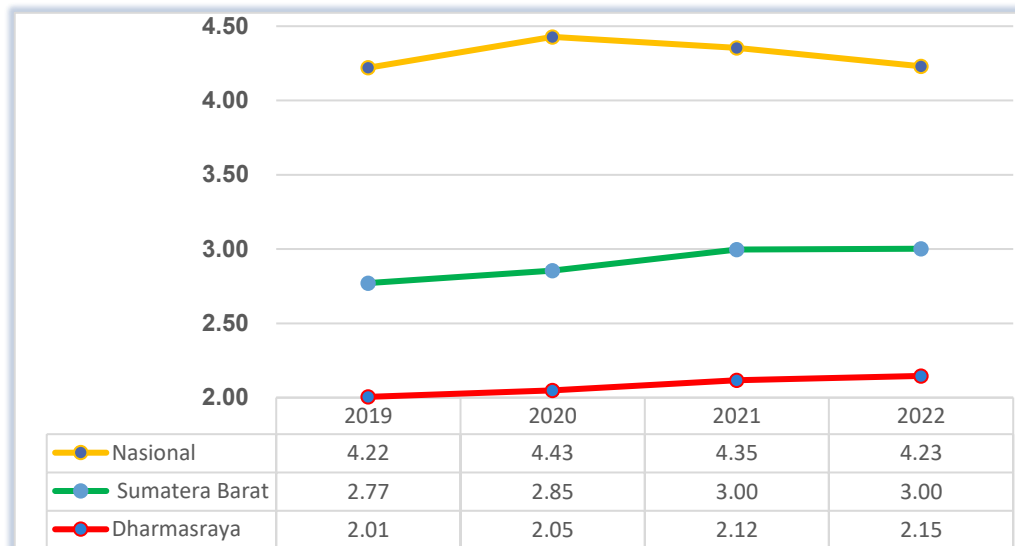
E. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan rasio sektor keuangan dan asuransi di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menggambarkan kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi di kab/kota dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai yang dihasilkan oleh sektor sektor jasa keuangan dan asuransi , semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional

Bruto per daerah. Untuk lebih jelasnya Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.32.

Gambar 2- 32 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi di Dharmasraya apabila dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat relatif rendah. Namun dilihat dari kecenderungan perkembangannya, dapat dilihat perkembangannya masih cukup berpeluang dapat mengalami peningkatan yang positif.

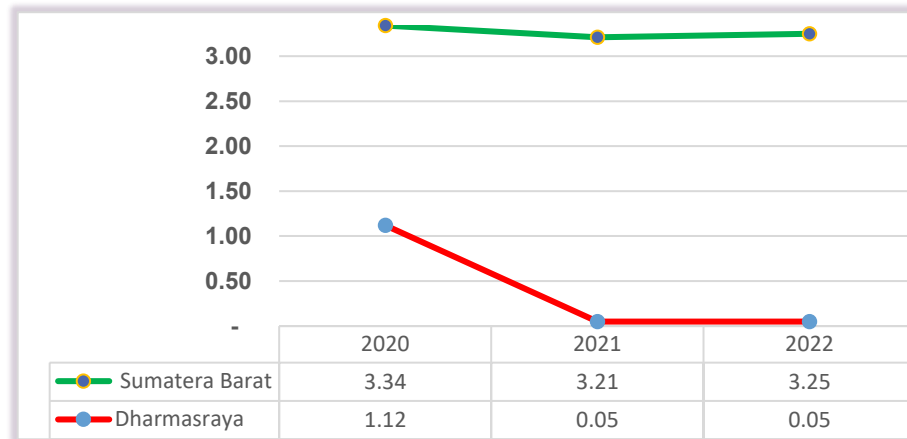
F. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan

tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Untuk lebih jelasnya Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.33.

Gambar 2- 33. Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

2.3.2. Daya Saing SDM

A. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA) adalah ukuran yang menggambarkan capaian kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:

1. Anak penyandang disabilitas
2. Anak dengan HIV/AIDS
3. Anak kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak korban jaringan terorisme
5. Anak dalam situasi darurat
6. Anak korban penelantaran

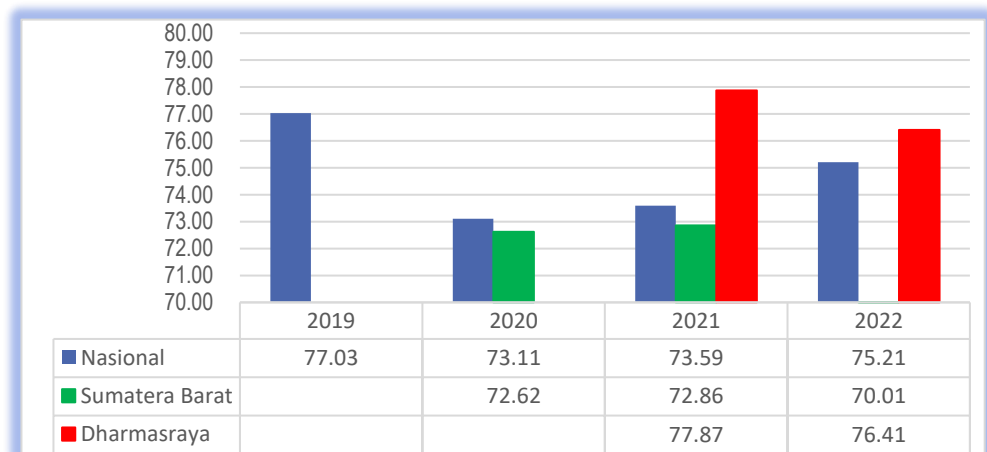
Perlindungan Khusus Anak merupakan program yang didorong oleh Kemenko PMK untuk memberikan jaminan rasa aman kepada anak. Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang



sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan

Adapun indeks perlindungan khusus anak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.34.

Gambar 2- 34. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa indeks perlindungan khusus anak (IPKA) tahun 2021-2022 diatas capaian IPKA Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Meskipun demikian kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak masih sering terjadi, baik kasus yang diungkap maupun kasus yang tidak sepenuhnya tertangani secara optimal. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah melalui pendirian unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada pada perangkat daerah yang menangani bidang urusan Sosial serta upaya dalam pencapaian kabupaten layak anak.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

A. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan

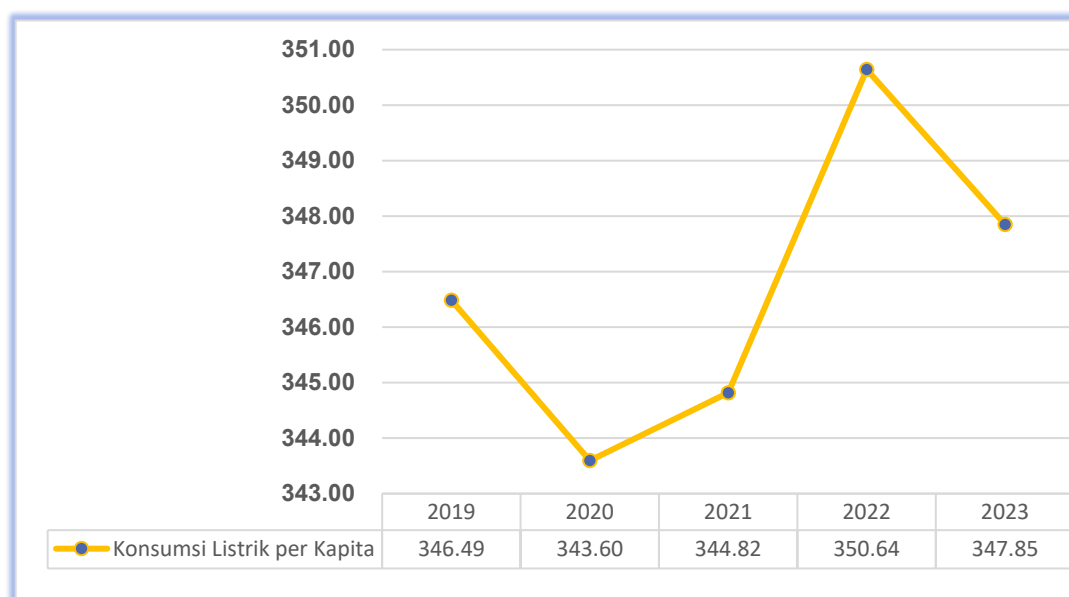
nasional. Untuk lebih jelasnya Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.35.

Tabel 2-17 Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2019-2023 (kWh/orang)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	346,49	343,60	344,82	350,64	347,85
Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN	kWh	74.248.968	74.285.984	78.020.247	80.227.242	82.692.050
Jumlah Penduduk	orang	214.292	216.202	226.265	228.801	237.724

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024

Gambar 2- 35. Konsumsi Listrik per Kapita Thun 2019-2023 (kWh/orang)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024 (data diolah)

Jumlah produksi listrik Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023 jumlah produksi listrik Kabupaten Dharmasraya mencapai 82.692.050 KWh dengan konsumsi listrik per-orang tertinggi tercatat di tahun 2022 sebesar 350,64 kWh/orang.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara,

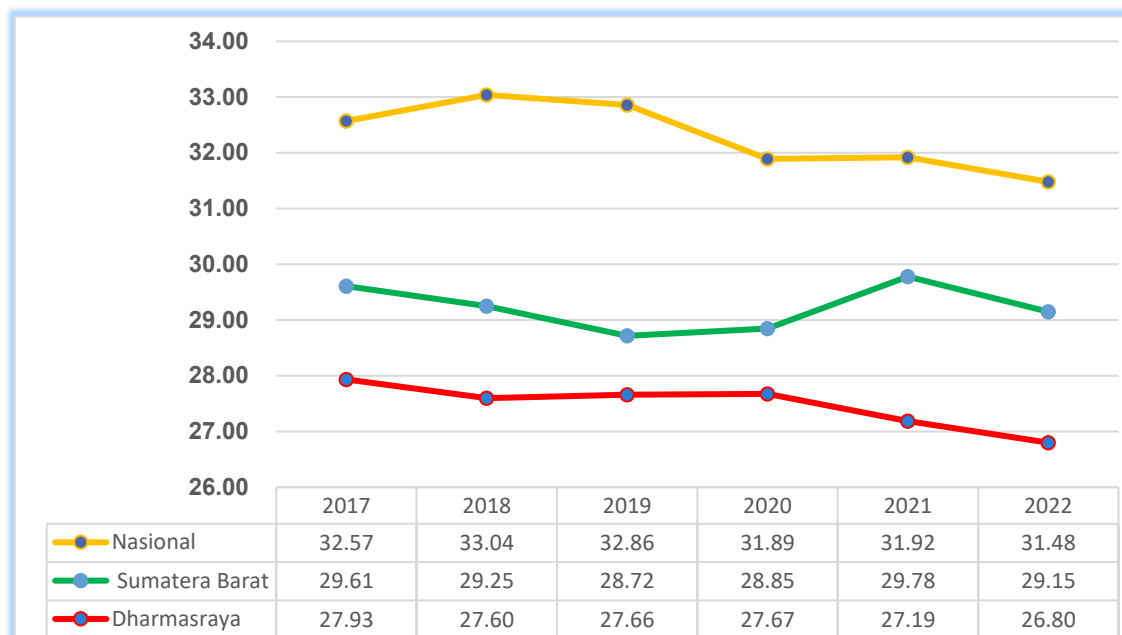


serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB kabupaten

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Untuk lebih jelasnya Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.36.

Gambar 2- 36. Pembentukan Modal Tetap Brutto Tahun 2019-2023 (kWh/orang)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Rasio PMTB terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya di Dharmasraya, hal serupa juga terjadi di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat.



2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi kasar merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Kegunaan indikator APK untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK yang menjadi kewenangan kab/kota terdiri dari APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs. Untuk lebih jelasnya capaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2-18 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	68,62	67,99	69,39	72,84	72,44
Jumlah murid PAUD	Orang	7.614	7.595	7.806	9.163	11.915
Jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun	orang	11.096	11.170	11.250	12.579	16.448

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Perkembangan APK PAUD Tahun 2020 hingga 2024 terlihat adanya peningkatan, adanya penambahan jumlah penduduk usia PAUD dapat diimbangi oleh jumlah jumlah murid PAUD. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana PAUD yang ada, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh pemerintahan nagari dan masyakat.

Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19. Secara garis besar dapat dilihat bahwa perkembangan APK PAUD terus mengalami peningkatan yang menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat/orang tua akan pentingnya peran PAUD sebagai jenjang pra sekolah untuk mempersiapkan generasi menuju dunia pendidikan dasar.



- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2-19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	persen	106,62	99,33	99,58	99,43	89,28
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat	Orang	27.586	26.691	26.204	26.840	23.946
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	25.874	26.871	26.896	26.995	26.822

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Untuk nilai APK SD pada tahun 2020 berada di atas 100, meskipun pada tahun 2021-2023 terlihat menurun, namun kondisinya masih cukup ideal karena masih mendekati angka 100. Tetapi pada tahun 2024 nilai APK SD mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 89,28%.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Persen	103,30	96,75	96,75	80,44	85,78
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.220	12.567	8.715	11.057	11.738
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	10.862	13.024	13.677	13.746	13.684

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Untuk APK SMP/MTs, cukup fluktuatif, Tahun 2020 menunjukkan angka di atas 100, namun di tahun 2021-2023 menunjukkan angka di bawah 100. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian APK tahun 2021 dan tahun 2022 masih mendekati 100, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 80,44 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 85,78 . Secara umum kebijakan bidang kependidikan untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sudah semakin membaik. Meskipun terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun dapat diikuti oleh daya tampung sekolah yang ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi
Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan

yang seharusnya sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun APM yang dihitung sesuai dengan kewenangan kab/kota adalah APM SD/MI, dan APM SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2-21 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	persen	99,31	98,40	98,92	99,48	94,23
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat	orang	25.696	26.441	26.204	26.854	25.275
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	25.874	28.614	26.896	26.995	26.822

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2025

Dengan adanya APM SD/MI yang sudah berada di angka cukup mendekati 100, artinya kondisi ini sudah cukup ideal, adanya sedikit kekurangan APM ini dari titik ideal diasumsikan minimnya angka putus sekolah di tingkat SD/MI. hal ini juga ditunjukkannya tidak jauh berbedanya angka APM SD/MI dibandingkan dengan APK SD/MI yang memperlihatkan semakin tingginya ketepatan usia anak sekolah sesuai umur dan tingkatannya.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts**

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2-22 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	persen	93,13	93,75	95,35	81,06	84,92
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat	orang	10.116	12.210	8.715	11.141	11.621
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	orang	10.862	13.024	13.677	13.746	13.684

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2025

Dibandingkan dengan APM SD/MI, maka capaian APM SMP/MTs sedikit lebih rendah. Selain disebabkan oleh faktor ketepatan usia sekolah yang masih belum optimal yang juga terlihat pada APK SMP/MTs yang belum mencapai angka 100, salah satu penyebabnya adalah adanya lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP/MTs di luar Kabupaten Dharmasraya.

- Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2-23 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	71,15	45,43	97,3	93,02	91,09
Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	Orang	8.942	12.210	8.715	37.897	36.896
Jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	12.567	26.871	13.677	40.741	40.506

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dari tahun 2020 s.d. 2022 terlihat berfluktuasi. Dimana Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama maupun data kependudukan juga berfluktuasi tajam di tahun 2021, namun tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dan makin membaik.

- Jumlah anak 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Pendidikan PAUD merupakan pendidikan pra sekolah dilaksanakan dalam rangka pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dan dilaksanakan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Penanaman kejujuran, disiplin, cinta sesama, cinta tanah air dan semua nilai yang positif lain termasuk pengetahuan mendasar mengenai gizi perlu pembiasaan dan harus dilakukan secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.24.



Tabel 2-24 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	77,67	88,04	91,70	81,30	66,76
Jumlah anak usia 5 s.d 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	8.614	7.588	7.806	7.084	5.684
Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	11.090	8.619	8.512	8.713	8.514

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Jumlah anak 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menandakan pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mempersiapkan anak peserta didik masuk ke dunia Pendidikan.

- Persentase guru dan tenaga kependidikan professional
Capaian persentase guru dan tenaga kependidikan professional di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2-25 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	persen	60,54	53,45	35,55	56,77	76,29
Jumlah guru dan tenaga kependidikan professional	Orang	1.623	1.813	1.152	2.119	1783
Jumlah guru dan tenaga kependidikan seluruhnya	Orang	2.681	3.392	3.220	1.203	2.337

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa adanya tren penurunan persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional memiliki tren kenaikan setiap tahun. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah guru yang tersedia juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional, sehingga secara persentase cakupan guru dan tenaga kependidikan profesional terlihat menurun.



2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

• Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2-26 Angka kematian bayi (AKB)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	8,98	7,72	11,7	9,0	13
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	orang	52	50	41	32	42
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	orang	5.527	5.565	3.482	3.562	3.207

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 angka kematian bayi mengalami peningkatan yaitu 11,7 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2023 AKB mengalami penurunan menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu 13 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan karena pada umumnya ibu sudah menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan sampai bayi lahir dengan mengikuti setiap tahapan imunisasi. Dan juga disertai dengan kehadiran tenaga kesehatan maupun bidan yang terlatih di setiap daerah.

• Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau



pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya.

AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah. Pada Tabel 2.27 dapat dilihat perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024.

Tabel 2-27 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	77,02	257,59	201	84	187
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	3	14	7	3	6
Jumlah kelahiran hidup	orang	3.895	3658	3.482	3.562	3.207

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya rentang waktu tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 77,02 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus). Namun pada tahun 2021 kasus AKI meningkat menjadi 257,59 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19, namun di tahun 2022 sudah terjadi penurunan menjadi 201 per 100.000 kelahiran hidup, dimana kasus kematian ibu melahirkan dari 14 kasus tahun 2021 dan 7 kasus pada tahun 2022 menjadi 3 kasus Pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 6 kasus.



- **Prevalensi Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)¹. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 berfluktuatif. Untuk lebih jelasnya perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 2-28 *Prevalensi Stunting*

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	indeks	12,4	13,5	7,6	7,6	6,5
Jumlah balita Stunting	balita	-	1.558	1.329	1.329	1.122
Jumlah Balita yang diukur berat badan dan tinggi badan	balita	-	-	14.522	15.722	17.070

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dalam penanggulangan kasus balita stunting, upaya yang dilakukan bukan hanya pada faktor kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu disejalankan dengan dengan peningkatan layanan air bersih, higiene dan sanitasi lingkungan.

Sebagian kasus yang terjadi memperlihatkan kasus stunting terjadi karena faktor rumah dan sanitasi lingkungan yang kurang baik menyebabkan kasus stunting pada balita. Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu dengan program orang tua asuh dan selanjutnya memberikan bantuan makan sesuai dengan kebutuhan balita stunting agar dapat tumbuh kembang dengan lebih baik dan nantinya Puskesmas diminta untuk memantau perkembangan perkembangan balita stunting tersebut.

- **Prevalensi Malnutrisi**

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Perkembangan kasus balita malturisi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 sebanyak 2.713 kasus dengan indeks 6,56 menurun pada tahun 2024 menjadi 1.872 kasus dengan indeks 5,5. Untuk lebih jelasnya prevalensi malturisi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.29.



Tabel 2-29 Prevalensi Malnutrisi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Malnutrisi	indeks	6,56	6,25	6,65	5,7	5,5
Jumlah Balita Malnutrisi	Kasus	2.713	2.113	2.159	1.958	1.872
Jumlah Balita yang diukur berat badan dan tinggi badan	kasus	15.523	16.888	14.522	15.722	17.070

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Kasus malnutrisi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi merupakan faktor langsung. Ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang kurang memadai menjadi faktor tidak langsung. Wasting memiliki dampak yang besar sehingga masih dikatakan sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat.

Anak balita yang wasting secara tidak langsung dapat mengalami defisiensi zat gizi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan pertumbuhan, penyakit infeksi dan kecerdasan anak. Keadaan kurang gizi yang tidak teratasi pada masa balita dapat mempengaruhi intellectual performance, kapasitas kerja, dan kondisi kesehatan di usia selanjutnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian wasting adalah asupan karbohidrat, penyakit infeksi, ASI eksklusif, kelengkapan imunisasi, usia ibu dan BBLR.

- **Persentase Rumah Tangga PHBS**

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Adapun persentase rumah tangga PHBS di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2-30 Persentase Rumah Tangga PHBS

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga PHBS	persen	30,9	32,9	49,5	55,20
Jumlah Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Rt	16.789	15.491	25.514	29.515
Jumlah Rumah Tangga	Rt	54.159	47.088	51.599	53.471

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pelaksanaan PHBS merupakan pemantauan Rumah Tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS, yaitu : 1) Persalinan melalui tenaga kesehatan, 2) Asi Eksklusif, 3) Timbang Bayi, 4) Air Bersih, 5) Jamban Sehat, 6) cuci tangan pakai sabun (CPTS), 7) Bebas Jentik, 8) Makan buah dan sayur, 9) Aktifitas Fisik, 10) Tidak Merokok.



Pada tahun 2021, dari 54.159 rumah tangga yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang dipantau melaksanakan PHBS berjumlah 16.789 rumah tangga atau sebesar 30,9%, terus meningkat hingga tahun 2024 berjumlah 29.515 rumah tangga atau 55,20% .

- **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Pelaksanaan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 3) Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga, 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga. Tujuan dari program STBM adalah untuk merubah perilaku masyarakat dengan pendekatan pemucuan *Community Leat Total Sanitation* (CLTS). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2-31 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	40,38	51,92	55,77	100	100
Jumlah Nagari PHBS (Nagari ODF)	nagari	21	27	29	52	52
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada saat ini kegiatan percepatan Universal Akses terhadap jamban sehat baru difokuskan pada pilar pertama, dalam rangka pencapaian status Oven Deficasion Free (ODF). di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sudah ada 29 nagari dengan status ODF atau 55,77% dari 52 nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023 sampai tahun 2024 sudah semua nagari dengan status ODF.

- **Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam**

KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka.



Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah – langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor – faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah. Penanganan KLB dari tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu ditangani segera atau kurang dari 24 jam. Untuk lebih jelasnya Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2-32 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah KLB yang ditangani ≤ 24 jam	Kasus	1	1	1	2	
Jumlah kejadian Luar Biasa	kasus	1	1	1	2	

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024, Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam sudah 100%.

- **Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular**

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit. Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 sudah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.33.



Tabel 2-33 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Di tahun 2024, penyakit menular yang disebabkan oleh TBC didapatkan hasil positif sebanyak 510 kasus, semua kasus yang ditemukan sudah mendapatkan pengobatan sesuai standar. sedangkan HIV ditemukan kasus baru sebanyak 8 orang, dimana penemuan kasus baru HIV terdapat peningkatan sebesar 22,22%, dengan adanya peningkatan kasus HIV setiap tahunnya, hal ini perlu menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan kasus ini, mengingat penyakit yang disebabkan oleh virus ini tidak bisa diobati dan hanya dapat dicegah .

- **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular**

Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehatan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Berdasarkan data tahun 2020-2023, cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular sudah 100%. Pada tahun 2024, mengalami penurunan menjadi 99,46%. Untuk lebih jelasnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular dapat dilihat Pada Tabel 2.34.

Tabel 2-34 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	99,46

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 milimeter merkuri (mmHG). Angka 140 mmHG merujuk pada bacaan sistolik, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, angka 90 mmHG mengacu pada bacaan diastolik, ketika jantung dalam keadaan rileks sembari mengisi ulang bilik-biliknya dengan darah.

Pada tahun 2024, capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 22.039 orang, sehingga jumlah penderita dengan hipertensi berusia >15 tahun cukup tinggi, selain



faktor pola hidup, hipertensi juga dipengaruhi oleh pola konsumsi yang dijalankan oleh masyarakat. Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita.

- **Visite Rate**

Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti amanat undang-undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya.

Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandakan akses masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Perkembangan visite rate di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2-35 Visite Rate

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Visite Rate	persen	21,4	4	4,6	5,25	5,32

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Tahun 2022 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya meningkat dari data capaian *visite rate* tahun 2021 dengan visite rate 21,4%. Rata-rata capaian *visite rate* tahun 2022 adalah 4,6 dari jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja, sedangkan tahun 2021 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya 4,0,% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2023 capaian visite rate yaitu 5,25%. Dan pada tahun 2024 capaian visite rate yaitu 5,32%. Peningkatan visite rate di fasilitas kesehatan menggambarkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas sudah menjangkau seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dengan rata-rata kunjungan masing-masing individu 4 sampai 5 kali kunjungan dalam satu tahun.



- **Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama**

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Akreditasi Puskesmas terbagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;

1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2-36.

Tabel 2-36 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	persen	7,14	21,40	21,43	93,3	100
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	unit	1	3	3	14	15
Jumlah Puskesmas	unit	14	14	14	15	15

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dengan adanya penilaian akreditasi dan re-akreditasi di 15 puskesmas Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 dan tahun 2024, maka seluruh puskesmas terakreditasi utama 100%. Capaian ini sangat signifikan peningkatannya bila dibandingkan dengan capaian puskesmas terakreditasi utama tahun 2020-2022.

- **Persentase UPT RSUD Terakreditasi**

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten



Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai.

RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi sejak tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2022, UPT RSUD Sungai Rumbai sudah terakreditasi. Untuk lebih jelasnya jumlah RSUD terakreditasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2-37.

Tabel 2-37 Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	50	100	100	100
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	1	2	2	2
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dengan ada 2 RSUD yang sudah terakreditasi, maka hal ini juga memberikan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh RSUD Sungai Dareh maupun RSUD Sungai Rumbai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Jalan Daerah yakni jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berupa Kemantapan Jalan Provinsi di Indonesia yang mana jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan dimana berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jalan diketahui bahwa total panjang jalan Kabupaten Dharmasraya adalah 1.042,87 km.

Mengingat jalan sebagai infrastruktur dasar, maka perlu diketahui kondisi kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023 dilakukan updating terhadap ruas jalan kabupaten



dan peninjauan kembali terhadap ruas jalan kabupaten maka panjang jalan kabupaten mengalami penambahan dari 1.042,87 Km menjadi 1052,66 Km. Perubahan panjang jalan ini merupakan penambahan ruas jalan kabupaten yang belum termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017. Dengan ditetapkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/336/KPTS-BUP/2023 tanggal 9 Desember 2023 tentang Penetapan Ruas Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, maka Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pada data capaian proporsi panjang jalan dilakukan penyesuaian data sehingga terjadi penyesuaian data Panjang jalan yang mempengaruhi data jalan dengan kondisi baik. Secara umum pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian data dan definisi operasional terhadap pengertian jalan dengan kondisi baik. Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024.

Untuk lebih jelasnya proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2-38 berikut:

Tabel 2-38 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	49,75	49,71	58,09	58,15	54,59
Panjang jalan kondisi mantap	Km	523,89	523,49	611,72	612,21	574,80
Panjang Jalan (Km)	km	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.052,66	1.052,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yaitu sepanjang 1.052,66 Km, dimana panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 574,80 Km atau ketercapaian panjang jaringan jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 54,59% dari total panjang jalan kewenangan kabupaten.

Terjadinya penurunan fluktuasi proporsi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan beberapa hal :

1. Terjadi perubahan panjang jalan kabupaten karena perbedaan pemahaman terhadap kondisi jalan mantap, dimana pada tahun 2018 jalan kerikil yang rata dianggap jalan mantap tetapi saat ini jalan kerikil dianggap tidak termasuk jalan mantap



2. beban yang melewatinya terus menerus melampaui batas maksimum. Kendaraan-kendaraan yang lewat, sering kali beratnya melampaui batas (over load).

- **Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan data 5 tahun terakhir bahwa jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 188 unit jembatan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jembatan di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah jembatan tersebut, pada tahun 2022 jembatan dalam kondisi baik sebanyak 148 unit atau 79,07% dari jumlah jembatan secara keseluruhan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian data jumlah jembatan, dimana saat ini jumlah jembatan yang ada yaitu 265 unit jembatan. Jembatan dalam kondisi baik sebanyak 185 unit atau sebanyak 68,93% jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik.

Untuk lebih jelasnya presentase jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2-39 berikut:

Tabel 2-39 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jembatan dalam Kondisi Baik	persen	68.09	68.09	79,07	70,03	68,93
Jumlah jembatan dalam Kondisi Baik	unit	128	128	148	180	185
Jumlah Jembatan seluruhnya	unit	188	188	188	257	265

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

- **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**

Persentase luas daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten dalam kondisi baik yaitu menggambarkan persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dibangun/ditingkat dan di pelihara.

Irigasi merupakan salah satu prasarana wilayah yang dapat mendukung peerkonomian. Pembangunan jaringan irigasi sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan air untuk irigasi persawahan merupakan salah satu upaya mendukung ketahanan pangan mengingat lapangan usaha dominan berada pada sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Artinya terdapat keterkaitan antara dampak pembangunan daerah irigasi terhadap produksi padi,



menunjukkan bahwa jika luas fungsional daerah irigasi mengalami peningkatan maka produksi padi pun meningkat.

Berdasarkan data, Luas Potensial Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi 2.783 Ha, dengan luas fungsional mencapai 1710,94 ha yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berikut merupakan tabel presentase luas daerah irugasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2-40 **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	59,86	79,76	79,76	76,37	72,45

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 59,86% di tahun 2020 meningkat menjadi 72,45% tahun 2024.

- **Persentase penduduk yang terlayani jaringan air minum**

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air). Untuk lebih jelasnya Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.41 berikut:

Tabel 2-41 **Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum**



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	21,67	26,17	88,22	89,07	89,64
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	46.853	59,217	201.848	211.736	
Jumlah penduduk	Jiwa	216.202	226.265	228.801	237.724	

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

Pencapaian terkait cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah. Berdasarkan data lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 21,67% meningkat pada tahun 2024 menjadi 89,64%.

- **Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik**

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perdagangan, rumah susun dan asrama. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.42.

Tabel 2-42 **Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik**



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	persen	86,88	87,25	91,73	92,50	92,45
Jumlah penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Jiwa	186.177	188.636	207.553	219.876	
Jumlah penduduk	Jiwa	214.292	216.202	226.265	237.724	

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

Akses layak air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 92,45% dimana sebagian besar rumah tangga sudah melakukan praktik buang air besar ke jamban pribadi milik sendiri, dan hanya sebagian kecil saja rumah tangga menumpang ke jamban tetangga/saudara (sharing).

- **Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik**

Gedung perangkat daerah idealnya sesuai dengan jumlah perangkat daerah yang ada. Jumlah perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 38 OPD.

Saat ini belum semua perangkat daerah memiliki kantor sendiri. Dari 38 OPD baru 24 OPD yang memiliki gedung kantor dalam kondisi baik yang terdiri dari 11 kecamatan dan 13 kantor OPD. Selain itu masih ada OPD di Kabupaten Dharmasraya yang belum memiliki kantor sendiri dalam hal ini masih menyewa dan menumpang pada bangunan lain.

Untuk lebih jelasnya Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2-43 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44,73	44,73	44,73	47,36	64,86
Jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	unit	17	17	17	18	24
Jumlah Perangkat Daerah		38	38	38	38	37

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik sebesar 64,86%. Dari tahun 2020-2024 jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik masih 18 OPD yang terdiri dari 11 gedung kantor kecamatan dan 13 kantor OPD (sekretariat daerah, Bapperida, BKD, inspektorat, dinas PUPR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, DLH, DPMPSTSP, Dinas Kesehatan (UPTD RSUD Sungai Dareh) , Dinas Kesehatan dan sekretariat DPRD).

- **Persentase Kesesuaian Tata Ruang**

Untuk lebih jelasnya persentase kesesuaian tata ruang dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut :

Tabel 2-44 Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Indikator	Satuan	2022	2023
Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	89.47	92.59
Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Yang Dikeluarkan	Buah	68	50
Jumlah Permohonan Kesesuaian tata Ruang	Buah	76	54

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tahun 2022 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 89,47% dan tahun 2023 sebesar 92,59%.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- **Cakupan permukiman layak huni**

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.46.



Tabel 2-45 Cakupan permukiman layak huni

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan permukiman layak huni	Persen	83,88	83,99	84,15	84,30	86,29
Luas Permukiman layak huni (Ha)	Ha	2.068	2.072	2.076	2.079,80	2.128,69
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Ha	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 mengalami peningkatan tiap tahun. Tahun 2020 cakupan pelayanan permukiman layak huni sebesar 83,88% dan tahun 2024 meningkat menjadi 86,29%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari program-program penanganan kawasan permukiman layak huni yang dilaksanakan setiap tahunnya.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada 2.47.

Tabel 2-46 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90,61	90,68	91,17	91,49	91,60
Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	53.029	53.074	53.512	53.972	54.144
Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	58.526	58.526	58.695	58.993	59.108

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan data cakupan ketersediaan rumah layak huni Pada tahun 2020 capaian yaitu 90,61%. Berdasarkan hasil pengumpulan data jumlah rumah layak huni tahun 2024 yaitu 54.144 rumah atau 91,60% dari jumlah rumah keseluruhan. Dilihat berdasarkan perkembangan data tahun 2020-2024 jumlah cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 90,61% menjadi 91,60%. Penambahan cakupan ketersediaan rumah layak huni disebabkan oleh 2 (dua faktor) yaitu adanya penambahan jumlah rumah



itu sendiri serta adanya perbaikan rumah baik yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri maupun program yang dijalankan oleh pemerintah, terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana**

Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2020-2024 tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. Lebih jelasnya perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2-47 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	0	0
Jumlah total rencana ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024 tidak ada ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana, atau tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. sehingga capaian kinerja untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tetap 100%, sesuai ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah**

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah tahun 2020-2024 yaitu tidak ada rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Tetapi, pada tahun 2023 terdapat 2 unit rumah masyarakat terkena relokasi program pemerintah, dan statusnya menjadi rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah. Untuk lebih jelasnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah dilihat pada Tabel 2.49.



Tabel 2-48 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	%	100	100	100	100	100
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	2	0
Jumlah rumah masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	2	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

- Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani**

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang di tangani di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 hanya sebesar 0,56%. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kawasan kumuh yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2-49 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	0	0,56	2,13	4,35	5,28
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Ha	0	0,61	2,3	4,7	5,7
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar	Ha	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98

Sumber : Dinas Perkintan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di Kabupaten Dharmasraya yaitu 107,98 hektar. Berdasarkan capaian di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan kawasan permukiman kumuh di bawah 10



hektar yang di tangani di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2021-2025. Pada tahun 2020 tidak ada kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani. Pada tahun 2021, permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani seluas 0,61 hektar, luasan ini meningkat menjadi 2,3 hektar tahun 2022, seluas 4,7 hektar pada tahun 2023 dan mencapai 5,7 hektar pada tahun 2024.

- **Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU merupakan perbandingan antara Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha) dengan Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha). Adapun capaian Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2-51 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	51,68	50,36	49,37	50,02	64,62
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	95,96	103,38	104,58	108,88	270,02
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	185,67	205,29	211,82	217,69	417,86

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Dharmasraya



Tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebanyak 51,68% dan pada tahun 2022 dilihat berdasarkan angka capaian mengalami penurunan menjadi 49,37%. Artinya setiap tahun cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU semakin berkurang. Salah satu penyebabnya yaitu pembangunan perumahan dan permukiman oleh masyarakat tidak dilengkapi dengan PSU, sementara itu program pembangunan PSU dari pemerintah juga masih terbatas. Pada tahun 2023, cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat menjadi 50,02%. Dan pada tahun 2024, cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat tinggi menjadi 64,62%. Peningkatan terjadi di pengaruhi oleh ketersediaan anggaran tidak tersedia, Belum optimalnya pengelolaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam, Terkendala dengan persyaratan dari pengusulan PSU perumahan.

- **Cakupan rumah layak huni yang terjangkau**

Cakupan rumah layak huni yang terjangkau merupakan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data terlihat bahwa cakupan pelayanan dari tahun 2020-2024 cukup rendah. Untuk lebih jelasnya cakupan rumah layak huni terjangkau dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2-52 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	11,21	1,14	12,76	15,34	5,8
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	500	45	448	467	167
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	4.460	3.960	3.512	3.045	2.878

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Pada tahun 2024 kegiatan untuk melaksanakan pencapaian ketersediaan rumah layak huni pada program pusat alokasi pada Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu banyak dan developer pembangunan rumah formal juga tidak memenuhi target, karena terkendala dengan survey informasi debitur.



5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

• **Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk lebih jelasnya jumlah kasus dan persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2-53 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	91	90	100	100	100
Jumlah Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	10	9	-	-	-
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	11	10	-	-	-

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2025

Catatan : *jumlah Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum tersedia*

Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 persen.

• **Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi**

Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi. Capaian kinerja persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2-54 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen	100	100	100	100	90

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas, maka capaian persentase penegakan perda dan perkara yang memuat sanksi pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

- **Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran**

Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase respontime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar 15 menit. Cakupan pelayanan respontime 15 menit pada lokasi kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2-55 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2025

Berdasarkan tingkat capaian persentase respontime pada lokasi kebakaran pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah daerah telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri.

- **Jumlah Nagari Tangguh Bencana**

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada Tahun 2024, adanya penambahan 2 Nagari Tangguh Bencana yaitu Nagari Abai Siat dan Nagari Bonjol. Sehingga Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Nagari Tangguh Bencana sebanyak 5 Nagari yaitu Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh, Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Abai Siat dan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar.



- **Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi**

Evakuasi merupakan tindakan untuk membuat orang-orang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sangat berbahaya ke tempat yang lebih aman. Ada banyak kondisi ekstrim yang berpotensi mengancam keselamatan manusia sehingga perlu dilakukan evakuasi. Berdasarkan data tahun 2024, korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2024 tertangani seluruhnya.

- **Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**

Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi adalah menggambarkan jumlah warga negara yang menjadi korban yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi.

Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi warga negara yang menjadi korban bencana telah tercapai 100% sejak tahun 2020 s/d 2024. Setiap kejadian bencana yang terjadi selalu direspon dengan cepat dan langsung dilakukan penanganan dan penyelamatan, baik terhadap warga maupun harta benda/materil warga yang terdampak bencana. Untuk lebih jelasnya persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2-56 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	persen	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2025

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- **Persentase PPKS yang tertangani**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk lebih jelasnya PPKS yang tertangani dapat dilihat pada Tabel 2.57.



Tabel 2-57 Persentase PPKS yang tertangani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
persentase PPKS yang tertangani	Persen	75	96	97	97,7	98
Jumlah PPKS yg diberikan bantuan	Orang	-	-	136.305	-	25.895
Jumlah PPKS yg seharusnya	orang	-	-	140.521	-	26.451

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Pada tahun 2020 persentase PPKS yang tertangani menjadi 75% dari jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Dharmasraya, hal ini akibat merebaknya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan beberapa kegiatan. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 96% karena sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dan kegiatan penanganan PPKS dapat dilaksanakan, dan di tahun 2022-2024 persentase kenaikan semakin membaik .

- **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti, paling lama 7 (tujuh) hari, meliputi permakanaan; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat; fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak; akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga, serta reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial. Untuk lebih jelasnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dapat dilihat pada Tabel 2.58.



Tabel 2-58 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	33	136	44	44	25
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Orang	33	136	44	44	25

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti paling pada tahun 2024, sebanyak 25 orang. Dilihat berdasarkan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, semuanya (100%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

- **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota**

Tanggap Darurat Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Untuk lebih jelasnya persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota dapat dilihat pada Tabel 2.59.



Tabel 2-59 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Orang	17.024	7.754	5.677	-	500
Jumlah korban bencana alam dan sosial	Orang	17.024	7.754	5.677	-	500

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Selama tahun 2020 s.d. 2024 kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan capaian 100%. Jika dilihat berdasarkan jumlah korban bencana alam dan sosial terbanyak terdapat pada tahun 2021, menunjukkan jumlah yang cukup besar yaitu 17.024 orang. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi banjir di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung, serta adanya bencana lainnya.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Simanjuntak, 2005:45). Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya digambarkan melalui tabel 2.60.



Tabel 2-60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	72,72	73,04	77,84	73,93	74,45
Jumlah angkatan kerja	Orang	136.507	141.468	119.814	143.054	135.394
Jumlah penduduk 10 tahun ke atas	Orang	187.711	193.674	153.923	193.499	181.859

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Keterangan :

* : sumber Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas pada tahun 2024 terlihat bahwa jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yaitu 181.859 orang, dimana angkatan kerja berjumlah 135.394 orang dan bukan angkatan kerja berjumlah 91.659 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,45%. Jika dilihat berdasarkan perkembangan dari tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 72,72% dan tahun 2024 menjadi 74,45%. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan sektor jasa. jumlah penduduk yang relatif banyak, namun faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi yang masih kurang dan dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan banyak penduduk memilih untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk Dharmasraya yang memilih bekerja di sektor informal daripada di sektor formal.

- **Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan**

Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang terampil mendorong para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka. Dalam rangka peningkatan keterampilan dimaksud, pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Dareh yang berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. UPT BLK Sungai Dareh sebagai lembaga pelatihan kerja milik pemerintah daerah, UPT BLK memiliki tugas mempersiapkan calon tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja agar dapat bersaing pada dunia kerja dan dunia usaha di daerah atau Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya. Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan dapat dilihat pada tabel 2.61.

Tabel 2-61 Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	25	29	44,92	36,4	49,72
Jumlah Peserta Pelatihan yang ditempatkan	Orang	96	116	86	128	180
Jumlah Peserta lulus yang pelatihan	Orang	384	400	191	352	362

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025



Berdasarkan data diatas terlihat bahwa persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 96 orang atau 25% dari total peserta lulus yang ikut pelatihan. Tahun 2024 terdapat sebanyak 21 Paket dari APBN dan 2 Paket dari APBD. Kegiatan ini dilaksanakan tahun 2024 dengan persentase kelulusan 100%. Dari persentase peserta yang lulus pelatihan yang dapat diterima kerja atau ditempatkan sebanyak 49,72%.

- **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dengan jumlah tenaga kerja pada suatu daerah. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas objektif, secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 ini sudah mengolah data Tenaga kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan melalui Aplikasi Siap Kerja melalui Website Kementerian Ketenagakerjaan.

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2-61 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	80,14	93.86	56,09	39,20	21,48
Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	1025	4449	2.489	1.425	26
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1279	4740	4.437	3.633	121

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan jika dilihat dari data tahun 2021.

- **Persentase Kasus-Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan**

Kasus yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya adanya laporan dari pekerja yang bekerja di perusahaan mengenai adanya PHK dari beberapa perusahaan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terdapatnya perselisihan perusahaan, tetapi kasus yang ada Cuma kasus PHK, walaupun banyak pekerja yang terkena dampak PHK oleh beberapa perusahaan, karena semua PHK telah disepakati oleh



para pihak dan tidak diperselisihkan. Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang merupakan salah satu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini pengurusannya di bantu oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk dibuatkan bukti tanda terima kasus PHK dan membuatkan akun siapkerja di situs kemnaker.go.id serta cek eligibilitas kepesertaan Program JKP. Pada Tahun 2024 ini sebanyak 1 Orang yang terdampak PHK dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah kasus ketenagakerjaan yang terjadi, semuanya dapat terselesaikan (100%). Untuk lebih jelasnya jumlah kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.62.

Tabel 2-62 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Kasus	1430	4	-	12	1
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan	Kasus	1430	4	-	12	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025

Berdasarkan data Tahun 2020-2024, kasus ketenagakerjaan paling banyak terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.430 kasus dan semuanya dapat terselesaikan. Banyaknya jumlah kasus ini karena adanya masalah di perusahaan yang berkaitan dengan masalah hak-hak tenaga kerja yang tidak terpenuhi sesuai aturan, karena perusahaan belum memiliki dokumen kepatuhan ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui kesetaraan gender pada seluruh pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

a. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Focalpoint perangkat daerah merupakan aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah telah mempunyai focalpoint aktif. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2-63 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Indikator	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun 2020-2024 bahwa semua Perangkat Daerah dilingkup Kabupaten Dharmasraya mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah.

b. persentase Organisasi perempuan yang aktif

Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar 100%. Yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang aktif dalam pemberdayaan perempuan yaitu sebanyak 17 Organisasi. Untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tersebut telah dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga organisasi mampu melaksanakan program-programnya. Adapun Organisasi Perempuan yang aktif di Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada Tabel 2.64:

Tabel 2-64 Persentase Organisasi perempuan yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Organisasi perempuan yang aktif	Organisasi	19	17	17	17	17
Jumlah Organisasi perempuan seluruhnya	Organisasi	19	17	17	17	17

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Jumlah Organisasi perempuan yang mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2024. Hal ini terjadi karena adanya organisasi yang vakum dan akhirnya dibubarkan. Untuk organisasi yang aktif, seluruhnya dibina oleh pemerintah daerah.

c. Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)

APE (Anugrah Parahita Ekapraya) merupakan penghargaan atas upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Penilaian APE dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali, dan Kabupaten Dharmasraya baru mengikuti penilaian pada tahun 2020. Tingkat kategori capaian APE Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 kategori Pratama. Tingkat kategori capaian APE di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.65.



Tabel 2-65 Tingkat kategori capaian APE

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kategori capaian APE	kategori	pratama	pratama	-	Pratama	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yaitu Predikat/ penghargaan APE kategori pratama berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah. Evaluasi APE dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada tahun 2024 tidak dilakukan evaluasi APE.

d. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya perlu dikawal. Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya berupa penghargaan kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kategori. Penghargaan KLA untuk Kabupaten Dharmasraya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan pada Tahun 2021 sampai tahun 2023 berhasil memperoleh penghargaan KLA kategori Madya. Perkembangan status Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2-66 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Status	Pratama	Madya	Madya	Madya	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Pada tahun 2024, evaluasi Kabupaten Layak Anak hanya dilakukan pada tahap penilaian mandiri dan verifikasi administrasi oleh provinsi. Evaluasi lapangan dan pemberian penghargaan baru dilaksanakan pada tahun 2025.

e. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

KDRT adalah Tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perempuan korban kekerasan yang tertangani adalah perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual yang telah diberikan pendampingan untuk pemulihan



fisik, psikologis dan rehabilitasi sosial oleh lembaga layanan perlindungan perempuan di daerah.

Pada tahun 2024 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan pendampingan. Cakupan ini disebabkan karena sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kab. Dharmasraya. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

UPTD PPA juga telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan rumah perlindungan sebagai tempat penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan. Disamping itu pada tahun 2024, Dinas SOSP3APPKB juga menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui link pengaduan bit.ly/salingsappa sehingga memberi kemudahan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan. Pada tahun 2024 terdapat 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan telah mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan. Data tersebut di atas diperoleh dari data UPTD PPA kab. Dharmasraya Tahun 2024 sebanyak 43 Kasus. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020-2024 adalah 100%. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2-67 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Orang	1	3	10	-	43
perempuan korban kekerasan	orang	1	3	10	-	43

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024



Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 masing-masing 1 orang, di tahun 2021 sebanyak 3 orang dan di tahun 2022 terjadi sebanyak 10 kasus. Seluruh kasus yang terjadi pada setiap tahun telah difasilitasi dan diselesaikan dengan capaian masing-masing 100%. Pada tahun 2024 rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani sebanyak 100%. Dengan telah terbentuk dan berjalannya UPT PPA diharapkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diungkap dan ditangani dengan optimal.

f. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Angka kasus KDRT di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 yaitu 3 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena kegiatan pencegahan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang KDRT, baik pencegahan dan penanganannya. Namun dapat juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT dikarenakan berbagai faktor. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, beranjak dari hal tersebut sejak tahun 2021 Dinas SOSP3APPKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat inovasi SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak) yang memberikan layanan konseling bagi perempuan korban KDRT dan layanan pengaduan secara online yang menjamin kerahasiaan pelapor melalui link pengaduan bit.ly/salingsappa. Selanjutnya Rasio kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2-68 Rasio kekerasan dalam rumah tangga

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio kekerasan dalam rumah tangga	rasio	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan yang di miliki oleh daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan peruntukannya. Cadangan pangan tersebut bersumber dari :

1. Stock/cadangan pangan pemerintah daerah , dan
2. Cadangan pangan masyarakat yang berada pada lumbung pangan masyarakat.

Persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah di Kabupaten Dharmasraya semenjak tahun 2020 sebesar 27,87%. terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 36,51%. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Cadangan pangan daerah merupakan upaya untuk mengatasi gejolak harga pangan, bencana alam serta antisipasi masa paceklik. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.69

Tabel 2-69 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	persen	27,87	36,51	36,51	80,06	88,56

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, Tahun 2025

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi perkembangan yang signifikan dalam persentase ketersediaan cadangan pangan. Pada tahun 2020, data awal tercatat sebesar 27,872%. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021-2024, di mana ketersediaan cadangan pangan tetap stabil pada 36,51%. Namun, terjadi lonjakan yang luar biasa pada tahun 2024, dengan persentase ketersediaan cadangan pangan mencapai 88,56%. Hal ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan produksi dan manajemen pangan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dalam skala yang lebih besar.

b. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Keterjangkauan Pangan adalah kondisi masyarakat yang dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau dan jumlah yang tersedia cukup. Angka yang harus terpenuhi dari



ketersediaan kalori dan protein ini adalah ≥ 2.400 K.Kal/Kap/hr dimana kondisi ini menunjukkan bahwa pangan di daerah tersedia dan terjangkau oleh masyarakat Untuk lebih jelasnya Ketersediaan Kalori dan protein perkapita/hari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2-70 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Kalori dan protein perkapita/ hari	K.Kal/Kap/hr	2.540	2.550	2416	2.490	2.498
Ketersediaan Protein	Gram/Kap/hr	95,11	91,51	85,95		

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2025

Tabel diatas menjelaskan ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari, terdapat variasi dalam data yang diamati dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, dengan ketersediaan kalori dan protein mencapai 2.540 kilokalori (K.Kal) dan protein per kapita per hari. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan ketersediaan kalori dan protein mencapai 2.645 K.Kal/Kap/Hr. Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 2.416 K.Kal/Kap/Hr. Dan, Pada tahun 2024 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 2.498 K.Kal/Kap/Hr. Secara keseluruhan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target, ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam ketersediaan kalori dan protein perkapita di Kabupaten Dharmasraya.

c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola pangan harapan adalah Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro). Pemenuhan konsumsi pangan yang baik dapat dijadikan indikator ketahanan pangan, status gizi dan kesejahteraannya yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola pangan harapan (PPH) dengan nilai ideal adalah 100.

Susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan yang semakin baik. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2-71 Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan	skor	85,6	94	87,8	88,5	91,2

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas, data mengenai skor pola pangan harapan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi dalam penilaian harapan terhadap pola pangan dalam masyarakat. Pada tahun 2020, skor awal tercatat sebesar 85,6, menggambarkan tingkat harapan yang relatif stabil terhadap kualitas pola pangan. Namun, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021, di mana skor menjadi 94, ini mencerminkan peningkatan yang berarti dalam harapan terhadap kualitas pola pangan. Meskipun demikian, terjadi penurunan kembali pada tahun 2022, di mana skor turun menjadi 87,8. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, skor pola pangan harapan kembali meningkat menjadi 88,5 dan 91,2, itu menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya memenuhi harapan terhadap pola pangan yang lebih baik. Hal ini menegaskan perlunya pemantauan dan peningkatan terus-menerus dalam kebijakan pangan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pola pangan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat

Pada bidang pertanian indikator Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat merupakan indikator yang dapat menunjukan kondisi pertanian. Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah pemerintah. Untuk lebih jelasnya Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha) dan persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2-72 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	22,29	23,86	26,13	33,20	41,22
Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)	Ha	372,89	399,13	437,14	555,48	689,61
Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha)	Ha	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2025

Sampai tahun 2024 luas lahan pemda yang sudah disertifikatkan tercatat sebanyak 689,61 hektar atau 41,22% dari seluruh tanah yang dimiliki pemerintah. Diantara tanah yang belum disertifikatkan adalah berupa tanah yang berlokasi di sekolah serta tanah lainnya.



- b. Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan

Kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 jumlah kasus tanah berkisar antara 5-10 kasus. Pada tahun 2020 persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah sebanyak 66,67%, kasus yang terselesaikan. Sementara pada tahun 2021-2024 persentase penyelesaian kasustanah pemerintah sudah 100%. Untuk lebih jelasnya persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah pemerintah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2-73 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah	Persen	66,67	100	100	100	100
Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan	kasus	10	8	10	10	10
Jumlah Kasus yang terdaftar	kasus	15	8	10	10	10

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2025

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Pada Tabel 2.74 berikut disajikan capaian indikator indeks kualitas air dari tahun 2020-2024.

Tabel 2-74 Indeks Kualitas Air

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	indeks	-	52,82	-	-	-
Sumatera Barat	indeks	75	79,00	-	-	-
Dharmasraya	indeks	70,00	52,73	53,18	54	51,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Kualitas air sungai di Kabupaten Dharmasraya akan menggambarkan keadaan kualitas air Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air didefinisikan memenuhi baku mutu jika $IKA \geq 70$, didefinisikan tercemar ringan pada $IKA \geq 50$, tercemar sedang pada $IKA \geq 30$, tercemar berat jika $IKA \geq 10$. Pada rentang waktu lima tahun, indeks kualitas air Kabupaten Dharmasraya berada pada status tercemar ringan dengan nilai IKA berada pada rentang 50 hingga 54.



Kondisi yang menyebabkan IKA masih dalam kondisi tercemar diantaranya meliputi meliputi:

1. Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke Badan Air. Alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya air karena hutan adalah daerah tangkapan air akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air di daerah sekitarnya. Sensitifitas ekosisten hutan terletak pada tutupan lahannya, semakin baik tutupan lahannya semakin bagus fungsi tanggapan air nya.
2. Penambangan emas skala kecil (PESK) yang masih menggunakan merkuri Proses penambangan emas yang dilakukan secara tradisional dengan penarikan biji emas dengan menggunakan Hg menghasilkan limbah (taiing) pada proses pencucian, yang umumnya masih mengandung merkuri namun dibuang begitu saja langsung ke badan air atau ke permukaan tanah tanpa perlakuan yang menyebabkan air dan tanah tercemar merkuri, akibatnya terjadi akumulasi merkuri pada tanah dan tanaman pangan maupun biota air.
3. Masih terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan air limbah domestik, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan
4. Masih Kurangnya Fasilitas Buang Air Besar pada Kawasan Pemukiman Masyarakat.
5. Masih adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair. Dari hasil pengawasan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan, 9 (sembilan) usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 60% telah taat terhadap ketentuan pengelolaan limbah cair, 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan atau 33% kurang taat serta 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan atau 7% tidak taat terhadap ketentuan. Ketidak taatan umumnya terdapat pada aspek pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dan kepemilikan izin air pembuangan air limbah.
6. Perilaku Kehidupan Sosial Masyarakat terhadap Lingkungan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk lebih jelasnya indeks kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.75.



Tabel 2-75 Indeks Kualitas Udara

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	indeks		87,36			
Sumatera Barat	indeks	90,39	90,22			
Dharmasraya	Indeks	86,11	84,49	85,32	83,28	91,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Indeks Kualitas Udara/IKU adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Metode perhitungan dan analisa data yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas udara adalah model EU/Indeks annual Model EU-LEU. Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah parameter SO₂ dan NO₂. Pada rentang waktu lima tahun terakhir, konsentrasi parameter NO₂ rata-rata dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Didukung dengan penghijauan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah, fasyankes dan masyarakat, pengawasan industri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran pembukaan lahan baru.

c. indeks kualitas tutupan lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Untuk lebih jelasnya indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2-76 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	persen	-	60,72	-	-	
Sumatera Barat	persen	64,13	66,24	-	-	
Dharmasraya	persen	40,95	42,70	42,70	43,14	42,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 berfluktuatif. Tahun 2020, IKTL sebesar 40,95 dan tahun 2024 sebesar 42,55. Angka ini menunjukkan masih ada lokasi lahan kritis karena masih adanya lahan yang belum dilakukan penanaman/penghijauan kembali,



pembukaan lahan baru serta pengalihan fungsi lahan yang bersifat tanaman hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

d. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Cakupan sumber daya alam yang terlindungi ada dua hal yang diukur yaitu kawasan lahan yang terlindungi dan kawasan air yang terlindungi. capaian indikator pada sasaran strategis ini diukur dengan melihat luas area sumber daya alam baik lahan maupun air yang berhasil terlindungi dari potensi kerusakan serta dengan menghitung luas area penambahan tutupan lahan yang berhasil dilakukan. Dalam mencapai sasaran strategis ini ada beberapa program yang mendukung diantaranya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Untuk lebih jelasnya cakupan sumber daya alam yang terlindungi dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2-77 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	6	2,1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Pada tahun 2024 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungi sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 1094 batang tanaman yaitu bibit tanaman buah dan bibit tanaman bunga yang telah disalurkan ke Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

e. Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis

Luas tutupanlahan/menurunnya lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2-78 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis	Ha	6	2,1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Pada tahun 2021 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungi sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 235 batang tanaman seperti Durian, Sukun, Nangka serta Mangga diserahkan ke 12 wilayah Nagari yang tersebar di Kabupaten



Dharmasraya, sehingga diperkirakan penanaman bibit tersebut dapat melindungi sumber daya alam sekitar 2,1 Ha.

Pada tahun 2024, Pemberian Bibit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Masyarakat, Instansi, Sekolah dan Lainnya melalui Pengadaan Bibit dengan Jumlah bibit yang telah disalurkan 1094 bibit tanaman dari Total Bibit 1029 Bibit tanaman dengan jenis 13 Bibit Tanaman. Disamping itu Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan BPDAS HL Jambi, Dinas Lingkungan Hidup juga memperoleh Bibit Pohon Pelindung dan Buah yang juga didistribusikan kepada Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

f. **Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali)**

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstrada sebagaimana PERMEN LHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan target 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup maka kegiatan pengurangan sampah dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga 15,35%. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 12,37%. Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.79 dan Tabel 2.80.

Tabel 2-79 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	Persen	8,92	11,34	15,09	15,35	12,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Tabel 2-80 Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	61,75	78,71	79,65	80,48	80,21

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025



Untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup pada kegiatan penanganan sampah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 juga terus mengalami peningkatan. Capaian tersebut telah melebihi target Jakstrada yang ditetapkan oleh KLHK hingga tahun 2025.

- g. Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2-81 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/ kegiatan	29	14	20	20	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Mulai tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah sebanyak 20 usaha/kegiatan. Meliputi Perusahaan yang bergerak pada kegiatan industri Kelapa serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Dimana 20 kegiatan sudah mentatati regulasi terkait pengelolaan limbah B3. Sehingga cakupan ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 pada tahun 2024 sebesar 100%.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Persentase kepemilikan KTP-el

Persentase kepemilikan KTP-el Tahun 2024 mencapai 99,20% dari target 100%. Pada tahun 2023, persentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 95,56%. Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2023, capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 terjadi kenaikan persentase kepemilikan KTP-el. Capaian positif ini imbas dari percepatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan perekaman KTP-el Pemula ditahun 2024. Untuk lebih jelasnya persentase kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada tabel 2.82.



Tabel 2-82 Persentase kepemilikan KTP-elektronik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepemilikan KTP-elektronik	persen	97,74	99,91	97,63	95,56	99,20
Kepemilikan KTP-el	orang	149.352	156.636	161.800	163.446	169.854
Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas)	orang	152.911	156.770	165.734	171.011	171.211

Sumber : Dinas Dukcapil, tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas Persentase Kepemilikan KTP-el pada Tahun 2021 sudah mencapai angka diatas 99%. Pada Tahun 2022 dan tahun 2023 ini mengalami penurunan karena bertambah nya penduduk usia 17 tahun yang belum segera melakukan perekaman KTP-el. Pada Tahun 2024, persentase kembali naik diatas 99%.

b. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Capaian Kinerja Kepemilikan KIA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Dharmasraya hanya sebesar 35,55%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 68,78%. Perkembangan persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2-83 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	35,55	54,72	64,02	66,21	68,78
Jumlah anak memiliki KIA	orang	25.026	38.460	42.807	46.678	48.928
Jumlah Anak Usia 0-17 tahun	orang	69.398	70.282	66.864	70.504	70.978

Sumber : Dinas Dukcapil, Tahun 2025

Penerbitan KIA terlihat cukup meningkat dengan baik, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA sebagai kartu identitas yang mesti dimiliki. Peningkatan ini terlihat setiap tahunnya, dimana di tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 68,78%.

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Untuk lebih jelasnya Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2-84 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun 2026

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	persen	87,17	91,57	95,58	96,36	97,16
Jumlah Anak yang memiliki akta	Orang	65.506	68.803	68.041	71663	72.517
Jumlah Anak Usia 0-18 tahun	orang	75.062	75.135	71.190	74370	74.636

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2025

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2024 yakni sebanyak 72.517 dari 74.636 penduduk usia 0-18 tahun. Terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 0-18 tahun dan persentase pada tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023, hal ini disebabkan karena data kependudukan yang bersifat dinamis diantaranya karena peristiwa kelahiran dan lain sebagainya.

d. Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Akta kematian merupakan dokumen dalam pembuktian administrasi bahwasanya seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Selain untuk syarat pencairan asuransi dan mengurus penetapan ahli waris, pembuatan akta kematian juga dapat mencegah penyalahgunaan data almarhum, dan juga dapat membantu memastikan keakuratan data kependudukan. Selama lima tahun terakhir persentase cakupan akta kematian menunjukkan 100 persen. Untuk lebih jelasnya Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2-85 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	dokumen	2.867	3.803	5.468	5.468	9.157
Jumlah Kematian yang dilaporkan	orang	2867	3.803	5.468	5.468	9.157

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020-2024 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan sudah mencapai 100%. Artinya jumlah kematian pada tahun tersebut sudah dilaporkan oleh keluarga dan sudah tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya.



- e. Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil adalah akta perkawinan apabila tidak diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Berdasarkan data perkembangan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan tahun 2020-2024 sudah 100%. Untuk lebih jelasnya Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2-86 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	Orang	-	276	401	401	78.843
Jumlah Akta Perkawinan yang dilaporkan	Orang	-	276	401	401	78.843

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2025

- f. Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Sejak tahun 2021-2024, pemanfaatan data kependudukan sudah dilakukan melalui kerjasama antar pihak yang dapat menggunakan data kependudukan secara akurat dan bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2-87 Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	4	11	16	15

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun 2021



hanya 4 lembaga, tahun 2022 sebanyak 11 lembaga, tahun 2023 yaitu 16 lembaga, dan pada tahun 2024 yaitu 15 lembaga.

- g. Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Berdasarkan data diperoleh bahwa dari banyaknya Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Dharmasraya semuanya memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan. Tahun 2021 sebanyak 4 lembaga, tahun 2022 sebanyak 11 lembaga, tahun 2023 sebanyak 16 lembaga dan pada tahun 2024 yaitu 15 lembaga. Untuk lebih jelasnya Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2-88 Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	4	11	16	15

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, Tahun 2025

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM
RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Nagari sebagai penjabaran dari RPJM Nagari berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk lebih jelasnya persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2-89 Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persentase	19,23	30,77	82,69	100
Jumlah nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Jumlah	10	16	43	52
Jumlah nagari	Jumlah	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indikator ini, Persentase Nagari yang Sudah Menyusun RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM tahun 2021 sebesar 19,23% (10 dari 52 Nagari) dan naik menjadi 30,77% (16 dari 52 nagari) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 naik menjadi 82,69% (43 dari



52 nagari), sedangkan tahun 2024 sebesar 100% (52 dari 52 Nagari) yang mana berarti jumlah nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM adalah 100% atau sudah semua menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM. Hal ini bisa terjadi karena Dinas PMD rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur nagari dalam menyusun RKP nagari serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RKP Nagari.

b. Persentase APB nagari berbasis IDM

Persentase APB nagari berbasis IDM merupakan persentase Nagari Yang sudah Menyusun APB Nagari Berdasarkan IDM. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Nagari. Untuk lebih jelasnya persentase APB nagari berbasis IDM dapat dilihat pada tabel 2.90.

Tabel 2-90 Persentase APB nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	7,69	5,76	82,69	100
Jumlah APB nagari berbasis IDM	Jumlah	4	3	43	52
Jumlah nagari	jumlah	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Pada tabel diatas tersaji capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 Persentase APB Nagari Berbasis IDM adalah 7,69% (4 nagari). Pada tahun 2022 naik menjadi 11,53% (6 Nagari). Untuk tahun 2023 realisasinya menjadi 82,69% (43 nagari) dan tahun 2024 Persentase APB Nagari Berbasis IDM sebesar 100% (52 dari 52 Nagari). Jika dibandingkan dengan target masa akhir RENSTRA yaitu 100%, capaian indikator sudah tercapai, yang berarti sudah ada 52 nagari yang menyusun APB Nagari Berdasarkan IDM.

c. Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online

Keuangan Nagari berbasis Siskeudes Online sudah diterapkan pada tahun 2022 setelah sebelumnya di tahun 2021 masih pada tahap sosialisasi dan percobaan. Kedepan diharapkan seluruh nagari sudah menerapkan Sistem keuangan nagari berbasis Siskeudes Online. Untuk lebih jelasnya Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online dapat dilihat pada tabel 2.91.



Tabel 2-91 Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57,69	100	100
Jumlah Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Jumlah	30	52	52
Jumlah nagari	jumlah	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 capaian sebesar 0%, target untuk tahun 2021 adalah 50% (26 nagari) dengan realiasi 0%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan belum maksimalnya pelatihan terhadap aparatur nagari terkait dengan penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan karena penggunaan dana desa difokuskan kepada penanganan COVID-19. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 173% dengan target 57,69% (30 Nagari) sedangkan realisasinya adalah 100% (52 Nagari). Capaian untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, target untuk tahun ini adalah 100% (52 nagari) dengan realisasi 100% (52 nagari).

d. Persentase nagari memiliki bumnag berkembang

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. BUMNag berkembang merupakan tingkat klasifikasi bagi BUMNag yang telah melewati tahap tumbuh. Untuk lebih jelasnya Persentase nagari memiliki BUMNAG berkembang dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2-92 Persentase Nagari Memiliki BUMNag Berkembang

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase nagari memiliki BUMNAG berkembang	Persen	21,15	26,92	21,15	34,61	38,46
Jumlah nagari memiliki BUMNAG berkembang	bumnag	11	14	12	18	20
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator ini adalah 116%, target tahun 2021 adalah 23,08% atau 12 nagari memiliki Bumnag berkembang, sedangkan realisasinya adalah 26,92% atau sudah 14 nagari memiliki bumnag berkembang. Pada tahun 2022 capaiannya adalah 131% dengan target 25% atau 13 nagari memiliki bumnag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 32,69% atau 17 nagari yang sudah memiliki Bumnag berkembang. Pada tahun 2023 capaiannya adalah 100%



dengan target kinerja 34,62% atau 18 nagari memiliki bumrag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 34,62% atau 18 nagari sudah memiliki bumrag berkembang. Dan pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 40.38% atau sama dengan 21 nagari yang memiliki Bumrag berkembang, sedangkan realisasinya adalah 38.46% (20 Bumrag Berkembang/maju).

- e. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Lembaga kemasyarakatan nagari yang telah mempunyai peran aktif dalam pembangunan nagari. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (PP No. 72/2005) tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Permendagri No. 18/2018) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2-93 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	persen	84	86	100	100	100
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Lembaga	311	320	370	370	370
Jumlah LKN	lembaga	370	370	370	370	370

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang aktif dalam pembangunan, pada tahun 2021 capaian dari indikator ini adalah 116, dari target 318 LKN realisasinya adalah 370 kemudian pada tahun 2022 capaiannya adalah 114%, dari target 326 LKN realisasinya adalah 370 dan pada tahun 2023 capaian yang diperoleh adalah 111%, dari target 333 LKN realisasinya adalah 370 LKN. Dan pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100% atau sama dengan 370 LKN yang berperan aktif dalam pembangunan, sedangkan realisasinya adalah 100%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sangat berhasil.



f. Jumlah BumNag Bersama

Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNag Bersama) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. Jumlah BUMNag berdama di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2-94 Jumlah BumNag Bersama

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Jumlah BumNag Bersama	jumlah	0	5	6	11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Sampai tahun 2021 belum ada BUMNag bersama yang terbentuk di Kabupaten Dharmasraya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengamanatkan pengalihan status UPK eks-PNPM menjadi BUMNag Bersama, maka hal tersebut menjadi angin segar bagi daerah mengenai status kewenangan UPK-eks-PNPM yang tidak jelas sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014. Sehingga di tahun 2024 sudah terbentuk 11 (sebelas) BumNag Bersama di Kabupaten Dharmasraya..

g. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Kerjasama antar nagari dimaksudkan untuk kepentingan nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar nagari, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kerjasama nagari juga dapat dilakukan dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut kepentingan nagari dan bermanfaat bagi nagari. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2-95 Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	jumlah	3	4	5	4	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2025

Pada tahun 2020 s.d. 2024 terdapat kenaikan jumlah kerjasama nagari hingga terdapat 4 kerjasama nagari dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan



oleh nagari dengan empat Universitas yang ada di Sumatera Barat dalam program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa maupun Pengabdian Masyarakat. Dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Antara lain:

- Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM. Hal tersebut terjadi karena penyusunan berbasis IDM merupakan hal yang baru dan belum semua nagari memahami pelaksanaannya.
- Belum optimalnya pengelolaan BUMNag sehingga sulit berkembang untuk bersaing dalam pasar kompetitif.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Angka kelahiran total

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Angka kelahiran total di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2-96 Angka kelahiran total

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,62	2,6	-	-	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.97.



Tabel 2-97 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,3	83,43	80,60	70,19	72,18

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) dari tahun 2020-2021 cenderung mengalami peningkatan. Namun di tahun 2022-2023 terjadi penurunan menjadi 70,19 persen, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 72,18%.

c. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Unmet Need diterjemahkan sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi atau dengan kata lain kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 sampai 49 tahun untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi atau PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Tingginya angka unmet need berpeluang terhadap meningkatnya peluang angka kematian ibu, terutama pada kehamilan yang tidak diinginkan. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2-98 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,21	8,17	20,76	12,53	9,55
Peserta KB Aktif	Orang	-	-	7.374		
Jumlah pasangan usia Subur (PUS)	orang	-	-	35.525		36.578

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Dilihat dari kondisi terakhir tahun 2024, terlihat adanya peningkatan realisasi unmet need menjadi 9,55 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, masih perlu usaha untuk menekan angka ini untuk mencegah atau menekan terjadinya kematian ibu melahirkan.

d. persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.



Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2-99 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

e. persentase kelompok tribina yang aktif

Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain. Selain itu, Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, Tri Bina dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia). persentase kelompok tribina yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020-2024 adalah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2-100 persentase kelompok tribina yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2025

Persentase kelompok tribina yang aktif pada 2024 mencapai 100%. ini disebabkan adanya pembinaan yang terpadu dan sosialisasi yang Continue ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya dengan melalui pelatihan-pelatihan ke kelompok Tribina yang ada (BKB, BKR, BKL).

Pada tahun 2022 dan 2023 Pesentase Tribina yang Aktif adalah 100 % dengan capaian realisasi 100%. Dimana kelompok tribina itu adalah BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja) dan BKL (Bina



Kelompok Lansia). Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesehatannya.

Dari 237 kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) telah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. jumlah penambahan trayek angkutan umum

Penambahan Trayek Angkutan Umum adalah Penambahan lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Dharmasraya hanya trayek angkutan umum Damri pada jalur Pasar Ampalu-Pulau Punjung dan Sungai Rumbai-Pulau Punjung. Sejak tahun 2019-2023 jumlah trayek angkutan umum hanya 1 trayek, atau tidak ada penambahan trayek angkutan umum. Masih kurangnya trayek ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat Dharmasraya banyak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga masih tingginya angka kecelakaan dikalangan pelajar dan usia muda. Jumlah trayek angkutan umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023. Untuk tahun 2024 tidak adanya penambahan trayek angkutan umum, karena belum adanya anggaran kegiatan pada Dinas Perhubungan untuk trayek, dan belum adanya bantuan dari Dana DAK, mayoritas masyarakat Dharmasraya banyak menggunakan kendaraan pribadi dan dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2-101 Jumlah penambahan trayek angkutan umum

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penambahan trayek angkutan umum	izin	1	1	1	1	0

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

b. persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara



teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Berdasarkan data Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka berfluktuatif. Pada tahun 2020, persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR mencapai 102% dan pada tahun 2021 sebanyak 65,50%. Pada tahun 2022 kembali naik menjadi 77,82% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali mencapai 62,2%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 67,8%. Lebih jelasnya persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dapat dilihat pada Tabel 102 :

Tabel 2-102 Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen (%)	102	65,50	77,82	62,2	67,8

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

Dengan tidak dipungut lagi retribusi atas uji KIR, maka ke depan diharapkan lebih banyak lagi kendaraan yang mematuhi dalam melakukan uji KIR kendaraannya.

c. akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Berdasarkan data akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2019 adalah C artinya masih kurangnya sarana dan prasarana Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada tahun 2020-2022 meningkat menjadi akreditasi B, Pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi akreditasi A. Hal ini dikarenakan adanya penambahan alat untuk Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Untuk lebih jelasnya Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 103.

Tabel 2-103 kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Nilai	B	B	B	A	A

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi

Telekomunikasi terintegrasi adalah sistem transmisi informasi dari point-to-point atau point-to-multipoint melalui jarak. Aspek kunci yang membedakan sistem telekomunikasi terintegrasi dari sistem lain adalah konsep penggunaan berbagai format. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah diperlukan sarana telekomunikasi terintegrasi. Sasaran dari telekomunikasi terintegrasi ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk lebih jelasnya persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2-104 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan data, persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 sudah memiliki jaringan terintegrasi. Meskipun sudah memiliki jaringan terintegrasi, namun jaringan pada beberapa OPD tidak aktif karena prasarana Terminal Gunung Medan mengalami kerusakan dan kekuatan jaringan yang diberikan kepada OPD masih lemah karena memakai sistem radio dan tidak memakai sistem fiber optik.

b. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya mulai dari OPD sampai ke nagari. Model aplikasi yang dikembangkan baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan baik yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilayani mandiri oleh OPD. Lebih jelasnya Jumlah



sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2-105 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100	100	100	100	100
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	100	100	100	100	100
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	21	21	21	21	21

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan data capaian persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 sudah semua OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dan mulai tahun 2020 sudah seluruh OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan. Begitu juga di tingkat nagari, persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan meningkat.

- c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2-106 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	%	70.73	68,78	100	-	100



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Jumlah Sasaran	Orang	152.911	152.911	-	-	
Jumlah Penduduk	Orang	216.202	226.265	228.801	237.724	

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan data terlihat bahwa persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020 sebanyak 70,73% dan menurun pada tahun 2021 sebanyak 68,78%. Berdasarkan data terjadi penurunan akibat dari penggunaan data jumlah penduduk sasaran tahun 2020 dan tahun 2021 sama sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan. Dan di tahun 2024 sudah semua masyarakat dapat mengakses informasi publik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. persentase Koperasi Sehat

Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kinerja koperasi dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan jati diri koperasi. Penilaian ini dilakukan terhadap KSP/USP aktif. Dalam perkembangannya predikat sehat untuk usaha simpan pinjam koperasi sangat penting karena mengindikasikan bahwa koperasi tersebut telah memiliki sistem manajemen yang baik. Perkembangan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.107.

Tabel 2-107 Jumlah Koperasi Sehat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi Sehat	Koperasi	30	33,3	47,77	59,70	68,66

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase koperasi sehat pada tahun 2024 sebesar 68,66% hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya sebesar 59,70%. Pada tahun 2024 jumlah koperasi yang tergolong sehat berjumlah 46 koperasi merupakan hasil peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 40 koperasi dari 67 koperasi yang ada di Dharmasraya. Hal ini bisa tercapai juga karena adanya pembinaan dan pengawasan serta kontribusi tenaga pendamping koperasi dari DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Salah satu indikator penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi adalah manajemen dari koperasi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kesehatan koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan



Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi, Capaian yang tergolong sangat berhasil ini tidak terlepas dari adanya fasilitasi dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Sumatera Barat. Namun dalam pencapaian indikator ini masih terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya SDM dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan penilaian koperasi, dan minimnya anggaran sehingga hanya sedikit Koperasi yang dapat dilakukan PenKes.

b. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha diartikan sebagai usaha mikro yang sudah naik kelas sesuai kriteria. Gerakan UMKM naik kelas merupakan salah satu akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam membangun daya saing UMKM. Pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM, mengembangkan dan memperkuat seluruh potensi UMKM agar bisa terus berkembang dan naik kelas. Jumlah pelaku usaha makro menjadi wiraswasta di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2-108 Jumlah pelaku usaha mikro menjadi wirausaha

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	41,5	58,55	60,18
Jumlah UMKM yang menjadi wirausaha	unit	631	900	925
Jumlah UMKM	unit	1537	1537	1537

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2025

Pada tabel terlihat realisasi Persentase usaha mikro yang menjadi wirusaha pada tahun 2022 adalah 41,05% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 58,55 %, dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 60,18%. Beberapa indikator UMKM naik kelas diantaranya, usahanya menjadi formal, total penjualan dan aset meningkat. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan dorongan menjadikan pelaku usaha mikro bisa naik menjadi usaha kecil. Pada tahun 2024, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menargetkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 60% pelaku usaha dan saat ini telah terealisasi sebesar 60,18 % pelaku usaha mikro, lebih besar dari yang ditargetkan atau capaian 100,30 % dengan kategori capaian Memuaskan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sebesar Rp. 148.462.000.000 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Dilihat pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lebih

jelasan perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2-109 Nilai realisasi Investasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai realisasi Investasi	rupiah	148.462.000.000	196.395.700.000	423.750.000.000	1.126.000.000.000	1.228.327.091.106

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Realisasi Investasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun terkait dengan permasalahan Pandemi Covid-19 maka investasi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 nilai investasi kembali meningkat. Nilai realisasi investasi pada tahun 2023 dengan target Rp. 555 M terealisasi Rp. 1,126 Triliun dengan kategori cukup berhasil. Sedangkan pada tahun 2024 nilai realisasi investasi dengan target Rp. 1,2 Triliun terealisasi Rp. 1,228 Triliun.

- b. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal
- Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2-110 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	persen	0,32	1,96	4,24	66,9	9,03

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal tertinggi tercatat di tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021. Kondisi tersebut juga terkait dengan Pandemi Covid-19. Dan ditahun 2022 pertumbuhannya kembali baik menjadi 4,24 persen, begitu juga pada tahun 2023 meningkat sebesar 66,9%. Pada tahun 2024 persentase pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal sebesar 9,03%.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Jumlah cabang olahraga yang aktif

Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Bisa Tercapai adalah Jumlah Cabang Olahraga yang terlaksana dan secara aktif dan diikuti oleh para atlet. Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa cabang olahraga yang aktif seperti paralayang, karate, volly dan beberapa cabor lainnya secara umum



sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya ke luar daerah. Jumlah cabang olah raga yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2-111 Jumlah cabang olahraga yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabang	33	33	35	25	21

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 s.d. 2022 jumlah cabang olahraga yang aktif terus meningkat. Dari 33 buah pada tahun 2020 sampai menjadi 35 cabang olah raga di tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah cabang olah raga yang aktif mulai menurun hanya 25 cabang. Dan, pada tahun 2024 jumlah cabang olahraga yang aktif hanya 21 cabang.

b. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu mendukung pencapaian prestasi olahraga di tingkat provinsi. Dukungan tersebut berupa pengiriman atlet-atlet terbaik untuk mengikuti pertandingan olahraga tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2-112 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabang	-	6	21	15	15

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Pada tahun 2020 tidak ada prestasi yang didapat dari cabang olahraga tingkat Provinsi yang diikuti. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya membina atlet-atlet daerah untuk dapat bersaing ke depannya di tingkat provinsi.

c. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional adalah Jumlah cabang olahraga yang diikuti, berprestasi di tingkat nasional mendapatkan medali (emas, perak, perunggu). Kabupaten Dharmasraya mengirimkan atlet untuk cabang olah raga yang berprestasi di tingkat nasional tahun 2023 sebanyak 4 cabang olahraga. Angka ini menurun dari tahun 2022, dimana Kabupaten Dharmasraya mengikuti 7 cabang olah raga berprestasi tingkat



nasional. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional pada tahun 2023 sebanyak 4 cabang olahraga dari target tersebut terealisasi sebanyak 4 cabang atau sebesar 100 % dimana cabang yang berprestasi tersebut adalah cabang olahraga taekwondo, cabang gulat, cabang olahraga volley dan cabang olahraga aerosport dan paralayang.

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2-113 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabang	-	3	7	4	6

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Pada tahun 2024 jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional meningkat dari tahun 2023 dengan perolehan 4 cabang olahraga menjadi sebanyak 6 cabang olahraga, meliputi cabang olahraga PELTI, cabang olahraga taekwondo, IMI, Gulat, volley ball, dan aerosport.

d. Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Jumlah organisasi pemuda yang aktif adalah Jumlah organisasi pemuda yang aktif berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah organisasi pemuda yang aktif tahun 2023 dan 2024 sebanyak 236 organisasi, sementara pada tahun 2022 berjumlah 245 organisasi. Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2-114 Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	0	108	246	236	236

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah organisasi pemuda yang aktif, pada tahun 2020, kondisinya masih 0 (nol), sementara capaian kinerja pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan 246 organisasi dan pada tahun 2023 dan 2024 capaian indikator kinerja mengalami penurunan 236. Dalam hal ini adanya organisasi pemuda yang tidak aktif sebanyak 10 organisasi.

e. Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi adalah Jumlah pemuda/kepemudaan yang mendapatkan prestasi dalam mengikuti ajang



kepemudaan. Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2-115 Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	orang	0	19	25	30	35

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Pada Tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi pada tahun 2020, kondisinya masih 0 (nol) dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebanyak 19 orang jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, 2024 mengalami kenaikan.

f. Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Jumlah organisasi pramuka yang Aktif adalah Jumlah organisasi pramuka yang aktif berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Jumlah organisasi pramuka yang aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2-116 Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah organisasi pramuka yang aktif	organisasi	30	30	210	210	210

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Pada Tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah organisasi pramuka yang aktif pada tahun 2019, 2020,2021 kondisinya masih 0 (nol) dan capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 210 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 210 orang, capaian kinerja ini dari tahun 2022 ke tahun 2024 masih tetap.

g. Jumlah pelatih bersertifikat

Pelatih Bersertifikat adalah Jumlah pelatih yang telah mengikuti pelatihan memiliki bersertifikat. Pelatih ialah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.117.



Tabel 2-117 Jumlah pelatih bersertifikat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelatih bersertifikat	orang	0	0	18	20	24

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

Tahun 2024 target pelatih bersertifikat sebanyak 30 orang dapat terealisasi sebesar 80% sebanyak 24 orang, sertifikat kepelatihan dimaksud dimelalui beberapa pelatihan di berbagai cabor misal nya sertifikat kepelatihan sepak bola sebanyak 17 orang dari berbagai tingkat lisensi ada C dan D, kedua sertifikat pelatih taekwondo sebanyak 1 orang dan sisa adalah pelatih renang

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Perkembangan dari indikator urusan pemerintahan bidang statistik berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Dharmasraya Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya dari tahun 2021-2024.

Perkembangan Buku Sumbar Dalam Angka dan Buku PDRB masih dilaksanakan oleh BPS, karena sesuai dengan Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri nomor 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada dua Peraturan itu dinyatakan kalau OPD yang menangani Statistik sektoral sebagai wali data. Selain itu, berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Secara umum dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya persentase ketersediaan data statistik sektoral dapat dilihat pada tabel 2.118 :

Tabel 2-118 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase ketersediaan data Statistik sektoral dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan kinerja 100%.

b. Jumlah Nagari Statistik

Nagari statistik yaitu nagari yang mengembangkan basis data secara statistik. Launching Nagari Statistik pertama di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada tahun 2018 di Nagari Sungai Duo dan tahun 2020 mulai dikembangkan ke Nagari Gunung Medan, Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur. Jumlah nagari statistik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2-119 Jumlah Nagari Statistik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Nagari Statistik	nagari	4	4	4	4	33

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dengan adanya nagari statistik yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal dan Level pengambil kebijakan nagari yg dipilih tidak mengerti sementara kegiatan ini merupakan pilot project nasional.

c. Jumlah Kecamatan Statistik

Kecamatan statistik yaitu kecamatan yang mengembangkan basis data secara statistik. Pengembangan Kecamatan Statistik dimulai tahun 2020 di Kecamatan Sitiung, namun belum dilakukan launching sampai saat ini. Jumlah kecamatan statistik di KabupatenDharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2-120 Jumlah Kecamatan Statistik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Jumlah kecamatan statistik sampai saat ini baru 1 kecamatan yaitu Kecamatan Sitiung. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan optimal.



15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Aplikasi yang dilakukan asesment

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Aplikasi yang dilakukan asesment di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2-121 Aplikasi yang dilakukan asesment

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Aplikasi yang dilakukan asesment	Unit	4	4	0	0	0

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Aplikasi yang dilakukan asesment di Kabupaten Dharmasraya baru sebanyak 4 unit. Assesment dilakukan dengan Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2018 yaitu website utama dan seluruh website OPD, Website server, Aplikasi LPSE dan Aplikasi PPID, tahun 2018 sampai 2022 belum dilakukan penambahan assessment. Permasalahan saat ini yaitu masih minimnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.

b. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2-122 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	persen	5,26	5,26	5,26	-	84,21
Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	OPD	2	2	2	-	32
Jumlah Perangkat Daerah	OPD	38	38	38	-	38

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



Berdasarkan data diatas terlihat bahwa persentase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital tahun 2020 hingga tahun 2022 masih terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang menggunakan sertifikat digital. Dan pada tahun 2024 OPD yang menggunakan sertifikat sudah mencapai 82,21% atau sudah 32 Perangkat Daerah yang menggunakan sertifikat digital.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Jumlah group kesenian daerah yang dibina adalah Jumlah group/ sanggar seni daerah dibawah binaan Disbudparpora Kab.Dharmasraya. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal. Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.123.

Tabel 2-123 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	30	40	45

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah group kesenian daerah yang dibina dari tahun 2020 belum ada dilakukan pembinaan dan pada tahun 2021, tahun 2022 capaian kinerja dari indicator ini sebesar 30 grup yang dilakukan pembinaan, dan dari tahun 2022 ke tahun 2024 mengalami kenaikan, Grup Kesenian Daerah yang telah terdaftar di Dinas Budparpora telah dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas, sehingga ilmu yang didapatkannya dapat menunjang kegiatannya dilapangan Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan sampai tahun 2024 sebanyak 45 group.

b. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan adalah Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan dan dibawah pengawasan Disbudparpora. Jenis Kesenian adalah macam-macam kesenian yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.124.



Tabel 2-124 Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	jenis	30	30	14	16	18

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2025

Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan adalah jumlah jenis kesenian atau Sanggar kesenian yang terdaftar di daerah yang mendapat binaan dari Dinas terkait dengan tujuan untuk dilestarikan. Pelestarian ini berupa mengikutsertakan dalam penampilan hari besar Daerah seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten, Memperingati 17 Agustus dan agenda – agenda pemerintah daerah seperti pisah sambut dan peresmian serta penyambutan tamu daerah. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah kesenian daerah yang dilestarikan sampai tahun 2024 sebanyak 18 jenis.

c. Persentase lembaga adat yang aktif

Persentase lembaga adat yang aktif adalah Tingkat lembaga adat yang aktif melaksanakan kegiatan. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang berada di wilayah kabupaten Dharmasraya. Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Perkembangan lembaga adat yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2-5025 Persentase lembaga adat yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	100	100	80	85	89

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2025

Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2021. Namun di tahun 2023 turun menjadi 85 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 89%. Presentase Lembaga Adat yang Aktif dalam kegiatannya adalah :

1. Melakukan Pembinaan dan memberikan Insentif terhadap Rajo. KAN dan Penghulu Suku yang telah masuk dalam Surat Keputusan Bupati setiap Tahunnya.
2. Melakukan Renovasi dan Pembangunan Rumah Adat penghulu Suku sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
3. Melakukan pembinaan terhadap Bundo Kandung Kabupaten, Bundo Kandung Kecamatan dan Nagari dengan mengadakan Sosialisasi dan Lomba Sumbang Duo Baleh Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.



d. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan adalah Jumlah cagar budaya yang ditetapkan milik daerah. Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 0-51 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	35	21	45	3	4

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2025

pada tahun 2024 adalah 4 Unit dan realisasinya adalah 4 Unit capaian untuk indikator ini adalah 100%. Cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/397/KPTS BUP/2024 Ditetapkan Pada Tanggal 3 Desember 2024, Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/398/KPTS-BUP/2024 Ditetapkan Pada Tanggal 3 Desember 2024, Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/399/KPTS-BUP/2024 Ditetapkan Pada Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/400/KPTS-BUP/2024 Ditetapkan Pada Tanggal 3 Desember 2024 diantaranya adalah: 1) Arca Bodhisattwa Awalokiteswara Amoghapasa sebagai Benda Cagar Budaya. 2) Arca Bodhisattwa Awalokiteswara Amoghapasa sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 3) Percandian Pulau Sawah sebagai Situs Cagar Budaya. 4) Situs Percandian Pulau Sawah sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

e. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah Jumlah cagar budaya yang terdaftar dan dilestarikan dibawah pengawasan Disbudparpora. Maksud dilestarikan adalah dijaga kelangsungannya. Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 106 Unit tersebut, telah dilakukan pelestarian oleh Dinas Budparpora dengan cara Renovasi dan pembersihan lainnya. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 0-52 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	jenis	37	56	101	102	106

Sumber: Dinas Budparpora, Tahun 2025



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan terus meningkat dari tahun 2020 sebanyak 37 unit dan sampai tahun 2024 sudah berjumlah 106 unit.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat. Selain kunjungan ke perpustakaan daerah, juga dilakukan layanan kunjungan pustaka keliling ke sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 – 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Jumlah pemustaka mengalami peningkatan cukup tinggi karena pada tahun 2018 kunjungan Pustaka Keliling sudah sampai ke sekolah-sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, dan mulai tahun 2021 kembali meningkat sesuai dengan sudah berkurangnya dampak covid19. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.133.

Tabel 0-53 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	67.742	202.273	152.286	156.300	156.168

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2025

b. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan merupakan perbandingan antara Jumlah perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan terhadap Jumlah perpustakaan seluruhnya. Dilihat dari tahun 2020-2024, persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2024 telah mencapai 51,26%. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.134:

Tabel 0-54 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perpustakaan yang melaksanakan	Persen	6,25	9,19	38,68	44,57	51,26



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
manajemen perpustakaan						
Jumlah perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Perpustakaan	17	25	105	121	139
Jumlah perpustakaan seluruhnya	Perpustakaan	272	272	272	272	272

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2025

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah dan nagari sejak tahun 2020 s.d. 2024 :

a. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan antara Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku terhadap jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan data tahun 2020 – 2024 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, dimana pada tahun 2020 hanya 7,89% perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, dan pada tahun 2023 sudah mencapai 66,42%. Untuk lebih jelasnya perkembangan data Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.135:

Tabel 0-55 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7,89	47,37	47,37	68,42	78,95
Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	PD	3	21	21	26	
Jumlah perangkat daerah	PD	38	38	38	38	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2025

b. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan jumlah nagari yang mengelola arsip secara baku dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2024, dari 52 nagari



terdapat 24 nagari atau 46,15% nagari yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, dimana hanya 3 nagari yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya persentase nagari yang mengelola arsip secara baku tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.136:

Tabel 0-56 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	5,77	23,08	30,77	38,46	46,15
Jumlah Nagari yang mengelola arsip secara baku	Nagari	3	10	16	20	24
Jumlah Nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2025

2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.137.

Tabel 0-57 Produksi Perikanan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan	Ton	22.185	27.182	25.120	25.449	27.455

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2025

Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 dari 22.185 ton menjadi 27.455 ton. Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya yang terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung perikanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga perikanan di daerah dapat berkembang dengan baik. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan lele, ikan nila, ikan garing dan ikan khas Dharmasraya yaitu ikan bauang.



2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan adalah banyaknya orang yang melakukan kegiatan atau kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat fluktuatif, pada tahun 2020 sebanyak 6.164 orang dan mengalami peningkatan terus hingga tahun 2023 yaitu 188.463 orang. Namun jika dilihat data per tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6.164 orang akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan kunjungan wisatawan sejumlah 101.394 orang, dan kembali turun menjadi 71.550 orang dan tahun 2023 meningkat menjadi 188.463 orang dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 101.453 orang, ini disebabkan karena ada beberapa objek wisata yang ditutup karena biaya operasional dilapangan sangat besar. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.138:

Tabel 0-58 Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan wisatawan	orang	6.164	101.394	71.550	188.463	101.453

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

b. Tingkat hunian akomodasi

Tingkat hunian akomodasi atau disebut juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.139.

Tabel 0-59 Tingkat hunian akomodasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat hunian akomodasi	persen	9,95	22,05	69,75	61.514	22.102
Jumlah Malam Kamar yang Dihuni	kamar	9.282	22.210	68.860	-	
Jumlah Malam Kamar yang Tersedia	kamar	93.240	100.740	98.723	-	

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

c. Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Di Kabupaten



Dharmasraya sudah terdapat sebanyak 47 pelaku ekonomi kreatif. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.140:

Tabel 0-60 Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	unit	32	32	36	45	47

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

Jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 32 unit akibat pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi kreatif, terutama pada subsektor yang bergantung pada interaksi fisik, seperti seni pertunjukan, pariwisata, kuliner, dan fashion. Banyak pelaku ekonomi kreatif mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hingga harus menutup usaha. Namun, setelah pandemi mereda, terjadi proses pemulihan yang didorong oleh berbagai faktor dan kebijakan.

d. Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Jumlah lembaga pada daya tarik pariwisata yang dibina mengalami peningkatan dari 7 lembaga pada tahun 2019 menjadi 21 lembaga pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 24 lembaga pada daya tarik wisata yang dibina. Untuk lebih jelasnya jumlah lembaga pada daya tarik pariwisata yang dibina di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 141.

Tabel 0-61 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	12	16	21	24	

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dibidang pertanian komoditi padi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya. Dengan total luas sawah sebanyak 6.023 Ha berdasarkan PERDA LP2B No. 18 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya berkeinginan bisa memenuhi kebutuhan akan pangan bagi masyarakat sehingga tercapainya kemandirian pangan.



Selain padi komoditi pertanian di Kabupaten Dharmasraya yaitu jagung, kelapa sawit, karet dan peternakan. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi komoditi pertanian di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.142:

Tabel 0-62 Produksi Sektor Pertanian

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	ton	68.652	40.797	56.290,25	53.868,84	57.300,45
	Produktivitas	ton/ha	4,64	4,46			4,578
	Luas panen	ha	14.783	9.149			12.516,48
2	Produksi jagung	ton	4.069	12.125	2.553,12	2.755,39	4.290,49
	Produktivitas	ton/ha	5,79	4,79			8,294
	Luas panen	ha	698	2.093			517,3
3	Produksi kelapa sawit	ton	104.992	103.279,18	103.636,76	123.104,94	127.906,45
	Produktivitas	ton/ha	4,98	4,60			24.764,62
	Luas panen	ha	22.441,85	32.743,64			5,165
4	Produksi karet	ton	29.689	2.366,76	24.758,03	32.712,38	33.870,33
	Produktivitas	ton/ha	0,78	0,88			0,897
	Luas panen	ha	34.278,00	3.758,90			37.741,28
5	Produksi Daging	Ton	6.340	1.558,80	1.535,78	1.697,15	1.786
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	49.043	51.380	44.971	42.612	41.684

Sumber : Dinas Pertanian, Tahun 2025

Produksi Padi Kabupaten Dharmasraya sangat didukung oleh irigasi Batanghari, sehingga produksi padi cukup memadai, begitupun dengan sawit dan karet juga masih menjadi komoditi yang unggulan daerah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi padi tahun 2022 sebesar 15.493,08 ton atau sebesar 37,98% dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi sebesar 2.421,41 ton atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan produksi padi terjadi karena adanya fenomena El-Nino yang terjadi yang menyebabkan kekeringan dan terdapat perbaikan jaringan irigasi sekunder yang pengerjaannya memerlukan waktu yang lama sehingga menghambat proses pengolahan tanah dan jadwal tanam menjadi mundur tidak sesuai dengan yang direncanakan. dalam masa Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, pada tahun ke-empat telah mencapai realisasi sebesar 51,55% dari total jumlah target perduksi jagung yang ditetapkan sebesar 404.000 ton selama 5 tahun sehingga masih terdapat 48,45% yang harus dicapai lagi untuk memenuhi capaian keseluruhan dari jumlah target produksi padi tahun 2021-2026.

Potensi produksi jagung sangat besar di Kabupaten Dharmasraya karena masih banyak lahan yang bisa ditanami jagung, namun minat petani untuk menanam jagung sangat rendah dikarenakan faktor harga benih jagung yang mahal. Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya hanya mengandalkan bantuan benih jagung dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN karena kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian



realisasi kinerja produksi jagung tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 hasil produksi jagung meningkat signifikan dari pada tahun 2023 sebesar 4.290,49 ton.

Bahwa terjadi peningkatan produksi kelapa sawit (kebun rakyat) tahun 2024 sebesar 4.801,51 ton atau sebesar 3,90% dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2023 sedangkannya jika dibandingkan dengan pada tahun 2021 pada awal masa renstra terjadi peningkatan produksi kelapa sawit (kebun rakyat) sebesar 24.627,27 ton atau sebesar 23,85%.

Terjadi peningkatan produksi karet tahun 2024 sebesar 1.157,95 ton atau sebesar 3,54% dibandingkan dengan produksi karet Tahun 2023 sedangkannya jika dibandingkan dengan pada tahun 2021 pada awal masa renstra terjadi peningkatan produksi karet sebesar 7.982,06 ton atau sebesar 30,83%.

Untuk produksi daging, terjadi penurunan tahun 2021 sebesar 23,02 ton atau sebesar 1,48% dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi kenaikan produksi daging sebesar 1.61,37 ton atau sebesar 10,51% dibandingkan dengan Tahun 2022. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada tahun 2023 yaitu 1.786 ton.

Terjadi penurunan populasi sapi/kerbau tahun 2022 sebesar 6.409 ekor atau sebesar 12,47% dibandingkan dengan populasi sapi/kerbau Tahun 2021 dan tahun 2023 terjadi penurunan populasi sapi/kerbau sebesar 2.359 ekor atau sebesar 5,25% dibandingkan dengan Tahun 2022. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 41.684 ekor. Penurunan populasi sapi/kerbau ini disebabkan karena terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit endemik seperti Jembrana juga masih mengancam populasi ternak di Kabupaten Dharmasraya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Pasar rakyat yang dimaksud yaitu pasar tradisional atau pasar nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.143.

Tabel 0-63 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	48,63	48,63	48,63	48,63	37,83

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2025

Capaian kinerja ini sudah memenuhi target yang ada pada PK 2024 namun belum memenuhi target tahun 2024 yang ada pada renstra yaitu sebesar 41 %,



hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi dana untuk melakukan pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat pada tahun anggaran 2024, baik dari APBN (DAK) maupun APBD Provinsi. Untuk revitalisasi tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten yakni dari Pokir DPRD dan Bantuan dana dari Rumah BUMN (PLN). Sedangkan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah memasukkan kedalam Renstra (RPJMD) maupun kedalam Renja (RKPD) namun karena terkendala kondisi keuangan daerah yang kurang baik sehingga kegiatan ini belum bisa diakomodir sesuai harapan untuk memenuhi target renstra tahun 2024. Sehingga target indikator kinerja sasaran strategis dirubah pada PK perubahan 2024 menjadi 37 %. Terelisasi sebesar 37,83 % dengan pencapaian kinerja, sebesar 102,24 % dengan kategori prediket memuaskan .

b. Alat UTTP yang Beratanda tera sah

UTTP merupakan singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. Pelaksanaan tera ulang UTTP adalah dalam rangka perlindungan konsumen atas pembelian barang. Capain indikator persentase alat UTTP yang beratanda tera sah dapat dilihat pada Tabel 2.144.

Tabel 0-64 Alat UTTP yang Beratanda tera sah

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Persentase alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	44	44,77	67,41

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2025

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Persentase peningkatan omzet IKM

Persentase IKM Dengan Peningkatan Omzet adalah salah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari sisi Peningkatan Omzet IKM Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan omzet tahun sebelumnya.

Persentase peningkatan omzet IKM sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian dan kondisi keuangan masyarakat yang ada didaerah. Semakin bagus kondisi perekonomian maka akan semakin bagus juga daya beli masyarakat yang akan langsung berefek pada peningkatan omzet IKM, begitu juga sebaliknya, apabila daya beli masyarakat menurun maka omzet IKM juga akan menurun. Dinas koperasi UKM dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian sudah melakukan banyak upaya agar omzet IKM kita senantiasa mengalami peningkatan. Dengan melakukan pendampingan, pemberdayaan, pengawasan demi peningkatan daya saing IKM. Untuk lebih



jelasan Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 0-65 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	6,50	9,26	8,1	8,54	11,4
Omzet IKM tahun n	Rupiah	103.170.000	160.793.698	173.193.760.000	187.992.280.000	209.525.690.000
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah	96.836.486	147.170.356	160.793.693.000	173.193.760.000	187.992.280.000

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2025

- b. Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar
IKM yang memiliki legalitas sesuai standar adalah syarat mutlak untuk perkembangan IKM selanjutnya. Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.146.

Tabel 0-66 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	%	9,6	12,5	73,14	75,68	80,30
Jumlah IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Unit	76	111	700	800	935
Jumlah IKM seluruhnya	Unit	789	888	957	1057	1164

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2025

Pada tabel terlihat persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 75,68%. Sedangkan tahun 2024 adalah 80,30%. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian sudah mengupayakan banyak hal agar capaian kinerja indikator ini semakin meningkat setiap ahunnya. Dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada IKM bahwa pentingnya untuk melengkapi semua legalitas izin usaha yang juga merupakan bagian dari usaha meningkatkan daya saing IKM itu sendiri. Selain itu juga memberikan fasilitasi dan percepatan pemberian rekomendasi dalam pengurusan legalitas usaha IKM tersebut. Namun masih banyak ditemui bermacam kendala dalam pelaksanaannya



6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah ek. transmigrasi yang ada di Sumatera Barat. Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya telah berlangsung sejak tahun 1965 dan menjadi salah satu dari empat kabupaten penerima transmigrasi di Sumatera Barat. Selama periode tahun 2020-2024 kinerja urusan pilihan transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya tidak dilaksanakan karena program transmigrasi tidak terdapat di Kabupaetn Dharmasraya.

Untuk periode tahun 2025-2029 direncanakan pembangunan kawasan transmigrasi di Padang Hilalang Kecamatan Sembilan Koto.

2.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Untuk menentukan bobot penilaian/skor capaian kinerja masing-masing indikator pada LPPD dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), dengan sasaran penilaian sebagai berikut :

- 1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD;
- 3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD;
- 4) Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan;

Adapun penilaian:

1. Predikat AA dengan bobot > 90 – 100 : sangat memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.



2. Predikat A dengan bobot > 80 – 90 : memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3. Predikat BB dengan bobot > 70 – 80 : sangat baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4. Predikat B dengan bobot > 60 – 70 : baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5. Predikat CC dengan bobot > 50 – 60 : cukup (memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6. Predikat C dengan bobot > 30 – 50 : kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat..
7. Predikat D dengan bobot > 0 – 30 : sangat kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.147.

Tabel 0-67 Nilai LPPD

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rangking Skor status	Rangking	-	43	9	-	
	indeks	-	2,88	3,5036	-	
	Tinggi/ sangat tinggi	-	Sedang-	Tinggi	-	

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024, KepMendagri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 dan KepMendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

Catatan : Data Tahun 2020 tidak tersedia karena Covid-19, dan data Tahun 2023 sedang proses penilaian LPPD oleh Kemendagri



Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke-43 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sementara pada Tahun 2022 meningkat menjadi peringkat ke-9.

Perkembangan realisasi indikator LPPD dari tahun 2019-2022 sangat memuaskan, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Adanya komitmen dari pimpinan kepada seluruh kepala OPD terkait data LPPD yang berkualitas sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, kinerja yang maksimal dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data.
2. Verifikasi data capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja, meliputi validasi capaian kinerja dan verifikasi elemen data yang dilakukan secara mandiri (Self Assesment-Evaluasi Mandiri).
3. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi capaian kinerja melalui perbandingan dengan data-data tahun sebelumnya, baik data-data yang disampaikan oleh perangkat daerah provinsi maupun data agregasi dari kabupaten kota.

b. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai alat pengukur sejauh mana penerapan SAKIP di suatu daerah, ditetapkan 5 komponen penilaian SAKIP, Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.

Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya 20.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 yaitu 67,24 dengan predikat "B". Hal ini menunjukkan bahwa



implementasi akuntabilitas kinerja "Baik" yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik.

Untuk melihat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.148:

Tabel 0-68 Nilai SAKIP

Indikator	Satuan	2020	2021	2022*	2023	2024
Nilai hasil evaluasi	AA/A/ BB/B/CC	B	B	B	B	B
Tingkat akuntabilitas kinerja	indeks	63,44	63,98	64,07	64,65	67,24
Perencanaan Kinerja	bobot	19,35	19,42	22,20	22,28	22,75
Pengukuran Kinerja	bobot	16,48	16,48	18,19	18,64	19,54
Pelaporan Kinerja	bobot	10,58	10,61	10,78	10,81	11,52
Evaluasi internal	bobot	6,47	6,37	12,90	12,92	13,43
Capaian kinerja	bobot	10,56	11,1			
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	bobot			12,90		

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Keterangan * = terjadi perubahan penilaian evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selama 5 tahun terakhir, nilai SAKIP di Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada nilai B, artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Namun dilihat dari nilainya masih menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2022 sebesar 64,07 dan tahun 2023 menjadi 64,65. Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 67,24. Sesuai dengan surat Kemenpan Nomor B/875/AA.05/2022, maka hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan sub kkomponen serta kriteria penilaiannya.

c. Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan; penataan perundang-undnagan; penataan penguatan organisasi; penguatan tata laksana; penataan SDM aparatur;



penguatan akuntabilitas kinerja; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu birokrasi yg bersih dan akuntabel; birokrasi yg efektif dan efisien; serta birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan perUUan
3. Penataan penguatan Organisasi
4. Penguatan Tata laksana
5. Penataan SDM aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu :

1. Birokrasi yg bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yg efektif dan efisien
3. Birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi suatu daerah dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi daerah tersebut. Pencapaian pelaksanaan RB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.149 dibawah ini:

Tabel 0-69 Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)	nilai	44,7	46,58	50,20 (CC)	57,28 (CC)	

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Dari hasil penilaian tersebut, maka pemerintah Dharmasraya sudah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform tetapi mengalami penurunan nilai pada total komponen hasil. Sehingga masih perlu meningkatkan upaya lebih baik lagi dalam melaksanakan reformasi agar mencapai target indeks lebih baik lagi.

2. Sekretariat DPRD

a. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1)



dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya. Sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Perkembangan agenda DPRD yang difasilitasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.150.

Tabel 0-70 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	95	100	97,64
Jumlah agenda DPRD yang difasilitasi	agenda	125	147	-	-	
Jumlah agenda DPRD seluruhnya	agenda		125	147	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa agenda DPRD yang dilaksanakan, mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 seluruhnya difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Namun di tahun 2022 hanya 95% agenda DPRD yang dapat difasilitasi oleh sekretariat DPRD, sedangkan tahun 2023 semua agenda DPRD dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Dan pada tahun 2024 agenda DPRD dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yaitu 97,64%.

3. Perencanaan

Dilihat berdasarkan capaian sasaran perencanaan secara keseluruhan, kinerja perencanaan dilaksanakan oleh Bapperida. Secara keseluruhan capaian kinerja perencanaan berada pada kategori memuaskan dan sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 0-71 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian sasaran RPJMD	%	90	104.05	115.61	Memuaskan
		Capaian sasaran Renstra PD	%	90	102.70	114.11	Memuaskan
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	90	89.06	98.96	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	%	23	22.28	96.87	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	%	20	18.64	93.20	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida, Tahun 2025



4. Keuangan

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Adapun capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.151.

Tabel 0-72 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2025

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut Pemerintah secara berturut turut telah menerima WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Dharmasraya sangat baik.

b. Rata-rata ketergantungan dana transfer

Untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya masih bergantung pada sumber pendanaan pembangunan dari dana transfer. Adapun rata-rata ketergantungan dana transfer di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.152.

Tabel 0-73 Rata-rata ketergantungan dana transfer

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	91,63	85,73	80, 67	88,59	

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2025

Dilihat dari perkembangan rata-rata ketergantungan APBD terhadap dana transfer terlihat masih tinggi. Penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta turunnya total alokasi dana transfer dari pusat. Sehingga dengan kedua faktor tersebut menyebabkan turunnya angka ketergantungan APBD terhadap dana pusat.

c. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dilihat perkembangan SILPA terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 menunjukkan angka peningkatan. Pada tahun 2019 hanya 0,38% SILPA terhadap APBD, sementara pada tahun 2023 mencapai 5,57% dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase SILPA terhadap APBD tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.153:

Tabel 0-74 Persentase SILPA terhadap APBD

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,85	7,66	4,46	5,57	
Jumlah SILPA terhadap APBD	Juta Rp	8.337,43	70.209,49	41.912	46.430	
Jumlah belanja APBD	Juta Rp	985.747,17	917.045,66	939.201	822.042	

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2024

Persentase Silpa tahun 2023 dibandingkan tahun 2022-2023 terlihat lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh nilai SILPA tahun 2022 jauh lebih kecil dibandingkan SILPA yang diterima tahun 2021.

5. Kepegawaian

a. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN pada dasarnya merupakan respon proaktif dan sekaligus mandat yang dilakukan oleh BKN untuk menjawab kebutuhan tingkat profesionalitas ASN melalui standarusasi pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan pokok dari program ini untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan serangkaian langkah kegiatan identifikasi dan pemetaan terhadap



hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 0-75 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58,04	62,87	62,86	83,19	(sedang dalam penilaian)
Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi	Nilai	12,53	13,39	-	-	
Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi	Nilai	15,49	20,57	-	-	
Indeks Profesionalisme dimensi kinerja	Nilai	24,8	23,92	-	-	
Indeks Profesionalisme dimensi disiplin	Nilai	5	5	-	-	

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Perkembangan nilai indeks profesionalisme ASN (IP ASN) cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Sedangkan untuk IP ASN tahun 2024 sedang dalam proses penilaian oleh BKN.

b. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana tahunan instansi yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pada tahun 2023 dan 2024 kinerja persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 semakin baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2022 capaian kinerja hanya mencapai 63,5 persen. Adapun penyebab tidak maksimalnya capaian kinerja pada penyusunan SKP pada tahun lalu antara lain masih banyak ASN yang belum memahami cara penyusunan SKP yang benar disebabkan adanya perubahan tata cara penyusunan SKP dari Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2022. Selain itu juga sering berubahnya regulasi tentang penilaian kinerja ASN, sehingga pemahaman ASN terhadap regulasi yang baru masih kurang. Disamping itu, masih rendahnya kepedulian ASN dalam menyusun SKP. Agar dapat memenuhi target yang diinginkan dalam penyusunan SKP, maka telah dilakukan pelatihan (coaching) ke setiap



OPD. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 0-76 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	99,35	14,39	63,5	96	94
Jumlah ASN yang menyusun SKP	Jumlah	3533	506	2.164	3940	4315
Jumlah pegawai	Jumlah	3556	3516	3.408	4104	4580

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja pada penyusunan SKP tahun 2024 dinilai berhasil dan mencapai target. Dimana, untuk pengukuran capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah SKP yang dientrikan ke SIASN dengan jumlah ASN. Dimana jumlah SKP yang dientrikan ke SIASN berjumlah 4315, sedangkan jumlah ASN adalah 4580. Dengan demikian realisasi kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni 94 persen.

c. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi merupakan perbandingan antara jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi terhadap total jumlah pegawai. Untuk menghitung persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan jumlah jabatan struktural.

Pada tahun 2024 jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi berjumlah 276 orang dengan rincian: eselon II sebanyak 26 orang, eselon III sebanyak 122 orang, dan eselon IV sebanyak 128 orang. Sedangkan jumlah jabatan struktural yang tersedia sebanyak 337 jabatan. Sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 81,9 persen. Sedangkan untuk target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 81.9 persen. Dengan demikian capaian kinerja berhasil mencapai target. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.156 di bawah ini.

Tabel 0-77 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	41,25	79,04	70	81,9	81,9
Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah	205	215	199	276	276
Jumlah pegawai	Jumlah	497	272	284	337	337

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan pada realisasi kinerja, yakni sebesar 81,9 persen dari target 81,9 persen, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022, capaian kinerja sebesar 70 persen, dan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

d. Persentase kasus ASN yang tertangani

Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari 4 kasus disiplin berat yang sudah terlaksana penjatuhan hukuman disiplinnya, 1 orang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang pembebasan dari jabatan, 1 orang sedang pemberhentian sementara, dan 1 orang penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Untuk pelanggaran disiplin sedang sebanyak 10 orang terkait pelanggaran tidak masuk kerja selama kurang dari 10 hari sudah ditindak lanjuti oleh atasan langsung dan pemanggilan oleh BKPSDM dan Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persentase kasus ASN yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Tabel 0-78 Persentase kasus ASN yang tertangani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah kasus yang diterima	Jumlah	5	83	12	30	14
Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah	5	83	12	30	14

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 dan 2021 terjadi peningkatan kasus. Tingginya kasus disebabkan karena banyaknya kepala OPD yang belum memahami tentang proses pembinaan PNS di lingkungannya sesuai dengan PP No. 94 tahun 2021 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2021. Agar pencapaian kinerja di tahun berikutnya sesuai yang diharapkan, maka BKPSDM akan melaksanakan kembali sosialisasi dan monitoring evaluasi ke OPD tentang PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Serta mensosialisasikan aplikasi IDIS yang sudah dilounching oleh BKN.

Disamping itu faktor yang mempengaruhi pembinaan Pegawai tidak terlepas dari pelaksanaan Absensi Online dan Pembayaran reward kinerja berupa



Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pelaksanaan Absensi Online dan Pembayaran TPP selama Tahun 2024 bisa dikatakan belum maksimal. Diharapkan ke depannya ini dapat menjadi fokus stake holder terkait untuk sehingga menunjang peningkatan kinerja dan disiplin PNS.

6. Pendidikan dan Pelatihan

a. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.158.

Tabel 0-79 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	Persen	33,63	42,12	49,04	85,01	81,33
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah	1196	1481	1617	3489	3728
Jumlah pegawai	Jumlah	3556	3516	3297	4104	4584

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 85,01 persen, namun tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 tidak ada dilaksanakan penerimaan CPNS, sehingga tidak ada pelaksanaan pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS. Disamping itu juga pada tahun 2023 masih kurangnya minat ASN dalam meningkatkan pengembangan kompetensi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja pada tahun 2023, salah satunya mengikuti tugas belajar. Keengganan ASN mengikuti tugas belajar ini disebabkan karena tidak adanya bantuan pendidikan dari pemerintah Daerah dan tidak dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya.

7. Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah untuk Peningkatan Pelayanan Publik; Pemberdayaan dan peran, serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah.

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

- Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif 60,01 - 100,00
- Inovatif 35,00 – 60,00
- Kurang Inovatif 0,01 - 34,99
- Tidak Dapat Dinilai 0

Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.159.

Tabel 0-80 Indeks inovasi daerah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah skor	indeks	3	48,07	57,84	55,61	63,
kategori	-	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2021-2024 termasuk pada kategori kabupaten yang inovatif.

2.4.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Tingkat Kapabilitas APIP

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP permasalahan dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (initial), level 2 (insfrastruktucture), Level 3 (integrated), Level 4 (managed) dan Level 5 (optimizing). Tingkat kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.160.

Tabel 0-81 Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2025

Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2018 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bisa mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sudah dilakukan penilaian dengan memperoleh level 3. Artinya Inspektorat sebagai oraganisasi sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan



strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan tetapi belum efektif.

- b. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefenisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 0-82 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	3	3	2,6	2,96	

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2025

Penilaian maturitas SPIP sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP, dan Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2019 dilakukan penilaian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3 sehingga berada pada level 3, sementara tahun 2022 berada pada nilai 2,6, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hampir mencapai level berkembang.

2.4.6. Unsur Kewilayahan

Untuk unsur kewilayahan merupakan kinerja dari Pemerintah Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Capaian indikator Unsur kewilayahan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari capaian sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan capaian indeks kepuasan masyarakat.

Tabel 0-83 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)

No	Kecamatan	REALISASI		
		2022	2023	2024
1	Kecamatan Asam Jujuhan	70,53	69,94	74,62
2	Kecamatan Koto Baru	66,1	77,39	78,15
3	Kecamatan Koto Besar	63,96	72,45	73,81
4	Kecamatan Koto Salak	60,61	67,18	69,33



No	Kecamatan	REALISASI		
		2022	2023	2024
5	Kecamatan Padang Laweh	66,1	67,94	71,94
6	Kecamatan Pulau Punjung	71,53	71,57	72,09
7	Kecamatan Sembilan Koto	65,02	61,08	62,62
8	Kecamatan Sitiung	60,93	61,08	66,08
9	Kecamatan Sungai Rumbai	72,62	72,37	78,12
10	Kecamatan Timpeh	71,41	60,05	69,89
11	Kecamatan Tiumang	65,83	61,46	69,89

Sumber : Bagian Organisasi Setda, Tahun 2025

Tabel 0-84 Capaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Kecamatan Asam Jujuhan	81,59	81,5	75,5
2	Kecamatan Koto Baru	80,7	80	81,5
3	Kecamatan Koto Besar	80,5	87,25	90,13
4	Kecamatan Koto Salak	80,61	80	75
5	Kecamatan Padang Laweh	77,09	80	81,2
6	Kecamatan Pulau Punjung	80,7	89,85	81,53
7	Kecamatan Sembilan Koto	80	89,85	80
8	Kecamatan Sitiung	81,64	87,25	85,53
9	Kecamatan Sungai Rumbai	78,18	87,25	88,56
10	Kecamatan Timpeh	80,5	87,25	80,7
11	Kecamatan Tiumang	80,61	80	80

Sumber : Bagian Organisasi Setda, Tahun 2025

2.4.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persentase Pembinaan Partai Politik

Persentase pembinaan partai politik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.162.

Tabel 0-85 Persentase Pembinaan Partai Politik

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	125	62,5	62,5	62,5	85

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2025

Dari tabel di atas tergambar bahwa pada tahun 2020 terdapat kenaikan signifikan dari persentase pembinaan partai politik, dan kembali menurun pada tahun 2021-2023. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020



intensif dilakukan pembinaan kepada partai politik untuk menyongsong Pemilu serentak pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan legislatif pada tahun 2020. Saat ini dari 19 partai politik, 10 partai Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik dan sekaligus di berikan Pembinaan. Salah satu penyebab masih rendahnya pembinaan partai politik yaitu kurangnya dana pendukung untuk Bimbingan Teknis Administrasi bantuan Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik dan sekaligus di berikan Pembinaan. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan kepada partai politik yang mendapat bantuan keuangan partai politik, agar laporannya tepat waktu dan tidak mendapat temuan dari BPK, Pada tahun 2024, adanya kenaikan pembinaan partai politik yang mana tahun sebelumnya 62,5% menjadi 85%.

b. Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.163.

Tabel 0-86 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	20,2	10,14	10,14	10,14	0

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Pada tahun 2023 jumlah ormas yang ada sebanyak 69 Ormas, sedangkan Ormas yang terbina sebanyak 7 Ormas atau 10,14%. Ormas yang terbina sebanyak yaitu: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Majelis Taklim Indonesia (MTI), Lembaga Dakwah Indonesia (LDII), Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Polri), Gerakan Pemuda Ansor.

Jika dilihat berdasarkan data tahun 2020-2023 mengalami penurunan. terjadinya penurunan dari dikarenakan tidak adanya dana yang mendukung pada kegiatan ini, proses pembinaan dilakukan sama dengan tahun sebelumnya, melalui diskusi dan tatap muka ketika mereka melaporkan kepengurusan yang baru atau program kerja yang akan mereka laksanakan ke Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Adapun jumlah Ormas yang melaporkan kepengurusannya Sama dengan tahun sebelumnya namun dengan Ormas yang berbeda yang melaporkan keberadaan Ormasnya.

Pada tahun 2024, pembinaan organisasi kemasyarakatan tidak berjalan dengan semestinya karena tidak adanya anggaran yang mendukung untuk melakukan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat dan Kurangnya laporan dari Pengurus Organisasi masyarakat mengenai keberadaan kepengurusan Organisasi Masyarakat sehingga sulit dilakukan pembinaan.



c. Persentase Pembinaan LSM

Persentase pembinaan LSM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.164.

Tabel 0-87 Persentase Pembinaan LSM

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan LSM	Persen	33,3	16,67	16,67		

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2025

Begitu Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

d. Jumlah Konflik Sosial

Jumlah konflik sosial di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.165.

Tabel 0-88 Jumlah Konflik Sosial

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konflik Sosial	Kasus	3	5	5	5	10

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Pada tahun 2024 adanya peningkatan jumlah konflik sosial di Kabupaten Dharmasraya. Adapun konflik yang terjadi yaitu mengenai Persengketaan batas tanah Ulayat yang sama-sama menuntut kepemilikan tanah tersebut oleh masyarakat Sipangkur dengan PT SAK Muaro Timpeh di Kecamatan Tiumang, Konflik antar masyarakat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan PT TKA yang mana masyarakat mempertanyakan tentang perpanjangan Hak Guna Usaha PT TKA sehingga masyarakat tidak terima di karenakan tidak adanya kejelasan dari perusahaan, Konflik antar masyarakat di Kecamatan Koto Baru mengenai Limbah yang berasal dari PT DSL yang merusak lingkungan masyarakat, terakhir di Kecamatan Pulau Punjung terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan PT AWB mengenai kepemilikan lahan perkebunan sawit dengan lahan milik masyarakat.

d. Jumlah Penyakit Masyarakat

Jumlah kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.166.

Tabel 0-89 Jumlah Penyakit Masyarakat

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	3	2	2	0	0

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2025



Adapun kasus penyakit masyarakat yang terjadi di tahun 2022 adalah Kasus Pencurian TBS Sawit masyarakat dan Kebun Sawit Perusahaan.

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Tercapai, Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya gradasi nilai kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.167.

Tabel 2-167 Gradasi Nilai Kinerja

No.	Interpretasi	Rrange Capaian
1	tercapai	≥ 100
2	sangat tinggi	80-100
3	tinggi	70-80
4	sedang	50-70
5	rendah	< 50

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2025

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

Capaian indikator Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2026 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel 2.168.

Tabel 2-168 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interpretasi
1 Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur						
1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60	58.15	96.92	Sangat tinggi
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	70	89.07	127.24	Tercapai
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	92.49	97.36	Sangat tinggi
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	41.13	4.35	10.58	Sangat Rendah
5	Rasio pemukiman layak huni	persen	91.45	84.3	92.18	Sangat tinggi
6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	69.75	76.38	109.51	Tercapai
2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.98	73.0	101.47	Tercapai
2	Angka Harapan Hidup	tahun	71.87	74.04	103.02	Tercapai
3	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.49	8.71	102.59	Tercapai
4	Harapan lama sekolah	tahun	12.45	12.68	101.85	Tercapai
5	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89.17	89,71	100,6%	Sanagt Tinggi
3 Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing						
1	Pertumbuhan PDRB	persen	4.2	4.35	103.57	Tercapai
2	Gini rasio	indeks	0.26	0.291	111.92	Tercapai
3	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	44.79	55.63	124.19	Tercapai
4	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3.4	14.57	428.62	Tercapai
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5.49	6.22	113.30	Tercapai
6	Tingkat Kemiskinan	persen	6.02	5.56	107.64	Tercapai
4 Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	70	57.28	81.83	Sangat tinggi
2	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3.322	-	-	Data capaian 2024 tidak tersedia
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	100	Tercapai
4	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB	64.65	80.81	Sangat tinggi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Interpretasi
5	Nilai LPPD	Skor	3.7	-	-	Data belum ada yang ada hanya data tahun 2022 (3,5)
6	Indeks SPBE	indeks	2.175	2.83	130.11	Tercapai
7	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	68	-	-	Sangat Rendah (2022)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82	84.5	103.05	Tercapai
9	Persentase nagari mandiri	persen	19.23	17.31	90.00	Sangat tinggi
10	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0.84	0.85	101.31	Tercapai
11	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0.71	0.74	104.33	Tercapai
12	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0.60	0.67	110.93	Tercapai
5 Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan						
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	10	92.59	925.93	Tercapai
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	65.47	63.48	96.96	Sangat tinggi
6 Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah						
1	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	6	2	33.33	Sangat Rendah
2	Persentase peningkatan zakat	persen	2	36.67	1,833.50	Tercapai
3	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	85	100	117.65	Tercapai

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja diatas yang dilihat berdasarkan target RKPD Tahun 2023 dengan reaisasi RKPD Tahun 2024, secara umum sudah tercapai. Sebanyak 22 indikator sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan, 7 indikator dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian tinggi dan 1 indikator dengan capaian rendah.

2.5.2. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja berdasarkan urusan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.169:

Tabel 2-169 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2024

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1:01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75.5	72.84	96.48	Sangat tinggi
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107.94	99.43	92.12	Sangat tinggi
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106.3	80.44	75.67	Tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	99.55	99.48	99.93	Sangat tinggi
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	96.13	81.06	84.32	Sangat tinggi
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	348	93.02	26.73	Sangat Rendah
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	7828	81.3	1.04	Sangat Rendah
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Persen	97	56.77	58.53	Rendah
1:02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	17.6	9.00	148.86	Tercapai
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	108	84	122.22	Tercapai
4	Prevalensi Stunting	indeks	11.65	7.6	134.76	Tercapai
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	19.65	5.7	170.99	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	33	49.4	149.70	Tercapai
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	50	65	130.00	Tercapai
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100.00	Tercapai
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100.00	Tercapai
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100.00	Tercapai
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	5	5.25	105.00	Tercapai
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	50	93.3	186.60	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
1:03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	60	58.15	96.92	Sangat tinggi
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	47	70.03	149.00	Tercapai
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	65	76.38	117.51	Tercapai
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	70	89.07	127.24	Tercapai
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	95	92.49	97.36	Sangat tinggi
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5.77	-	-	Data tidak tersedia
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	65	47.36	72.86	Tinggi
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	10	92.59	925.93	Tercapai
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	10	-	-	Data tidak tersedia
1:04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.45	91.49	100.04	Tercapai
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92.8	91.49	98.59	Sangat tinggi
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100.00	Tercapai
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di	Persen	41.13	4.35	10.58	Sangat Rendah



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	bawah 10 hektar yang ditangani					
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	65.57	50.02	76.28	Tinggi
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	11.12	15.34	137.95	Tercapai
1:05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	90	100	111.11	Tercapai
4	Persentase resptime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	1	3	300.00	Tercapai
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	75	100	133.33	Tercapai
1:06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					Sangat Rendah
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	82	97.7	119.15	Tercapai
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100.00	Tercapai
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Persen	100	100	100.00	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tanggap darurat bencana daerah kota					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2:07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.92	73.93	93.68	Sangat tinggi
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	29.32	36.4	124.15	Tercapai
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	44.36	39.2	88.37	Sangat tinggi
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2:08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	98	100	102.04	Tercapai
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-	pratama	100.00	Tercapai
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	100.00	Tercapai
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100.00	Tercapai
6	Rasio KDRT	Persen	0.001	0.001	100.00	Tercapai
2:09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	53	80.06	151.06	Tercapai
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2,560	2,490	97.27	Sangat tinggi
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	88	88.5	100.57	Tercapai
2:10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	37:34:00	-	-	Data tidak tersedia
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan	Persen	100	-	-	Sangat Rendah



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan					
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	7	-	-	Data tidak tersedia
2:11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	2	-	-	Data tidak tersedia
2	indeks kualitas air	indeks	56.3	54	95.91	Sangat tinggi
3	indeks kualitas udara	indeks	83.85	83.28	99.32	Sangat tinggi
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	47.2	43.14	91.40	Sangat tinggi
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	Kawasan Lahan: 1	1	100.00	Tercapai
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	2	100	5,000.00	Tercapai
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	14	15.35	109.64	Tercapai
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	15	80.48	536.53	Tercapai
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	20	20	100.00	Tercapai
2:12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	100	95.56	95.56	Sangat tinggi
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	90	66.21	73.57	Tinggi
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	97	96.36	99.34	Sangat tinggi



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	90	100	111.11	Tercapai
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	90	-	-	Data tidak tersedia
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	15	-	-	Data tidak tersedia
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	15	-	-	Data tidak tersedia
2:13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	17.31	82.69	477.70	Tercapai
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	11.58	82.69	714.08	Tercapai
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	67.31	100	148.57	Tercapai
4	Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	Persen	26.92	34.61	128.57	Tercapai
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90	100	111.11	Tercapai
6	Jumlah Bumrag Bersama	unit	2	6	300.00	Tercapai
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	4	4	100.00	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2:14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
1	Angka kelahiran total	Persen	2.64	-	-	Data tidak tersedia
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81.25	70.19	86.39	Tercapai
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10.23	12.53	12.48	Tercapai
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2:15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	62	0	-	Data tidak tersedia
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks	0.2	-	-	Data tidak tersedia
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	0	-
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	87	86.5	99.43	Sangat tinggi
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	A	A	100.00	Tercapai
2:16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		38 OPD	100	100.00	Tercapai
			20 Nagari			
			20 SMP			
			20 SD			
			8 Puskesmas			
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	15	100	666.67	Tercapai
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	aplikasi	70	100	142.86	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2:17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	40	59.7	149.25	Tercapai
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha		50	58.55	117.10	Tercapai
2:18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	179,639	1,126.00	0.63	Sangat Rendah
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	3.3	66.9	2,027.27	Tercapai
2:19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga					
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	25	25	100.00	Tercapai
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	23	15	65.22	Rendah
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	5	4	80.00	Sangat tinggi
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	9	236	2,622.22	Tercapai
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	3	30	1,000.00	Tercapai
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	17	210	1,235.29	Tercapai
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	5	20	400.00	Tercapai
2:20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor	Persen	70	100	142.86	Tercapai
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	30	4	13.33	Sangat Rendah
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	4	1	25.00	Sangat Rendah
2:21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	10	-	-	Data tidak tersedia
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah	Persen	50%	-	-	Data tidak tersedia



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	yang Menggunakan Sertifikat Digital					
2:22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	90	38	42.22	Sangat Rendah
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	16	16	100.00	Tercapai
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	85	85	100.00	Tercapai
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	23	48	208.70	Tercapai
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	100	102	102.00	Tercapai
2:23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	84,000	156,300	186.07	Tercapai
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	44.97	44.57	99.11	Sangat tinggi
2:24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	68.42	68.42	100.00	Tercapai
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	38.46	38.46	100.00	Tercapai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3:25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					
1	Produksi Perikanan	Ton	28,123	25,449	90.49	Sangat tinggi
3:26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	37567	188,463	501.67	Tercapai
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	20.493	61,514	300,170.79	Tercapai
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	40	45	112.50	Tercapai
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	29	24	82.76	Sangat tinggi
3:27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
1	Produksi Padi	ton	67,500	53,869	79.81	Tinggi
2	Produksi Jagung	ton	4,000	2,755	68.88	Rendah
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103,000	123,104.94	119.52	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Produksi karet	ton	30,200	32,712.38	108.32	Tercapai
5	Produksi Daging	ton	1,200	1,697.15	141.43	Tercapai
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	42,100	42,612	101.22	Tercapai
						Sangat Rendah
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	39	48.63	124.69	Tercapai
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	40	44.77	111.93	Tercapai
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8.2	8.54	104.15	Tercapai
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	80	75.68	94.60	Sangat tinggi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	Sekretariat Daerah					
1	Nilai LPPD	bobot	3.7	-	-	Sangat Rendah
2	Nilai SAKIP	bobot	72	64.65	89.79	Sangat tinggi
3	Nilai RB	bobot	67.7	57.28	84.61	Sangat tinggi
4.02	Sekretariat DPRD					
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)					
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen	85	-	-	Data tidak tersedia
2	Persentase ditetapkan PerdaAPBD dan APBD-P	Persen	100	-	-	Data tidak tersedia
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	100	-	-	Data tidak tersedia
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)					
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	90	100	111.11	Tercapai
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	persen	90	-	-	Data tidak tersedia



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD					
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5:01	Perencanaan					
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90	-	-	Data tidak tersedia
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90	-	-	Data tidak tersedia
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	90	-	-	Data tidak tersedia
5:02	Keuangan					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	100.00	Tercapai
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	90	88.59	98.43	Sangat tinggi
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	0.25	5.57	2,228.00	Tercapai
5:03	Kepegawaian					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	68	-	-	Data tidak tersedia
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	96	96.00	100.00	Tercapai
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	47	81.90	174.26	Tercapai
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100.00	100.00	Tercapai
5:04	Pendidikan Dan Pelatihan					
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	15	85.01	566.73	Tercapai
5:05	Penelitian Dan Pengembangan					
1	Indeks inovasi daerah	indeks	Sangat inovatif(70)	55.61	79.44	Tinggi
5:06	Pengelolaan Perbatasan					
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6:01	Inspektorat Daerah					
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3 DC	3	100.00	Tercapai
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	2.96	98.67	Sangat tinggi
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8:01	Kesatuan Bangsa Dan Politik					
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	62.5	208.33	Tercapai



No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	10.14	33.80	Sangat Rendah
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	30	-	-	Data tidak tersedia
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	100.00	Tercapai
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	3	-	-	Data tidak tersedia

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 132 indikator kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 97 indikator sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dilihat berdasarkan capaian bahwa capaian sangat tinggi sebanyak 26 indikator, capaian tinggi sebanyak 6 indikator, capaian sedang sebanyak 1 indikator dan capaian rendah sebanyak 2 indikator.

2.6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta adanya pencapaian yang mempunyai gap terhadap kondisi ideal. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk diselesaikan pada Tahun 2026:

1. Meskipun PDRB perkapita dan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumbar akan tetapi angka IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 lebih rendah sebesar 74,82 (UHH SP.2020). Angka IPM Kabupaten yang lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat (76,43). Dengan mengamati komponen IPM yang terdiri dari pendapatan per kapita, Usia Harapan Hidup, lama sekolah dan tingkat



buta huruf maka faktor penyebab utama nilai IPM Kabupaten Dharmasraya menjadi lebih rendah dari Provinsi yaitu angka rata-rata lama sekolah yang rendah.

Angka partisipasi dalam setiap jenjang pendidikan yang masih rendah menunjukkan permasalahan penting di sektor pendidikan. Masalah di sektor pendidikan ini terkait dengan masalah pemerataan akses pelayanan, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi anak usia sekolah. Program pendidikan wajib belajar 13 tahun yang akan diterapkan menjadi tantangan untuk berhasil dijalankan di Kabupaten Dharmasraya.

2. Tingkat kesehatan penduduk khususnya ibu dan anak Kabupaten Dharmasraya cukup baik terlihat dari indikator Angka kematian bayi tahun 2024 yaitu 15,4/1000 klh atau 39 kasus, Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI 2023: 245/100.000 klh dengan 6 kasus kematian), dan Indeks prevalensi stunting (6,09) yang jauh dibawah rata-rata provinsi. prevalensi malnutrisi (5,32) masih cukup tinggi. Dengan kondisi seperti ini tetap perlu terus dilakukan prioritas program untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka keberhasilan pengobatan TBC Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional sementara cakupan penemuan dan pengobatan TBC meskipun fluktuatif angkanya tetapi rata-rata masih lebih tinggi dari provinsi Sumbar.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Dharmasraya relatif sama dengan UHH Provinsi Sumbar yang berada diatas rata-rata nasional menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif tinggi.

Sementara masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tingkat kelahiran di kabupaten yang tinggi dimana Angka TFR kabupaten (2,6) masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (2,19). Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran seperti Keluarga Berencana perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan.

Selain itu penerapan pola hidup bersih masyarakat juga perlu ditingkatkan. Ketersediaan air bersih masih perlu ditingkatkan demikian juga dengan ketersediaan sanitasi jamban masyarakat meskipun sudah cukup tinggi masih perluditingkatkan.

3. Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk menghadirkan program perlindungan lintas sektoral terintegrasi dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2022 dengan indeks perlindungan anak sebesar 76,41. Angka ini lebih tinggi dari



capaian provinsi (70,01) dan nasional (75,21). Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai KLA tingkat Madya, sehingga untuk tahun ini pemerintah setempat berupaya untuk mengoptimalkan peranan pemangku kepentingan yang ada untuk meningkatkan capaian menjadi KLA tingkat Nindya, dengan berbagai program seperti rumah ibadah ramah anak melalui masjid ramah anak.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tingkat nagari atau desa sebagai sarana advokasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu hasilnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami anak sebagai korban kekerasan kepada lembaga layanan perlindungan anak, tetapi kasus yang dilaporkan bersifat parsial dan masih banyak permasalahan terhadap anak yang terjadi tapi enggan dilaporkan. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terutama pada tingkat nagari dengan melibatkan berbagai pihak.

4. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.

Pada dasarnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Dharmasraya dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meskipun termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai 74,82, sementara jika dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional masih dibawah provinsi dan nasional serta peringkat 11 di tahun 2024, sehingga kondisi ini berakibat pada masih lambatnya perkembangan dimensi pengetahuan dalam mendorong perkembangan IPM. Artinya Meskipun masuk kategori "tinggi", posisi Dharmasraya masih belum kompetitif dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, berada di kisaran peringkat ke-11 dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Barat.

IPM Dharmasraya yang masih tertinggal dibandingkan provinsi dan nasional mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi lokal. Meskipun trennya meningkat, gap dengan wilayah lain tetap perlu menjadi perhatian serius.



5. Masih tingginya angka kemiskinan

Dilihat berdasarkan data tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sebesar 5,32%, angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Dharmasraya, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Pencapaian tingkat kemiskinan 5,32% menempatkan Kabupaten Dharmasraya pada posisi yang relatif baik di tingkat provinsi maupun nasional. Keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan kebijakan ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial, agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Meskipun angka kemiskinan tergolong rendah, perlu diwaspadai potensi kerentanan baru, terutama kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor), yang bisa dengan mudah tergelincir ke bawah jika terjadi tekanan ekonomi (misalnya: lonjakan harga pangan, atau pengangguran).

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang masih relatif rendah.

6. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2023 meningkat positif dan tahun 2024 melambat menjadi 3,86% atau peringkat ke-15, meskipun sangat melambat pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 3,86%. Angka ini menempatkan Dharmasraya di peringkat ke-15 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, atau berada di kuartil terbawah dalam hal kinerja pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

Angka ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Dharmasraya masih belum pulih sepenuhnya atau belum sekuat kabupaten/kota lain pasca pandemi COVID-19 dan krisis global. Capaian pertumbuhan ekonomi ini menandakan perlunya transformasi ekonomi yang lebih progresif dan terstruktur. Tanpa perubahan signifikan dalam strategi pembangunan terutama dalam hal diversifikasi sektor ekonomi dan perbaikan infrastruktur kabupaten ini akan tertinggal lebih jauh dalam daya saing regional. Langkah-langkah strategis perlu difokuskan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta pembenahan infrastruktur dan kualitas SDM untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ke depan kembali menguat dan inklusif.

Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian & Perkebunan) Struktur ekonomi Dharmasraya yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan (sawit, karet) membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta perlambatan permintaan di pasar luar. Dan keterbatasan Diversifikasi Ekonomi Belum berkembangnya sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa modern, pariwisata, perdagangan digital) menyebabkan basis pertumbuhan ekonomi sempit, sehingga kurang tahan terhadap guncangan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; sektor pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan konstruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK terbesar yaitu pada: sektor Informasi dan Komunikasi: jasa lainnya; dan akomodasi. Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDBR di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB.

Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan dari Rasio Gini Dharmasraya. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280. Tahun 2024 gini rasio Kabupaten Dharmasraya 0,291 atau peringkat ke-16 di kabupaten/kota.



7. Masih tingginya tingkat kemiskinan daerah yaitu 5,32% atau peringkat ke9 di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 5,32%, angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,97%, dan juga lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada kisaran 9,36%. Dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 5,32%, Kabupaten Dharmasraya berada dalam posisi yang relatif kuat secara regional dan nasional. Namun, tantangan masih ada—khususnya dalam menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan dan memastikan kelompok rentan tidak terabaikan. Perlu pendekatan jangka panjang berbasis pemberdayaan ekonomi dan keadilan akses layanan dasar.
8. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 yaitu 6,02% atau peringkat ke-17 di Provinsi Sumatera Barat dan berada diatas rata-rata Sumatera Barat. Tingkat pengangguran terbuka Dharmasraya sebesar 6,02% pada tahun 2024 adalah sinyal bahwa daerah ini menghadapi tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya dari kelompok usia produktif. Tanpa intervensi yang tepat, pengangguran ini dapat memicu masalah sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi ekonomi daerah dan pembangunan SDM yang terarah sangat penting untuk dilakukan secara konsisten dan kolaboratif.
9. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Dharmasraya semakin menurun.

Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2020 sebesar 67,94 masuk dalam kategori cukup. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualitas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.

Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Dharmasraya terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di



Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Dharmasraya yang sebesar 130,03 di tahun 2023, atau pada kategori sedang.

10. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 57,28 (CC) meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 50,20 (CC). Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya

2.6.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Dharmasraya, seperti daerah lain, memiliki tantangan dan permasalahan yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan. Untuk tahun 2026, permasalahan-permasalahan ini kemungkinan akan tetap relevan dan menjadi fokus perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan dokumen perencanaan sebelumnya (seperti RPJMD, RKPD tahun-tahun sebelumnya), serta tren pembangunan daerah, berikut adalah beberapa permasalahan utama yang kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Dharmasraya di tahun 2026:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Relatif: Meskipun ada peningkatan, IPM Dharmasraya mungkin masih memerlukan dorongan signifikan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
 - Pendidikan: Masih ada tantangan dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas, kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar yang memadai, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Angka partisipasi sekolah di jenjang tertentu, atau kualitas rata-rata nilai ujian, bisa menjadi indikator permasalahan ini.



- Kesehatan: Permasalahan stunting, akses terhadap layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok, ketersediaan tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang memadai masih menjadi isu krusial.
 - Masih adanya masyarakat miskin dan kemiskinan ekstrem. Permasalahan ini akan terus menjadi fokus dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran.
2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
- Ketergantungan pada Sektor Pertanian: Ekonomi Dharmasraya masih sangat dominan di sektor pertanian (terutama sawit dan karet). Fluktuasi harga komoditas ini sangat memengaruhi pendapatan masyarakat dan daerah.
1. Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: Kurangnya hilirisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah yang rendah. Diperlukan diversifikasi ke sektor lain yang memiliki potensi, seperti pariwisata atau industri pengolahan.
 2. Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih kesulitan dalam mengakses permodalan, inovasi produk, dan jaringan pemasaran yang lebih luas.
 3. Infrastruktur Pendukung Ekonomi: Meskipun sudah ada perbaikan, infrastruktur jalan produksi, irigasi, dan energi yang belum merata dan optimal dapat menghambat kegiatan ekonomi.
3. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah
- Disparitas Antar Wilayah: Pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) seringkali tidak merata antara wilayah kecamatan dan daerah pinggiran.
4. Aksesibilitas dan Konektivitas: Beberapa daerah mungkin masih sulit dijangkau karena kondisi jalan yang kurang memadai, yang berdampak pada distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Efektivitas Birokrasi: Tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi: Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum merata.
 - Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Degradasi Lingkungan: Isu-isu terkait deforestasi, pengelolaan limbah, pencemaran sungai, dan konservasi sumber daya alam.



- Ancaman Bencana Alam: Dharmasraya rentan terhadap bencana seperti banjir dan longsor, sehingga membutuhkan kesiapan dan mitigasi bencana yang lebih baik.

2.6.3. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

2.6.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Kabupaten Dharmasraya yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

- Angka rata-rata lama sekolah lebih rendah dari provinsi dan nasional;
- Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas pembelajaran (seperti ruang kelas SD dan SMP) dalam kondisi baik;
- Masih relatif rendahnya dimensi pengetahuan/ pendidikan dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE), ruang kelas dan UKS
- belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD
- belum optimalnya pelaksanaan pendidikan ke-orangtuaan (*Parenting*) dan peran orang tua di sekolah
- Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya tenaga pendidik pada sekolah dasar
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah serta pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SD dan SLTP

11. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

- i. Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terjadinya pendarahan saat melahirkan, usia ibu saat hamil, masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan, masih ada persalinan ditolong oleh non kesehatan.
- ii. Belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin, masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi. Masih ditemui remaja anemia, ibu hamil KEK.



- iii. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil.
 - iv. Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB)
- Masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, disebabkan oleh penyakit infeksi dan kekurangan gizi.
 - Kematian pada bayi juga disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan,
 - Kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- c. Prevalensi Malnutrisi
- Masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil menderita kurang energi protein akan berpengaruh pada gangguan fisik, mental dan kecerdasan anak, juga meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi.
- d. Persentase Rumah Tangga PHBS
- masih rendahnya indikator PHBS yaitu merokok, dimana indikator merokok sangat mempengaruhi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kabupaten Dharmasraya sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok seharusnya dengan adanya peraturan tersebut memperkuat orang tidak merokok.
- e. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam
- Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam di Kabupaten Dharmasraya sudah semua kasus kejadian luar biasa tertangani
- f. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Permasalahan yang terjadi pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Dharmasraya adalah belum semua masyarakat yang beresiko mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasilitas kesehatan.
- g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
- Masih adanya ditemui kasus pasung pada ODGJ berat, dan masih kurangnya peranan keluarga dalam pendampingan pasien minum obat pada kasus TBC dan ODGJ berat.



h. Visite Rate

Masih kurangnya pemahaman fasilitas kesehatan dengan definisi operasional (DO) visite rate.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023, proposrsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 58,15%.
- Pembangunan jalan tidak diiringi dengan pembangunan drainase jalan kabupaten terutama pada daerah rawan genangan
- Sebagian besar kondisi jembatan tidak baik
- Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
- Masih kurangnya dinding pengaman sungai terutama pada kawasan perumahan dan permukiman
- Belum seluruh rumah tangga terlayani air minum perpipaan
- Kelembagaan pengelolaan air minum masih berupa UPT Air Minum
- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman;
- rumah masyarakat sudah memiliki tangki septik tetapi belum semuanya memenuhi ketentuan teknis.
- Terbatasnya pelayanan sedot tinja
- Kurangnya sarana dan prasarana IPLT
- Belum semua PD memiliki gedung miulik sendiri dan yang representatif
- Minimnya regulasi terkait bangunan gedung
- Belum adanya rencana rinci/RDTR yang ditetapkan sebagai rujukan bagi perizinan yang berskala besar, dimana RTRW merupakan rencana umum sehingga ketentuan-ketentuan rinci tidak dapat ditampilkan secara spesifik
- Belum optimalnya peran kelembagaan penataan ruang

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- Masih belum terpenuhinya kecukupan prasarana dan sarana umum (PSU) permukiman.
- Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
- Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh

3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak tertangani
- Masih adanya gangguan trantibum
- Masih kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang trantibum



- Wilayah kerja pemadam kebakaran belum sesuai dengan standar pelayanan.
- Belum adanya pembentukan nagari tangguh bencana
- Masih kurangnya SDM yang terlatih dalam menanggulangi kebencanaan
- Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana

4. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum semua PD memiliki akses kaum disabilitas
- Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat
- Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah, hal ini terlihat dari data perkembangan IPG tahun 2018 hingga tahun 2022, maka perkembangan IPG Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan positif, namun perkembangannya tidak sebagus nasional dan provinsi.
- Masih adanya kasus kekerasan pada anak;
- Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;

2.6.3.2. *Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

5. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Belum semua peserta lulusan pelatihan ditempatkan pada dunia kerja
- Masih adanya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
- Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
- Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Keragaman konsumsi pangan masih rendah
- Kebiasaan/pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- Pemanfaatan pangan lokal non beras sebagai sumber energi belum maksimal



8. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
 - Belum seluruhnya tanah milik pemerintah bersertifikat
 - Belum semua sekolah dan instansi pemerintah memiliki sertifikat
 - Masih adanya konflik pertanahan di masyarakat
 - Masih belum adanya pemetaan tanah milik ulayat
9. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan sampah di TPA
 - Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di TPA
 - Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
10. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Belum optimalnya capaian penerbitan kartu identitas anak
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan kematian
11. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM..
 - Belum berkembangnya skala usaha BUMNag
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Nagari
 - Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
 - Belum adanya pembangunan nagari berbasis kawasan
12. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih ada pasangan usaha subur yang belum berKB
 - Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB
13. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
 - Masih kurangnya rambu-rambu atau perangkat jalan sehingga sering terjadi kecelakaan
 - Belum adanya dokumen kebijakan terkait lalu lintas atau master plan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
 - Belum adanya terminal angkutan orang
14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - Masih terbatasnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (keterbukaan informasi publik)



- Belum seluruhnya sistem informasi berjalan secara terintegrasi
 - Belum seluruh nagari memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM)
 - Belum kurang updatenya perangkat daerah memberikan informasi publik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang pembubaran koperasi yang tidak aktif
 - Masih rendahnya komitmen pengurus koperasi dalam peningkatan kinerja dan volume usaha
 - Belum seluruhnya UMKM dapat meningkatkan akses terhadap pasar offline dan online
 - Masih terbatasnya akses UMKM dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
16. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- Masih adanya regulasi yang belum mendukung dalam peningkatan investasi daerah
 - Masih terdapatnya sistem data base perizinan secara manual
17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Masih kurangnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
 - Masih kurangnya pembinaan cabang olahraga prestasi
 - Belum optimalnya pemanfaatan GOR
 - Masih terdapatnya beberapa cabang olahraga yang belum memiliki pelatih bersertifikat
 - Masih kurangnya pemuda berprestasi
 - Belum optimalnya jumlah organisasi pramuka yang aktif
18. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- a. Masih kirangnya ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral
 - b. Belum handalnya pencatatan data sektoral di SKPD
 - c. Belum seluruh nagari dan kecamatan terbentuk sebagai nagari statistik dan kecamatan statistik
19. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- a. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
 - b. Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
 - c. Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website
20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- a. Masih kurangnya group kesenian yang dapat dibina
 - b. Masih kurangnya kesenian daerah yang dilestarikan.



- c. Belum optimalnya peran serta lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan
 - d. Sedikitnya Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan
 - e. Masih belum optimalnya inventarisasi dan observasi benda dan tak benda cagar budaya yang ditetapkan
21. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- a. Belum adanya gedung layanan perpustakaan
 - b. Masih rendahnya minat baca
 - c. Masih rendahnya layanan kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
 - d. Masih belum optimalnya manajemen perpustakaan (daerah, sekolah dan TBM)
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
- a. Belum semua OPD dan nagari mengelola arsip secara baku

2.6.3.3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi perikanan
 - Relatif rendahnya produktifitas perikanan budidaya
 - Menurunnya kualitas air mengakibatkan produksi dan keanekaragaman perikanan tangkap menurun
24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
- Belum optimalnya inventarisasi dan pengelolaan destinasi
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
 - Belum adanya even tahunan
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
 - Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat,
 - Pengelolaan limbah pertanian dan limbah ternak yang belum terkelola
26. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Secara umum pasar yang ada tidak representatif
 - Pengelolaan sampah pasar yang belum optimal
 - Masih adanya alat-alat metrologi yang belum terstandar
27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Masih rendahnya daya saing produk IKM
 - Belum optimalnya pemanfaatan IKM Logam

2.6.3.4. *Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan*

28. Perencanaan
- Masih kurangnya ketersediaan dan keakuratan data
 - Pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan



29. Keuangan

- a. Masih tingginya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah terhadap dana tranfer

30. Kepegawaian

- Rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS
- terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansi
- belum adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan

31. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya aparatur

32. Penelitian dan Pengembangan

- Masih kurangnya lembaga untuk melakukan kerjasama penelitian
- Masih kurangnya inovasi yang diciptakan OPD dalam pelaksanaan urusan

2.6.3.5. Unsur Pemerintahan Umum

33. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya penanganan masalah kasus penyakit masyarakat dan Konflik Sosial
- Belum optimalnya forum-forum Strategis Kesbangpol yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
- Lemahnya system pelaporan dari nagari dan kecamatan mengenai situasi dan kondisi daerah.
- maraknya penyalahgunaan kasus narkoba dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Tokoh masyarakat adat setempat.
- permasalahan mengenai Konflik yang terjadi mengenai batas tanah ulayat telah di adakan koordinasi dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara perusahaan dengan warga masyarakat dengan melibatkan pemda dan Aparat yang berwajib.

2.6.4. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

Kabupaten Dharmasraya menghadapi tantangan dalam hal transformasi ekonomi, penguatan SDM, infrastruktur wilayah, dan tata kelola pemerintahan. Pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan



ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor produktif, layanan dasar, serta integrasi antarwilayah dan data pembangunan.

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dilihat berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada tahun 2025 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 menurun menjadi 3,86%, setelah sempat tumbuh positif selama 2021–2023. Ketergantungan pada sektor primer (pertanian & perkebunan) membuat ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Minimnya sektor industri pengolahan dan jasa menjadi kendala utama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tinggi

TPT tahun 2024 sebesar 6,02%, peringkat ke-17 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rendahnya penyerapan tenaga kerja, terutama lulusan muda, menunjukkan adanya ketimpangan antara kompetensi SDM dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Kualitas SDM Masih Perlu Ditingkatkan

IPM Dharmasraya (0,748) masih di bawah provinsi (0,764) dan nasional. Akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat perlu terus ditingkatkan agar SDM lebih kompetitif. Tingginya proporsi penduduk berpendidikan rendah dan belum/tidak sekolah jadi hambatan jangka panjang.

4. Kesenjangan Wilayah dan Aksesibilitas Infrastruktur

Sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar: jalan dan air bersih, dan beberapa nagari yang masih kategoribblank spot. Distribusi pembangunan belum merata, terutama ke daerah-daerah terpencil atau pinggiran.

5. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Meskipun kemiskinan menurun (5,32%), kerentanan ekonomi rumah tangga tetap tinggi, terutama dari sektor informal. Keluarga rentan sangat sensitif terhadap inflasi, bencana alam, dan gangguan mata pencaharian.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Data

Kinerja birokrasi dan pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis data terkini dan evaluasi dampak. Digitalisasi pelayanan publik dan keterpaduan sistem informasi pembangunan masih terbatas.

7. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Aktivitas perkebunan besar dan pertambangan di beberapa wilayah memunculkan risiko degradasi lingkungan. Perlu penguatan kebijakan tata ruang, konservasi, dan pengelolaan bencana berbasis mitigasi.



8. Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian sehingga membutuhkan proses hilirisasi melalui teknologi pengolahan hasil pertanian, perdagangan, industri berbahan baku komoditi lokal. Selain itu inovasi teknologi dan kolaborasi antar sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) belum berkembang optimal.

2.7. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN TAHUN 2024

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD, dan serta indikator, strategi dan arah kebijakan terkait pada 7 (tujuh) perangkat daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang berkewajiban dalam melaksanakan SPM, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Satpol PP dan Kebakaran;
6. BPBD; dan
7. Dinas SOSP3APPKB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana Warga Negara yang tidak mampu lebih diprioritaskan dalam menerima Pelayanan Dasar untuk memperoleh barang dan/atau jasa



Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun kategori warga tidak mampu dimaksud adalah :

- miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- kondisi bencana; dan/atau
- kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, telah dirumuskan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan permasalahan mendasar yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan Standar

Pada urusan pendidikan, pada tahun 2024 telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu secara keseluruhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 100 persen. Untuk bidang kesehatan, secara umum pencapaian indikator SPM adalah 100 persen kecuali indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 91,39 persen.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 89,64 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,5 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen.

Tabel 2- 1
Target dan Realisasi Kegiatan SPM Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2024

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi 2024	Capaian
1. PENDIDIKAN						
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	Setiap Tahun	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	100	Setiap Tahun	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	Setiap Tahun	100	100



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi 2024	Capaian
2. KESEHATAN						
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	88,04	88,04
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	91,39	91,39
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	91,97	91,97
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	96,33	96,33
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	96,71	96,71
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	97,37	97,37
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	95,62	95,62
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	99,32	99,32
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	99,06	99,06
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	100	100
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	100	100
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	100	100
3. PEKERJAAN UMUM						
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	100	Setiap Tahun	89,64	89,64
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100	Setiap Tahun	92,5	92,5
4. PERUMAHAN RAKYAT						
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	Setiap Tahun	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	Setiap Tahun	100	100
5. TRANTIBUMLINMAS						



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi 2024	Capaian
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	persen	100	Setiap Tahun	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	Setiap Tahun	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	Setiap Tahun	12,6	12,6
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	Setiap Tahun	100	100
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	Setiap Tahun	100	100
6. SOSIAL						
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	Setiap Tahun	100	100

Sumber : OPD Pengampu SPM, Tahun 2025

2.8. CAPAIAN SDG'S TAHUN 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs



merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar-negara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia bertujuan untuk meraih 17 tujuan melalui pengembangan 169 target dan 319 indikator TPB/SDGs. Pemerintah baik Tingkat pusat,



provinsi maupun kabupaten dan kota berperan aktif sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan urusan dan kewenangannya, terdapat 319 indikator TPB/SDGs yang dibagi kewenangannya menjadi 4 kategori, yakni :

1. Kewenangan Pusat sebanyak 308 indikator,
2. Kewenangan Provinsi sebanyak 235 indikator,
3. Kewenangan Kabupaten sebanyak 220 indikator, dan
4. Kewenangan Kota sebanyak 222 indikator.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pembiayaan ataupun terkait optimalisasi sistem pendokumentasian kegiatan kegiatan terkait yang masih belum optimal. Berikut dapat dilihat capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 100 indikator (49,02%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 67 indikator (32,84%), indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah sebanyak 11 indikator (5,39%) dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 26 indikator (12,75%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.

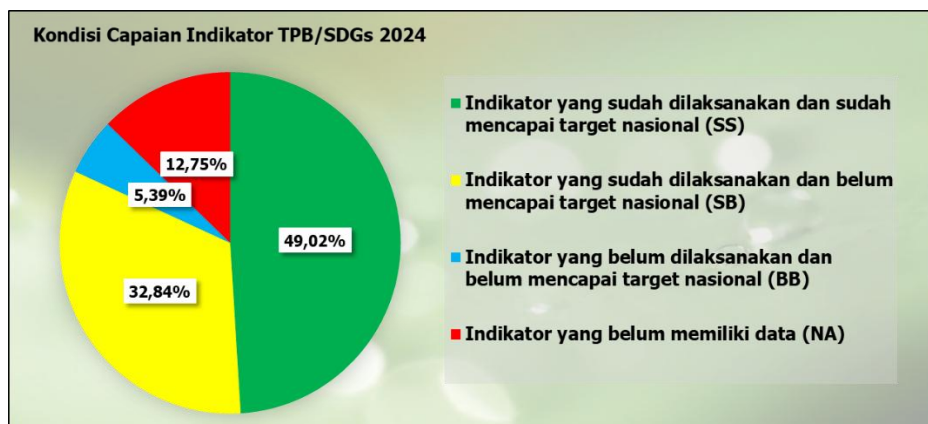
Tabel 2- 2
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	100	49,02%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	67	32,84%
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	11	5,39%
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	26	12,75%
TOTAL		204	204

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029



Gambar 2- 5
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 3
Rekapitulasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Dharmasraya

No.	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator	Ketidaktercapaian (%)
1	Tanpa Kemiskinan	13	8	0	2	23	34,78
2	Tanpa Kelaparan	8	1	0	2	11	9,09
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	13	0	3	34	38,24
4	Pendidikan Berkualitas	5	7	0	1	13	53,85
5	Kesetaraan Gender	8	4	0	2	14	28,57
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	6	3	1	17	52,94
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	0	1	0,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	10	0	3	19	52,63
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	4	1	1	9	55,56
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	1	0	2	7	14,29
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	1	1	1	9	22,22
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	3	2	0	5	100,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
15	Ekosistem Daratan	0	2	1	1	4	75,00
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	13	4	1	3	21	23,81
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	3	2	4	15	33,33
		100	67	11	26	204	
	Ketercapaian			49,02%			

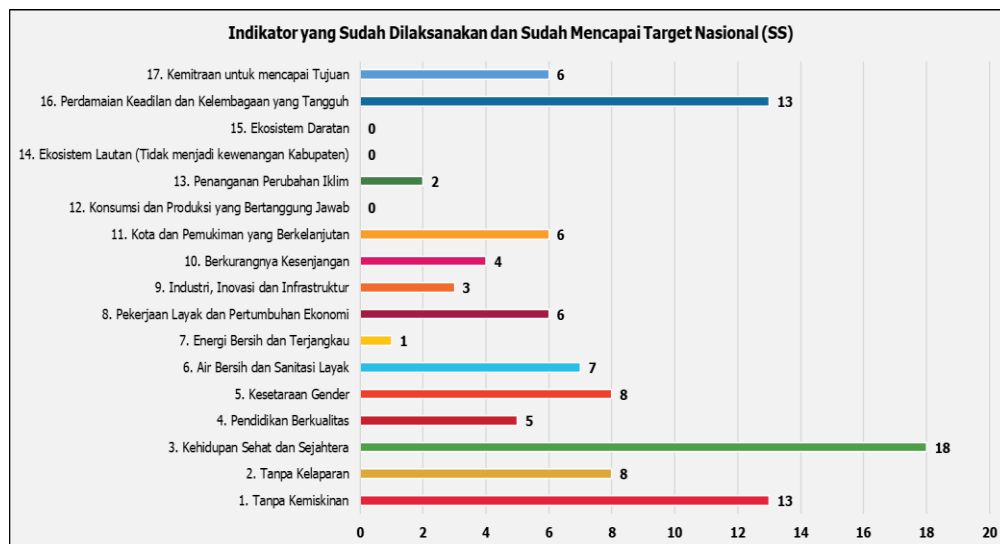
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029



2.8.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 100 indikator atau dengan persentase 49,02%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat Gambar berikut.

Gambar 2- 6
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya





Tabel 2- 4
Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 7-8% Target 2030 : 2,72-3,18	6,230	6,670	5,560	5,560	5,320
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 95%	69,76%	78,71%	79,75%	94,28%	96,34%
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 2,8 juta	4.502	5.182	7.337	6.531	6.613
4	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 63%.	1,94	1,84	1,83	96,22	96,43
5	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 65%	275,55	83,43	65,45	100	100
6	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 94,78%	99,97	98,40	98,40	99,48	99,49
7	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 82,2%	55,73	39,03	90,71	81,05	84,92
8	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	Meningkat menjadi 77,4%.	89,38	90,84	95,68	96,45	97,16
9	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena	BPBD	Menurun	0	0	0	0	0



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		dampak bencana per 100.000 orang.							
10	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Meningkat menjadi 39 daerah Target daerah : ada	0	0	0	1	1
11	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	±7581000000	±5000000000	±1000000000	±2000000000	±1200000000
12	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	1
13	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BKD	Meningkat	54,16	53,20	48,44	53,96	55,12
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dispaperi	Menurun	1,25	1,24	1,12	1,30	1,24
15	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 17%	0,24	0,23	0,15	0,84	1,50
16	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dispaperi	Menurun menjadi 8,5 %	0	0	0	0	0
17	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	5,00%	8,30%	7,60%	2,63%	2,40%



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
18	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Menurun	9,12	2,63	3,04	4,65	4,31
19	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	NA	NA	NA	9,53	9,62
20	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 50%	1334 (74,19%)	79,000	589 (70,8%)	2003 (73,9%)	2238 (72,7 %)
21	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dispaperi	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	191,35	100,10	203,30	92,30	95,45
22	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 306	77,02	382,72	200,29	168,44	187,09
23	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	99,62	99,32	99,66	99,80	100,00
24	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 85 %	91,74	94,70	94,97	94,97	94,97
25	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24	8,98	7,90	7,30	9,3/1.000 KH	13,6 / 1.000 KH
26	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi <0,5%	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
27	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 245	198,89	128,16	159,50	179,20	210,58



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
28	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	0
29	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 300	52	52	52	52	52
30	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Menurun	66,667	NA	NA	100	100
31	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 34 provinsi Sijunjung 8 kecamatan	9	0	0	0	0
32	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 35. Target daerah : semua kecamatan	0	0	0	0	0
33	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	1.643	NA	14.513	31.903 (20%)	28.160 (17,7%)
34	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 280 Target daerah : Semua Puskesmas (13)	52	52	52	15	15



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
35	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 65%	81,10	83,43	65,45	100	100
36	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Meningkat	49,49	71,24	76,10	228.699 (98,05%) (UHC)	242.141 (100,83%) (UHC)
37	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi minimal 95% Target RPJPD Dharmasraya 2030 : 100%	49,49	71,24	76,10	228.699 (98,05%) (UHC)	242.141 (100,83%) (UHC)
38	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Meningkat	100	100	100	100	100
39	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat	5,05	7,37	7,38	5,91	6,25
40	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 84,2%	92,3%	90,7%	92,4%	89,8%	91,6%
41	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 81%	80,36%	82,76%	86,21%	84,75%	89,66%
42	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8,47	8,55	8,56	8,710	8,980
43	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 96,1%	156.326,000	99,40%	98,71%	99,59%	99,85%
44	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat	NA	99,97%	99,28%	99,59%	99,85%



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
45	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,003	0,001	0,004	0,010	0,004
46	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,059	0,000	0,148	0,176	0,104
47	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,007	0,000	0,005	0,016	0,013
48	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 70%	100	100	100	100	100
49	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 38 tahun Target daerah menurun	NA	NA	NA	2,052	0,881
50	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 9,9%	10,29	0,00	0,00	12,53	8,96



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
51	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 85%	58,01	83,43	65,45	100	100
52	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	Meningkat	NA	NA	93,40	92,50	94,16
53	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPR	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	120	120	120	120	120
54	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (Sijunjung 8 kecamatan 62 desa/nagari)	52	52	52	52 (ODF)	52 (ODF)
55	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Meningkat	NA	21	28	52	52
56	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DPUPR	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1	1	1	1	1
57	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUPR	Meningkat	0,35	0,46	0,55	0,54	0,63



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
58	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUPR	8 WS	1	1	1	1	1
59	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUPR	10 WS (skala nasional)	1	1	1	1	1
60	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Dinas LH	10-16%	BK	BK	BK	20,83	22,98
61	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Bapperida	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	47,39	47,38	52,60	56,14	59,16
62	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Distrans dan naker	Meningkat	56,39	52,40	55,12	56,00	62,52
63	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Diskumperdag	25%	NA	NA	26,98	40,84	39,53
64	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Distrans dan naker	Meningkat	15.621,39	15.703,37	17.140,48	17.140,48	18.713,71
65	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP	Meningkat	21	21	21	41	41
66	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMPTSP	Menurun (mendekat)	0	0	2	2	2
67	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Diskumperdag	Meningkat	15,799	14,681	15,443	10,720	12,419
68	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	Meningkat	NA	NA	93,40	92,50	94,16
69	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	Meningkat	48,50	NA	76,01	77,73	82,62
70	10.1.1*	Koefisien Gini.	Bapperida	Menurun menjadi 0,36	0,28	0,27	0,29	0,29	0,23



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
71	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Bapperida	Menurun menjadi 7-8%	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32
72	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri. Indikator RPJPD (Persentase Desa Mandiri)	DPMD	Meningkat paling sedikit 2.000 desa Target RPJPD Kab Dharmasraya 2030 : 21,15 persen	4	5	6	9	24
73	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum	ada Target : tidak ada kebijakan diskriminatif	0	0	0	0	0
74	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Disbudparpora	ada	13	56	99	102	106
75	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,034	0,058	0,005	0,146	0,062
76	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Menurun menjadi 30% Target RPJPD Kab. Dharmasraya 136,94-126,94	143,20	138,81	134,16	130,03	130,03
77	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	ada	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
78	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	±7581000000	±5000000000	±1000000000	±2000000000	±1200000000



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
79	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	KRP, PRB, Renkon
80	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	1
81	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,03	0,06	0,01	0,15	0,06
82	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesbangpol	Menurun	1	1	1	0	0
83	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesbangpol	Menurun	0	0	0	0	0
84	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Badan Kesbangpol	Meningkat	100	95,22	92,95	100	100
85	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,02	0,06	0,07	0,17	0,07
86	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,03	0,01	0,03	0,52	0,21
87	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BKD	Meningkat	96,86	92,75	95,01	94,83	95,52
88	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas	BKD	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%,	hasil pemeriksaan dengan Opini Wajar	Hasil pemeriksaan dengan Opini	Hasil pemeriksaan dengan Opini	Hasil pemeriksaan dengan Opini	WTP



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Kabupaten:60%, Kota: 65%	Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
89	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 50%	63,440	63,980	64,070	64,650	67,240
90	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bag PBJ	Meningkat menjadi 80%	-	0	0	92,27	115,51
91	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	NA/60,17	37 OPD/ 46,58	26 OPD/ 50,2	57,280	?
92	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal Indeks kepatuhan pelayanan publik	Bag. Organisasi	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 80%	NA	81,760	88,620	90,420	90,420
93	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	Meningkat menjadi 85%	89,38	90,84	95,68	96,45	97,16



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
94	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum	ada Target : tidak ada kebijakan diskriminatif	0	0	0	0	0
95	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskominfo	Meningkat	48,50	NA	76,01	77,73	82,62
96	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Meningkat	99%	100%	100%	100%	100%
97	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Meningkat	83%	87%	94%	100%	100%
98	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	ada	Tersedia	Tersedia	Tersedia	ada	ada
99	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Meningkat	10.497	8.883	59.780	28.998	12.058
100	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Meningkat	96,12%	100%	100%	97,06%	100%

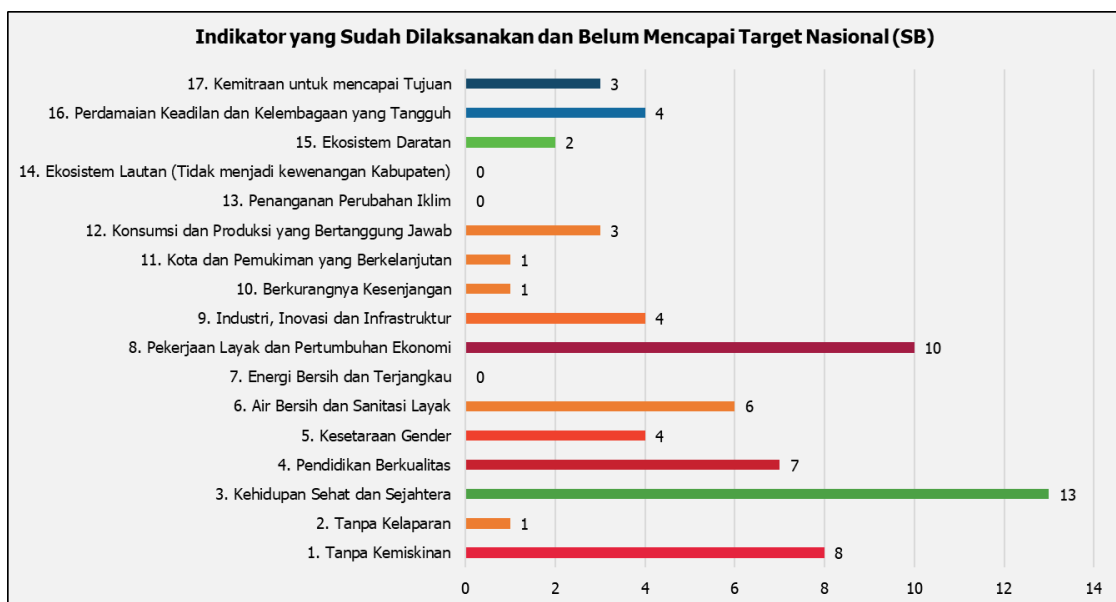
Sumber : Analisis capaian SDGs Kabupaten Dharmasraya, 2025



2.8.2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 67 indikator atau dengan persentase 32,84%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2- 7
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya





Tabel 2- 5
Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)

No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Distrans dan naker	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	7,88%	16,61%	20,22%	21,00%	17,95%
2	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 17,12%	20,19%	10,41%	2,03%	0,68%	5,13%
3	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	59,86%	85,49%	88,22%	89,07%	89,64%
4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	87,28%	91,73%	92,20%	92,40%	92,50%
5	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Bag. Perekonomian dan SDA	Meningkat menjadi 100%	16,74%	22,84%	22,32%	NA	23,23%
6	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 151 ribu	17.024	7.754	5.677	3.458	3.458
7	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 81,5 ribu	0	7.754	5.677	3.458	3.458
8	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 450	0	0	2	2	3



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
9	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Menurun	12,89	5,21	4,87	5,00	5,76
10	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	14,377	8,800	9,000	14,02/1000KH	15,5/1000KH
11	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	8,73	8,75	6,58	9,75	9,93
12	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	51,92	17,31	25,00	17,31	21,15
13	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Meningkat	140,54	140,54	83,87	83,87	83,87
14	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 5,4%	NA	NA	13,393	1.453 (3,39%)	3.944 (9,03%)
15	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24,3%	11.239,00	26.485,00	29.124,000	137.212 (88,01%)	137.838 (86,45%)
16	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Disdukcapil	Menurun	0,259	0	0	NA	NA
17	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi angka 0,02%	NA	NA	NA	NA	NA
18	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 66%	71,52	9,79	31,71	12,53	8,96



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
19	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 23,5%	23,38	25,40	17,16	19,79	20,39
20	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 2,28	9,71	8,14	NA	7,85	6,90
21	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	0
22	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	NA	NA	NA	1.625	2.508
23	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	Meningkat	11.335	11.441	11.595	Jumlah anak anak SD : 1) kelas 4 : 4327. 2) kelas 6: 4472 . 3) kelas 9: 2926	Jumlah anak anak SD : 1) kelas 4 : 4336. 2) kelas 6: 4370 . 3) kelas 9: 2897 Jumlah anak MI: 1) Kelas 4: 157 2) Kelas 6: 148 Kelas 9:
24	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 114,09%	107,23	106,49	106,49	106,84	107,77
25	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 106,94%	91,26	96,75	96,75	90,19	97,09
26	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 77,2%	47,64	46,50	47,51	0,49	0,43



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
27	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Meningkat	SD : 99,04 SMP : 76,76	SD : 99,06 SMP : 76,2	SD : 99,31 SMP : 76,64	SD : 99,94 SMP : 76,47	SD : 98,34 SMP : 80,57
28	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan	Meningkat	48,214	46,552	46,552	NA	NA
29	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	Meningkat	75,269	50,319	86,304	49,410	0,000
30	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DinsosP3AP2KB	bertambah sebanyak 16 (Target Daerah "Meningkat"	2,000	7,000	8,000	0,000	0,000
31	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DinsosP3AP2KB	Meningkat	8,33	6,67	6,67	6,67	6,67



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
32	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM	Meningkat	25,34	26,67	26,62	24,71	22,99
33	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DinsosP3AP2KB	Meningkat	0	0	0	0,05	0,05
34	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	59,86%	85,49%	88,22%	89,07%	89,64%
35	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	Meningkat	NA	NA	NA	0,002	0,002
36	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	76,5%	76,6%	74,5%	72,92%	71,26%
37	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DPUPR	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000
38	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUPR	Meningkat	0,96%	0,91%	1,24%	1,21%	1,18%
39	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DPUPR	Meningkat	55,35	52,73	53,18	54,00	51,11
40	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Bapperida	Meningkat	2,133	2,000	2,110	2,067	2,054



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
41	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Bapperida	Meningkat	2,19	-83,78	13,75	13,75	9,09
42	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Distrans dan naker	Meningkat	90,30	90,30	90,30	97,34	95,85
43	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Distrans dan naker	51%	41,07	38,17	40,15	42,16	48,07
44	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Distrans dan naker	Menurun Target RPJPD Dharmasraya 2030 = 5%	5,08%	5,00%	6,23%	6,23%	6,22%
45	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Distrans dan naker	Menurun	5,00%	29,29%	25,32%	4,80%	5,30%
46	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Distrans dan naker	Meningkat	0	19,30%	26,10%	30,60%	21,70%
47	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Disbudparpora	Meningkat menjadi 8%	NA	NA	NA	0,044%	0,038%
48	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disbudparpora	Meningkat	15.768	101.394	126.596	188.463	101.453
49	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Disbudparpora	Meningkat	48,34	44,92	47,25	34,50	47,26
50	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Bapperida	Meningkat	5,46%	5,66%	5,52%	5,38%	5,26%
51	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Diskumperdag	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB	-3,35%	7,30%	1,62%	1,76%	1,50%
52	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Diskumperdag	Meningkat	NA	NA	NA	13,51	NA



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
53	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Diskumperdag	Meningkat	1.170	NA	NA	43,89	33,30
54	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Distrans dan naker	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	7,88	16,61	20,22	21,00	17,95
55	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LH	Meningkat menjadi 80%	6,70	78,71	79,65	79,59%	72,27%
56	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LH	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	8.613,00	22.999,00	20.063,00	95.918,76	99.565,30
57	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (per hari)	Dinas LH	20 ton per hari (skala nasional) Perlu ditetapkan target lokal	0,0170	0,0000	0,0000	0,0003	0,0005
58	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH	Meningkat	1	1	1	1	1
59	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH	Meningkat	17,46	1,87	1,87	21,12	20,33
60	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas LH	ada	0	0	0	1	1
61	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesbangpol	Menurun	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
62	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan	DinsosP3AP2KB	Meningkat	8,33	6,67	6,67	6,67	6,67



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).							
63	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DinsosP3AP2KB	Meningkat	4,76	3,33	3,33	8,33	8,33
64	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	Meningkat	94,94	96,47	0,00	98,10	96,37
65	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BKD	Meningkat	1,68%	2,06%	1,69%	1,37%	1,27%
66	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BKD	Di atas 12%	0,81%	0,77%	0,88%	0,87%	0,76%
67	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BKD	Meningkat	8,41	9,03	11,50	14,11	12,07

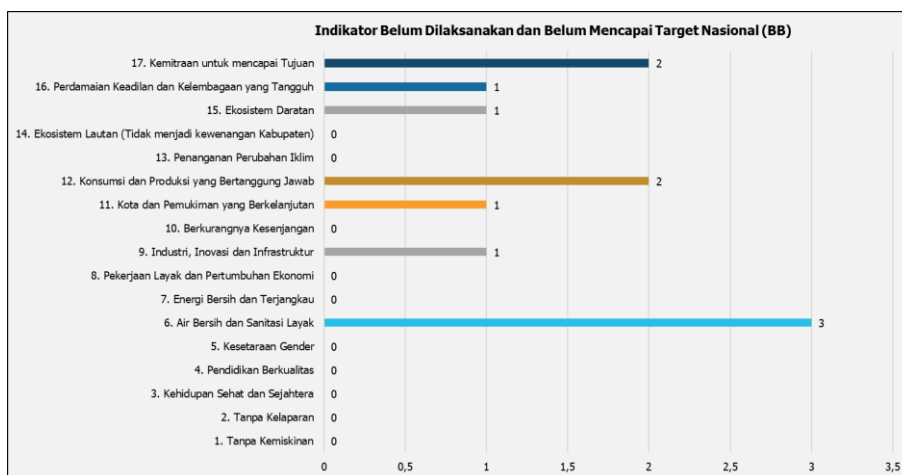
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029



2.8.3. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 11 indikator atau dengan persentase 5,39%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar 2.87 dan Tabel 2.121.

Gambar 2- 8
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya



Tabel 2- 6
Indikator TPB/SDGs Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB)

No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
2	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
3	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
4	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Bapperida	Meningkat	0	0	0	0	0
5	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DPUPR	Ada	0	0	0	0	0



No	INDIKATOR TPB		OPD Penyedia Data	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
6	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
7	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
8	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
9	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Meningkat	0	0	0	0	0
10	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag PBJ	ada	0	0	0	0	0
11	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Adm Pembangunan	ada	0	0	0	0	0

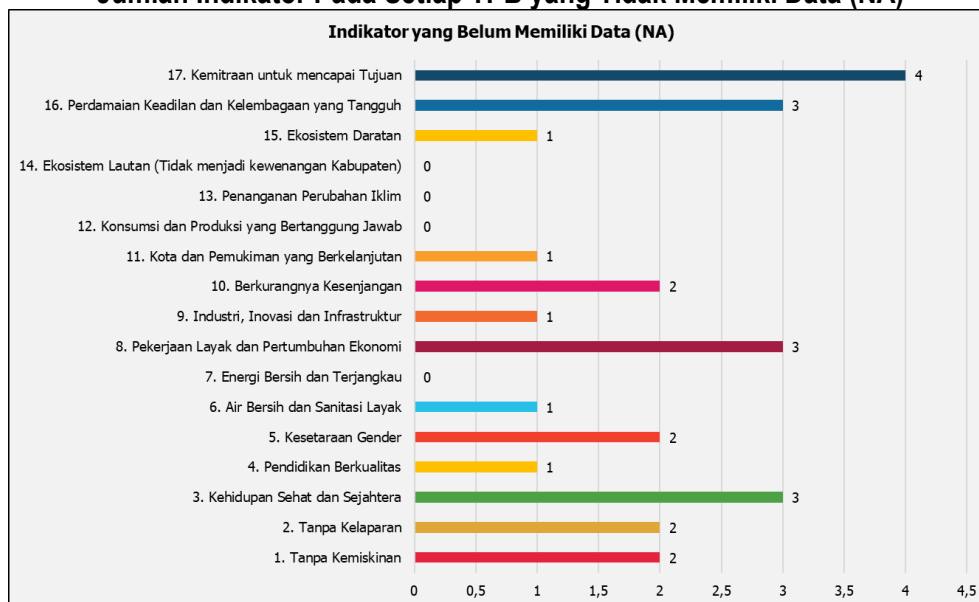
Sumber : Analisis Data OPD, 2025

2.8.4. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 26 indikator atau 12,75%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Gambar 2.88.



Gambar 2- 9
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data (NA)





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2020 hingga sampai dengan 2024 serta proyeksi untuk tahun 2025 dan tahun 2026 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Berikut adalah penjelasan mengenai kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

Berdasarkan narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, maka terdapat 16 indikator pada sasaran ekonomi makro, berikut ditampilkan perkembangan data perkembangan indikator sasaran ekonomi makro dari tahun 2020 sampai dengan 2024 serta outlook tahun 2025 beserta sasaran tahun 2026 sebagai berikut :



Tabel 3- 1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	outlook 2025	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	(%,yoy)	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57	1,6	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah	(Rp/US\$)	14.543	14.296	14.847	15.235	15.846	16.313	16.500 - 16.900
3	Cadangan Devisa	(miliar US\$)	135,9	144,9	137,2	146,4	155,72	161,81	171,01–171,42
4	Cadangan Devisa	(dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,5	6,7	6,2–6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan	(% PDB)	-0,4	0,3	1	-0,1	-0,63	-0,9	(1,04)–(0,90)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	(%)	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98	20,8	21,18–21,20
7	Rasio PDB Pariwisata	(%)	2,24	2,3	3,6	4,1	3,72	4,20-4,30	4,6–4,7
8	Devisa Pariwisata	(miliar US\$)	3,6	0,55	7,04	14,63	16,71	17,10-18,30	22,00–24,70
9	Pendapatan Negara	(% PDB)					12,84	12,36	12,22-13,35
10	Penerimaan Perpajakan	(% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	10,08	10,24	10,45-11,40
11	Keseimbangan Primer	(% PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	-0,09	-0,26	(0,22)–(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN	(% PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	-2,29	-2,53	(2,53)–(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah	(% PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	39,36	39,15	39,8-39,9
14	Pertumbuhan Investasi	(PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	4,61		6,17–7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	(Triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	1714,2		2.093,3– 2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	(Triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	721,27	855,95	915,4–1.006,5



Perekonomian nasional tahun 2024 tumbuh sedikit melambat dibanding tahun 2023 yaitu dari 5,05 persen menjadi 5,03 persen,. Perlambatan ini dipengaruhi juga oleh perlambatan perkembangan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025, utamanya disebabkan oleh risiko perang dagang seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tangguh di atas lima persen. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko ke bawah dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan 2026.

Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,20 persen.

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.



PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30– 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan di daerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 serta memperhatikan target Sumatera



Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan memperhatikan target Provinsi Sumatera Barat dalam RKP tahun 2026.

Tabel 3.2. Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Target Kinerja	
		RPJMD	Sasaran
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	5,7	5,7
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	36,87	36,87
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	69,59	69,59
4	Gini Rasio	0,281	0,281
	Indeks Wiliamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,306	0,306
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,92	4,92
7	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	294.489	294.489
8	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,34	5,34
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,48	77,48
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	74,83	74,83
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62	14,62
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,58	9,58
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12.074	12.074
10	Penurunan Intensitas Emisi	-	52,62-62,27

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh Lapangan Usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja PMTB sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian, meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor



stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tecermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tecermin dari persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun. Kondisi penduduk miskin secara umum juga lebih baik yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang lebih kecil antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang lebih baik ini juga diindikasikan merata sejalan dengan kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin mengecil.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Lokal

- Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
- Mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal seperti jagung, karet, dan kelapa sawit.
- Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDesa dan koperasi produktif.

Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

- Mendorong penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal dan padat karya.
- Perluasan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan peningkatan akses pendidikan vokasi.
- Penurunan kemiskinan ekstrem secara bertahap menuju 0%.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Daerah

- Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran.
- Mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi lokal (kuliner, kriya, dan pariwisata nagari).

Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Terintegrasi dan Merata



- Pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan produksi, irigasi, jembatan desa) untuk mendukung distribusi hasil produksi dan akses pasar.
- Penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, internet) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Peningkatan Daya Saing dan Kualitas SDM Lokal

- Penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan sektor unggulan.
- Peningkatan indeks modal manusia (IMM) dan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Daerah

- Digitalisasi layanan ekonomi, pertanian, dan keuangan desa.
- Mendorong riset terapan dan inovasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 3.2. Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	RPJMD 2025	RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,54	
2	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	63,22	
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. Juta	36,7	
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,26	
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74,58	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,03	
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	8,87	
	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	12.437	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	5,86	
6	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	13.426	



No	Indikator	Satuan	RPJMD 2025	RKPD 2026
7	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,41	
8	Gini Ratio	Indeks	0,232	
9	Inflasi			

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam



mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah, serta menggunakan rasio-rasio keuangan.

Tabel 3.
Perkembangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan tahunan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
4	PENDAPATAN DAERAH	990.191	978.921	911.077	937.513	970.830	-0,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.878	82.829	108.011	115.996	108.347	7,68
4.1.01	Pajak Daerah	17.752	20.496	21.634	23.692	25.141	10,41
4.1.02	Retribusi Daerah	1.862	2.411	2.760	2.450	65.935	860,4
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.064	3.525	4.324	4.832	5.348	7,9
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.201	56.398	79.293	85.022	11.923	-19,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	872.426	838.657	786.486	819.526	850.690	-0,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325	787.385	727.854	770.899	792.449	-1,17
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498	713.844	673.570	707.812	716.383	-0,52
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.148	33.663	29.385	35.246	37.078	36,2
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.356	472.416	472.528	489.147	512.945	1,81



Kode Akun	Uraian Akun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan tahunan
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	0	0	0	300.805		
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	0	0	-	188.342		
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK	0	0	0	58.668		
	BIDANG PENDIDIKAN	0	0	0	66.923		
	BIDANG KESEHATAN	0	0	0	26.329		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	0	0	0	36.422		
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.942	121.884	64.466	56.562	34.621	-19,19
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053	85.881	107.191	126.857	131.739	11,98
4.2.01.02	Insentif Daerah	46.554	17.000	6.528	8.601	20.745	-13,86
4.2.01.05	Dana Desa	53.273	56.540	47.756	54.486	55.321	0,96
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101	51.272	58.632	48.627	58.241	10,43
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.101	51.272	58.632	48.627	58.241	10,43
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887	57.434	16.580	1.991	11.793	-16,55
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466	26.548	16.580	1.991	102	-23,97
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.421	30.886	-	-	11.691	-15,98
5	BELANJA DAERAH	985.747	917.048	939.371	931.495	1.013.183	0,7
5.1	BELANJA OPERASI	659.027	638.707	696.160	680.834	793.194	5,09
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043	380.290	380.049	373.990	454.926	2,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.948	246.613	304.834	278.076	304.014	15,87
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	54.875	11.804	11.277	28.767	34.254	-9,39
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161	-	-	-	-	-25
5.2	BELANJA MODAL	194.525	166.253	132.791	137.284	102.189	-11,87
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751	51.542	48.053	39.031	24.238	-15,64
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.053	85.986	15.750	45.092	28.954	-17,3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.664	22.155	66.364	50.168	45.055	7,49
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057	6.570	2.624	2.752	3.810	65,09



Kode Akun	Uraian Akun	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan tahunan
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	242	131	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924	164	369	3.924	2.486	-22,51
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924	164	369	3.924	2.486	-22,51
5.4	BELANJA TRANSFER	107.271	111.924	110.051	109.453	115.315	1,87
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933	111.924	2.660	1.217	1.984	28,17
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.338	-	107.391	108.236	113.331	1,64
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3.893	8.334	70.207	40.413	46.431	273,13
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893	8.334	70.207	41.913	46.431	273,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893	8.334	70.207	41.913	46.431	273,13
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	1.500	-	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500	-	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
6.3	SILPA	8.337	70.207	41.913	46.431	4.077	-12,77

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

2.5.2.1. Pendapatan Daerah

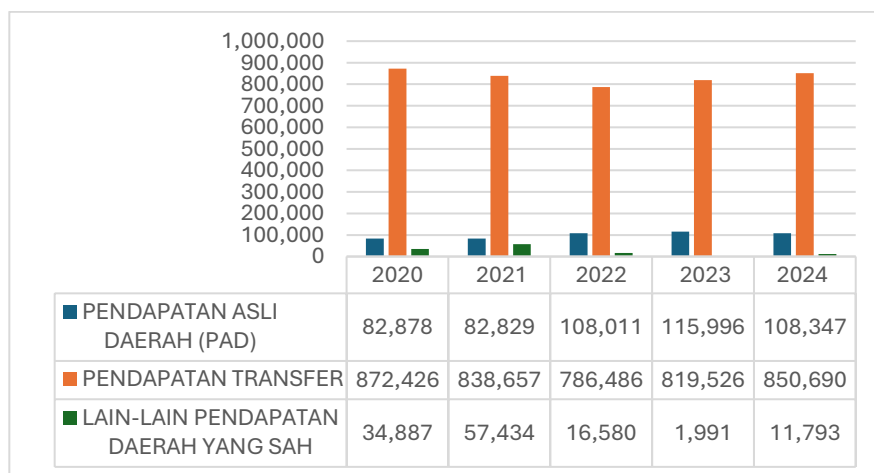
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah



Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Gambar 3- 1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari data transfer, yaitu transfer pusat dan transfer dari pemerintah provinsi. Total ketergantungan terhadap dana transfer berada pada kisaran 86 sampai dengan 87 persen untuk setiap tahunnya. Sedangkan peran PAD hanya sebesar 11,16 persen, adanya tren meningkatnya PAD terhadap perannya dalam pendanaan pembangunan, namun hal ini belum memperlihatkan kemandirian keuangan daerah yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat saat adanya refocusing anggaran yang dilakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena adanya kasus covid-19, maka cukup berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga disini dapat dilihat pentingnya meningkatkan kemandirian dan ketangguhan perekonomian daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang tantangan yang bisa saja terjadi ke depannya.

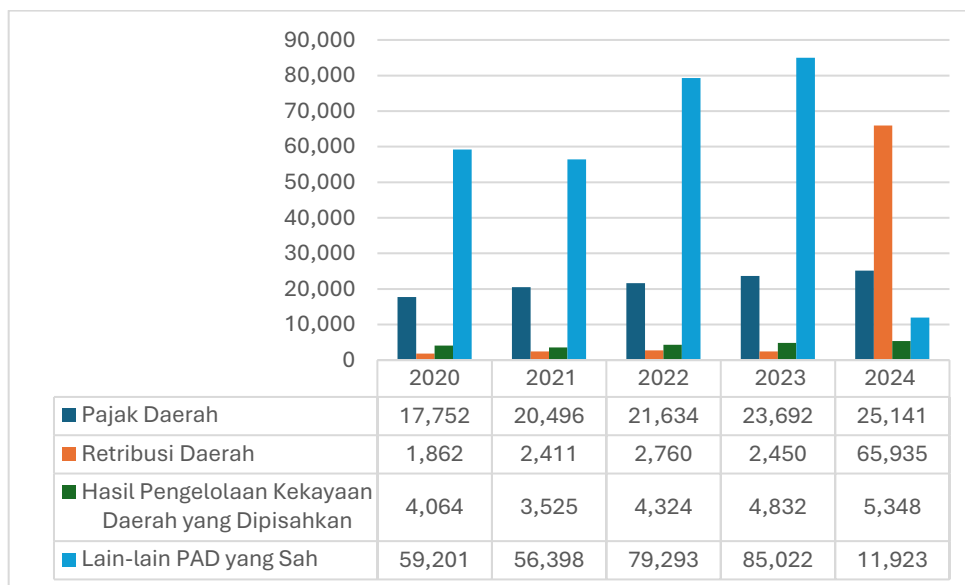
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyetaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Gambar 3- 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Secara umum setiap tahunnya PAD cenderung memperlihatkan peningkatan, pada tahun 2020 hingga tahun 2023 penyumbang nilai PAD terbesar tercatat dari lain-lain PAD yang sah, dimana BLUD merupakan pemegang peran terbesarnya, dan pada tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur penempatan BLUD pada pengelolaan APBD, dimana BLUD terjadi perpindahan penempatan dari lain-lain PAD yang sah dipindahkan menjadi retribusi daerah.

B. Pendapatan Transfer

Untuk kabupaten/ kota, pendapatan transfer yang diterima berasal dari dana transfer pusat atau disebut dengan Transfer ke daerah (TKD), dan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah provinsi yang berada di atasnya, ataupun berasal dari transfer pemerintah daerah lain atau disebut dengan pendapatan transfer antar daerah.

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat

Pengalokasian transfer ke daerah setiap tahunnya menjadi bagian dari peraturan presiden tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun

- 1) DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas alam, panas bumi, dan perikanan
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan



kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.

Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Besaran DAU dapat dilihat dari formula berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

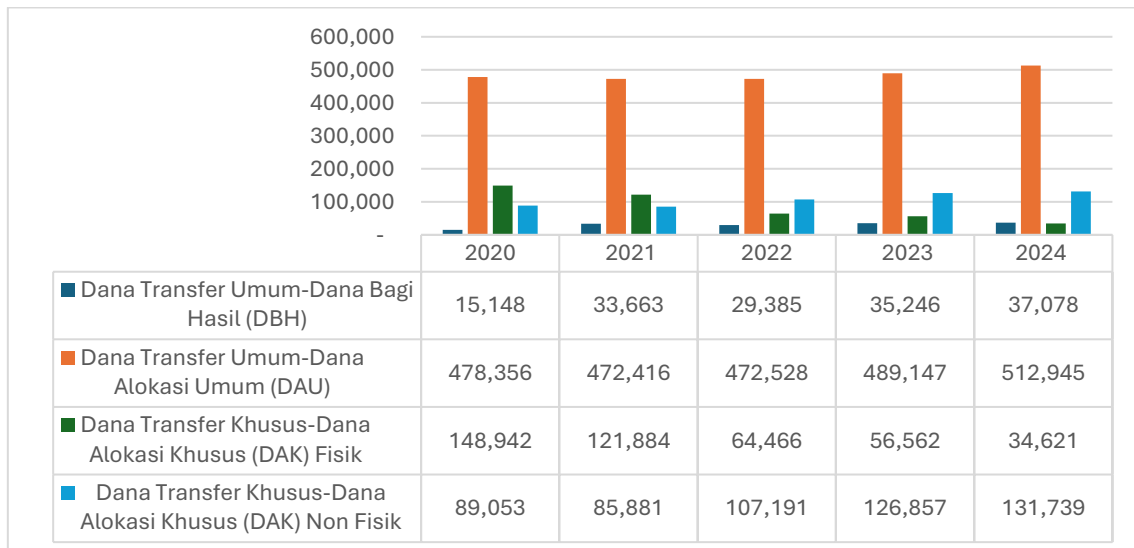
Besaran alokasi dasar diperoleh dari besaran gaji PNS Daerah, sedangkan celah fiskal dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan dengan alokasi DAU celah fiskal nasional. Untuk celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Sedangkan kapasitas fiskal ditetapkan setiap tahunnya oleh kementerian keuangan, di tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.07/2020, kapasitas fiskal Kabupaten Dharma Raya termasuk daerah kategori rendah yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,540. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU sejak tahun 2016, bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan data penduduk dari BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terdiri dari DAK fisik, dan DAK non fisik. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarnya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikordinasikan oleh Bappenas. dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sesuai

dengan arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Gambar 3- 3 Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)

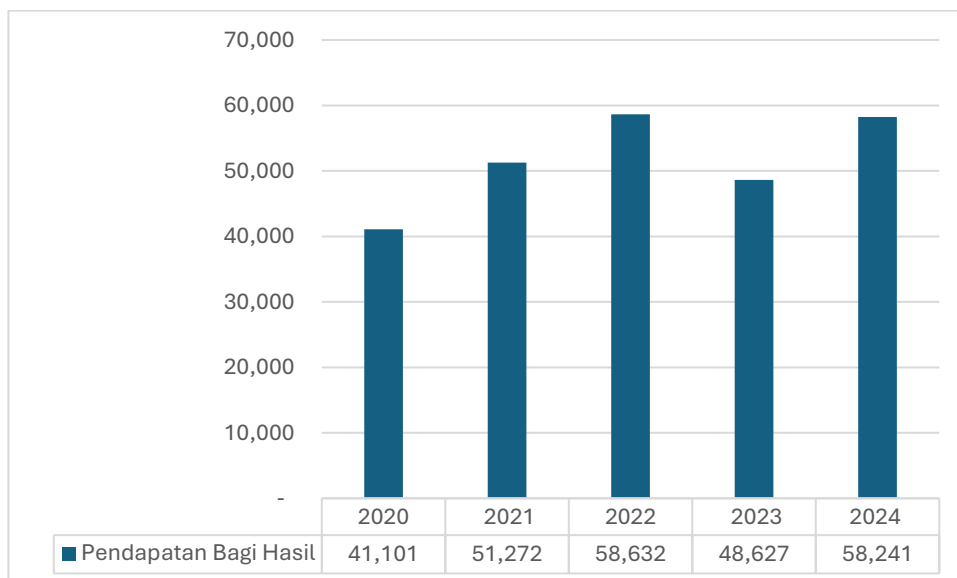


Pada pendapatan transfer dari pusat, maka dana alokasi umum (DAU) menjadi sumber pendanaan utama dan terbesar dalam pendanaan pembangunan daerah pada APBD. Bagi Kabupaten Dharmasraya DAU merupakan sumber pendanaan utama dalam pemenuhan belanja pembanguann daerah terutama terkait dwngan belanja prioritas dan belanja yang harus ipenuhi sesuai dengan priorotas daerah.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah diperoleh dari pendapatan bagi hasil, serta batuan keuangan. Pada APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 hingga tahun 2024 maka pendapatan transfer ini berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun bagi hasil pajak tersebut

Gambar 3- 4 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Pendapatan transfer yang diperoleh dari bagi hasil pajak menunjukkan rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar 10 persen

2.5.2.2. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Belanja daerah merupakan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah ditujukan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja, maka wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya :



3.3. ARAH KEBIJAKAN KERANGKA PENDANAAN

2.3.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat perubahan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memperoleh pendanaan daerah sesuai potensi daerah yang ada secara optimal.

A. Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam optimalisasi pajak daerah adalah :

1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi
2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak
3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah
5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya
6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB
7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah

Selain kebijakan diatas, beberapa strategi dan poin penting terkait dengan kebijakan pendapatan Asli Daerah diantaranya:



1. **Analisis Kebutuhan Finansial:** Sebelum menetapkan kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah biasanya melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan finansial untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
2. **Penyusunan Kebijakan:** Kebijakan ini melibatkan penyusunan atau revisi peraturan daerah terkait tarif dan pengenaan pajak serta retribusi. Hal ini mencakup penilaian kembali tarif yang berlaku, kemungkinan pengenalan tarif baru, dan perubahan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini.
3. **Konsultasi Publik:** Pemerintah daerah sering kali melibatkan konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami pandangan dan dampak dari peningkatan pajak dan retribusi terhadap masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
4. **Tujuan Pembangunan dan Pelayanan Publik:** Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
5. **Pengelolaan yang Efisien dan Transparan:** Penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi dengan efisien dan transparan. Ini termasuk dalam hal pemungutan yang tepat waktu, pemakaian dana yang sesuai dengan kebutuhan publik, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari peningkatan pajak dan retribusi tersebut. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, respons dari sektor bisnis, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui :

1. Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya
2. Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya
3. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.



C. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari "Lain-lain PAD yang sah"

Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2026 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu :

1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah
2. Sedangkan sumber lainnya seperti pendapatan denda, jasa giro atau yang lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah given berdasarkan data teknis dan besaran pendapatanyang dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya :

▪ *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*

1. Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit. Alokasi DBH Sawit dihitung dengan formula Luas lahan, produktivitas CPO, alokasi Kabupaten/Kota berbatasan dan alokasi Kinerja Selanjutnya untuk optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sawit, mengingat Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah daerah Pada Tahun 2025 telah melakukan audiensi dengan Dirjen perimbangan keuangan terkait luasan Perkebunan sawit di Kabupaten Dharmasraya, menurut data BPS yang juga di pakai oleh Dirjend Perimbangan Depkeu, luas sawit Dharmasraya sebesar 62.000 Ha, sedangkan data luas kebun sawit yang tercatat pada Dinas Pertanian seluas lebih kurang 84.000 Ha, terjadinya selisih luas kebun sawit ini karena adanya perbedaan pencatatan kebun sawit HGU .PT.TKA seluas 18.000 Ha (berada di wilayah Dharmasraya) namun di catat masuk wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan data sawit PT.Pratama Sakato (Incasi raya group) seluas 4000 Ha wilayah Dharmasraya di catat di Kabupaten Sijunjung hal ini menyebabkan terjadinya selisih data luas kebun sawit Kabupaten Dharmasraya kurang lebih 22.000 Ha. dengan adanya



konfirmasi selisih luasan kebun sawit di Kabupaten Dharmasraya ke BPS diharapkan adanya kenaikan DBH sawit tahun 2026. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Alokasi DBH Sawit sebesar Rp10.982.777.000,-, Tahun 2024 sebesar Rp9.701.504.000,- dan Tahun 2025 sebesar Rp4.080.407.000,-, Kemudian melalui PMK No, 89 TAHUN 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdapat lebih salur DBH sawit tahun 2023 sebesar Rp5.679.951.000,-.

3. Peluang dana pusat lainnya yang dapat diusahakan adalah berupa DID yang didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya

- ***Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat***

Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari provinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai prioritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, bagan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarnya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 3- 5 Proyeksi besaran APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2030

Kode Akun	Uraian Akun	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	1.060.821.552.398	1.114.453.225.581	1.162.277.289.935	1.281.694.140.528	1.341.361.038.946
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.668.377.398	186.974.366.831	219.456.463.247	328.514.247.506	377.804.126.274
4.1.01	Pajak Daerah	56.445.222.524	62.089.744.777	62.829.871.255	75.128.591.180	82.641.450.298
4.1.02	Retribusi Daerah	92.122.050.868	102.357.834.298	132.357.834.298	167.357.834.298	207.357.834.298
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.947.929.006	15.047.929.006	16.447.929.006	77.847.929.006	79.247.929.006
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.153.175.000	7.478.858.750	7.820.828.688	8.179.893.022	8.556.912.672
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.000.000.000	920.000.000.000	935.000.000.000	945.000.000.000	955.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.153.175.000	7.478.858.750	7.820.828.688	8.179.893.022	8.556.912.672
5	BELANJA DAERAH	1.054.180.120.592	1.107.894.965.139	1.155.803.864.284	1.275.307.246.364	1.335.062.406.899
5.1	BELANJA OPERASI	871.129.199.087	921.183.025.204	965.357.685.550	990.944.057.275	1.017.357.699.465
5.1.01	Belanja Pegawai	610.982.463.466	623.055.978.037	635.431.337.037	648.116.083.037	661.117.943.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.948.916.730	283.645.271.898	315.154.937.739	327.761.135.249	340.871.580.659
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	14.197.818.891	14.481.775.269	14.771.410.774	15.066.838.989	15.368.175.769
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
5.1.07	Belanja Imbalan	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	53.111.798.422	54.174.034.391	55.257.515.078	146.470.752.160	177.054.421.767
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.743.909.463	18.098.787.653	18.460.763.406	18.829.978.674	19.206.578.247
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.905.185.233	21.323.288.937	21.749.754.716	22.184.749.811	22.628.448.807
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.159.179.600	10.362.363.192	10.569.610.456	100.889.089.445	130.561.125.797
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.833.114.406	3.909.776.694	3.987.972.228	4.067.731.673	4.149.086.306
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	470.409.720	479.817.914	489.414.273	499.202.558	509.186.609
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.970.500.000	10.169.910.000	10.373.308.200	10.580.774.364	10.792.389.851
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.970.500.000	10.169.910.000	10.373.308.200	10.580.774.364	10.792.389.851
5.4	BELANJA TRANSFER	119.968.623.083	122.367.995.544	124.815.355.455	127.311.662.564	129.857.895.816
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.236.997.730	5.341.737.685	5.448.572.438	5.557.543.887	5.668.694.765
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114.731.625.353	117.026.257.860	119.366.783.017	121.754.118.677	124.189.201.051
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.641.431.806	6.558.260.442	6.473.425.651	6.386.894.164	6.298.632.047
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.158.568.194	4.241.739.558	4.326.574.349	4.413.105.836	4.501.367.953
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.158.568.194	4.241.739.558	4.326.574.349	4.413.105.836	4.501.367.953
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-	-



Kode Akun	Uraian Akun	2026	2027	2028	2029	2030
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.800.00 0.000	10.800.00 0.000	10.800.00 0.000	10.800.00 0.000	10.800.00 0.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000 .000	1.500.000 .000	1.500.000 .000	1.500.000 .000	1.500.000 .000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.300.000 .000	9.300.000 .000	9.300.000 .000	9.300.000 .000	9.300.000 .000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-	-	-
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	- 0	- 0	- 0	- 0	

Sumber : BKD Tahun 2025

2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

1.1.1 Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.



Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang ditentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1.1.2 Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja



pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

1.1.3 Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2026 tidak dialokasikan.

1.1.4 Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2026 tidak dialokasikan.

1.1.5 Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

1.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya.

1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan belanja pengembalian pelampauan pendapatan atau kelebihan dana transfer.

1.4 Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol



3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30 orang
2. Belanja rutin dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, serta belanja operasional lainnya
3. Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalokasiannya
4. Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja, serta pembiayaan KPBU PJU yang masih berlanjut di tahun 2026

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2026 dialokasikan untuk penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD, dimana penambahan modal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan pada tahun berikutnya berupa peningkatan pendapatan deviden.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta mensinergikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, dan top down-bottom-up planning. Selain itu, digunakan pendekatan perencanaan berbasis kewilayahan yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan sesuai dengan potensi daerah.

Perumusan prioritas RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan isu strategis yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan beserta hasil evaluasi pembangunan pada tahun lalu (tahun 2025), serta memperhatikan arahan dan direktif Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, maka perumusan sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan memperhatikan :

1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 – 2045;
2. Evaluasi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026;
3. Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 – 2029;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043;
5. RPJMN Tahun 2025 – 2029;
6. Tema dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026; dan
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Selain itu, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Korelasi terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kegiatan prioritas bupati dan wakil bupati periode 2025-2029.
2. Relevansi dengan permasalahan dan isu strategis global, nasional dan provinsi yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya, yakni konektifitas antara wilayah, belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar,



hilirisasi komoditi unggulan sehingga daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah.

3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang di fokuskan pada pemberdayaan ekonomi berbasis komoditis, akses dan pelayanan dasar yang adil, peningkatan kualitas dan daya saing dan reformasi tata kelola dan keuangan daerah.
4. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap difokuskan pada sektor utama distribusi PDRB yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Informasi dan Komunikasi.
5. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
6. Relevansi dan keterkaitan terhadap permasalahan dan isu strategis daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan wilayah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC).



Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut didukung melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional dan 5 (lima) arahan direktif presiden. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 memastikan keberlanjutan Pembangunan sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden RI yaitu :

Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arahan direktif presiden meliputi :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Penerapan Digitalisasi Pendidikan
3. Pengentasan Kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif
4. Pengelolaan Sampah Terpadu
5. Sekolah Rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026. Masing-masing sasaran makro pembangunan



nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

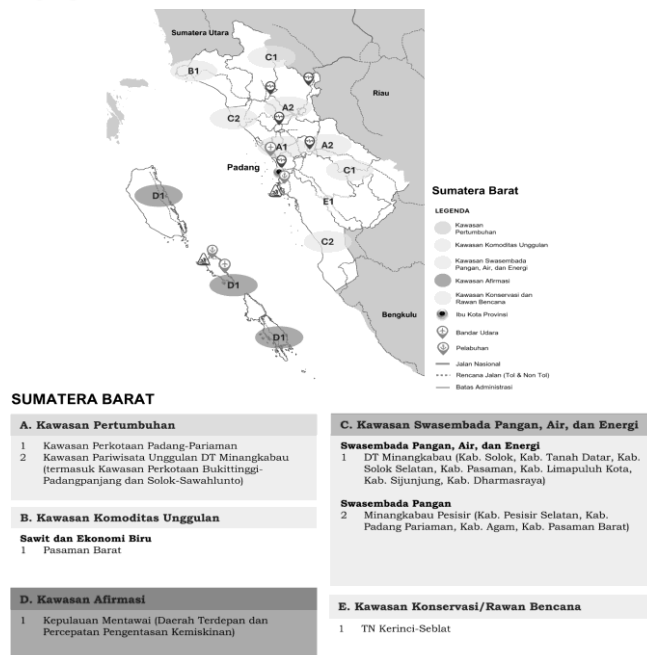
Tabel 4.1
Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026

Indikator	Target Nasional
LPE (%)	5,8 - 6,3
PRDB per Kapita (Rp Juta)	5.870 (GNI per Kapita, US\$)
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 - 7,50
Rasio Gini	0,377–0,380
Indeks Modal Manusia	0,57
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14 %
IKLH Daerah	76,67
TPT (%)	4,44% – 4,96%

Berdasarkan kebijakan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat”, dengan highlight prioritas pembangunan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Highlight Intervensi Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Highlight Intervensi



Sumber : RKP Tahun 2026

[illegible]

Dalam kerangka RKP Tahun 2026, intervensi kewilayahan di Sumatera Barat diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan wilayah, peningkatan konektivitas antarmasyarakat, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Adapun highlight indikasi intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
		Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.
	Provinsi Sumatera Barat	Direktif Presiden:
		Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
	Provinsi Sumatera Barat	Direktif Presiden:
		Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.
		Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output:
		Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;
		SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.
	Provinsi Sumatera Barat	Direktif Presiden:
		Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui:
		Peningkatan kapasitas usaha koperasi
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.
		Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.
	Provinsi Sumatera Barat	Direktif Presiden:
		Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: Pembangunan Sistem Pengelolaan
		Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Padang
	Provinsi Sumatera Barat	Direktif Presiden:



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output;
		Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur;
		Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan;
		Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;
		Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH);
		Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih;
		Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh Kelautan dan Perikanan;
		Kartu Prakerja;
		Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha;
		Alat dan mesin pertanian pra-panen;
		Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminansia potong, ternak unggas, dan ternak lainnya;
		Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan;
		Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan;
		Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat;
		Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya;
		Pemuda yang terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan;
		Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).
		Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output;
		Bantuan PBI JKN;
		Kartu Indonesia Pintar;
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
		Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako;
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
		Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;
		Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
		Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik;



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
		Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana;
		Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial;
		Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.
A1	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman Kota Padang Kota Pariaman Kab. Padang Pariaman	Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus
		Preservasi jalan ruas Padang-Painan- Kambang
		Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan
		Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman
		SMA yang direvitalisasi
		Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit
		(SIHREN) (LR-11)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)
A2	Kawasan Pariwisata Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi- Padangpanjang dan Kawasan Perkotaan Solok- Sawahlunto) Kab. Tanah Datar Kab. Agam Kab. Solok Kab. Limapuluh Kota Kab. Sijunjung Kab. Dharmasraya Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Payakumbuh	• Penataan waterfront Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pembangunan Jalan Tol Padang- Bukittinggi- Pekanbaru • Pembangunan Fly Over Sitingau Lauik • Pembangunan TPST Bukittinggi • SMA yang direvitalisasi • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit • (SIHREN) (LR-11) • Inkubasi startup gim • Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan Industri Gim • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau Kab. Tanah Datar Kab. Agam Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Limapuluh Kota Kab. Sijunjung Kab. Dharmasraya Kab. Pasaman	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Panti Rao
		Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Batang Sinamar
		Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima
		Membangun infrastruktur pertanian
		Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani
		Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian
		Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air
		Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Peningkatan SPAM
C2	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir Kab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Barat	Pembangunan jaringan Irigasi pada DI Sawah Laweh Tarusan.
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Batang Anai
		Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima
		Membangun infrastruktur pertanian
		Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani
		Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian
		Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air
		Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian
D1	Kawasan Afiriasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Kab. Kep. Mentawai	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		Pembangunan jalan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai
		Pembangunan PLTS
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat Kab. Pasaman Barat	RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
		Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis
		Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air
		Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian
		Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan
		Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
E1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Kerinci-Seblat Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Selatan Kab. Dharmasraya.	Perlindungan dan pengamanan hutan
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Sumatera Barat	Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
	Provinsi Sumatera Barat	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan
		Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi
		Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk
		Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T
		Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok
		Pelindungan dan pelestarian warisan budaya
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kab. Pesisir Selatan
		Pengembangan Sistem Drainase di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kab. Pesisir Selatan
		Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru di Kab. Sijunjung
		Pengembangan jalan dan jembatan di Kawasan Transmigrasi Muara Takung- Kamang Baru di Kab. Sijunjung
		Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional
		Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran
		Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan.



Kode	Lokasi	Highlight Intervensi
		Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM
		Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sekolah Unggul
		Melaksanakan pembangunan Sekolah Unggul
		Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran
		Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh
		Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat
		Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan
		Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis
		Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah
		Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin
		Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis
		Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
		Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
		Peta kerawanan praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik
		Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha
		Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM

Adapun sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang ditetapkan pada RKP Tahun 2026 yaitu:

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Indikator	Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat
LPE (%)	5,2 - 5,7
PRDB per Kapita (Rp Juta)	63,4 - 66,3
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,5
Tingkat Kemiskinan (%)	3,39 - 4,39



Indikator	Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat
Rasio Gini	0,266 - 0,269
Indeks Modal Manusia	0,6
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62 - 62,27
IKLH Daerah	78,16
TPT (%)	5,16 - 5,60

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu: "Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan" Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni: "Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Fondasi Dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini diharapkan dapat menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.
2. Transformasi Sektor Strategis Mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan



nasional atau daerah. Seperti halnya sektor pertanian dan perikanan yang diitransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau smart farming). Sektor pariwisata yang dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal. Sektor industri Kecil/UMKM yang diarahkan pada penguatan industri kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif** : Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin,

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone atau tonggak pencapaian pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan :

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029; Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya yang tertuang pada rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029; RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043; Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 dan Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Sumatera Barat guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan lima tahun pertama (Perkuatan Fondasi Transformasi) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang menjadi visi pembangunan daerah yaitu



Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun Misi bupati dan wakil bupati terpilih pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien
3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan
4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5. Transformasi ekonomi
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029

VISI DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 :	Pemerataan Akses dan pengembangan Infrastruktur Daerah	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif



VISI DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata		Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan
Misi 2 : Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel
		Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital
		Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing
Misi 3 : Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	meningkatnya kualitas lingkungan
		meningkatnya resiliensi terhadap bencana
Misi 4 : Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata
		Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
Misi 5 : Transformasi ekonomi	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro	meningkatnya pendapatan masyarakat dan nilai tambah sektor unggulan daerah
		mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran
Misi 6 : Transformasi sosial dan budaya berbasis ABS-SBK	Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan peningkatan kerukunan antar umat beragama

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. Target tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dengan arah kebijakan pembangunan yang direpresentasikan melalui tema



pembangunan **"PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA"**. Tema ini menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang berfokus pada penguatan dasar-dasar perubahan (transformasi) struktural dan kultural, sebagai pijakan utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya.

Penjelasan Tema Pembangunan Tahun 2026 yaitu:

Perkuatan Fondasi, sesuai dengan tujuan pelaksanaan periode 5 tahun pertama RPJPD tahun 2025-2045 yang bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Dharmasraya mengacu pada penguatan elemen-elemen dasar pembangunan daerah, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), tata kelola pemerintahan yang baik, serta stabilitas sosial dan ekonomi, Fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pelayanan publik, serta penguatan regulasi dan kebijakan pembangunan yang responsif dan inklusif.

Transformasi, yang bermakna dalam menunjukkan perubahan yang menyeluruh dari aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola, dengan mendorong inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan, transformasi ekonomi diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan UMKM, dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri kreatif dan transformasi sosial menekankan pada pengurangan ketimpangan, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dharmasraya Sejahtera Merata, merupakan makna dari Visi jangka menengah Kabupaten Dharmasraya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, dan merata secara geografis, merujuk pada upaya pemerataan pembangunan hingga ke daerah pinggiran, mengurangi disparitas antarwilayah, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Tema Pembangunan ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026.

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur (konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar seperti pengelolaan air minum, persampahan, sanitasi dan lain-lain) dan pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.
2. Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada hilirisasi dan Industrialisasi komoditi unggulan (pertanian dan perikanan) dengan mengembangkan, memanfaatkan dan meningkatkan komoditi unggulan daerah dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mensukseskan swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekstensifikasi pertanian, penyediaan sarana pertanian berupa bibit unggul dan bersertifikat, penyediaan pupuk dan penyediaan alsintan,



Pembangunan/Rehabilitasi prasarana infrastruktur pertanian antara lain irigasi, jalan usaha tani (JUT), Jalan Produksi, embung, dam parit serta pelaksanaan kegiatan *One Village One Product* (OVOP). Komitmen ini akan sangat berdampak nantinya bagi peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tercipta masyarakat Dharmasraya yang sejahtera merata. Selain itu juga difokuskan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan membangun perusahaan-perusahaan daerah, membangun koperasi merah putih. Perkuatan ekonomi ini juga sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

3. Memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat secara merata. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membangun sekolah rakyat sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas serta mendukung prioritas nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan konsep Kampung Inggris, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi masyarakat. Melalui program ini, memberikan kesempatan bagi penduduk Dharmasraya untuk menguasai bahasa internasional yang dapat meningkatkan daya saing dan peluang kerja di era globalisasi. Dengan upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran dengan harapan bahwa anak-anak dan masyarakat Dharmasraya dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan merata, sehingga mampu berkontribusi dalam membangun Kabupaten Dharmasraya yang sejahtera secara keseluruhan.

Selain itu pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya, termasuk penurunan angka stunting, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Salah satu langkah yang kami ambil adalah dengan mengintensifkan program-program kesehatan preventif dan kuratif di setiap wilayah. Fokus pada penurunan angka stunting dengan mengimplementasikan program gizi yang menyeluruh, termasuk edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta pemberian suplemen gizi yang diperlukan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh komplikasi saat melahirkan, mengembangkan RSUD Sungai Dareh menjadi rumah sakit trauma center yang siap memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan kecelakaan dan trauma, melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas serta pelayanan di puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah dan meningkatkan puskesmas menjadi rumah sakit type D, guna memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.



4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

No	Indikator	RPJMD	RKPD Kab.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)		
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)		
3	Tingkat Kemiskinan (persen)		
4	Gini Rasio		
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)		
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025, Rancangan RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025-2029 dan hasil analisis Tahun 2025

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Pada dasarnya prioritas pembangunan daerah merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Penyusunan prioritas



pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penentuan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada RKP Nasional Tahun 2026.
- b. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat
- c. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.
- d. Isu Strategis, dan
- e. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.
- f. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah.

Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah. "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal



pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :
 - a. melanjutkan pembangunan infrastruktur
 - b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
 - c. penguatan koperasi
 - d. mengembangkan industri kreatif
 - e. pendalaman sektor keuangan
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :
 - a. membangun desa dan membangun dari desa
 - b. pemerataan ekonomi
 - c. Memberantas kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :
 - a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis
 - b. Melestarikan budaya
 - c. Penanganan bencana

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah- langkah berupa program hasil terbaik cepat. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan



untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Merujuk pada Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dimana pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tema pembangunan tahun 2025-2029 wilayah Sumatera yaitu Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Tabel 4.6
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.		
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.		
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.		
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.		
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.		
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.		
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis		

Sumber : Permendagri No.10 Tahun 2025

Sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2026 Dalam RKP Tahun 2026, pada arah kebijakan kewilayah di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya termasuk pada kawasan swasembada pangan, air, dan energi serta kawasan swasembada pangan serta kawasan konservasi/rawan bencana Taman Nasional Kerinci Seblat. Highlight Intervensi tahun 2026 dan sesuai dengan Direktif Presiden:

Tabel 4.17
Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Dalam Mendukung Asta Cita

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
1.	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6.	Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
7.	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9.	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10.	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11.	Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15.	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta
16.	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18.	Penanaman Modal	Pemenuhan Target Realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
20.	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
21.	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
22.	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
23.	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24.	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	
25.	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan
26.	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27.	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28.	Kehutanan		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru



NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
30.	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31.	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
32.	Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
33.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sumber : Permendagri No.10 Tahun 2025

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber



daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.18
Program Strategis Nasional (ProSN)

NO	ProSN	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota



4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran 4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) 2. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber : Permendagri No.10 Tahun 2025

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

4.2.2.1. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2026

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni :

A. Bidang Pendidikan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- b. Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- c. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- d. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set



- perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus.
 - f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
 - Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

B. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :



- a. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darurat dengan melakukan :
 - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
 - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
 - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
 - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
 - melakukan penyuluhan
 - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
 - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
 - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
 - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerimaan layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :



- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
 - program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.
 - Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :
 - pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering
 - Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun
 - Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena
 - relokasi program pemerintah daerah.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
- b. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota
 - perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas
 - personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi : pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
- d. Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah



sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

F. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

2. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
4. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
5. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
6. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.2.2. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan



tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Pada rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Prioritas 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
7. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
8. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
9. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialisasi seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
10. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
12. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.



Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
2. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni
3. Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
2. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
3. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
4. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
6. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
7. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.



Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari.
4. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
6. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan ecommerce, dan kemitraan dengan sektor swasta. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasi, dengan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.
8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.



Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam ecommerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
2. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
6. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau "Minang Halal Hub" di kancah nasional dan internasional melalui



promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.

Prioritas Pembangunan 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.
2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang,
3. Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
4. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
5. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas.
7. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
8. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
9. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah



tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

10. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lainn Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program "Masjid Ramah Anak dan Remaja" serta "Surau Digital" akan menjadi inovasi ke depan.
4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program "Sekolah Orang Tua," konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.



7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisata Berbasis Kompetensi dan Keramahmatan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata.
3. Program "Hospitality for Nagari Tourism" akan dilaksanakan di desa wisata. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti "Minang Heritage Tourism" dan "Rendang Valley" akan diperkuat.
4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal.
6. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
7. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis.



Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.

8. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
9. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

1. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.
2. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.
3. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan Public Service Super App yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.
4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
5. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, whistleblower system, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama dengan



- KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
 7. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan data-driven planning, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
 8. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum tergali, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.
 9. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.
 10. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
 13. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara Kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.
 14. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

Dalam kebijakan pemerataan wilayah di Provinsi Sumatera Barat, terdapat ketimpangan di beberapa kabupaten. Dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu pemerataan dengan penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Untuk Kabupaten Dharmasraya ruas jalan yang perlu didorong pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan pemerataan pembangunan wilayah adalah ruas jalan Abai Sangir (Kab. Solok Selatan) - Sungai Dareh (Kab. Dharmasraya).



Selain itu posisi Kabupaten Dharmasraya sebagai wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat, dimana pada arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan dengan provinsi lain yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yaitu:

1. Pengembangan potensi ekonomi unggulan berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
2. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
3. Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.
4. Peningkatan sumberdaya manusia dalam upaya transfer knowledge.
5. Penyusunan dan implementasi regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.
6. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
7. Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas program atau kegiatan antar wilayah perbatasan untuk percepatan pengembangan Kawasan.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2026 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yaitu **ANNISA SUCI RAMADHANI, SH., LL.M** dan **LELI ARNI, S.Pd.,M.Si** yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang maupun penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk



mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Tema Pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2026 adalah **"PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA"**.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rancangan RPJMD 2025-2029, dimana 6 misi sekaligus menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memperhatikan:

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
3. Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas
4. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka program prioritas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026
1.	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
2.	Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien
3.	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan
4.	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata
5.	Transformasi ekonomi	Transformasi ekonomi
6.	Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Adapun tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari prioritas pembangunan (PP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



1. Prioritas Pembangunan 1 : Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan transformasi Dharmasraya menuju daerah yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penghubung antarwilayah, pemerataan layanan dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas strategis untuk mempercepat keterhubungan antarwilayah, mendorong aktivitas ekonomi lokal, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan wilayah yang layak huni dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Untuk lebih jelasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 : Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata Tahun 2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 1	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.			
	Tujuan : Pemerataan Akses dan pengembangan Infrastruktur Daerah	Indeks Kinerja Infrastruktur	indeks	65
		Stok Infrastruktur terhadap PDRB	persen	
	Sasaran : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01
		Indeks kinerja sistem irigasi	indeks	
	Sasaran : Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	65

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025

Arah kebijakan pembangunan pada Prioritas Pembangunan Membangun Infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata :

1. Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.



2. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan kabupaten yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, peningkatan akses air bersih, pemerataan jaringan listrik di seluruh nagari, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari.
3. Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur nagari dalam menuju nagari mandiri
4. Penguatan infrastruktur air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan layanan publik
5. Penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan longsor, seperti tanggul, saluran drainase, dan kanal pengendali
6. peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan serta regulasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan air baku
7. peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan dan meningkatkan pelayanan UPT SPAM untuk mewujudkan pendirian PDAM
8. Peningkatan Konservasi sumberdaya air
9. pengelolaan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan (sampah, limbah dan drainase)
10. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan dan peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu salah satunya dengan penerapan sistem pengolahan sampah terpadu dari sumber sampah.
11. Fasilitas Penyediaan Perumahan Yang Terintegrasi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam mewujudkan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
12. Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
13. Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten dan jalan lingkungan sebagai akses utama masyarakat
14. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata
15. Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil komoditi unggulan dalam rangka mendukung program One Village One Product (OVOP)
16. Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan kabupaten
17. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala kawasan (IPLT)
18. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
19. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
20. Percepatan pemerataan jaringan listrik dan layanan telekomunikasi/internet ke wilayah terpencil dan blank spot.

2. Prioritas Pembangunan 2: Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien



Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas strategis. Pemerintahan yang berjalan secara transparan, profesional, efektif, dan efisien merupakan landasan utama untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas, responsif, serta pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel.

Melalui prioritas ini, arah kebijakan diarahkan pada reformasi birokrasi yang menyeluruh, peningkatan kualitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan dan partisipasi publik. Pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara layanan, tetapi juga sebagai fasilitator, penggerak inovasi, dan penjaga keadilan sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari prioritas pembangunan mewujudkan Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien dengan tujuan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berbasis teknologi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terciptanya birokrasi yang responsif, kompeten, dan berintegritas dan Pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 2 : pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.21
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien Tahun 2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 2	Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien			
	Tujuan : meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	indeks	4,1
		indeks reformasi birokrasi	indeks	
		Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,55
	Sasaran : Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP	bobot	BB
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
		indeks reformasi hukum	indeks	70,1
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	67
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86
		Indeks SPBE	indeks	3,7
		Indeks masyarakat digital indonesia	indeks	55
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,1
	Sasaran : Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase nagari mandiri	persen	53,85

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025

Arah kebijakan pembangunan pada prioritas Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien yaitu :

1. Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu
2. Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan
3. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan ekosistem inovasi untuk penguatan daya saing daerah
4. Penguatan system rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan
5. Menjadi Birokrasi Terbuka
6. Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Memperkuat Inovasi Daerah Fondasi Keterbukaan dan Digitalisasi
7. Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi
8. Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik
9. Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital
10. Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan
11. Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja
12. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi
13. Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN
14. Pengembangan system manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur



15. Melakukan penguatan system meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
16. Mengembangkan kompetensi melalui talent pool
17. Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN
18. Pengembangan system manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur
19. Menerapkan budaya kerja yang inovatif
20. Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K
21. Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
22. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government
23. Penerapan kebijakan internal arsitektur SPBE melalui jaringan intra dengan system penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi
24. Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE
25. Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan system pemerintahan berbasis elektronik
26. Meningkatkan maturitas SPIP
27. Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi
28. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah
29. Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
30. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif
31. Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif
32. Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka
33. penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
34. pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis
35. penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
36. perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.
37. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang

3. Prioritas Pembangunan 3 : Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan

Dalam upaya mewujudkan Dharmasraya yang sejahtera secara merata dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup menjadi fondasi



penting yang harus diperkuat. Lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari bukan hanya penyangga kehidupan, tetapi juga berperan langsung dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Dharmasraya menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti degradasi hutan, pencemaran air dan tanah, meningkatnya volume sampah, serta risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup tidak bisa dilakukan secara sektoral dan sporadis, melainkan harus melalui penguatan sistem tata kelola, kebijakan berbasis bukti, serta implementasi lapangan yang partisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Arah kebijakan dalam prioritas ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ekologis secara aktif dan mandiri.

Untuk lebih jelasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 : Mengembangkan Sistem, Kebijakan dan Implementasi Pelestarian Lingkungan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22

Sasaran Dan Target Indikator Kinerja Prioritas Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan Tahun 2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 3	mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan			
	Tujuan : Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,9
	Sasaran : meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas air	indeks	
		indeks kualitas udara	indeks	
		indeks tutupan lahan	indeks	47
	Sasaran : meningkatnya resiliensi terhadap bencana	Indeks resiko bencana (IRB)	indeks	128

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025

Arah kebijakan pembangunan pada prioritas Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan yaitu :

1. Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.



2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim
4. Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon
5. Penguatan standarisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon
6. Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
7. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan
8. Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup
9. Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah
10. Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
11. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
12. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
13. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor dan abrasi.
14. Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana.
15. Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat kabupaten
16. Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time.

4. Prioritas Pembangunan 4 : Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama untuk mendorong kemajuan Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa SDM yang berkualitas, segala upaya pembangunan tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas utama dalam mendukung terwujudnya visi *Dharmasraya Sejahtera Merata*. Artinya, pembangunan tidak hanya fokus pada fisik atau infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kualitas manusia sebagai pelaku utama pembangunan.



Melalui sasaran terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata, Kabupaten Dharmasraya berkomitmen membangun generasi masa depan yang cerdas, kompetitif, dan memiliki integritas. Inilah fondasi utama dalam memperkuat transformasi pembangunan dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara adil di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya, pemberian makanan bergizi gratis (MBG) bagi siswa dan santri, penyediaan sarana dan prasarana sekolah berkualitas, penyediaan sekolah rakyat, pemberian beasiswa bagi kk miskin dan berprestasi, hafidz al-quran, serta mahasiswa S1, S2 dan S3 serta peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.

Pada bidang kesehatan, kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara dan prasyarat utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif, cerdas, dan sejahtera. Karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata menjadi salah satu sasaran utama dalam prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2026. Pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan secara merata, pemberian makanan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan Balita serta peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas.

Pada sisi pembangunan SDM, juga diperlukan embangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera akan melahirkan generasi yang tangguh. Untuk itu, membangun keluarga berkualitas menjadi bagian penting dalam pembangunan SDM yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif juga menjadi indikator kemajuan pembangunan. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang membuka ruang dan kesempatan setara bagi semua warga, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, status ekonomi, atau latar belakang sosial, yang dapat dicapai dengan melalui peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil untuk keluarga miskin yang tidak mendapatkan alokasi PKH, Meningkatkan kesejahteraan kader posyandu dan ASN, pelayanan cek Kesehatan gratis dan rutin untuk lansia langsung ke rumah dan bantuan langsung sesuai kebutuhan dan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas.

Untuk lebih jleasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 4 : Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 4.23
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun SDM
Dharmasraya Sejahtera Merata Tahun 2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 4	membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata			
	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76,5
	Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata	Usia Harapan Hidup	tahun	75,2
	Sasaran : Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	Harapan lama sekolah	tahun	14,4
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,2
	Sasaran : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80,5
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65,5
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,515

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025

Arah kebijakan pembangunan pada Prioritas Pembangunan Membangun Infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata :

Arah Kebijakan pada Sasaran 1 : Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) kesehatan
2. Memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil
3. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
6. Peningkatan status Rumah Sakit Type D ke Type C RSUD Sungai Rumbai menuju RS dengan Tematik TBC Paru dan Peningkatan status RSUD Sungai Dareh menuju RS dari Type C ke Type B dengan Tematik



Trauma Centre dan meningkatkan fungsi layanan Puskesmas menjadi rumah sakit type D.

7. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu dan anak.
8. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
9. Eliminasi penyakit kusta dan *Schistosomiasis*
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
11. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Kesehatan dengan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes di Kabupaten Dharmasraya
12. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Kabupaten untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;
13. Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan dalam perwujudan wilayah bebas TBC.
14. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
15. peningkatan kepesertaan jaminan sosial kesehatan untuk pencapaian *Universal Health Coverage*

Arah Kebijakan pada Sasaran 2 : Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2. Melaksanakan kegiatan Pemenuhan SPM pendidikan
3. Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
4. Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP) terutama bagi anak miskin dan rentan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
5. Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.
6. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
7. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran dan SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.



8. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, Melaksanakan pembangunan USB, Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah,
9. Peningkatan kompetensi guru, mutu guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berjenjang dan berkelanjutan dan program sertifikasi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
10. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik terutama pada daerah terpencil
11. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan pendirian kampung Inggris.
12. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
13. Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau
14. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
15. Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi
16. Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber
17. Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat

Arah Kebijakan pada Sasaran 3 : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat
2. Peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan
4. Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
5. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil untuk keluarga miskin yang tidak mendapatkan alokasi PKH
6. Meningkatkan kesejahteraan kader posyandu
7. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas
8. Percepatan penurunan kemiskinan melalui graduasi



9. Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
10. Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)

5. Prioritas Pembangunan 5 : Transformasi ekonomi.

Transformasi ekonomi merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, dan merata di Kabupaten Dharmasraya. Dalam menghadapi tantangan global, ketergantungan pada sektor primer harus secara bertahap diubah menuju struktur ekonomi yang lebih modern, bernilai tambah tinggi, dan inklusif.

Melalui prioritas transformasi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendorong kebijakan yang berorientasi pada diversifikasi ekonomi lokal, penguatan daya saing produk unggulan, hilirisasi komoditas, pemberdayaan UMKM, digitalisasi ekonomi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis potensi nagari.

Komoditas unggulan di Kabupaten Dharmasraya selain kelapa sawit antara lain padi, jagung, peternakan dan perikanan. Kabupaten Dharmasraya akan berupaya melakukan optimalisasi lahan padi sawah seluas 4.629 Ha dengan peningkatan Indeks Penanaman (IP) serta integrasi kelapa sawit dengan padi gogo seluas 1.300 Ha melalui kegiatan Replanting kepala sawit. Selain itu melalui program One village one Product (OVOP) untuk komoditi padi yang akan dilaksanakan di 20 (Dua Puluh) Nagari juga berperan serta dalam menunjang dan mendukung suksesnya swasembada pangan di Kabupaten Dharmasraya.

Pada tahun 2025 dalam blue print pilot project *One Village One Product* atau OVOP, Perangkat Daerah bersama perangkat nagari terkait dan Satgas Pangan melakukan musyawarah yang menghasilkan komoditas/produk unggulan yang dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu:

- a. Sektor Pertanian : Fokus pada komoditas utama seperti padi dan jagung, yang tersebar hampir di seluruh nagari. Sektor ini memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.
- b. Sektor Perikanan: meliputi budidaya ikan air tawar seperti ikan lele dan nila.. Sektor ini berkembang pesat di nagari-nagari yang memiliki potensi sumber daya air, baik melalui pembangunan kolam darat maupun keramba sungai.
- c. Sektor Peternakan : Berfokus pada pengembangan sapi, ayam pedaging dan ayam petelur. Kegiatan peternakan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi rumah tangga serta sumber protein hewani yang terjangkau.



Melalui pengelompokan ini, diharapkan akan dapat dipetakan dan dikembangkan secara terintegrasi produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi, memperkuat jejaring pemasaran, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan hasil (hilirisasi). Berdasarkan jenis komoditi yang dijamin dari nagari-nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, maka terdapat 5 (lima) komoditi unggulan yang diusulkan, yaitu: ayam, ikan, sapi, padi dan jagung. Kebijakan transformasi ekonomi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, meningkatkan produktivitas sektor riil, serta memperkuat peran masyarakat, khususnya kelompok rentan, pemuda, dan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif yang ramah lingkungan.

Untuk lebih jelasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 5 : Transformasi Ekonomi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Transformasi Ekonomi
Tahun 2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 5	transformasi ekonomi			
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas ekonomi makro	Pertumbuhan PDRB	persen	5,5
		Gini Rasio	indeks	0,150
		tingkat inflasi	persen	2,75
	Sasaran : meningkatnya pendapatan masyarakat dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pendapatan perkapita	juta Rp	75
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	5,7
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	persen	16,5
		Rasio net ekspor terhadap PDRB	persen	15,25
	Sasaran : mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	persen	4,5
		Tingkat pengangguran	persen	5,5

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025



Arah kebijakan pembangunan pada prioritas transformasi ekonomi yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas melalui : Pengembangan One Village One Product (OVOP) untuk mendorong ekonomi lokal berbasis nagari, penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet) Clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.
2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial yang terintegrasi program *One village one Product* (OVOP) sebagai model pengembangan produk lokal
3. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan penerapan teknologi irigasi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
4. Hilirisasi dan Industrialisasi produk unggulan Hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, karet dan padi) daerah melalui pendirian pabrik pupuk dan pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga tidak ada produk unggulan yang dijual mentah tetapi sudah bentuk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai produk tersebut. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, produksi olahan daging seperti rendang kaleng dan bakso, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
5. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, serta digitalisasi sistem distribusi yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan bibit unggul, sarana prasarana, dan kelembagaan.
7. Rintisan pembangunan pabrik pupuk untuk petani
8. Melanjutkan swasembada pangan dalam mendukung penyediaan pangan lokal untuk pelaksanaan MBG
9. Bantuan pembinaan, akses pendanaan dan pembangunan infrastruktur produksi dan pemasaran produk UMKM
10. Revitalisasi pasar nagari, koperasi dan pendirian koperasi merah putih
11. Pemerataan ekonomi dan penguatan umkm serta ekonomi kreatif
12. Percepatan pembangunan destinasi wisata
13. Percepatan dan kemudahan dalam diregulasi perizinan
14. penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diprioritaskan dari rumah tangga miskin



15. pengembangan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi
16. pelatihan ketenagakerjaan bagi pencari kerja dan pengangguran
17. Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi
18. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan

6. Prioritas Pembangun 6 : Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi

Dalam kerangka pembangunan Dharmasraya yang tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan ekonomi, namun juga bertumpu pada nilai-nilai moral dan spiritual, transformasi sosial dan budaya menjadi pondasi yang sangat penting. Oleh karena itu, pembangunan sosial dan budaya diarahkan untuk memperkuat karakter, identitas, dan jati diri masyarakat melalui pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai lokal yang luhur, khususnya filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

ABS-SBK tidak hanya menjadi warisan budaya Minangkabau yang khas, tetapi juga menjadi sistem nilai yang menuntun etika pemerintahan, tata pergaulan sosial, dan pembangunan karakter generasi muda. Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya Dharmasraya difokuskan pada penguatan institusi adat, revitalisasi nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari, pemberdayaan komunitas budaya, serta transformasi sosial yang inklusif dan berkeadaban.

Selain itu Kabupaten Dharmasraya dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi. Masyarakatnya terdiri dari beragam kelompok seperti Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak, Mandailing, Melayu, dan lainnya yang telah hidup berdampingan secara harmonis selama puluhan tahun. Keragaman ini merupakan kekayaan sosial yang menjadi modal penting dalam membangun peradaban daerah yang inklusif, berbudaya, dan berkeadaban.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadikan transformasi sosial dan budaya sebagai prioritas pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berkarakter kuat, menjunjung nilai-nilai lokal, serta mampu menjaga harmoni dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) tetap dijadikan fondasi moral dan budaya, namun diaktualisasikan dalam ruang sosial yang menghargai kebinekaan dan kebersamaan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk membangun tatanan sosial yang tangguh, memperkuat peran lembaga adat dan keagamaan, melestarikan seni budaya lokal, serta memastikan bahwa semua warga tanpa memandang latar belakang etnis dan budaya memiliki ruang yang adil dan setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.



Untuk lebih jelasnya Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 6 : transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.25
Sasaran Dan Target Indikator Kinerja Prioritas Transformasi Sosial dan Budaya Berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai Pondasi Tahun 2026

No	Program Prioritas/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026
PP 6	Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi			
	Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52,5
	Sasaran : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan peningkatan kerukunan antar umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52,5
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	75,2

Sumber : Hasil Analisis Bapperida, 2025

Arah kebijakan pembangunan pada prioritas Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi yaitu :

1. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan
2. Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur.
3. Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.
4. Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local
5. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat
6. Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya
7. Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan melalui PPKD (Pokok-Pokok Pikiran kebudayaan Daerah
8. Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan



9. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.
10. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
11. Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah
12. Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non- formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat)
13. Memfasilitasi pembinaan mental spiritual
14. Mengembangkan kawasan Mesjid Agung Dharmasraya sebagai penerapan ABS-SBK
15. Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
16. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk pembinaan lembaga adat.

4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah yang dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten serta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui hasil reses.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2026 yang telah dimasukkan kedalam e-planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan hasil reses tersebut diperoleh daftar usulan reses yang disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Memahami kemampuan keuangan daerah maka dilakukan pemilahan dan pemilihan hasil reses tersebut yang disesuaikan dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga diperoleh usulan pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:



1. Hasil Musrenbang diakomodir 1 usulan per nagari.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diakomodir berdasarkan usulan dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Adapun proses pengajuan usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4-4 Flow Penyampaian Pokir Dewan Dalam SIPD.RI



Berdasarkan hasil input Pokir dalam aplikasi SIPD-RI yang disampaikan berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, terdapat sebanyak 380 usulan yang telah diverifikasi oleh Bapperida dan dilaksanakan oleh 15 (lima belas) Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya usulan-usulan pokir DPRD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.26:

Tabel 4.26
Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No	OPD Pelaksana	Jumlah Usulan
1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	87
2	Dinas Kesehatan	28
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3
5	Dinas Lingkungan Hidup	5
6	Dinas Pangan dan Perikanan	9
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	201
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
9	Dinas Pendidikan	67
10	Dinas Perhubungan	4
11	Dinas Pertanian	84



No	OPD Pelaksana	Jumlah Usulan
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	160
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
15	Sekretariat Daerah	57
Jumlah Usulan		893

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

4.2.5. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD, dan serta indikator, strategi dan arah kebijakan terkait pada 7 (tujuh) perangkat daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang berkewajiban dalam melaksanakan SPM, yaitu :

8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan;
12. Dinas Satpol PP dan Kebakaran;
13. BPBD; dan
14. Dinas SOSP3APPKB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana Warga Negara yang tidak mampu lebih diprioritaskan dalam menerima Pelayanan Dasar untuk memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun kategori warga tidak mampu dimaksud adalah :

- e. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- g. kondisi bencana; dan/atau
- h. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, telah dirumuskan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan permasalahan mendasar yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan Standar

Pada urusan pendidikan, pada tahun 2026 telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu secara keseluruhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 100 persen. Untuk bidang kesehatan, secara umum pencapaian indikator SPM adalah 100 persen kecuali indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,72%.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 89,07 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,50 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan target penerima layanan dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4-27.

Tabel 4.27 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Batas Waktu Capaian
Bidang Pendidikan					
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Batas Waktu Capaian
a	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	persen	100	100	Setiap Tahun
b	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	100	Setiap Tahun
Bidang Kesehatan					
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	99,72	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Batas Waktu Capaian
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
Bidang Urusan Pekerjaan Umum					
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	89,07	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	92,50	100	Setiap Tahun
Bidang Urusan Perumahan Rakyat					
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Batas Waktu Capaian
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Setiap Tahun
Bidang Urusan Sosial					
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	persen	100	100	Setiap Tahun



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	Batas Waktu Capaian
	perlindungan dan jaminan sosial				

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Tabel 4.28
Rekapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan SPM Tahun 2026

Uraian	Pagu (Rp)
SPM Bidang Kesehatan	919.141.600
Dinas Kesehatan	919.141.600
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.141.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.378.250
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.203.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	186.913.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.389.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.996.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.495.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64.389.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	43.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.699.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	72.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	81.077.000
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.052.538.500
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	520.276.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4.347.500
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	4.347.500
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	406.902.500
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	3.790.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	383.766.500
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.421.000
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	11.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2.962.500



Uraian	Pagu (Rp)
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.962.500
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	109.026.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.949.250
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34.836.750
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.760.000
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	60.480.000
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	532.262.500
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	223.672.500
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	190.772.500
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	24.900.000
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	8.000.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	308.590.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	308.590.000
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.115.000.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	4.115.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	50.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	200.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.565.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	735.000.000
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000



Uraian	Pagu (Rp)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	230.000.000
SPM Bidang Pendidikan	11.939.138.763
Dinas Pendidikan	11.939.138.763
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.843.250
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.915.000
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.928.250
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.871.020.380
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20.575.550
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.583.814.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	62.712.250
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	159.750.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.840.300
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	40.328.280
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.261.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	10.380.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.525.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.136.000
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.220.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7.873.717.483
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.070.000
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.140.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.098.250
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	193.158.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.522.132.067
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	682.671.576
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	34.107.800
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	17.673.000
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	7.720.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	208.000.000



Uraian	Pagu (Rp)
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.854.200
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	654.819.075
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	7.140.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	470.973.500
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.797.800
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	40.883.375
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	985.608.840
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.870.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.169.296.650
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	556.572.650
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.605.700.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.024.000
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	184.427.350
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	184.427.350
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	159.799.475
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	159.799.475
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.297.875
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.297.875
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	615.050
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	615.050
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.714.950
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	21.714.950
SPM Bidang Sosial	411.185.500
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	411.185.500
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	87.473.500
Pelayanan Dukungan Psikososial	4.295.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.822.500
Penyediaan Makanan	71.043.500
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.312.500
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	323.712.000



Uraian	Pagu (Rp)
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.412.500
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	171.930.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.155.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34.625.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.819.500
Pemberian Layanan Kedaruratan	4.882.500
Pemberian Layanan Rujukan	3.815.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.162.500
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000
Penyediaan Alat Bantu	8.120.000
Penyediaan Permakanan	14.400.000
Penyediaan Sandang	9.390.000
Total	18.621.431.713

4.2.6. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sesuai Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2026 Dalam RKP Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan sasaran.

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2026 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2026 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 akan berdampak pada berjalannya prioritas nasional yang kemudian akan berjalan hingga ke tingkat daerah provinsi dan kabupaten dan agar rencana pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah berjalan beriringan dan tercapainya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mnyelaraskan tema pembangunan 2025 dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, peningkatan



perekonomian dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyelarasan tema pembangunan dapat disajikan pada Tabel 4.29 dan Tabel 4.30.:

Tabel 4.29

Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026		
NASIONAL (RKP)	PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)	KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)
Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif	Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perkuatan Fondasi Transformasi Menuju Dharmasraya Sejahtera Merata

Tabel 4.30

Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Urutan	Prioritas Nasional Pada RKP 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026	Prioritas
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Prioritas 2	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Prioritas 4
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Prioritas 6		



Urutan	Prioritas Nasional Pada RKP 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026	Prioritas
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Prioritas 2 Prioritas 7	Transformasi ekonomi	Prioritas 5
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 4 Prioritas 5	Transformasi ekonomi Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata	Prioritas 5 Prioritas 1
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Prioritas 1 Prioritas 6	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	Prioritas 4 Prioritas 6
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Prioritas 4	Transformasi ekonomi	Prioritas 5
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Lumbung Pangan Nasional Dan	Prioritas 3 Prioritas 2	Transformasi ekonomi	Prioritas 5



Urutan	Prioritas Nasional Pada RKP 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	Prioritas	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026	Prioritas
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Ekonomi Berkelanjutan			
		Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Prioritas 4		
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 5		
		Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Prioritas 7		
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Prioritas 8	Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Prioritas 2
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Prioritas 2	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Prioritas 3
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 5	Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	Prioritas 6
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Prioritas 6		

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026, Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan Hasil Kajian Bapperida, Tahun 2025

4.2.7. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Dalam rangka menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya turut mengacu kepada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yang bertujuan untuk **"Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan"**. Untuk perencanaan tahun 2024 mengacu pada program pembangunan lima tahun pertama dalam periodisasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

4.2.7.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai. Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai meliputi:

- a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
- b. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

2. Kawasan Strategis Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan darat terdapat di kawasan Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru. Kawasan budidaya perikanan dengan bentuk budidaya kolam terdapat pada kawasan pengairan sungai Batanghari yang termasuk kedalam daerah administrasi Nagari Sikabau, Nagari Siguntur, dan Nagari Sitiung. Pengembangan dilakukan pada area yang sebagian dengan kondisi berawa yang sesuai untuk dibangun kolam perikanan. Pengembangan sentra budidaya perikanan dengan didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Centre* di Pulau Punjung.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

- a. Meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budidaya perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengembangkan perikanan budidaya terpadu dengan pendekatan



kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

- a. Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
- b. Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.
- c. Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
- d. Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat bahwa:

1. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
2. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional pantai timur Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

"Mewujudkan keselarasan antara kegiatan industri dengan kegiatan permukiman di Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

1. Mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang.
2. Mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi. Selain itu dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.



Pembangunan pabrik dengan perlu dikendalikan bukan hanya dampak lingkungan tetapi juga dampak lalu lintasnya. Oleh karena itu perlu diarahkan pembangunan lokasi pabrik yang tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap lalu lintas umum orang.

Kawasan lokasi kegiatan industri yang dimaksud dalam RTRW Kab. Dharmasraya ini adalah kawasan lokasi pabrik bagi perusahaan individual. Kawasan lokasi kegiatan industri ini bukan dalam pengertian kawasan industri yang sudah baku definisinya seperti terdapat dalam PerMen Perind. No. 40/M-IND/PER/6/2016 yang mengartikan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Kawasan lokasi industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.
- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.
- Selain itu pengembangan lokasi pabrik pertimbangannya adalah untuk menghindari lalu lintas angkutan barang melewati jalan lintas Sumatera antara Sungai Rumbai – Pulau Punjung yang menjadi jalur pusat aktifitas penduduk kabupaten.

Dengan pertimbangan tersebut maka kawasan lokasi industri di Kabupaten Dharmasraya diarahkan sepanjang koridor jalan lingkar selatan dan lingkar utara kabupaten agar tidak menimbulkan dampak lalu lintas terhadap jalan lintas Sumatera yang membelah kabupaten serta dampak pencemaran dapat dilokalisir. Lokasi kawasan dibagi menjadi :

- a. Kawasan bagian selatan dan timur kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer lingkar selatan dan lingkar utara di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, atau Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Baru.
- b. Kawasan bagian utara kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer (koridor jalan lingkar utara) di Kecamatan Timpeh dan kawasan bagian utara di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sembilan Koto.

Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi: Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto;, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar.



Dengan pertimbangan efisiensi, meskipun lokasi pabrik telah dilokalisasi tetapi pada kawasan perkebunan yang memiliki hamparan yang cukup luas dengan skala produksi yang memungkinkan untuk membangun pabrik pengolahan komoditi untuk kebutuhan sendiri dan juga untuk melayani produksi perkebunan rakyat sekitarnya maka dibolehkan untuk membangun pabrik di dalam kawasan perkebunannya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dibangun pada kawasan lain yang memiliki potensi dan sesuai dengan kriteria.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri meliputi:

- a. Mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan.
- b. Mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

4.2.7.2. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya

Potensi sumberdaya air sebagai sarana transportasi dan lokasi telah menyebabkan berkembangnya Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Pada kondisi sekarang potensi sumberdaya air dan situs budaya dimanfaatkan untuk pengembangan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:
"Mewujudkan kawasan Sungai Batanghari dan sekitarnya yang memiliki latar belakang sejarah terbentuknya Kerajaan Dharmasraya sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:

- a. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya.
- b. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.

Kawasan wisata air dan budaya yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Wisata air dirancang pada ruas sungai Batanghari menghubungkan Bendungan Batu Bakawik - Sungai Dareh - Siguntur. Pada masing-masing simpul transportasi tersebut dibangun dermaga wisata untuk melayani moda transportasi air.



Wisata air dipadukan dengan wisata budaya pada kawasan cagar budaya di Siguntur. Akses menuju kawasan cagar budaya di Siguntur dapat dicapai dengan pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya dan penyeberangan melalui ponton di Pisang Barabuih. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan taman dan kegiatan kulinernya dapat dipadukan dengan kegiatan wisata air sepanjang ruas Sungai Batanghari tersebut. Pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh dilengkapi dengan plaza sebagai tempat rekreasi.

Wisata budaya mengintegrasikan kawasan historis situs bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh, dan Koto Besar. Paket wisata yang ditawarkan bisa mengkaitkan seluruh kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya tersebut.

Arahan pengembangan Kawasan Wisata Air dan Budaya yaitu:

1. Mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
 - a. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
 - b. Pengadaan transportasi wisata sungai.
 - c. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
 - d. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
 - e. Pembangunan jalan Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
 - f. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
2. Mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

2. Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan area rekreasi dan olah raga. Kawasan koridor kegiatan masyarakat terdapat di sepanjang Jalur koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

"Mewujudkan kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan mengembangkan fungsi pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi



untuk melayani masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

2. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
2. Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
3. Mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya.

4.2.7.3. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat adalah untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.

Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, meliputi:

- a. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budidaya.
- b. Pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.

2. Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati

Pada saat ini KP Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul berkerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya.

Untuk pengembangan lebih lanjut, rencana kawasan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya merupakan kebun koleksi plasma nutfah yang diarahkan terutama untuk koleksi penelitian dan



pengembangan (*research and development*) plasma nutfah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan yang sekaligus juga berfungsi untuk pembibitan. Kawasan kebun keragaman hayati selain sebagai sarana pendukung konservasi dan pengembangan budidaya tanaman pertanian juga dikembangkan sebagai kawasan agrowisata pertanian yang bersifat edukatif. Nama lain dari kebun yang menyimpan keragaman hayati yang lengkap yaitu Kebun Raya dengan luas lahan yang dibutuhkan lebih kurang 100 Ha. Kawasan Kebun keragaman hayati bisa dibangun bertahap dengan memulainya dalam ukuran terbatas seperti membangun Taman Keragaman Hayati (KEHATI) dengan luas minimal cukup 3 Ha.

Pembangunan kawasan perlu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Kawasan strategis keragaman hayati diarahkan pengembangannya yang terdapat di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan kawasan cagar budaya Siguntur di bagian baratnya yang bisa dijadikan kesatuan kegiatan pariwisata.

Tema dan tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

"Mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional kabupaten.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
2. Mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.



4.2.8. Inovasi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa IGA, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sebagai berikut:

1. Daerah provinsi terinovatif
2. Daerah kabupaten terinovatif;
3. Daerah kota terinovatif;
4. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
5. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
6. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei tahun 2023 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, maka Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Keputusan Menti Dalam Negeri No. 400.1011-6287 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 berada pada peringkat 65 dari 415 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pencapaian tahun 2023 sebesar 55,61 atau predikat Kabupaten inovatif. Daftar inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.31 dan Tabel 4.32.

Tabel 4.31 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

OPD	NAMA INOVASI
UPT Puskesmas Sungai Rumbai	1. BERAS MERAH (Bersihkan Sarang Nyamuk Sekitar Rumah)
	2. SERUNI IKAN KAKAP (Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap)
Dinas PMPTSP	3. SI-PINTAR (Sistem Informasi Peluang Investasi Tata Ruang)
	4. SIKEMAD (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online DPMPTSP)
	5. SIPEMAIN (Sistem Pengaduan Masyarakat Perizinan Online DPMPTSP)
	6. LARI PATAS TUNTAS (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas)
	7. LAF YU (Layanan Full Senyum)
	8. LAH DAKEK (Lihat Mudah Data Kepegawaian Kita)
	9. SIAP PAK KADIS (Sistem Informasi Absesnsi Pegawai Paling Ampuh Untuk Kerja Disiplin)
	10. AJIAN DARA (Antar Jemput Perizinan Dharmasraya)
UPT Puskesmas Timpeh	11. Berita si TB (Bersama Nagari Kita Eliminasi TB)
	12. GALI CINTAKU (Keluarga Peduli Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan Untuk Kunjungan Ulang)



OPD	NAMA INOVASI
UPT Puskesmas Sitiung 1	13. MARATO PASANG ANTENA (Manajemen Pelaporan Terpadu Obat Puskesmas dan Jaringan Melalui Rangkaian Microsoft Excel Sederhana)
	14. LAGUKU KIAN PADU (Layanan USG, Bedah Buku KIA dan ANC terpadu)
	15. DESERTASI (Barcode dan sertifikat Asi Eksklusif)
Dinas Perhubungan	16. CeCe GeMMes (Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Generasi Muda Melalui Media Sosial)
	17. BaBinhub (Bantuan, Pembinaan dan Informasi Perhubungan)
	18. Si-Praja GeMa (Sistem Informasi Prasarana Jalan Via <i>Google Maps</i>)
	19. Merata (Manajemen rekayasa lalu lintas pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pada ruas jalan nasional lintas sumatera di kabupaten dharmasraya)
UPT Puskesmas Beringin Sakti	20. GERTAK BUNTING (Gerakan Serentak Serbu Stunting)
	21. SERULING TANGKIT (Seruan Keliling Tanggap Penyakit)
Dinas Lingkungan Hidup	22. GAGAH PISAN (Gerakan Keluarga Sadar Memilah Sampah)
UPT Puskesmas Sitiung II	23. GERPAK BANG PASI (Gerakan Cepat Penimbangan dan Imunisasi)
UPT Puskesmas Sungai Dareh	24. CETING DEKAN LAMA (Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan)
	25. STUDIO IBU HAMIL (Skrinning Triple Eliminasi, Ungkap, Dekap, Intervensi Menuju Zero Ibu Hamil)
	26. SIMANDA TUA MAS SD (Sistem Manajemen Data Tata Usaha Puskesmas Sungai Dareh)
Dinas Kesehatan	27. PATWAL MILITER (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi)
	28. SUMBAR RANCAK (Surat Untuk Mengabarkan Rencana Imunisasi Anak)
UPT Puskesmas Koto Besar	29. GERTAK TB BUK DELA DAN BANG AMPUN (Gerakan Serentak Pasien TB Buka Jendela dan Lobang Penampung)
Dinas Pertanian	30. SIMPUKDI (Simpanan Penebusan Pupuk Bersubsidi)
Dinas Kumperdag	31. STIGMA METER (Strategi Optimalisasi Kegiatan Melalui Sistem Terintegrasi)
	32. SIPANDU (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Terpadu)
	33. STAN KOPI (Sistem Pelayanan Koperasi Secara Digital)
BKPSDM	34. COMENT BELA (Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri)
	35. SeRaSi (Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pra Pensiun)
Dinas Pangan dan Perikanan	36. Mancing Palala (Makan Ikan Cegah Stunting Pada Panen Lubuk Larangan)
	37. Kampung Ikan Garing
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38. BULAN (Buku Bajalan)
	39. LINK TERPADU (Layanan Informasi Kearsipan Terpadu)
Dinas Perkimtan	40. Klik Rumah Saya (Klinik Rumah Sehat Swadaya)
Dinas Pendidikan	41. Program Ekstrakurikuler Adzan (Proekzan)
	42. LINGTARKU (Lingkungan Sekitar Guruku)



OPD	NAMA INOVASI
	43. SALSA (Satu Anak memungut minimal Lima SAmpah)
	44. SARIDULING
	45. Pembelajaran dengan Wordwall dan Google classroom
	46. GASESI (Gerakan Selasa Literasi)
	47. PeSDig CC (Pembelajaran Berbasis Digital dengan Chromebook dan Classroom)
	48. GERMATI (GERAKAN JUM'AT PAGI MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI DENGAN PUBLIC SPEAKING)
	49. PROGRAM LAYANAN BINGKEL "BIMBINGAN KELOMPOK"
	50. PAK MeGi (Pembelajaran Aktif Kreatif dengan Memanfaatkan Teknologi)
	51. DUMISAKU (DUA MINGGU SATU BUKU)
	52. GERAK (GAMBAR BERGERAK)
	53. DUKU MANIS 05 KOBES (PEDULI LINGKUNGAN MANDIRI DAN AGAMIS) SDN 05 KOTO BESAR
	54. GELISAH (GERAKAN LITERASI SEKOLAH)
	55. Satu Buku Satu Minggu (Sabu Sami)
	56. GeZaH 'Gerakan Zuhur berjamaaH"
	57. Penerapan Gerakan Menabung(Gembun) di SMA Negeri 1 Koto Besar
	58. SESAT dan GREZI (Selasa sehat dan Gerakan Makan Bergizi)
	59. GELIAT (Gerakan Literasi SDN 04 Sitiung)
	60. SABARIS (Satu Hari Berbahasa Inggris)
	61. PROGRAM SEBUMI
	62. BIAS SAJI (Pembiasaan mengaji 5 menit jam pertama)
	63. GERAKAN SADAR SAMPAH DI SEKOLAH (G3S)
	64. SAMISABU
	65. TiMang Gen PD (Tiga Tiumang Generasi Pintar Digital)
	66. GERAKAN LITERASI MAJU 05 "GELIMA"
	67. SERASI (Selasa Beraksi)
	68. Jum 'at Berkah Bersih
	69. SAKESADING (Satu Kelas Satu Mading)
	70. Jumat bersih
	71. OBRASSAJA (Obrolan Asik Seputar Remaja) Melalui Layanan BINGKEL (Bimbingan Kelompok)
	72. Pemanfaatan CaWallQu Dalam Pembelajaran
	73. SANTYING (Sekolah Anti Cyber bullying)
UPT Puskesmas Sialang	74. SIKUMBANG JATI (Awasi kesehatan dan tumbuh kembang remaja putri)
	75. MARIMAS CEKDAH (Mari ke puskesmas cek dahak)
	76. SIMANTU KIA (Sistem melayani terpadu kesehatan ibu dan anak)
UPT Puskesmas Sitiung IV	77. CENTING MANISE (Cegah anemia dan stunting dengan makan bergizi dan suplementasi Fe)
	78. PARE BORING (Pantau Faktor Resiko PTM dengan buku monitoring)



OPD	NAMA INOVASI
	79. IKAN PATIN (Ikrar kesehatan pada calon pengantin)
	80. CINTIA RINDU (Cegah Infeksi TB anak dengan skrining di Posyandu)
	81. APEL MENTAH (Alarm peduli menurunkan kematian ibu hamil)
	82. SEIMBANG (Sertifikat bayi dengan imunisasi booster lengkap)
Badan Keuangan Daerah	83. SPRIT (Sistem Perjalanan Dinas Terpadu)
	84. BAPANTUN ASN (Bayar Pajak Tepat Waktu ASN)

Sumber : Bapperida Tahun 2025

Tabel 4.32 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	JARI MANIS (Jaringan Pengembangan Inovasi Dharmasraya)	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2	RONDA (Rapat Online Riset dan Inovasi Dharmasraya)	
3	MENWASASI (Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Pengawasan Melalui Digitalisasi)	INSPEKTORAT DAERAH
4	RESI CEPAT (Rekonsiliasi Setor Pajak Cepat Tepat)	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Dharmasraya	
6	PARIO DHARMASRAYA (Pajak dan Retribusi Online Dharmasraya)	
7	SIAP ONLINE (Sistem Aplikasi PBB Online)	
8	QRIS-nya PakDe (Pembayaran pajak daerah dengan Qris)	
9	KIPER ASIK (Klinik Pertanian - Adaptif, Solutif, Inovatif dan Kolaboratif)	
10	KOK PANIK (Komplek Pangan Organik)	
11	MARKISA (Mari kita makan sayur dan buah)	DINAS PERTANIAN
12	SATILAYA BERSHOLAWAT (Satu Tiumang Lagan Jaya Bersholawat)	
13	SARIKAYA SAGU (Satu Murid Satu Karya Satu Minggu)	
14	CICALUGESI (Cintai Membaca Melalui Gerakan Literasi)	
15	ECO PRINT : MAGIC LEAVES, DAUN UNTUK KEHIDUPAN	
16	EKSPADUS SKWAT (Ekstrakurikuler Paduan Suara Siswa Aktif Dan Berbakat)	
17	GELAS (Gerakan Literasi Siswa)	
18	SABU (Satu Bulan Bisa Baca)	



NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
19	PENANTANG SETIA (Penyambutan Anak Datang Setiap Pagi)	
20	DUMISAKU (Dua Minggu Satu Buku)	
21	PROGRAM BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri)	
22	PROGRAM BERHIAS (Bersih hijau asri dan sehat hati)	
23	JUMAT BERSEGI (Jumat Bersih, Sehat dan Religi)	
24	SEPENDEKAR (Sepakbola Untuk Pendidikan Karakter)	
25	CLBK (Cinta Literasi Banyak Karya)	
26	SAMITY SDNSA (Satu minggu sekali murid belajar IT secara langsung dari kelas 1 sampai kelas VI secara langsung menggunakan Chromebook)	
27	KOMEDI SEPAYUNG (Komunitas Melek Digital SD 4 Sitiung)	
28	KAYA (KAmis BerkarYA)	
29	PROTAMEM QUR'AN (Program Tahfidz Membumikan Al Qur'an)	
30	Ekskul"MB SpenggaBest" Melek Notasi dan Melek ilmu	
31	Penerapan ASMA GOSH (Asesmen Matematika dengan Google Sheet) Menuju Tamatan SMK yang Kompeten dan Siap Kerja	
32	BIAS CANDRA (Pembiasaan Membaca dan Bercerita)	
33	DUKU MANIS 05 KOBES (Peduli Lingkungan Mandiri Dan Agamis) SDN 05 KOTO BESAR	
34	SABU SAMI (Satu Buku Satu Minggu)	
35	GELIAT (Gerakan Literasi SDN 04 Sitiung)	
36	SABARIS (Satu Hari Berbahasa Inggris)	
37	SAMISABU	
38	TiMang Gen PD (Tiga Tiumang Generasi Pintar Digital)	
39	SERASI (Selasa Beraksi)	
40	SAKESADING (Satu Kelas Satu Mading)	
41	OBRASSAJA (Obrolan Asik Seputar Remaja) Melalui Layanan BINGKEL (Bimbingan Kelompok)	
42	SARI SARA SDN TRIKOBA	
43	Pemanfaatan lahan kosong Sebagai Kebun Sekolah untuk Media Pembelajaran dan Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Terhadap Siswa	
44	PEMBELAJARAN KOPERATIF DENGAN GAME BERACUN	
45	PANKREAS	



NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(PAPAN KREASI SISWA)	
46	VOCAL (VOCABULARY LEAGUE) LIGA KOSAKATA BAHASA INGGRIS	
47	GERAKAN LITERASI MAJU 05 "GELIMA"	
48	EKSPRESIANA	
49	ECO PRINT : MAGIC LEAVES, DAUN UNTUK KEHIDUPAN	
50	MATERI SESAT (MARI BERBAGI CERITA SESAAT)	
51	PERSONA (Pembelajaran Personalisasi dengan Classroom	
52	SABTU CERIA (Senang Membantu Cerdas Bersama Ibu dan Ayah)	
53	SESAT dan GREZI (Selasa sehat dan Gerakan Makan Bergizi)	
54	DOKCILKU (Dokter Cilik Ku)	
55	PROGRAM SEBUMI	
56	GELAS (Gerakan Literasi Siswa Hebat)	
57	Ralat (rabu literasi)	
58	Jumpa Berkah (Jum'at Pagi Beribadah Mendapat Berkah)	
59	GERAKAN LITERASI MAJU 05 "GELIMA"	
60	Program BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri)	
61	SaMBel PeMiKat (Satuan Murid Belajar Serta Pengembangan Minat dan Bakat)	
62	PUSPAGA ONLINE (Pusat Pelayanan Keluarga ONLINE)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
63	GUIAR PERAK (Gudang Informasi Seputar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
64	I-NIAGARA (Inovasi Pencatatan Golongan Darah)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65	SIGADINK EMAS-25 (Inovasi Nagari Mandiri adminduk Membahagiakan Masyarakat - 25)	
66	AJIAN DARA (Antar Jemput Perizinan Dharmasraya)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
67	BESAN ALIA (Bersama Isan Ayo Lapor Investasi Anda)	
68	SI DIPA (Sistem Informasi Data Potensi Investasi dan Promosi Daerah)	
69	SI BUKU BEKAS (Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus, Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Komunitas)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
70	PUSDA MALA - KUMPERDAG (Pusat Data, Informasi, dan Layanan - KUMPERDAG)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
71	SI PARDHA (Sistem Informasi Pasar Rakyat Dharmasraya)	



NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
72	PUSPITA PROGUL DARA (Pusat Promosi dan Informasi Terpadu Produk Unggulan Dharmasraya)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
73	AYO GAS RESTOCKING (Ayo Jaga Sungai dengan Restocking)	
74	GAS (Gerakan Makan Ikan di Sekolah)	
75	GO PAKANDIRI (Gerakan Mengolah Pakan Ikan Sendiri)	
76	BULE DALAM TERPAL (Budidaya Ikan Lele Dalam Kolam Terpal)	
77	KITA REHAT (Klinik Terintegrasi Untuk Masyarakat Sehat)	UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
78	SEGAR JIWA WARGA (Skrining Kesehatan Kebugaran Jiwa Pegawai dan Keluarga)	
79	MELIPUT AKSI TEBU (Komitmen Eliminasi Jemput Aktif dan Responsive Tuberkulosis)	
80	POJOK CERHATI (Pojok Cerita Kesehatan yang Menginspirasi)	UPT PUSKESMAS SITIUNG 1
81	CETAR GEMAS SHK (Cegah Retardasi Mental Menuju Generasi Emas dengan SHK/Skrining Hipotiroid Kongenital)	
82	I See TB (Identifikasi Screening Tuberculosis)	
83	CENTING MANISE (Cegah anemia dan stunting dengan makan bergizi dan suplementasi Fe)	UPT PUSKESMAS SITIUNG IV
84	PARE BORING (Pantau Faktor Resiko PTM dengan buku monitoring)	
85	IKAN PATIN (Ikrar kesehatan pada calon pengantin)	
86	CINTIA RINDU (Cegah Infeksi TB anak dengan skrining di Posyandu)	
87	APEL MENTAH (Alarm peduli menurunkan kematian ibu hamil)	
88	SEIMBANG (Sertifikat bayi dengan imunisasi booster lengkap)	
89	KANTIN (Kelasnya Calon Pengantin)	UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH
90	ABAH TELUNGKUP (Ada buah dan telur pelengkap isi tas ku)	UPT PUSKESMAS KOTO BARU
91	IMSAK (Ibu- Ibu Memilah Sampah Plastik)	UPT PUSKESMAS TIMPEH
92	PERIH (Periksa Triple Ibu Hamil)	
93	CETAR (Cepat Tanggap Darurat)	
94	SKUP KADU (Screening Kesehatan Unik Pustu Kader Unggul)	
95	GEMOY SEJIWA (Gerakan Minum Obat Yuk, Sehatkan Jiwa)	
96	PERI LEBAH REMATRI (Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri di Sekolah)	UPT PUSKESMAS KOTO BESAR



NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
97	KURMA MILK DAN ROTI (Kunjungan Rumah Bumil Kek Dan Resiko Tinggi)	UPT PUSKESMAS TIUMANG
98	GEMAR PETE (Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi)	
99	KECAPUTI (Kelas Catin Puskesmas Tiumbang)	
100	GETUK TB (Gerakan Ketuk Pintu Tuberculosis)	UPT PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
101	GAS POL TAS LANSIA (Gerakan Sehat Prolanis Terkontrol dan Berkualitas pada Lansia)	
102	OPER PKK 2.0 (Optimalisasi Pelayanan Hipertensi dengan Penyuluhan dan Kartu Kontrol 2.0)	UPT PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
103	ONE VILLAGE ONE PRODUCT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sumber : Bapperida Tahun 2025



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif dengan menggunakan nomenklatur sesuai pemutakhiran terhadap Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 pada masing-masing perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diuraikan berdasarkan klasifikasi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari : a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah; b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) urusan pilihan; e) unsur pendukung urusan pemerintahan; f) unsur penunjang urusan pemerintahan; g) unsur pengawasan urusan pemerintahan; dan h) unsur pemerintahan umum, dapat dilihat pada Tabel 5.1.:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAB. DHARMASRAYA

5.1. Tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	335.358.586.527
2	Dinas Kesehatan	287.537.014.593
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	80.235.399.220
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.389.308.178
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.702.155.350
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.291.791.400
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.763.655.350
8	Dinas Pangan dan Perikanan	6.849.700.000
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.320.821.270
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.687.541.754
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.573.289.565
12	Dinas Perhubungan	21.704.779.438
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.227.036.800
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4.949.183.715
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.811.546.973
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.840.846.926
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.917.230.045
18	Dinas Pertanian	20.500.391.245
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.148.839.360
20	Sekretariat Daerah	37.613.570.350
21	Sekretariat DPRD	56.599.992.150
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.484.645.350
23	Badan Keuangan Daerah	138.611.169.182
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.437.656.400
25		
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.523.760.775
27	Kecamatan Sitiung	2.542.705.200
28	Kecamatan Koto Baru	2.865.570.000
29	Kecamatan Sungai Rumbai	2.184.593.000
30	Kecamatan Sembilan Koto	1.675.989.150
31	Kecamatan Timpeh	1.580.300.010
32	Kecamatan Koto Salak	1.651.166.600
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.403.033.000
34	Kecamatan Koto Besar	2.336.298.600
35	Kecamatan Padang Laweh	1.544.860.600
36	Kecamatan Tiumang	1.687.641.100
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.727.989.485

5.2. TABEL RENCANA KERJA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Pendidikan						335.358.586.527							#####	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						335.358.586.527							#####	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						335.358.586.527							#####	
1	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						280.622.933.145						-	#####	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	280.622.933.145							#####	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
1	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan														
1	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.400.000								
1	01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
1	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2441/14 Orang/bulan	277.496.999.545	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	#####	DINAS PENDIDIKAN	
1	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah														
1	01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		-														
1	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	5.100.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	6.100.000	
1	01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	280.622.933.145							#####	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
1	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
1	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
1	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
1	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
1	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
1	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	59.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	79.895.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		85.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		-	-													
	1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	104.900.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	109.000.000	
	1 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	19.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		27.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	1 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		4.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	144.999.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.427.545.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		2.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	1 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	108.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		125.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	1 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
2	1 01 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						54.715.653.382						-	60.263.281.000	
		[Meningkatkan partisipasi anak														
	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah adiwiyata dan sekolah UKS Pembinaan kelembagaan, kurikulum dan penilaian satuan pendidikan penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana SD sesuai standar					33.050.004.982			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	36.647.400.000	
	1 01 02 2.01 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	800.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 0	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	360.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehat, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 0	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	400.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang				4 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada				200 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan				200 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				167 Satuan Pendidikan	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				167 Satuan Pendidikan	24.211.972.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERIA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		25.794.900.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				167 Orang	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	1.600.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,				167 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				167 Orang	5.000.000	-	-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi				4 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	01 02 2.01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	5.000.000	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.01 0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				167 Komunitas	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.01 0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				3 Paket	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk				2 Kegiatan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk				168 Orang	7.032.982	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		9.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				147 Satuan Pendidikan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik													
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah adiwiyata dan sekolah UKS Pembangunan unit sekolah baru SMP Pembinaan kelembagaan, kurikulum dan penilaian satuan pendidikan Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana SMP sesuai standar Penyelenggaraan proses belajar dan minat bakat peserta didik SMP					15.489.456.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	17.176.956.000	
	1 01 02 2.02 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	800.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	800.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	800.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	200.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	200.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	200.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	200.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah yang	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah yang				2 Unit	100.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan		175.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	100.000.000	Kab. Dhamasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		175.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada				200 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan				200 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				40 Satuan Pendidikan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				40 Satuan Pendidikan	10.620.456.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		10.920.456.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,				40 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		5.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi				4 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 01 02 2.02 0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk				2 Kegiatan	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Satuan Pendidikan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL				40 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia													
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
	1 01 02 2.02 0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia													
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD sesuai standar Penyelenggaraan proses belajar peserta didik, Pembinaan kelembagaan, kurikulum dan penilaian satuan pendidikan					4.846.092.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	5.026.125.000	
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				20 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		220.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				80 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan				80 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				268 Satuan Pendidikan	4.083.125.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		4.093.125.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				60 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,				19 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		7.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		70.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi				4 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				19 Komunitas	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	197.267.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk				2 Kegiatan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		7.500.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 01 02 2.03 0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL				20 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				38 Paket	5.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia													
	1 01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar													
		-	-		-	-	-	54.715.653.382							60.263.281.000	
	1 01 02 2.03 0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan														
	1 01 02 2.04 0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik													
		[Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah]	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	46.43 91.54 92 99.01	21.84 81.3 84.92 94.23	25.93 82.7 85.32 94.69	30.03 83.95 86.72 95.32	54.715.653.382							60.263.281.000	
	1 01 02 2.04 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi				18 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan -	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan				18 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP													
	1 01 02 2.04 0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
		[Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah]	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	46.43 91.54 92 99.01	21.84 81.3 84.92 94.23	25.93 82.7 85.32 94.69	30.03 83.95 86.72 95.32	54.715.653.382							60.263.281.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional					Daerah
	1 01 02 2.04 0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				9 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata			
		-														
	1 01 02 2.04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
	1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan													
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		5.700.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatkan partisipasi anak														
	1 01 02 2.04 0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
3	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						10.000.000						-	11.700.000	
		[Meningkatkan kualitas kurikulum						10.000.000							11.700.000	
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						5.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	6.000.000	
	1 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah				10 Buku	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	5.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	-	5.700.000	
	1 01 03 2.02 0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan				10 Buku	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Terwujudnya Pendidikan		5.700.000	DINAS PENDIDIKAN
4	1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA														
		[Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	Indeks Pemerataan Guru	15.80	28.51	25.25	23.71	10.000.000							11.200.000	
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	88.00	76.29	78.61	80.01										
	1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
		Dinas Kesehatan						165.304.386.604							#####	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						165.304.386.604							#####	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
5	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						132.364.003.087						-	#####	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat														
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	1.503.406.950				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	-	1.503.406.950
	1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
	1 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	1 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.313.406.950	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1.313.406.950	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	1 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	1 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
	1 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
	1 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
	1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	281.774.118			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	-	281.774.118	
	1 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	88.079.518	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		88.079.518	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.784.600	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		8.784.600	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	146.410.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		146.410.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	38.500.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		38.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	454.737.005			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	-	454.737.005	
	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	12.689.374	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		12.689.374	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.831.571	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		95.831.571	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	1 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.641.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		15.641.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	3.492.876.460			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	-	3.492.876.460	
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.198.960	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		9.198.960	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	175.692.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		175.692.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		3.300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	698.944.554			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	-	698.944.554	
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kinerja perangkat		17.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				10 Unit	180.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kinerja perangkat		180.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	22.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		22.200.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	319.534.554	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		319.534.554	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				3 Unit	159.710.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kinerja perangkat		159.710.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan													
6	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						20.204.500.000						-	22.204.500.000	
		I Meningkatkan kualitas kesehatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan TOI			5.5 Persen 63.4 Persen 45 Persen 35 Persen 100 Persen 14.5 Persen 100 Persen 75 Persen 100 Persen 3 Persen	10.325.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat	-	12.325.000.000		
	1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			5 Unit	1.000.000.000	Kab. Dhamasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar													
	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas													
	1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya													
	1 02 02 2.01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center													
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar													
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan													
	1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas													
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan													
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran B8TT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas Persentase pelayanan Antenatal Care (Pemeriksaan Lengkap) / K4 Persentase peningkatan kepesertaan JKN Mandiri Persentase penyehat tradisional yang tersertifikasi Persentase Puskesmas yang memiliki klinik hatra Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan			15 Kelompok 40 Nagari 52 Nagari 100 Persen 46 Persen 100 Persen 100 Persen 20 Persen 25 Persen 56 Persen	9.429.500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat	-	9.429.500.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5990 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4970 Orang	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4496 Orang	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17756 Orang	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36329 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				161873 Orang	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73978 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42902 Orang	110.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2219 Orang	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				521 Orang	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3668 Orang	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4155 Orang	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas perorangan		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				1 Dokumen	112.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas perorangan		112.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				69541 Dokumen	222.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		222.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	145.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		145.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	175.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas perorangan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				21 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas perorangan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	5.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke				100 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	190.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		190.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-				-	500.000.000	-	-	-	-	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				17 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan				1 Laporan	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100 Porsen	200.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat	-	200.000.000	
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi				100 Porsen 100 Porsen	250.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat	-	250.000.000	
	1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat				0 0	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas perorangan dan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas perorangan		50.000.000	DINAS KESEHATAN
7	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	[Meningkatkan mutu dan					513.240.000						-	513.240.000	
		[Meningkatkan mutu dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi				100 Persen	161.400.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	-	161.400.000	
	1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
	1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	86.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		86.400.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan														
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.840.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		51.840.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan														
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				20 Orang	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		300.000.000	DINAS KESEHATAN
8	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,														
		[Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100	100	100	526.200.000							493.200.000	
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pembinaan dan pengawasan Toko Obat, Apotek dan UMOT Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker				100 Persen 100 Persen 30 Orang	285.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	-	285.000.000	
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
	-	-	-	-	-	-	-	526.200.000							493.200.000	
	1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan				1 PKRT 100 Persen 15 Puskesmas	17.280.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	-	17.280.000	
	1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut				1 Dokumen	17.280.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas dan		17.280.000	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100	100	100	526.200.000							493.200.000	
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi														
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					48.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh						15.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						125.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	-	125.000.000	
	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut				1 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas dan	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan				100 Persen	25.920.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	-	25.920.000	
	1 02 04 2.05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut				1 Dokumen	25.920.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas dan	25.920.000	DINAS KESEHATAN	
		-	-	-	-	-	-	526.200.000						493.200.000		
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan				60 Sentra	25.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	-	25.000.000	
	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas dan	25.000.000	DINAS KESEHATAN	
9	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN [Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	60		10	20	11.696.443.517						11.696.443.517		
	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan,														
	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	11.436.443.517	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		11.436.443.517	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka														
	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					135.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh					135.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	125.000.000	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kualitas	125.000.000	DINAS KESEHATAN	
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh						19.224.334.000						19.224.334.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						19.224.334.000						19.224.334.000		
10	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						800.000.000						800.000.000		
		-	-	-	-	-	-	800.000.000						800.000.000		
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		800.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
11	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						18.424.334.000						18.424.334.000		
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun					1.387.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut					1.387.500.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
1	02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	300.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
1	02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				16 Unit	15.966.834.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	15.966.834.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan													
1	02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				36 Dokumen	770.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	770.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
		Laboratorium Kesehatan Daerah						598.683.800						598.683.800	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						598.683.800						598.683.800	
12	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN [Meningkatkan kualitas layanan Labkesda]	-	-	-	-		300.000.000						300.000.000	
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan												
13	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						197.334.800					-	197.334.800	
		-	-	-	-	-		197.334.800						197.334.800	
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan													
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					197.334.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung					197.334.800	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
14	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN						101.349.000					-	101.349.000	
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						101.349.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	101.349.000	
1	02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	101.349.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	101.349.000	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						77.086.264.000						77.086.264.000	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						77.086.264.000						77.086.264.000	
15	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [Meningkatkan pelayanan RSUD]						7.200.000.000					-	7.200.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	7.200.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	-	7.200.000.000	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah		7.200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
16	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-													
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	-		-	-	-	69.886.264.000.							69.886.264.000	
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan													
	1 02 02 2.01 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center													
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit													
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan													
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	7.000.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	7.000.000.000	
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	7.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		7.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
		Puskesmas Sungai Limau														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.178.452.351							1.178.452.351	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
17	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						439.786.246					-		439.786.246	
		[Meningkatkan kinerja pelayanan														
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	439.786.246			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas perangkat daerah	-	439.786.246	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	439.786.246	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas perangkat daerah		439.786.246	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
18	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	-	-	-	728.722.205							728.722.205	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan														
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1344 Orang	68.800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		68.800.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar													
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					11.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau						11.000.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					224.094.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		224.094.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	8.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		8.400.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	28.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		28.000.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	4.400.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		4.400.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				38 Orang	10.800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Status Kesehatan		10.800.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19 Dokumen	71.612.200	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		71.612.200	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-				-	177.056.000	-	-	-	-	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		177.056.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		800.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	9.150.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		9.150.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				2 Dokumen	3.610.005	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehat, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		3.610.005	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		6.000.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				9 Dokumen	60.700.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		60.700.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
19	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN														
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	9.943.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	9.943.900	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Siting I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				2 Dokumen	9.943.900	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Status Kesehatan		9.943.900	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.479.284.095							1.632.849.095	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
20	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.632.849.095						-	1.632.849.095	
		(Meningkatkan kinerja pelayanan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	21.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	6.400.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				1 Orang	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	87.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	237.575.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	13.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	3.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	7.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS SITIUNG I
22	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	6.960.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-	-	-
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Tiung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	6.960.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-	-	PUSKESMAS SITIUNG I
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.604.150.000						868.490.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
23	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						760.050.000					-	760.050.000	
		[Meningkatkan pelayanan													
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	760.050.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	-	760.050.000
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	760.050.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	760.050.000	PUSKESMAS TIUMANG
24	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA													
		-	-	-	-	-	-	839.700.000						108.440.000	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	839.700.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	108.440.000
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					22.400.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok					-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					22.500.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	5.900.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	312.600.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Tiung, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	PUSKESMAS TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	18.040.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				1 Orang	3.600.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Status Kesehatan		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	51.960.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	205.100.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1.400.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	7.060.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	22.500.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-				-	21.200.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	21.200.000		PUSKESMAS TIUMANG
25	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	4.400.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-	-	
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Silago	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	4.400.000	Kab. Dharmastraya, Tiumang, Sungai	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-	-	PUSKESMAS TIUMANG
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.587.880.156						1.587.880.156	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
26	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						909.475.156					-	909.475.156	
		[Meningkatkan pelayanan													
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD terbayarnya ATK, cetak dan oenggunaan terbayarnya belanja honorarium keuangan terbayarnya belanja honor kontrak blud terbayarnya belanja jasa pelayanan medis ASN terbayarnya belanja listrik terbayarnya belanja obat-obatan lainnya terbayarnya belanja operasional puskesmas lainnya terbayarnya jasa klain BPJS non Kapitasi				100 persen 12 bulan 7 Orang 13 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 38 Orang	909.475.156			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas perangkat daerah	-	909.475.156
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	909.475.156	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas perangkat daerah	909.475.156	PUSKESMAS SILAGO
27	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						665.475.000					-	665.475.000	
		-	-					665.475.000						665.475.000	
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan													
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					29.400.000	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago					29.400.000	PUSKESMAS SILAGO
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					30.400.000	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	30.400.000	PUSKESMAS SILAGO
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				13 Orang	7.600.000	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	7.600.000	PUSKESMAS SILAGO
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				168 Orang	19.000.000	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	19.000.000	PUSKESMAS SILAGO
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	190.000.000	Kab. Dharmastraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	190.000.000	PUSKESMAS SILAGO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		4.800.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		8.800.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		10.500.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				13 Orang	5.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Status Kesehatan		5.800.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	76.805.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		76.805.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	189.670.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		189.670.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	300.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		300.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	7.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		7.200.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		2.000.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	38.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		38.200.000	PUSKESMAS SILAGO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		45.000.000	PUSKESMAS SILAGO
28	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN														
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan gernas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja				40 nagari 75 persen 60 posyandu 28 posyandu	12.930.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	-	12.930.000	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Sialang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				4 Dokumen	12.930.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatkan status kesehatan		12.930.000	PUSKESMAS SILAGO
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.400.480.239							1.400.480.239	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
29	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						754.908.239						-	754.908.239	
		[Meningkatkan pelayanan Puskesmas]	-		-	-	-	754.908.239							754.908.239	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD				100 persen	754.908.239			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Peningkatan Operasional Pelayanan Puskesmas	-	754.908.239	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	754.908.239	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Peningkatan Operasional Pelayanan Puskesmas		754.908.239	PUSKESMAS SIALANG
30	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA						631.324.000							631.324.000	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						631.324.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan Masyarakat	-	631.324.000	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28.160.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		28.160.000	PUSKESMAS SIALANG
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	35.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		35.600.000	PUSKESMAS SIALANG
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		12.000.000	PUSKESMAS SIALANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		11.200.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	210.892.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		210.892.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		22.000.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	18.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		18.400.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	3.328.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		3.328.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				0 Orang	11.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatkan status Kesehatan		11.200.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	30.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		30.800.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	170.684.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		170.684.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	8.960.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		8.960.000	PUSKESMAS SIALANG	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	1.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat		1.800.000	PUSKESMAS SIALANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				257 rang 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 19 Orang 17340 Orang 22 Orang 37 Orang	633.315.400			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19 Orang	21.608.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				257 Orang	25.200.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	14.400.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				22 Orang	16.400.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	178.086.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	18.500.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	16.500.000	Kab. Dharmastraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmastraya	-	-	PUSKESMAS SITIUNG II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	12.443.900	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				17340 Orang	800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	56.755.800	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	170.330.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	5.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				2 Dokumen	891.700	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				2 Dokumen	13.600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				2 Dokumen	82.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya			-	PUSKESMAS SITIUNG II
34	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN															
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah nagari siaga aktif Jumlah nagari yang melaksanakan gernas aktif Jumlah posyandu strata mandiri Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja				2 Dokumen 40 nagari 75 persen 60 posyandu 28 posyandu	6.170.000		-	-	-	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kabupaten dharmasraya	-		-	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Padang Laweh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				2 Dokumen	6.170.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	-	-	-	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan			-	PUSKESMAS SITIUNG II
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.246.470.812								649.434.812	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.246.470.812								649.434.812	
35	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						616.834.812						-		616.834.812	
		[Meningkatkan pelayanan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	8.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	190.136.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11.100.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15.600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9.800.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				200 Orang	800.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	40.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	184.960.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	19.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	47.300.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
37	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN													
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan bagi penyandang disabilitas dan KIPA sosialisasi peningkatan kapasitas kader posyandu dalam 25 tanda kecakapan				0 kasus 4 nagari	13.840.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	-
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Koto Besar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	13.840.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Status Kesehatan	-	PUSKESMAS PADANG LAWEH
								1.691.420.000						1.691.420.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.691.420.000						1.691.420.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
38	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.018.000.000					-	1.018.000.000	
		[Meningkatkan pelayanan						1.018.000.000						1.018.000.000	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.018.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Perangkat Daerah	-	1.018.000.000
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.018.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.018.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
39	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						654.620.000					-	654.620.000	
		-													
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil P2P Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Imunisasi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Hasil Pengelolaan Malaria Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Hasil Pengelolaan Surveilans Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang Lansia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang Terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan kesehatan				205 orang 28 orang 1971 orang 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 60 Persen 100 Persen 28 Orang 908 orang 56 Kasus 6940 orang 1 Dokumen	654.620.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	-	654.620.000
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	32.160.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	32.160.000	PUSKESMAS KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	51.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		51.400.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	6.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		6.400.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		17.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	191.600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		191.600.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	17.300.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		17.300.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	13.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		13.800.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	12.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		12.200.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				1 Orang	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		6.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	49.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		49.200.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	182.700.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		182.700.000	PUSKESMAS KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		1.200.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	17.700.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		17.700.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		3.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	11.360.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		11.360.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	41.600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		41.600.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
40	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN														
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	18.800.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	18.800.000	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	18.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		18.800.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
		Puskesmas Koto Baru														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.927.613.763							2.073.827.863	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						2.927.613.763							2.073.827.863	
41	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN						2.045.227.963						-	2.045.227.963	
		[Meningkatkan kualitas pelayanan						2.045.227.963							2.045.227.963	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	2.045.227.963			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	2.045.227.963	
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan													
42	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						874.865.800						-	28.599.900	
		-	-		-	-	-	874.865.800							28.599.900	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						874.865.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	28.599.900	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	28.599.900	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		28.599.900	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2818 Orang	67.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	4.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	289.700.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				23 Dokumen	4.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang				32 Orang	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	55.585.900	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	244.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah					
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				122 Orang	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	21.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	13.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	95.100.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
43	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7.520.000						-	-		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	7.520.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	-		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Sungai Rumbai	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	7.520.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		-	PUSKESMAS KOTO BARU	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						2.281.730.000								1.503.800.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						2.281.730.000								1.503.800.000	
44	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.423.000.000						-		1.423.000.000	
		[Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas]	-		-	-	-	1.423.000.000								1.423.000.000	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.423.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Peningkatan Pelayanan Operasional Puskesmas		1.423.000.000	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	
45	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						845.630.000						-		80.800.000	
		-															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	845.630.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-	-	80.800.000	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	43.520.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	80.800.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-	80.800.000		PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	18.000.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	9.000.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 bulan Dokumen	267.300.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.400.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	27.800.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	8.600.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				1 Orang	14.400.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	38.500.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 bulan Dokumen	213.000.000	Kab. Dharmastraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	5.730.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	17.840.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.540.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	9.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	81.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
46	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						13.100.000						-	-	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	13.100.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	-	-	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Gunung Medan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	13.100.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai,	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		-	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						1.467.348.000							800.000.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						1.467.348.000							800.000.000	
47	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						800.000.000						-	800.000.000	
		[Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas]	-		-	-	-	800.000.000							800.000.000	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		800.000.000	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
48	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						662.436.000						-	-	
		-														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpicil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran B8TT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS/MTBM Persentase ibu nifas yang mendapat			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8 daerah 11 kelompok 50 nagari 46 nagari 0.7 indeks 85 persen 100 persen 100 persen 48 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 18 persen 100 persen 65 persen 100 persen	662.436.000				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	-	-		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	30.400.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	74.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	215.886.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan status kesehatan masyarakat			-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				25 Orang	17.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatkan status kesehatan		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	53.100.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	157.680.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.270.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	7.900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				6 Orang	600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	12.800.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	15.600.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	42.900.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
49	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN						4.912.000							-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.912.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	-		-	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Puskesmas Sungai Dareh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				1 Dokumen	4.912.000	Kab. Dhamasraya, Sitiung, Gunung	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		-	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						2.871.992.150							2.871.992.150	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.871.992.150							2.871.992.150	
50	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.031.955.200						-	2.031.955.200	
		[Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas]	-		-	-	-	2.031.955.200							2.031.955.200	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan													
51	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						831.636.950						-	831.636.950	
		-														
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8 daerah 40 kelompok 11 kelompok 50 nagari 46 nagari 0.7 indeks 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 48 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	831.636.950			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dhamasraya	-	831.636.950	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				595 Orang	81.920.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dhamasraya		81.920.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53111 Orang	88.800.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dhamasraya		88.800.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				72 Orang	10.600.000	Kab. Dhamasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dhamasraya		10.600.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				272 Orang	7.500.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Semau Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		7.500.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	275.880.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		275.880.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11.400.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		11.400.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		15.000.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	19.325.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		19.325.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				72 Orang	5.600.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung,	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan		5.600.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.374.950	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		35.374.950	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	188.100.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		188.100.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	5.160.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		5.160.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	13.500.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuao, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		13.500.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	6.677.000	Kab. Dharmastraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmastraya		6.677.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Pelayan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmasraya	4.000.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH	
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					62.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Kab. Dharmasraya	62.800.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH	
52	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN						8.400.000					-	8.400.000		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	8.400.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	8.400.000		
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
		Puskesmas Timpeh						1.790.317.000							1.794.561.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.790.317.000							1.794.561.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.790.317.000							1.794.561.000	
53	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas]	-	-	-	-	-	993.617.000						993.617.000		
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan													
54	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						789.540.000					-	793.784.000		
		-														
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8 daerah 40 kelompok 11 kelompok 50 nagari 46 nagari 0.7 indeks 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 48 persen 100 persen 100 persen 100 persen 55 persen 18 persen 100 persen 100 persen 10 persen 100 persen	789.540.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	-	793.784.000	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	36.360.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	36.360.000	PUSKESMAS TIMPEH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				272 Orang	35.600.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		35.600.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				193 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		10.000.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				108 Orang	10.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		10.800.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2227 Dokumen	222.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		227.700.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				93 Dokumen	11.100.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		11.100.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				423 Dokumen	32.500.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		32.500.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				152 Dokumen	12.585.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		12.585.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				93 Orang	9.340.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		9.340.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				284 Dokumen	65.515.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		65.515.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-				-	230.840.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		230.084.000	PUSKESMAS TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	300.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		300.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				146 Dokumen	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		24.000.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				224 Dokumen	3.900.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		3.900.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					15.200.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		15.200.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				688 Dokumen	68.800.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENNGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		68.800.000	PUSKESMAS TIMPEH
55	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7.160.000						-	7.160.000	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan														
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				716 Dokumen	7.160.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENINGKAT NYA STATUS KESEHATAN MASYARKAT		7.160.000	PUSKESMAS TIMPEH
		Puskesmas Beringin Sakti														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.248.700.000							1.248.700.000	
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.248.700.000							1.248.700.000	
56	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas]	-		-	-	-	642.000.000							642.000.000	
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan													
57	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						600.280.000						-	600.280.000	
		-														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan Persentase Rumah Tangga PHBS				100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 7 kelompok 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	600.280.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	-	600.280.000	
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	63.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		63.700.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				992 Orang	34.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		34.700.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				17 Orang	2.100.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		2.100.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	23.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		23.000.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7.320.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		7.320.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang				17 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	MENINGKATKAN DERAJAT		10.000.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional					Daerah
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	41.480.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		41.480.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	168.880.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		168.880.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria													
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi													
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak													
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan													
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi													
58	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						6.420.000						-	6.420.000	
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader posyandu yang terlatih Jumlah Kelompok TOGA yang dibina Jumlah Pembentukan dan pembinaan posyandu remaja Jumlah Persentase peningkatan PHBS Persentase anak usia sekolah yang diberikan penyuluhan kesehatan Persentase KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase poskesri dan pustu yang dibina Persentase rumah tangga yang ber-PHBS				7 Orang 12 kelompok 7 kelompok 48 persen 90 persen 80 persen 100 persen 85 persen	6.420.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	6.420.000	
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang						80.235.399.220							80.235.399.220	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						80.235.399.220							80.235.399.220	
59	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				BB Indeks	34.641.430			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya menunjang urusan perintah daerah	-	34.641.430	
	1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				7 Laporan	34.641.430	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatnya menunjang urusan		34.641.430	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	11.794.899.220							11.794.899.220	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB										
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	629.686.190			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	629.686.190	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Paket	5.000.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-		5.000.700	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 unit Paket	273.446.140	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		273.446.140	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.957.350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		15.957.350	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	41.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		41.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		-														
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	11.794.899.220							11.794.899.220	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.032.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		259.032.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		-														
	1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	850.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	-	850.000.000	
	1 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	550.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				96 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	3.250.855.600			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	3.250.855.600	
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		5.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		-														
	1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	11.794.899.220							11.794.899.220	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.490.755.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		2.490.755.600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.150.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		36.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				23 Unit	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
60	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						9.000.000.000						-	9.000.000.000	
		-														
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kinerja sistem irigasi				73.93 %	5.000.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	-	5.000.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 03 02 2.01 0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,25 KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		[Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Indeks kinerja sistem irigasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	78.07 80	40 72.44	50 73	55 73.93	9.000.000.000							9.000.000.000	
	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi													
	1 03 02 2.01 0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan													
	1 03 02 2.01 0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun													
	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	4.000.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	-	4.000.000.000	
	1 03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				60Ha KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				40Ha KM	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100Ha KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
61	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						3.565.000.000						-	3.565.000.000	
		[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota	2.49 35.15 94.77	30.02 3.27 89.64	2.85 30.88 90.50	2.77 31.73 91.35	3.565.000.000							3.565.000.000	
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan														
	1 03 03 2.01 0024	Pembiinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
	1 03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				4 lokasi Liter/Detik	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara													
	1 03 03 2.01 0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi													
	1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	230.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan		230.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya													
62	1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						780.000.000						-	730.000.000	
		-														
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-					780.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	-	730.000.000	
	1 03 04 2.01 0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan [Meningkatkan layanan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				100 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Pemerataan konektivitas dan		-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
	1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun													
	1 03 04 2.01 0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan													
63	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						550.000.000						-	450.000.000	
		[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	97.58	92.45	93.31	94.16	550.000.000							450.000.000	
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan														
	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja													
		-	-		-	-	-	550.000.000							450.000.000	
	1 03 05 2.01 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun													
		[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	97.58	92.45	93.31	94.16	550.000.000							450.000.000	
	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang				1 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Pemerataan konektivitas dan		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
	1 03 05 2.01 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan				50 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Pemerataan konektivitas dan		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
	1 03 05 2.01 0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah				1 Penyelenggara	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Pemerataan konektivitas dan	-		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
64	1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						2.000.000.000						-	2.000.000.000	
		[Meningkatkan kualitas														
	1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-					2.000.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	-	2.000.000.000	
	1 03 07 2.01 0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Pemerataan konektivitas dan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
65	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN						6.560.000.000						-	6.710.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
		[Meningkatkan kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	74.17	70.53	70.74	71.28	6.560.000.000						-	6.710.000.000	
	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-					6.560.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		6.710.000.000	
	1 03 08 2.01 0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				40 Bangunan Gedung Negara	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.01 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan													
		-	-		-	-	-	6.560.000.000							6.710.000.000	
	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala													
		[Meningkatkan kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	74.17	70.53	70.74	71.28	6.560.000.000							6.710.000.000	
	1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat				131 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatnya sarana dan		800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
66	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
		[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Rasio kemantapan jalan	57.58	54.58	55.08	55.58	41.500.000.000							41.500.000.000	
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan														
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya													
	1 03 10 2.01 0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin													
	1 03 10 2.01 0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				8 KM	23.800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan jalan		23.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				30 unit jembatan Meter	1.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan jalan		1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		-														
	1 03 10 2.01 0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	8.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan jalan		8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		[Meningkatkan aksesibilitas														
	1 03 10 2.01 0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun													
67	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						685.500.000						-	685.500.000	
		[Meningkatkan kompetensi tenaga														
	1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-					405.500.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Masyarakat	-	405.500.000	
	1 03 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
	1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih												685.500.000		
	1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi	-	-	-	-		685.500.000									
	1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan														
	1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	170.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	170.000.000		
	1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				5 Dokumen Paket Pekerjaan	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 11 2.04 0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan				5 Dokumen Bangunan	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-		85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	
68	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						3.800.000.000						-	3.800.000.000		
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang															
	1 03 12 2.01 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.01 0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
		[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)	0 11.09	0 10.64	0 10.72	0 10.81	3.800.000.000							3.800.000.000		
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten														
	1 03 12 2.01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
		-	-		-	-	-	3.800.000.000							3.800.000.000		
	1 03 12 2.01 0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	
	1 03 12 2.01 0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi														
		[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)	0 11.09	0 10.64	0 10.72	0 10.81	3.800.000.000							3.800.000.000		
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 03 12 2.01 0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi														
	1 03 12 2.02 0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.02 0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	750.000.000			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	750.000.000	
	1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang													
	1 03 12 2.03 0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku													
	1 03 12 2.03 0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03 0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	100.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	100.000.000	
	1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		Dinas Perumahan, Kawasan						7.389.308.178							2.400.000.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						7.189.308.178							2.400.000.000	
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.189.308.178							2.400.000.000	
69	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.682.808.178						-	2.400.000.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	2.377.284.800			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	2.400.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1 04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.377.284.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		2.400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawain														
	1 04 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut						-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						268.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	-	
	1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Paket	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	1 04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				60000 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	1 04 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	1 04 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	522.800.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	-	
	1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		-	-		-	-	-	3.682.808.178							2.400.000.000	
	1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 0	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1 Meningkatkan Kinerja Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	284.450.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	-	
	1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	1 04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	1 04 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	1 04 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
70	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN														
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					452.500.000							-	
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan														
	1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
	1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Warga yang tersosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				20 Orang	50.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Berkurangnya rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	
	1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis				1 Orang	50.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Berkurangnya rumah layak huni	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				1 Orang	125.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Berkurangnya rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	
	1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun													
		-	-		-	-	-	452.500.000							-	
	1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima														
	1 04 02 2.04 0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					452.500.000							-	
	1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 04 02 2.05 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	200.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Berkurangnya rumah layak huni bagi masyarakat	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		-														
	1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				7 Laporan	36.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Berkurangnya rumah layak huni bagi masyarakat	-	-	
	1 04 02 2.06 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku				20 Dokumen	36.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Berkurangnya rumah layak huni	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	
71	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						404.000.000					-	-		
	1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas														
	1 04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	400.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		[Meningkatkan kualitas kawasan permukiman]	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani					404.000.000						-		
	1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan														
	1 04 03 2.03 0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar													
72	1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						325.000.000					-	-		
		[Berkurangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh]	-	-	-	-	-	325.000.000						-		
	1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan														
	1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				6 Unit Rumah	150.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		-														
	1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				2 Unit	175.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
73	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN														
	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU					2.325.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	-	-	
	1 04 05 2.01 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan					275.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dhamasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		[Meningkatkan penyediaan PSU						2.325.000.000						-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 04 05 2.01 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	2.050.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
	2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						200.000.000							-	
74	2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						50.000.000						-	-	
		-														
	2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU					50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Optimalisasi perizinan tanah dan redistribusi tanah	-	-	
	2 10 06 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam				20 Dokumen	50.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Optimalisasi perizinan tanah dan		-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
75	2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN														
	2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-				-	150.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Optimalisasi perizinan tanah dan redistribusi tanah	-	-	
	2 10 09 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				75 Dokumen	150.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	Optimalisasi perizinan tanah dan redistribusi tanah	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Satuan Polisi Pamong Praja dan														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.702.155.350							9.881.000.000	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
76	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.164.155.350						-	7.228.000.000	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	8.164.155.350							7.228.000.000	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	B	BB									
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	157.000.000			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	180.000.000	
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
		-	-		-	-	-	8.164.155.350							7.228.000.000	
	1 05 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	3.556.400.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	2.558.000.000	
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		8.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	400.000.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	240.000.000	
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
77	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						518.000.000						-	423.000.000	
		[Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100	100	100	100	518.000.000							423.000.000	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 05 02 2.01 0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas													
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
		-	-		-	-	-	518.000.000							423.000.000	
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda					8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pelayanan publik yang prima dan		8.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban				150 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pelayanan publik yang prima dan	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		[Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	100	100	518.000.000						423.000.000		
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan														
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah														
	1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran				6 Laporan	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pelayanan publik yang prima dan		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	15.000.000			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	-	20.000.000	
	1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
78	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN,														
		-	-		-	-	-	2.020.000.000							2.230.000.000	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian,														
	1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
		[Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran]	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran	100	100	100	100	2.020.000.000						2.230.000.000		
	1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan				22 Unit	1.800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pelayanan publik yang prima dan		2.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran														
	1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran														
	1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian													
	1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	50.000.000			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	-	50.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya												
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3.291.791.400						3.455.500.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB													
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.291.791.400						3.455.500.000	
79	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN [Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	2.753.626.000						2.980.500.000	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	B	B	88								
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.463.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	-	1.600.000.000
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.463.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	1.600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat													
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.490.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	8.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90.012.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	92.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	250.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	-	110.000.000
	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	164.340.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	-	257.000.000	
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatnya resiliensi terhadap		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				9 Unit	90.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatnya resiliensi terhadap		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	8.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		17.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		120.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
80	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN														
		[Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100 12.7	100	100	538.165.400							475.000.000	
	1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan														
	1 05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun													
	1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	285.000.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	-	185.000.000	
	1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	05 03 2.02 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				250 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana													
1	05 03 2.02 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktum Pelayan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya													
1	05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana													
		[Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	538.165.400							475.000.000	
1	05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 %	128.165.400			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	-	160.000.000	
1	05 03 2.03 0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas													
1	05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat													
1	05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana													
1	05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
		[Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana]	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100	538.165.400							475.000.000	
1	05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar														
1	05 03 2.04 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				4 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				2 Kegiatan	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan					30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatnya resiliensi terhadap		30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN
								10.763.655.350							10.865.961.650	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.215.331.650							5.316.637.950	
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
81	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.485.354.700					-	4.582.161.000	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat													
	1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				1 tahun	5.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	10.000.000
	1 06 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah				12 bulan	3.131.506.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.131.506.000
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.131.506.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3.131.506.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat													
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												
	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				1 tahun	96.425.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	100.000.000
	1 06 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	29.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
	1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	850.535.500			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	850.535.500

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	1 06 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	77.012.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		77.012.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	769.523.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		769.523.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	11.880.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.880.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
82	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						38.320.000						-	38.320.000	
		[Meningkatkan Pemberdayaan														
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang terlatih				118 PSKS	38.320.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	38.320.000	
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1 06 02 2.03 0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis													
83	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						491.996.000						-	496.496.000	
		[Meningkatkan rehabilitasi sosial]														
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Assesment calon peserta murid baru sekolah rakyat Bantuan permakanan untuk lansia tunggal Terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti				100 orang 534 orang 30 Orang	412.040.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	416.540.000	
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				534 Orang	14.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		14.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	9.390.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		9.390.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8.120.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		8.120.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					126.910.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		126.910.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	62.978.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		62.978.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	165.650.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		170.150.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	3.815.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		3.815.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 04 2.01 0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.01 0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				700 orang	79.956.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	79.956.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga				700 Orang	79.956.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial		79.956.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
84	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN														
		[Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial]	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	100	0	0	100	63.230.950							63.230.950	
			Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	5	100	100	5									
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	81	2	76	77									
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	95	99.01	82	83									
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	99.00		98.91	99.00									
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar													
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Capacity Building Pengelola Data SIKS-NG Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat berupa pemberian bantuan modal usaha Terverifikasi dan validasi data DTKS/DTSN				68 Orang 27 orang 245.230 jiwa	63.230.950			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	63.230.950	
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Orang	23.227.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		23.227.550	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1 06 05 2.02 0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0													
85	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						136.430.000						-	136.430.000	
		[Meningkatnya perlindungan														
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota				250 orang	78.890.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	136.430.000	
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	6.822.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan		6.822.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1 06 06 2.01 0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lambung sosial				6 kecamatan	57.540.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	-	-	
	1 06 06 2.02 0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lambung Sosial bagi	Jumlah kampung siaga bencana dan lambung sosial yang difasilitasi				6 Desa/Kelurahan	57.540.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial	-	-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.548.323.700							5.549.323.700	
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
86	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						687.021.700						-	687.021.700	
		[Meningkatkan kualitas dan														
	2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan				38 perangkat daerah	36.794.800			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	36.794.800	
	2 08 02 2.01 0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan					17.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		17.700.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.01 0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG				4 Laporan	19.094.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kesetaraan gender		19.094.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				17 lembaga	650.226.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	650.226.900	
	2 08 02 2.02 0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan				17 Lembaga	519.326.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya kesetaraan gender		519.326.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 02 2.02 0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi													
	2 08 02 2.02 0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan													
87	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						131.130.000						-	131.130.000	
		[Menurunnya kekerasan terhadap														
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota				23 Layanan	114.130.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	114.130.000	
	2 08 03 2.02 0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau				1 Orang	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		1.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 03 2.02 0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau				20 orang	12.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		12.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 03 2.02 0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan				3 Orang	15.340.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		15.340.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 03 2.02 0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 08 03 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota												
	2 08 03 2.02 0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				20 orang	49.285.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	49.285.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan													
	2 08 03 2.03 0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek												
88	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						42.000.000					-	42.000.000	
		[Meningkatkan kualitas keluarga													
	2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 kegiatan	42.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya pemenuhan Hak Anak	-	42.000.000
	2 08 04 2.02 0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan												
89	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						69.200.000					-	69.200.000	
		[Terjaminnya pemenuhan hak													
	2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	69.200.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya pemenuhan Hak Anak	-	69.200.000
	2 08 06 2.01 0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang				3 Lembaga	16.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya pemenuhan Hak		16.800.000
	2 08 06 2.01 0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan				50 Orang	17.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya pemenuhan Hak		17.900.000
	2 08 06 2.01 0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	34.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya pemenuhan Hak		34.500.000
90	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						396.260.000					-	396.260.000	
		[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	100	0	100	100	396.260.000						396.260.000	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	67.90	100	66.83	66.95								
			Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82.02		76.54	76.71								
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap													
	2 08 07 2.01 0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				11 Dokumen	49.850.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	49.850.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUOK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.01 0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/kota												
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/kota				90 Layanan	208.160.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	208.160.000
	2 08 07 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan				85 Orang	50.920.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan	50.920.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	2 08 07 2.02 0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan				85 Orang	17.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		17.800.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 07 2.02 0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota													
	2 08 07 2.02 0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5 Orang	69.579.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		69.579.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan				85 Orang	61.661.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		61.661.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 07 2.02 0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan				1 Orang	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Perlindungan		1.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Lembaga	88.400.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	88.400.000	
	2 08 07 2.03 0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek													
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.222.712.000							4.223.712.000	
91	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						292.000.000						-	292.000.000	
		[Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk]	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	2.18	17.2	14.7	12.9	292.000.000							292.000.000	
				83.7	2.27	2.26	2.24									
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	85.8	40.4	45.4	55.8									
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	9.2	63.7	71.6	76.6									
			Persentase Kampung KB Mandiri													
	2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi														
	2 14 02 2.01 0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						252.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	-	252.000.000	
	2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				24 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				132 Dokumen	132.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		132.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
92	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA													2.699.112.000	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	7.35	14.08	11.02	72.50	2.699.112.000							2.699.112.000	
			75.15	72.18	72.18	9.15										
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	7.6	9.55	9.55	9.4									
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)													
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,														
	2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Laporan	539.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		539.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa				110 Laporan	220.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana				3 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh														
	2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				156 Orang	416.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		416.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Operasional distribusi alokon Operasional koordinasi pelayanan KB dan pembinaan pelayanan KB Penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, Cabut Implant, MOW, MOP) Sarana Penunjang Pelayanan KB				26 faskes 3 kali 2105 Akseptor 11 unit	958.212.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	-	958.212.000	
	2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat				24 Laporan	21.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		21.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode					912.312.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		912.312.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan				24 Laporan	24.300.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		24.300.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	-		-	-	-	2.699.112.000							2.699.112.000	
	2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan														
	2 14 03 2.04 0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB				3 Unit	22.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		22.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya pemberdayaan														
	2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)													
93	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.231.600.000					-	1.232.600.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
		[Meningkatnya pemberdayaan														
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bantuan permakanan untuk balita Bantuan permakanan untuk program stunting ibu hamil BKB Kit Stunting Konseling Satyagatra Sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				963 balita 200 ibu hamil 10 unit 11 kecamatan 3 sekolah	274.600.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	-	275.600.000	
	2 14 04 2.01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat				1163 Laporan / Dokumen	105.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,		105.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan				10 Unit	130.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,		130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
		-														
	2 14 04 2.01 0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				342 Kelompok	39.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		40.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya pemberdayaan														
	2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pencatatan hasil pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (KRS)				10 kali 10 kali	957.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	-	957.000.000	
	2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting				6995 laporan	435.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,		435.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
	2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon				6995 laporan	522.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dhamasraya Sejahtera Merata	Terwujudnya Keluarga Berkualitas,		522.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
		Dinas Pangan dan Perikanan						6.849.700.000							7.030.200.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB														
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						6.524.700.000							6.705.200.000	
94	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	4.329.700.000							4.390.200.000	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.030.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.030.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia				15 Unit	110.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	130.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 09 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		70.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	2 09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	765.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		765.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara				39 Unit	180.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	220.000.000	
	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		-	-		-	-	-	4.329.700.000							4.390.200.000	
	2 09 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				00 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan		100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	4.329.700.000							4.390.200.000	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		6.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
95	2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER														
		[Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	76.52	88.56	47.53	52.28	1.800.000.000							1.800.000.000	
	2 09 02 2.01	Pervediaan Infrastruktur dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
	2 09 02 2.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1.800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERIA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	-	1.800.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
96	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						265.000.000					-	335.000.000		
		[Meningkatkan diversifikasi dan														
	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok				<10 Persen	135.000.000			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan pangan	-	155.000.000	
	2 09 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERIA TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan pangan		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan				1 Laporan	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Ketersediaan pangan		90.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan pangan		40.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan														
	2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERIA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan Pangan		100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya				92,20 Skor	80.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	-	80.000.000	
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
97	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN														
		[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2	2	2	2	100.000.000							150.000.000	
	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan Tertangani				200 KK	100.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	-	150.000.000	
	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
98	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						30.000.000						-	30.000.000	
		[Meningkatkan pengawasan mutu														
	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar				11 Kecamatan	30.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	-	30.000.000	
	2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						325.000.000							325.000.000	
99	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN						20.000.000							20.000.000	
		-						20.000.000							20.000.000	
	3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	20.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan		20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
100	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN															
		[Meningkatkan produksi perikanan budidaya]	Produksi Perikanan Budidaya	26000	27105.49	23300	24000	210.000.000							210.000.000		
	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang didampingi				125 Kelompok	50.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	50.000.000		
	3 25 04 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 Kelompok	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan,				10 Kelompok	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan		20.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				40 Persen	160.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	160.000.000		
	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				3 Unit	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan		80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3 25 04 2.04 0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				7 Unit	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan		80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
101	3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER															
		[Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	Luasan Kawasan Konservasi	52	45	46	47	25.000.000							25.000.000		
	3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya															
	3 25 05 2.01 0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
102	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						70.000.000							-	70.000.000	
		[Meningkatkan konsumsi ikan]															
	3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Konsumsi				25 Persen	70.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	70.000.000		
	3 25 06 2.03 0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Dinas Lingkungan Hidup						6.320.821.270								6.288.000.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB															
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						6.320.821.270								6.288.000.000	
103	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.665.000.000							-	3.665.000.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat]															
	2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan				100 Persen	2.950.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	2.950.000.000		
	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.950.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		2.950.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		3.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RKBMD				100 Persen	165.000.000			-	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	165.000.000	
2	11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
2	11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
2	11 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
2	11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
104	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN														
		[Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak RRP]	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		100	100		170.000.000							30.000.000	
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan														
	2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
105	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN														
		[Menurunnya pencemaran dan jatuhnya kerusakan lingkungan hidup]	Indeks Kualitas Air	72.24	51.11	71.24	71.44	198.000.000							198.000.000	
			Indeks Kualitas Udara	77.36	91.97	75.86	76.16									
	2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang Terlaksana				3 Laporan	148.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	148.000.000	
	2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				26 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-														
	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang Terlaksana				1 Laporan	50.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	50.000.000	
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
106	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						400.000.000						-	400.000.000	
		[Meningkatkan kualitas														
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH di wilayah perkotaan yang dikelola/terpelihara				11 Ha	400.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	400.000.000	
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Ha	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
107	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						40.000.000						-	40.000.000	
		[Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	63.95	39.47	47.37	51.28	40.000.000							40.000.000	
	2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3														
	2 11 05 2.01 0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan					25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-						40.000.000							40.000.000	
	2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	15.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	2 11 05 2.02 0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				25 Usaha	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
108	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN [Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	87	82	85	85	52.000.000							52.000.000	
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana				2 Laporan	52.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	52.000.000	
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan				8 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		27.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
109	2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN														
		[Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH]	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	100	100	10.000.000							10.000.000	
	2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan														
	2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan													
110	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						140.000.000						-	140.000.000	
		[Meningkatkan kapasitas SDM														
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana				3 Laporan	140.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	-	140.000.000	
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan													
	2 11 08 2.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga				5 Lembaga	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
111	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN														
		[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.81	5.21	5.64	6.07	15.000.000							15.000.000	
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan														
	2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		[Meningkatkan penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup]	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100		100	100	10.000.000						10.000.000	
2	11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan													
2	11 10 2.01 0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola												
113	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.620.821.270					-	1.728.000.000	
		[Meningkatkan tata kelola													
2	11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah				4000 KK	1.620.821.270					-	1.728.000.000	
2	11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				20 Kelompok	28.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	28.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan				20 Unit	392.821.270	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				30 Ton	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	-	800.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di				20 Ton	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2		Dinas Kependudukan dan						4.687.541.754						5.185.000.000	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.687.541.754						5.185.000.000	
114	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.002.541.754					-	4.500.000.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat													
2	12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.502.541.754					-	3.000.000.000	
2	12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.502.541.754	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	3.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian													
2	12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
		-	-	-	-	-	-	4.002.541.754						4.500.000.000	
2	12 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	530.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	580.000.000	
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	2 12 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	2 12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	415.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	415.000.000	
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	350.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	350.000.000	
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Administrasi	Pengguna Layanan Publik Administrasi		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				9 Unit	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Administrasi	Pengguna Layanan Publik Administrasi		70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-		-	-	-	4.002.541.754							4.500.000.000	
	2 12 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	2 12 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
115	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
		[Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	0 100	0 38.46 94.19	0 50 96	0 60 97	195.000.000							195.000.000	
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
	2 12 02 2.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		-	-		-	-	-	195.000.000							195.000.000	
	2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk				100 Persen	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	100.000.000	
	2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia													
		[Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	0 100	0 38.46 94.19	0 50 96	0 60 97	195.000.000							195.000.000	
	2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah			
	2 12 02 2.03 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa				12 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Administrasi	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk												
116	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						315.000.000					-	315.000.000	
		[Meningkatkan kualitas layanan						315.000.000						315.000.000	
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						15.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	15.000.000
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-		-	-	-	315.000.000						315.000.000	
	2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													
	2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil												
	2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					250.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	-	250.000.000
	2 12 03 2.03 0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatkan kualitas layanan													
	2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil												
117	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						160.000.000						-	160.000.000
		[Meningkatkan pemanfaatan													
	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100 Persen	25.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan	-	25.000.000

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 12 04 2.01 0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan		25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Persen	90.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan	-	90.000.000	
	2 12 04 2.03 0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan				12 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data		50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi				12 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-														
	2 12 04 2.03 0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan													
	2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Persen	45.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan	-	45.000.000	
	2 12 04 2.04 0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
		[Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan]	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan					160.000.000							160.000.000	
	2 12 04 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi				12 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data		25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL [Meningkatkan kualitas profil kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan					15.000.000							15.000.000	
	2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan														
	2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengguna Layanan Publik Administrasi Kependudukan		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.573.289.565							6.450.000.000	
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
119	2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.732.289.565						-	4.160.000.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan				23 Orang	2.934.789.565			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.200.000.000	
	2 13 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.934.789.565	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	2 13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 13 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 13 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	1.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	50.000.000	
	2 13 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	335.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	104.500.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	133.000.000	
	2 13 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	2 13 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
	2 13 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	3.732.289.565								4.160.000.000	
	2 13 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
120	2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA						240.000.000						-	375.000.000		
	2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa															
	2 13 02 2.01 0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi														
121	2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						43.000.000						-	50.000.000		
		[Meningkatkan efektivitas kerja						43.000.000							50.000.000		
	2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						43.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	-	50.000.000		
	2 13 03 2.01 0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam				3 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatkan kerjasama antar		25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 03 2.01 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
122	2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						618.000.000						-	695.000.000		
		[Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	-	100	100	618.000.000							695.000.000		
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	95		80	81										
	2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan															
	2 13 04 2.01 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		225.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				156 Orang	257.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan				52 Dokumen	105.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2 13 04 2.01 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				52 Dokumen	56.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
123	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN															
		[Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	63.46	40.38	44.23	48.07	940.000.000							1.170.000.000		
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	99.03	75	80.28	84.61										
	2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga															
	2 13 05 2.01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				370 Lembaga	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 13 05 2.01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Dinas Perhubungan														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.704.779.438							23.875.257.382	
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						21.704.779.438							23.875.257.382	
124	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	6.738.468.740							7.412.315.614	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	B	B	BB									
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Laporan 2 Paket 71 Paket 40 Paket 11 Paket 20 Paket	162.511.300			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	178.762.430	
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 15 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	75.001.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	82.501.210	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit 5 Unit	55.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	60.500.000	
	2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
	2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit 9 Unit 1 Unit 45 Unit	283.663.750			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	-	312.030.125	
	2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang					20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang	-		22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	236.003.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		259.604.125	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	7.660.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		8.426.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-		22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
125	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN														
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	0.9 100	0.4 100	0.4 100	0.5 100	14.966.310.698							16.462.941.768	
			V/C Rasio													
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				451 Unit 210 Unit	14.664.605.698			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	-	-	16.131.066.268	
	2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0													
	2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berlekaaan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	201.631.750			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	221.794.925	
	2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan				10 Unit	201.631.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	221.794.925	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	100.073.250			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	110.080.575	
	2 15 02 2.08 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan				12 Laporan	100.073.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-	-	110.080.575	DINAS PERHUBUNGAN
		Dinas Komunikasi dan Informatika														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.227.036.800							6.720.287.787	
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.927.036.800							6.410.287.787	
126	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.644.987.800						-	5.030.287.787	
		I Meningkatnya Kinerja Perangkat														
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.814.183.343			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pegawai ASN (PNS dan PPPK) di Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.914.183.330	
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.814.183.343	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pegawai ASN (PNS dan PPPK) di Dinas Komunikasi dan Informatika		2.914.183.330	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian									Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	-	178.959.457	
	2 16 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10.000.000	-						10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						203.659.457			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika	-	178.959.457	
	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17 Paket	3.247.296	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika		3.547.296	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	5.412.161	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika		5.412.161	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika		25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Administrasi umum di Dinas Komunikasi dan Informatika		100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	2 16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.030.287.787			
	2 16 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau [Meningkatnya Kinerja Perangkat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				0 Unit	4.644.987.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan pemerintah				4 Jenis	1.166.645.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kegiatan Pelayanan Pemerintah Daerah	-	1.296.645.000	
	2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	2 16 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara				16 Unit	305.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi	-	305.500.000	
	2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	2 16 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													
	2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
127	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN														
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	75		50	55	1.182.049.000						1.230.000.000		
	2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan														
	2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media													
	2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan													
	2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis													
	2 16 02 2.01 0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				10 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
128	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						100.000.000					-	150.000.000		
		[Meningkatnya kualitas														
	2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan e-government				2 Dokumen	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kegiatan Pelayanan Pemerintah Daerah	-	150.000.000	
	2 16 03 2.02 0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
	2 16 03 2.02 0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kegiatan Pelayanan Pemerintah Daerah	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						150.000.000						160.000.000	
129	2 20 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN													
	2 20 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				40 Data	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
130	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						100.000.000					-	110.000.000	
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan statistik sektoral di daerah				3 Dokumen	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	110.000.000	
	2 20 02 2.01 0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				75 %	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				30 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.01 0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				5 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						150.000.000						150.000.000	
131	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						150.000.000					-	150.000.000	
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan persandian di daerah				1 Dokumen	150.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Sistem Informasi Elektronik milik Pemerintah Daerah	150.000.000	
	2 21 02 2.01 0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan				4 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Sistem Informasi Elektronik milik Pemerintah Daerah	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.01 0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan				30 Perangkat Daerah	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Sistem Informasi Elektronik milik Pemerintah Daerah	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan						4.949.183.715						2.000.000.000	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.820.100.000						-	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG													
132	2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.560.100.000					-	-	
	2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	2.440.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG	-		
	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.440.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	2 17 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	2 17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	2 17 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	61.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 17 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	12.100.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Transformasi ekonomi	ASN yang ada di Dinas KUMPERDAG			- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
133	2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						40.000.000						-	-	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	40	20	23	25	40.000.000							-	
	2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan														
	2 17 03 2.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
134	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						50.000.000						-	-	
		[Meningkatnya kinerja														
	2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-					50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Koperasi Aktif Yang Ada di Kabupaten Dharmasraya	-	-	
	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				35 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Koperasi Aktif Yang Ada di Kabupaten			- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
135	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN [Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	50	24	27	30	60.000.000							-	
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pengurus Koperasi	-	-	
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pengurus Koperasi		-	- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
136	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN														
	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-		-	-	-	110.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pelaku Usaha Mikro	-	-	-
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pelaku Usaha Mikro		-	- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				5 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pelaku Usaha Mikro		-	- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						720.000.000							2.000.000.000	
137	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	50	37.83	37.83	40.54	600.000.000							2.000.000.000	
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan														
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan													
138	3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						50.000.000					-		-	
			-		-	-	-	50.000.000							-	
	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok														
	3 30 04 2.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
139	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						70.000.000					-		-	
		[Meningkatnya tertib niaga dan														
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	70.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Alat UTTP dan pemilik alat UTTP	-		-
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang													
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina													
	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						409.083.715							-	
140	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN														
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	6.0	6.7	5.1	5.2	330.000.000							-	
	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana														
	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				40 Dokumen	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pelaku IKM		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan				70 Dokumen	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Pelaku IKM		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
141	3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN														
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	80.3	90	92	29.083.715							-	
	3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),														
	3 31 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat													
142	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.000.000						-		-
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	50.000.000							-	
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-					50.000.000			-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Pelaku IKM	-		-
	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan				200 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Pelaku IKM		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
	2	Dinas Penanaman Modal dan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.811.546.973							4.794.300.960	
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.811.546.973							4.794.300.960	
143	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.604.544.973						-	4.545.300.960	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				2 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	
	2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.272.976.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.750.300.960	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	60.000.000	
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	23.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.197.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.105.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		31.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	160.211.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor				2 Unit 33 Unit 39 Unit 1 Unit	284.457.869			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	580.000.000	
	2 18 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	2 18 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau						400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-						3.604.544.973							4.545.300.960	
	2 18 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				0 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah]	91.5	88.7	89	89.5	3.604.544.973							4.545.300.960	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		A	88	88	88									
	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	128.998.110	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Operasional/ lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit 1 Unit	110.648.144			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	126.500.000	
	2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		18.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				10 0	40.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	2 18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
144	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL												-	-	
		[Meningkatkan kemudahan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal				2 Dokumen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	-	-
2	18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif				1 Dokumen	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Terwujudnya iklim investasi yang	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
2	18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi													
2	18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
145	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN													
		[Meningkatkan jangkaun promosi penanaman modal]	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	115	100	100	50.000.000						60.000.000	
2	18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi													
2	18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
2	18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
146	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN													
		[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	101.488.650						130.000.000	
2	18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non													
2	18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												
2	18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2 Pelaku Usaha	8.970.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha												
147	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						55.513.350						59.000.000	
		[Terkendalinya pelaksanaan													
2	18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				4 Kegiatan Usaha 5 Pelaku Usaha 220 Perusahaan 15 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha	55.513.350			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	-	59.000.000
2	18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi				4 Kegiatan Usaha.	7.042.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri	Terwujudnya iklim investasi yang	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				4 Pelaku Usaha	11.441.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim Investasi yang Kondusif		12.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	37.029.850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 5. Transformasi ekonomi	Terwujudnya iklim Investasi yang Kondusif		39.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
148	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA [Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	12	12	12	12	-							-	
	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi														
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan													
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						12.840.846.926							14.889.960.569	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.860.846.926							13.811.960.569	
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
149	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						463.260.000						-	509.585.369	
		[Meningkatkan daya saing														
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah wirausaha muda yang dibina/ dilatih,				30 Orang	463.260.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	-	509.585.369	
	2 19 02 2.01 0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi				60 Orang	228.260.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		251.085.369	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 02 2.01 0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 02 2.01 0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda kabupaten/kota				5 Kegiatan	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh				30 Orang	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
150	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.745.000.000						-	1.919.500.000	
		[Meningkatkan pembudayaan dan														
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan				5 unit	750.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	825.000.000	
	2 19 03 2.01 0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota				10 Unit	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Meningkatkan pemasyarakatan		770.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 03 2.01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event olahraga tingkat Kab/Kota yang terlaksana				10 Event	400.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	440.000.000	
	2 19 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Tingkat				5 Kegiatan	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemasyarakatan		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 03 2.02 0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat				15 Orang	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemasyarakatan		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan														
	2 19 03 2.03 0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga													
	2 19 03 2.03 0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Diberaikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Diberaikan Pengembangan													
	2 19 03 2.03 0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan														
	2 19 03 2.04 0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		93.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.04 0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan				3 Dokumen	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan														
	2 19 03 2.05 0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
151	2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						375.000.000						-	412.500.000	
		[Meningkatkan kualitas														
	2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang aktif				5 Organisasi	375.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	-	412.500.000	
	2 19 04 2.01 0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehat, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
								375.000.000							412.500.000	
	2 19 04 2.01 0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Orang	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		27.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatkan kualitas														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	2 19 04 2.01 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	27.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		-														
	2 19 04 2.01 0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 19 04 2.01 0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				15 Organisasi	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
152	2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.058.746.350					-	4.998.300.000		
	2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Dokumen	181.622.450			Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	237.600.000		
	2 22 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	6.600.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	33.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.826.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.999.300	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.797.150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	132.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	2 22 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	2 22 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	37.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengadaan Barang Milik Daerah		50.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	54.475.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pengadaan Barang Milik Daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	2 22 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	2 22 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	166.000.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 22 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				36 Unit	170.500.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	152.000.000	
	2 22 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		27.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				6 Unit	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 22 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		15.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
153	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN														
		[Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Persentase lembaga adat yang aktif	100	18	18	18	2.714.435.026							3.217.231.200	
	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga SDM/lembaga adat yang dibina				17 lembaga adat	2.714.435.026			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan	-	3.217.231.200	
	2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan				17 Objek	691.755.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan	Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan		760.931.200	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
	2 22 02 2.03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				10 Unit	2.022.679.376	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	Lembaga Adat yang dilakukan pembinaan		2.456.300.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
154	2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		[Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100		78.72	82.98	2.368.955.850							2.605.850.000	
	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang														
	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
155	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						135.449.700					-		148.994.000	
		[Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100			60	135.449.700							148.994.000	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan													
	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat														
	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						980.000.000							1.078.000.000	
	3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
156	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						430.000.000					-		473.000.000	
		[Meningkatkan daya tarik														
	3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik wisata				2 Lokasi	280.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataaan 5. Transformasi ekonomi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten	-	308.000.000	
	3 26 02 2.01 0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan				2 Lokasi	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA	
		-														
	3 26 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Transformasi ekonomi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten		33.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
		[Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4.91		1.52	1.94	430.000.000							473.000.000	
	3 26 02 2.01 0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang				30 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	5. Transformasi ekonomi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA	
		-	-		-	-	-	430.000.000						473.000.000		
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata														
	3 26 02 2.03 0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataaan 5. Transformasi ekonomi	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
157	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						400.000.000					-		440.000.000	
		[Meningkatkan jangkauan														
	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				1 Kegiatan	400.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataaan 5. Transformasi ekonomi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	-	440.000.000	
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataaan 5. Transformasi ekonomi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		440.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
158	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN														
		[Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	91.14		48.84	55.70	150.000.000							165.000.000	
	3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
	3 26 05 2.01 0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut						82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						3.917.230.045							3.920.730.045	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB						3.917.230.045							3.920.730.045	
	2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.437.230.045							3.440.730.045	
159	2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.792.230.045						-	2.792.230.045	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	-	10.000.000	
	2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.801.127.045	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		1.801.127.045	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				10 Paket	288.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	-	288.000.000	
	2 23 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		33.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK		150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
2	23 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	2.792.230.045						2.792.230.045	
2	23 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				5 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat													
2	23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				60 Laporan	308.103.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	308.103.000	
2	23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Program kegiatan sub kegiatan di DPK	4.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
2	23 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
2	23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	225.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-	225.000.000	
2	23 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
2	23 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
2	23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
2	23 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
160	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						515.000.000					-	518.500.000	
		[Meningkatkan Layanan													
2	23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina				20 Perpustakaan	330.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari dan Taman Bacaan Masyarakat	330.000.000	
2	23 02 2.01 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 23 02 2.01 0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya													
	2 23 02 2.01 0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				250 Layanan	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari dan Taman Bacaan Masyarakat		115.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari dan Taman Bacaan Masyarakat		30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan				100 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari dan Taman Bacaan Masyarakat		20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				7 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari dan Taman Bacaan Masyarakat		15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan													
	2 23 02 2.01 0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK													
	2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	185.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari, Taman Bacaan Masyarakat	-	188.500.000	
	2 23 02 2.02 0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah				1 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari, Taman Bacaan Masyarakat		20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari, Taman Bacaan Masyarakat		100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-				0 Perpustakaan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari, Taman Bacaan Masyarakat		30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Perpustakaan sekolah, Perpustakaan Nagari, Taman Bacaan Masyarakat		38.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
161	2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						130.000.000						-	130.000.000	
		[Meningkatkan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100		100	100	130.000.000							130.000.000	
	2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik														
	2 23 03 2.01 0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				10 Eksemplar	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	-		60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					-	70.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	70.000.000	
	2 23 03 2.02 0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				200 Eksemplar	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
162	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						450.000.000						-	450.000.000	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	96.65	96.39	96.45	96.50	450.000.000							450.000.000	
	2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	325.000.000			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	325.000.000	
	2 24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				30 Berkas	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					35.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis													
	2 24 02 2.01 0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan		-	-	-	450.000.000							450.000.000	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	96.65	96.39	96.45	96.50	450.000.000							450.000.000	
	2 24 02 2.01 0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis													
	2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan				30 Berkas	10.000.000			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari	-	10.000.000	
	2 24 02 2.02 0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2 Arsip	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari		10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan														
	2 24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2 24 02 2.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
163	2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						30.000.000					-	30.000.000	
		-													
	2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	30.000.000			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmastraya Sejahtera Merata	-	-	30.000.000
	2 24 03 2.01 0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun												
		Dinas Pertanian						20.500.391.245						110.000.000	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						20.500.391.245						110.000.000	
164	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN [Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	84.13	85	86	15.542.391.245						110.000.000	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		A	A	A	A								
	3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorl Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah												
	3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Keuangan				100 %	12.999.686.045			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
	3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum				100 %	245.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9 Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	-	-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	47.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	3 27 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan												
	3 27 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan				14 Unit	164.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	164.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan													
	3 27 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
3	27 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.474.605.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah											-			
3	27 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.100.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				138 Unit	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
165	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN [Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Peningkatan Produksi Hortikultura	101	104.74	100.23	100.39	1.625.000.000					-			
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	101.11	108.77	101	101						-			
			Peningkatan Produksi Perkebunan	103.65	111.87	101.23	101.89						-			
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	104.82	304.26	104.48	104.50						-			
3	27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah asintan yang diberikan Jumlah Produksi Hortikultura (Tanaman Sayuran) Jumlah Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit Kebun Rakyat dan Karet) Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)				10 Unit 500 Ton 162.750 Ton 64.000 Ton	1.400.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-		-
3	27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 02 2.01 0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang				10 Ton	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 02 2.01 0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				4 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 02 2.01 0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura										-			
3	27 02 2.01 0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				5000 Batang	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN
3	27 02 2.01 0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak										-			
3	27 02 2.01 0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan										-			
3	27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan bantuan bibit ternak				15 Ekor	225.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-		-
3	27 02 2.06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				15 Ekor	225.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-			DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah			
166	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						2.888.000.000					-	-	-
		[Meningkatnya distribusi dan													
	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan				2 Jenis	350.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-		- DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	-		- DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola												
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Pertanian				28 Unit	2.538.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	840.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-		- DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan				6 Unit	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,	-		- DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi												
	3 27 03 2.02 0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	273.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-		- DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi												
	3 27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi												
167	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						180.000.000					-	-	-
		[Meningkatnya pengendalian													
	3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angka penanggulangan/ pelayanan kesehatan hewan yang tertangani				800 Ekor	120.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-	-	-
	3 27 04 2.01 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota												
		-	-		-	-	-	180.000.000							-
	3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan													
	3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan												
168	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						15.000.000					-	-	-
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	100	100	100	15.000.000							-
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan													
	3 27 05 2.01 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan												
169	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						250.000.000					-	-	-
		[Meningkatkan kapasitas SDM													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang didampingi penyuluhan Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi pertanian				165 Unit 75 %	250.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-		-	
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
	3 27 07 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						-	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya					50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5. Transformasi ekonomi	-		-	DINAS PERTANIAN
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						6.148.839.360							6.163.231.970	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						902.508.200							936.254.435	
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
170	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						51.000.000						-	52.000.000	
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	Ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	1	1	1	51.000.000							52.000.000	
	2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja														
	2 07 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	51.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		52.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
171	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN [Meningkatkan produktivitas tenaga kerja]	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	50	10	24	30	150.000.000							155.000.000	
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan														
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n													
172	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						112.321.350						-	118.254.435	
		[Meningkatkan penempatan														
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	56.635.500			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	57.000.000	
	2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				180 Orang	56.635.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		57.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Tendaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	55.685.850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		61.254.435	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
173	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
		[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	12	12	12	12	589.186.850							611.000.000	
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan													
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	539.186.850			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	556.000.000	
	2 07 05 2.02 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	55.746.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	51.906.450	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		56.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.246.331.160							5.226.977.535	
	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
174	3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.046.331.160						-	5.226.977.535	
		-														
	3 32 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	9.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	12.000.000	
	3 32 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	3 32 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	3 32 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	3 32 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	4.157.705.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	4.258.070.000	
	3 32 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.155.705.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		4.255.070.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
	3 32 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	219.896.850			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	237.757.535	
	3 32 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	7.115.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-		8.100.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.135.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		32.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	3 32 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.140.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		31.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	3 32 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	60.500.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	71.500.000	
	3 32 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		30.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	40.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		41.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	485.849.310			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-	-	508.000.000	
	3 32 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		4.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57.994.310	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	424.855.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		444.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	3 32 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	3 32 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	36.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		39.600.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		6.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3 32 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	3 32 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
	3 32 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		30.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
175	3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN														
		[Meningkatkan pelaksanaan transmigrasi]	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100			100	55.000.000							-	
	3 32 02 2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan														
	3 32 02 2.01 0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
176	3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN														
		[Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi]	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100			100	95.000.000							-	
	3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk														
	3 32 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					65.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai						-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
	3 32 03 2.01 0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan					30.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
177	3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						50.000.000						-		-	
		[Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100			100	50.000.000								-	
	3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman															
	3 32 04 2.01 0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				0 Kepala Keluarga	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Transformasi ekonomi	-			-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Sekretariat Daerah															
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						37.613.570.350									-
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						37.613.570.350									-
178	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN															
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	28.926.338.500									-
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB										
	4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat															
	4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
	4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	250.000.000			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-		-	
	4 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat															
	4 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	138.437.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	66.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.199.996.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	-	2.903.824.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-		-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
	4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
		-	-		-	-	-	28.926.338.500							-	-
	4 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	6.157.078.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	456.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	4.701.080.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	4.152.792.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
		-	-		-	-	-	28.926.338.500							-	-
	4 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	28.926.338.500							-	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		BB	B	B	BB									
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2.857.017.050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah			
4	01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	1.048.437.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
4	01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
4	01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan												
4	01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				5 Orang	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala				2 Orang/Bulan	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah						723.685.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
4	01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	388.040.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan												
4	01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					10.190.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut					-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13	Penataan Organisasi						103.492.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
4	01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	28.709.050	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
4	01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
4	01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					-	2.030.464.650			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
4	01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	2.030.464.650	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
179	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		[Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah]	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	100 3	100 2.88	100 2.9	100 2.92	7.645.010.150							-	
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan														
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan													
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
	4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
	4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	7.251.591.850			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	7.251.591.850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
		-														
	4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB													
	4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas													
		[Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah]	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	100 3	100 2.88	100 2.9	100 2.92	7.645.010.150							-	
	4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum														
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				460 Dokumen	55.072.750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	76.915.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang				1 Dokumen	39.798.750	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah														
	4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
180	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.042.221.700						-	-	
		[Meningkatkan kualitas kebijakan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	661.201.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-		
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan				0 Dokumen	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0 Laporan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				34 Dokumen	661.201.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	131.833.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	34.641.150	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	43.697.350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	53.494.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan														
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0													
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	22.500.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja													
		Sekretariat DPRD						56.599.992.150							-	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN														
	4 02	SEKRETARIAT DPRD						56.599.992.150							-	
181	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	27.120.000.000							-	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	320.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-	-	
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	320.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	680.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
	4 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	4 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	2.090.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	2.560.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-		-
	4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				3 Unit	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				15 Unit	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	360.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan														
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD													
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan													
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD													
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	550.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-		-
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
182	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						29.479.992.150						-		-
		[Meningkatkan kualitas														
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	6.350.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-		-
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program				7 Dokumen	4.700.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	1.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan				7 Dokumen	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatkan kualitas														
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	3.650.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-		-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	850.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-	-	
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan				1 Dokumen	850.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Penunjang kegiatan DPRD		-	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD														
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD													
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
	4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	579.992.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Penunjang kegiatan DPRD	-	-	
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD													
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses													
		-	-			-	-	29.479.992.150							-	
	4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD														
	4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
		[Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan]	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	29.479.992.150							-	
	4 02 02 2.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				40 Dokumen	3.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	SEKRETARIAT DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan,														
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.479.645.350							4.328.727.990	
	5 01	PERENCANAAN														
183	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.424.540.000						-	3.902.013.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 persen 100 persen	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	40.000.000	
	5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				22 Laporan	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	281.090.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	291.813.000	
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.890.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.613.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	185.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	5 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
	5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	430.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	272.000.000	
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	310.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		272.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
184	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, [Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	95	80	90	95	540.082.350							20.000.000	
	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan														
	5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota													
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas				37 OPD	35.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	-	
	5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan														
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan													
185	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						283.273.000						-	285.923.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
		[Meningkatkan kualitas														
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja bidang bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia yang diriviu dan yang disesuaikan dengan RKPd				25 OPD	145.273.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	153.923.000	
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang				4 Dokumen	88.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		43.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang				4 Dokumen	57.273.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	80	90	95	283.273.000							285.923.000	
	5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang														
	5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
	5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dirivu dan dsesuaikan dengan RKPd				5 OPD	85.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	87.000.000	
	5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi				4 Laporan	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		87.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
186	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						231.750.000						-	120.791.990	
		[Meningkatkan pemanfaatan hasil														
	5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah usulan rekomendasi rencana keltibangan PD Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan				2 OPD 65 persen	190.475.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya fungsi keltibangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	-	45.000.000	
	5 05 02 2.01 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau				3 Rekomendasi	163.475.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya fungsi keltibangan		45.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
	5 05 02 2.01 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan				12 Laporan	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya fungsi keltibangan		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
		[Meningkatkan fasilitas,														
	5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan				90 inovasi	41.275.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya fungsi keltibangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	-	75.791.990	
	5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan				1 Dokumen	41.275.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya fungsi keltibangan		75.791.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
	X	NON URUSAN														
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.000.000							-	
187	X XX 01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN														
		-	-													
	X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan						5.000.000								
	X XX 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Badan Keuangan Daerah						138.611.169.182							#####	
	5	UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN						138.610.169.182							#####	
	5 02	KELUANGAN														
188	5 02 01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.357.516.082						-	13.852.642.032	
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan														
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
	5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
	5 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD													
	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	5 02 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
	5 02 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan				2 Berita Acara	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat				2 Substansi	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.01 0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				2 Berita Acara	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah SPM dan SP2D yang Diajukan/Terbit				1 dokumen 35 dokumen	8.524.448.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	-	9.547.381.872	
	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	8.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		9.520.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	5 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
	5 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
	5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	5 02 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan													
	5 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
	5 02 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anebaran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
5	02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen KIB (Kartu Inventaris Barang) yang Diperbarui Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan dan Penilaian Barang				10 dokumen 1 dokumen	12.482.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	-	13.980.624	
5	02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.482.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		7.260.624	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah														
5	02 01 2.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah													
5	02 01 2.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen kepegawaian				19 Dokumen	158.636.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	-	196.616.224	
	5 02 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	6.482.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		7.260.624	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	15.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		36.303.120	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				44 Orang	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan					1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	64.827.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		72.606.240	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
	5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	64.827.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		72.606.240	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administratif Internal yang Difasilitasi persentase Surat Masuk dan Keluar yang Dikelola				12 kali 100 persen	984.132.920			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	-	1.095.508.870	
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													
		-	-		-	-	-	12.357.516.082							13.852.642.032	
	5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan													
	5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	12.357.516.082							13.852.642.032	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	324.135.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		363.031.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	-													
	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.482.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		7.260.624	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	5 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	12.357.516.082							13.852.642.032	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	25.930.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		29.042.496	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	-		-	-	-	12.357.516.082							13.852.642.032	
	5 02 01 2.07 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kinerja Peranekat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	77.792.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	87.127.488	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
		-	-		-	-	-	12.357.516.082						13.852.642.032	
	5 02 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				4 Unit	25.930.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	29.042.496	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	12.357.516.082						13.852.642.032	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB								
	5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan													
	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	304.946.208	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	341.539.753	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	97.240.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	108.909.360	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	693.762.996	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	777.014.556	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah													
	5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	118.244.448	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi	132.433.782	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-													
	5 02 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya													
	5 02 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					19.448.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		21.781.872	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	12.357.516.082							13.852.642.032	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	5 02 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	324.135.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		363.031.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau -	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan					1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
								12.357.516.082							13.852.642.032	
	5 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	reformasi birokrasi		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
189	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						122.025.365.406						-	#####	
		[Meningkatkan tata kelola anggaran]														
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen APBD				7 dokumen	1.295.882.499			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD	-	2.684.454.500	
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun													
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	200.876.562	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		340.341.750	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	15.387.656	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		34.034.175	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	10.387.656	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		34.034.175	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi													
		[Meningkatkan tata kelola anggaran]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30	28.80	30	35	122.025.365.406							#####	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	40	37.80	44.53	37									
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah				2 Dokumen	550.056.875	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		1.497.503.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
		-	-			-	-	122.025.365.406							#####	
	5 02 02 2.01 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													
	5 02 02 2.01 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan													
	5 02 02 2.01 0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	Persentase Penurunan SILPA	30	91	80	70	122.025.365.406							#####	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95	94.96	95	95									
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan														
	5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12.155.062	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		13.613.670	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya													
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	Persentase Penurunan SILPA	30	91	80	70	122.025.365.406							#####	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95	94.96	95	95									
	5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				114 Dokumen	10.775.312	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		68.068.350	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 02 2.02 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
	5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	Persentase Penurunan SILPA	30	91	80	70	122.025.365.406							#####	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95	94.96	95	95									
	5 02 02 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas				12 Laporan	97.240.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		108.909.360	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 02 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas													
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	Persentase Penurunan SILPA	30	91	80	70	122.025.365.406							#####	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95	94.96	95	95									
	5 02 02 2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran				2 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-														
	5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1.775.312	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		68.068.350	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan tata kelola														
	5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
		-	-	-	-	-	-	122.025.365.406							#####	
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Verifikasi Laporan Keuangan oleh tim Persentase Penyampaian Draft Laporan Keuangan oleh Unit Kerja Sesuai Jadwal Internal				6 kali 95 persen	869.497.534			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD	-	1.463.469.325	
	5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
	5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				648 Dokumen	1.775.313	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		68.068.350	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan tata kelola														
	5 02 02 2.03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
	5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi													
	5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					182.325.938	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						204.205.050	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas					36.465.188	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		408.410.100	BADAN KEUANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	122.025.365.406							#####	
	5 02 02 2.03 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
		[Meningkatkan tata kelola akuntansi dan pelaporan]	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	90	100	100	122.025.365.406							#####	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.03 0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	122.025.365.406							#####	
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan [Meningkatkan tata kelola	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan				1 Dokumen	42.547.719	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		47.647.845	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	122.025.365.406							#####	
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan				108 Orang	182.325.938	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		204.205.050	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 Lembaga	30.387.656	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		34.034.175	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota													
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Permintaan BTT yang Difasilitasi dan Diverifikasi Jumlah Surat Penyaluran DBH yang Diterbitkan Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana Nagari yang Diterbitkan				12 laporan 2 dokumen 12 dokumen	119.217.131.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD	-	#####	
	5 02 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	17.364.375	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		19.448.100	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	63.669.375	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		71.309.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah													
	5 02 02 2.04 0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
	5 02 02 2.04 0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah													
	5 02 02 2.04 0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah													
	5 02 02 2.04 0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	38.201.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		42.785.820	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatkan tata kelola anggaran]														
	5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
	5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
	5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan implementasi aplikasi				4 dokumen	438.582.251			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD	-	491.212.121	
	5 02 02 2.05 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	12.155.063	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		13.613.670	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan				5 Dokumen	425.427.188	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Opini BPK Atas LKPD		476.478.451	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05 0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Orang	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Opini BPK Atas LKPD		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
190	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1.508.251.472						-	1.953.561.645	
		[Meningkatnya tata kelola aset														
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Penilaian atau Inventarisasi Aset yang Dilaksanakan Persentase Aset Tetap Baru yang Dicatat Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik				2 kali 100 persen 85 persen	1.508.251.472			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset	-	1.953.561.645	
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	67.876.563	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		340.341.750	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik				1 Dokumen	182.325.938	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Indek Pengelolaan Aset		204.205.050	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	133.705.688	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		149.750.370	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					121.550.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		136.136.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah				1 Laporan	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah													
	5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	121.550.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		136.136.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,				5 Dokumen	243.101.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		272.273.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan				38 Laporan	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	91.162.969	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Indek Pengelolaan Aset		102.102.525	BADAN KEUANGAN DAERAH
191	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN														
		[Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.17	11.16	14.56	14.67	2.719.036.222							2.989.320.565	
	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kanal Pembayaran PAD yang Tersedia dan Aktif Jumlah Kerja Sama Pemungutan Pendapatan Daerah dengan Pihak Terkait Jumlah Rekonsiliasi Pendapatan Daerah yang Dilakukan persentase realisasi PAD				3 kanal 2 kali 12 kali 3 persen	2.719.036.222			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan	-	2.989.320.565	
	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Dokumen	121.550.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		136.136.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak				8 Dokumen	212.713.594	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		238.239.225	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	121.550.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		136.136.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah													
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				85000 Obyek Pajak	546.977.813	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		612.615.150	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				536 Dokumen	243.101.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		272.273.400	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19 Layanan	133.705.688	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		149.750.370	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	121.550.625	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		136.136.700	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				14 Dokumen	182.325.938	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		204.205.050	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				19 Dokumen	60.775.313	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		68.068.350	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas														
	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	243.101.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		272.273.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan				12 Laporan	303.876.563	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Rasio PAD terhadap total pendapatan		340.341.750	BADAN KEUANGAN DAERAH
		[Meningkatnya penerapan sistem														
	5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	51.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Rasio PAD terhadap total pendapatan		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	X	NON URUSAN						1.000.000							1.120.000	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
192	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.000.000					-		1.120.000	
		-	-		-	-	-	1.000.000							1.120.000	
	X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara				113 unit	1.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	1.120.000	
	X XX 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Badan Kepegawaian dan						8.437.656.400							8.570.000.000	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN						8.437.656.400							8.570.000.000	
	5 03	KEPEGAWAIAN						7.235.656.400							7.357.000.000	
193	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.614.656.400					-		5.706.000.000	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	5.614.656.400							5.706.000.000	
	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	B	B	88									
	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				47 orang	4.500.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	4.550.000.000	
	5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan				6 laporan	326.550.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	344.500.000	
	5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	5 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		26.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		160.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-														
	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhinya sarana pelengkapan kantor				22 unit	219.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	227.000.000	
	5 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		23.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat														
	5 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
		-			-	-	-	5.614.656.400							5.706.000.000	
	5 03 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	323.206.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	325.500.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	64.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-														
	5 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	5.614.656.400							5.706.000.000	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	5 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	237.206.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		238.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana yang terpelihara				27 unit	201.900.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	214.000.000	
	5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				5 Unit	23.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		24.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	11.400.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-														
	5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		160.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
194	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.621.000.000						-	1.651.000.000	
		[Meningkatkan kualitas layanan														
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah formasi ASN yang telah diumumkan Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan				50 formasi 120 dokumen	342.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	351.000.000	
	5 03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan				2 Dokumen	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		46.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	165.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		170.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi				120 Dokumen	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjune,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		39.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	52.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		53.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				200 Dokumen	42.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		43.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatkan tata kelola pengembangan karir ASN]	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	61	55.3	56	57	1.621.000.000							1.651.000.000	
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang naik pangkat Jumlah SK mutasi yang diterbitkan				620 orang 200 dokumen	106.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	108.000.000	
	5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				300 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		51.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					56.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		57.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya pengembangan						1.621.000.000							1.651.000.000	
	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional				2000 orang	960.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	977.000.000	
	5 03 02 2.03 0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya													
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				400 Dokumen	335.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		340.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				3 Dokumen	560.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		570.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	26.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		27.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas penilaian														
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menyusun SKP tepat waktu				4888 orang	213.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	215.000.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		30.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	151.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		152.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	32.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta		32.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.202.000.000							1.213.000.000	
195	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN														
		[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	28	25.5	25.5	26	1.202.000.000							1.213.000.000	
	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi				1 dokumen	27.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta	-	28.000.000	
	5 04 02 2.01 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan				1 Dokumen	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya kualitas		28.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan,														
	5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
		Inspektorat Kabupaten						10.968.679.550							11.656.179.490	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.968.679.550							11.656.179.490	
	6 01	INSPEKTORAT DAERAH														
196	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.130.486.400						-	8.547.986.400	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat														
	6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	93.753.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	-	103.753.000	
	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	93.753.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT		103.753.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	5.001.870.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	-	5.101.870.200	
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	1.221.435.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	-	1.321.435.300	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6	01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	1.221.435.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	1.321.435.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	357.820.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	397.820.600	
6	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
6	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	71.265.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	76.265.900	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												
6	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	57.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	62.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan												
6	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					112.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	122.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						464.895.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	491.895.000	
6	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	313.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	333.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	73.065.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	75.065.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
6	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	376.674.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT	402.174.300	
6	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
6	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					150.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT		55.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.474.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT		191.474.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	6 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	49.250.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	INSPEKTORAT		54.250.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				16 Unit	97.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	INSPEKTORAT		102.200.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
197	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.701.874.080					-		1.881.874.070	
		[Menurunnya terjadinya														
	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.485.773.710			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah	-	1.625.773.700	
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	202.453.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		222.453.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	206.138.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		226.138.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	231.322.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		251.322.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				14 Laporan	206.215.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		226.215.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa													
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk													
	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah			
	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			-	216.100.370			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah	-	256.100.370	
	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang			2 Laporan	98.407.870	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		118.407.870	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu												
198	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.136.319.070					-	1.226.319.020		
		[Meningkatnya kualitas													
	6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			-	212.797.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah	-	242.797.400	
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			1 Rekomendasi	212.797.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		242.797.400	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	-			-	923.521.670			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah	-	983.521.620	
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			15 perangkat daerah	301.562.370	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		321.562.320	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			15 perangkat daerah	272.720.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah		292.720.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta			5 Kegiatan	349.239.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		369.239.300	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Kecamatan Pulau Punjung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.523.760.775							-	
	7 01	KECAMATAN					2.523.760.775							-	
199	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.503.760.775					-	-		
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat													
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21 Orang/bulan	2.168.787.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	-	-	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 Orang/bulan	2.168.787.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	117.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	-		
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan														
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					56.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa							- KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
		-						2.503.760.775								-	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-		
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	2.503.760.775								-	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									-	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	175.973.775			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.729.975	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										-			
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Tahun 1 Tahun	18.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	-	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				6 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
		-	-		-	-	-	2.503.760.775								-
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 0	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
200	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN [Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	1.000.000								-
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Tahun 1 Tahun	1.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	-	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
201	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN [Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	12.300.000								-
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan														
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	12.300.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
202	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM [Meningkatkan ketentraman dan						1.000.000						-		-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah			
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Tahun	1.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	-
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang					1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		- KECAMATAN PULAU PUNJUNG
203	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5.700.000						-	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	5.700.000						-	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan													
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		- KECAMATAN PULAU PUNJUNG
		Kecamatan Sitiung													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.542.705.200						2.815.326.000	
	7 01	KECAMATAN						2.542.705.200						2.815.326.000	
204	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN						2.483.660.200					-	2.749.877.500	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat						2.483.660.200						2.749.877.500	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn				1 Tahun	1.981.333.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	2.185.893.000
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Laporan 600 Paket 3 Paket 4 Paket 3 Paket 1 Paket	149.562.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	165.062.000
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6.600.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	18.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19.800.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11.000.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	96.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		105.600.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN	148.425.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	163.282.500	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit 3 Unit 1 Unit 13 Unit	76.940.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	84.500.000	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		55.000.000	KECAMATAN SITIUNG
205	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN														
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	15.730.000							17.802.000	
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan														
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
		-	-		-	-	-	15.730.000							17.802.000	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan														
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	2.565.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.321.000	KECAMATAN SITIUNG
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	15.730.000							17.802.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	4.765.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		5.241.000	KECAMATAN SITIUNG
206	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	-	-	24.000.000						-	26.400.000	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Jenis 1 jenis	24.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	26.400.000	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
207	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						19.315.000						-	21.246.500	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	19.315.000							21.246.500	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100 % 1 Dokumen	19.315.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	21.246.500	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	19.315.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Simtem Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintah		21.246.500	KECAMATAN SITIUNG
		Kecamatan Koto Baru						2.865.570.000							3.153.315.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.865.570.000							3.153.315.000	
	7 01	KECAMATAN														
208	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.816.970.000						-	3.099.755.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat						2.816.970.000							3.099.755.000	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	18.800.000	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		3.800.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.980.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akutabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	2.178.000.000	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai				2 event	55.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	60.500.000	
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		36.300.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		24.200.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		6.600.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				660 Paket	19.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		21.780.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17.600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		19.360.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	106.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	117.350.000	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.500.000	kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		28.050.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan													
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				100 Persen	310.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	341.970.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		3.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.700.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		8.470.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		330.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya													
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	11.900.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		13.090.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		110.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
209	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.000.000						-	12.100.000	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				12 Jenis	11.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	12.100.000	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		6.600.000	KECAMATAN KOTO BARU
		[Meningkatkan pelayanan publik														
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru						5.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
210	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN						17.600.000						-	19.360.000	
		[Meningkatkan pemberdayaan						17.600.000						-	19.360.000	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten				45 Usulan	17.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	19.360.000	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
211	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000						-	5.600.000	
		-	-		-	-	-	5.000.000							5.600.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
212	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA [Meningkatkan tata kelola						15.000.000					-		16.500.000	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan				7 Jenis	15.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	16.500.000	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		16.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
		Kecamatan Sungai Rumbai														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.915.665.600								-
	7 01	KECAMATAN														
213	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 BB	- B	80 B	81 BB	1.894.345.600						-		-
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat														
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				1 Tahun	133.696.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	-		-
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Paket	534.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.480.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	88.126.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah														
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS				1 Tahun	18.380.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.780.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
214	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.550.000						-		-
		[Meningkatkan pelayanan publik														
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				12 Jenis	1.550.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 0	700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				550 Laporan	850.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
215	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN						13.860.000								-
		[Meningkatkan pemberdayaan						13.860.000								-
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13.860.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				45 Lembaga Kemasyarakatan	13.860.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
216	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI														
		-	-		-	-	-	2.875.000							-	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan														
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	2.875.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
217	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN														
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	3.035.000							-	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jenis pembinaan yang dilakukan				7 Jenis	3.035.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-		-
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	3.035.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	X	NON URUSAN														
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						268.927.400							-	
218	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						268.927.400						-		-
		-														
	X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun				3 Jenis	60.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	X XX 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan				3 Jenis	95.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	X XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
		Kecamatan Sembilan Koto														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.675.989.150							1.843.608.065	
	7 01	KECAMATAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
219	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.659.639.150					-	1.825.623.065	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	1.659.639.150						1.825.623.065	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB								
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan													
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.096.772.150			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	1.206.449.365
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.096.772.150	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	1.206.449.365 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	149.552.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	164.507.200
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	2.200.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	22.000.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	11.000.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan												
					-	-	-	1.659.639.150						1.825.623.065	
	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	4.400.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat													
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.552.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	86.407.200 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
		-	-		-	-	-	1.659.639.150						1.825.623.065	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah													
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	85	-	80	81	1.659.639.150						1.825.623.065	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB								
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	5.750.000 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	37.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		40.700.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	101.900.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		112.090.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					145.365.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa						159.901.500	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.850.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		84.525.000	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				6 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
	-	-	-	-	-	-	-	1.659.639.150							1.825.623.065	
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		55.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
220	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN														
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	4.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	4.675.000	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto,	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		2.750.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				650 Laporan	1.750.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		1.925.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
221	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6.920.000						-	7.612.000	
		[Meningkatkan pemberdayaan														
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	6.920.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	7.612.000	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum				0 Lembaga Kemasyarakatan	6.920.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	-		7.612.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
222	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI	-	-	-	-	-	3.180.000			Nasional	Daerah			3.498.000	
7	01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan														
7	01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
223	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.000.000						-	2.200.000	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	2.000.000							2.200.000	
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan														
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
		Kecamatan Timpeh						1.580.300.010							-	
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01	KECAMATAN						1.563.500.010							-	
224	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.559.500.010						-	-	
		-														
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	
7	01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				90% Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN TIMPEH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	1.559.500.010							-	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.000.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 PAKET Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	387.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-		-	
7	01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
		-															
7	01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					27.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat						1.559.500.010									-
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	20.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-		-	
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 dokumen Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						90.000.010									-
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang					25.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan	Meningkatnya Kualitas			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	10	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	KECAMATAN TIMPEH
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
225	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4.000.000						-		-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		-	-	-	-	-	4.000.000			Nasional	Daerah			-		
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan														
7	01 06 2.01 0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
X		NON URUSAN					16.800.000							-		
X	XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
226	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.800.000						-	-		
X	XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
X	XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
X	XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	6.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
X	XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	- KECAMATAN TIMPEH	
		Kecamatan Koto Salak						1.651.166.600							1.837.271.260	
7		UNSUR KOWILAYAHAN														
7	01	KECAMATAN						1.651.166.600							1.837.271.260	
227	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	1.637.086.600							1.821.783.260	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.309.086.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.463.513.260	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.309.086.600	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.463.513.260 KECAMATAN KOTO SALAK	
7	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian														
7	01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan													
7	01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000 KECAMATAN KOTO SALAK	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat														
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
7	01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000 KECAMATAN KOTO SALAK	
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	51.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	53.570.000	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	21.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.650.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.720.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	146.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	161.150.000	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	30.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	33.550.000	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	12.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan		13.750.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	2.400.000							2.640.000	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	2.400.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.640.000	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.320.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.320.000	KECAMATAN KOTO SALAK
229	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.480.000						-	9.328.000	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	85		60	65	8.480.000							9.328.000	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	8.480.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	9.328.000	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	8.480.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		9.328.000	KECAMATAN KOTO SALAK
230	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.200.000						-	1.320.000	
		[Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum]	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	-	100	100	1.200.000							1.320.000	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	1.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	1.320.000	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.320.000	KECAMATAN KOTO SALAK
231	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.000.000						-	2.200.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	2.000.000						2.200.000		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			-		2.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.200.000	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
		Kecamatan Asam Jujuhan						1.403.033.000							13.200.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.403.033.000							13.200.000	
	7 01	KECAMATAN						1.403.033.000							13.200.000	
232	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.369.033.000						-	13.200.000	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	1.369.033.000							13.200.000	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah		88	8	8	88									
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		1.017.121.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	1.017.121.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-		101.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	13.200.000	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		13.200.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	36.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	174.422.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		-	-		-	-	-	1.369.033.000							13.200.000	
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	-	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	1.369.033.000							13.200.000	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166.422.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	40.490.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.490.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
233	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.500.000					-	-	
			-	-	-	-	-	10.500.000					-	-	
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	10.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	3.500.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		[Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	10.500.000					-	-	-
7	01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
234	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						10.300.000					-	-	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat]	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	85	-	60	65	10.300.000					-	-	-
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	10.300.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	10.300.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
235	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						7.000.000					-		-	
		[Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum]	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	-	100	100	7.000.000							-	
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	7.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
236	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						6.200.000					-	-	-	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	6.200.000							-	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	6.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	6.200.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		Kecamatan Koto Besar						2.336.298.600							2.375.461.397	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.336.298.600							2.375.461.397	
	7 01	KECAMATAN						2.336.298.600							2.375.461.397	
237	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.316.858.600						-	2.354.829.797	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	2.316.858.600							2.354.829.797	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.807.697.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	1.834.812.455	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.807.697.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.834.812.455	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Laporan 12 Laporan 300 Paket 3 Paket 12 Paket 4 Paket 8 Paket 4 Paket	164.553.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	167.021.425	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.372.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.422.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	18.669.500	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		18.949.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	11.737.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		11.913.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	27.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		27.608.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.000.300	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		11.165.300	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	92.575.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		93.963.625	KECAMATAN KOTO BESAR
		-	-		-	-	-	2.316.858.600							2.354.829.797	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 5 Unit	76.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	84.191.500	
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	25.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		32.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	2.316.858.600							2.354.829.797		
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BB	B	B	BB	6 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15.191.500	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	36.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	195.857.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	198.795.667	
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.522.500	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	11.707.600	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11.883.214	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					11 Laporan	182.650.200	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	185.389.953	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit 7 Unit 1 Unit 10 Unit	72.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	70.008.750	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	14.210.000	KECAMATAN KOTO BESAR	
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	3.250.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3.298.750	KECAMATAN KOTO BESAR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		52.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR
238	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.650.000						-	4.604.750	
					-	-	-	3.650.000							4.604.750	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3.650.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	4.604.750	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				9 Dokumen	1.350.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1.370.250	KECAMATAN KOTO BESAR
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	3.650.000							4.604.750	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	2.300.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3.234.500	KECAMATAN KOTO BESAR
239	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.350.000						-	11.520.250	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	-	-	-	-	-	11.350.000							11.520.250	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				45 Lembaga Kemasyarakatan	11.350.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	11.520.250	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	11.350.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		11.520.250	KECAMATAN KOTO BESAR
240	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.800.000						-	1.827.000	
		-	-	-	-	-	-	1.800.000							1.827.000	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	1.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	1.827.000	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	1.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.827.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
241	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.640.000					-	2.679.600		
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	2.640.000						2.679.600		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	2.640.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.679.600	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	2.640.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.679.600	KECAMATAN KOTO BESAR
		Kecamatan Padang Laweh						1.544.860.600						493.636.780		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.544.860.600						493.636.780		
	7 01	KECAMATAN						1.544.860.600						493.636.780		
242	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.526.940.600					-	472.931.780		
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	1.526.940.600						472.931.780		
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88									
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Laporan 4 Dokumen	2.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.200.000	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.219.720.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	134.000.000	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.219.720.800	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		134.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Orang 20 Paket	10.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	11.000.000	
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.700.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran				100 Persen	100.119.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	109.231.780	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.906.800	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.097.480	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.200.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.220.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.513.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.464.300	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	47.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	49.700.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	119.100.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	130.900.000	
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	116.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		127.600.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	29.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	35.900.000	
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
243	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.550.000						-	3.905.000	
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	85	85	3.550.000							3.905.000	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan				200 Laporan	3.550.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.905.000	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				285 Laporan	2.050.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.255.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
244	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.370.000						-	11.500.000	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	85	-	60	65	11.370.000							11.500.000	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	11.370.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintah umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	-	11.500.000	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	11.370.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintah umum dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		11.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
245	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.500.000						-	3.300.000	
		[Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum]	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	-	100	100	1.500.000							3.300.000	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	1.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.300.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
246	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1.500.000						-	2.000.000	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	1.500.000							2.000.000	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	1.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.000.000	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
		Kecamatan Tiumang						1.687.641.100							-	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						245.050.000							-	
	7 01	KECAMATAN						245.050.000							-	
247	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						222.860.000						-	-	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	222.860.000							-	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	8	8	88	130.860.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	3.360.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	18.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	10.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	76.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
		-	-				-	222.860.000							-	
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	-	-	52.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	
	7 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	-	80	81	222.860.000							-	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB									
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	21.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	19.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIUMANG
248	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.500.000						-	-	
		[Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	-	100	100	4.500.000							-	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	4.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				350 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		-	KECAMATAN TIUMANG
249	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.690.000						-	-	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	-		-	-	-	11.690.000							-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	11.690.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 Lembaga Kemasyarakatan	11.690.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	KECAMATAN TIUMANG
250	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.000.000						-	-	
		[Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum]	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	-	100	100	3.000.000							-	
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	3.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	KECAMATAN TIUMANG
251	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3.000.000						-	-	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari]	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban	100	-	100	100	3.000.000							-	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	3.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 bulan Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	-	-	KECAMATAN TIUMANG
	X	NON URUSAN						1.442.591.100							-	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.442.591.100							-	
252	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.442.591.100						-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	1.442.591.100							-	
	X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.260.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	
	X XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.260.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	182.591.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
	X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	182.591.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	- KECAMATAN TIUMANG
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						4.727.989.485						5.200.678.434	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						4.727.989.485						5.200.678.434	
	8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.727.989.485						5.200.678.434	
253	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.735.501.500					-	1.908.941.650	
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB	1.735.501.500						1.908.941.650	
	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran				100 persen	-			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	-
	8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	-	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	1.224.084.000			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	1.346.492.400
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.224.084.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	1.346.492.400 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	192.737.300			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	211.901.030
	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.193.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	5.712.300 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.940.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	38.434.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.990.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	9.889.330 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.290.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		27.819.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.921.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		21.803.650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.402.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		108.242.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	82.400.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	90.640.000	
	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	38.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		42.460.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	43.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		48.180.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	-		-	-	-	1.735.501.500							1.908.941.650	
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	163.730.200			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	180.103.220	
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	B	BB	1.735.501.500							1.908.941.650	
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.950.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		30.745.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	130.780.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		143.858.220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	72.550.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	79.805.000	
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-		17.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	8 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	21.450.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.050.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	13.255.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
254	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.238.119.350					-	1.361.931.285	
		[Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100	100	1.238.119.350						1.361.931.285	
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan dan penyelenggaraan Paskibraka				6 kali	1.238.119.350			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	1.361.931.285	
	8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				110 Orang	77.179.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	84.897.945	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	26.023.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	28.625.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				355 Orang	1.134.916.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	1.248.408.040	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
255	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.242.334.535					-	1.366.567.989	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	85	100	100	1.242.334.535						1.366.567.989	
	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pembinaan di Bidang Politik dalam Negeri di Daerah				10 Dokumen	1.242.334.535			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	1.366.567.989	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				140 Orang	1.237.403.285	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	1.361.143.614	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	4.931.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	5.424.375	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
256	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						15.171.000					-	16.688.100		
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100		50	68	15.171.000						16.688.100		
	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pembinaan Organisasi Masyarakat di Daerah				10 Laporan	15.171.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	16.688.100		
	8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Laporan	15.171.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	16.688.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
257	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						87.236.200					-	95.959.820		
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	95	100	100	87.236.200						95.959.820		
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama				4 kali	87.236.200			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	95.959.820		
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	52.412.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	57.653.420	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				8 Laporan	34.824.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	38.306.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
258	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						409.626.900					-	450.589.590		
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	409.626.900						450.589.590		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				4 kali	409.626.900			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	450.589.590	
	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	355.679.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	391.247.945	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	53.946.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	-	-	59.341.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL									1.112.280.058.661							



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode pertama RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dapat dicapai.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah tahun 2026 dalam tabel berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2026

Indikator	Satuan	Target	
		2025	2026
Indeks Kinerja Infrastruktur	indeks	60	65
Stok Infrastruktur terhadap PDRB	persen		
Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,01
Indeks kinerja sistem irigasi	indeks		
Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	60	65



Indikator	Satuan	Target	
		2025	2026
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	indeks	4	4,1
indeks reformasi birokrasi	indeks		
Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5	3,55
Nilai SAKIP	bobot	B	BB
Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP
indeks reformasi hukum	indeks	70	70,1
Indeks Inovasi Daerah	indeks	65	67
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85	86
Indeks SPBE	indeks	3,65	3,7
Indeks masyarakat digital indonesia	indeks	53,52	55
Indeks Pelayanan Publik	indeks	4	4,1
Persentase nagari mandiri	persen	50,00	53,85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,82	72,9
Indeks Kualitas air	indeks		
indeks kualitas udara	indeks		
indeks tutupan lahan	indeks	46	47
Indeks resiko bencana (IRB)	indeks	129	128
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76,03	76,5
Usia Harapan Hidup	tahun	75	75,2
Harapan lama sekolah	tahun	14,39	14,4
Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,1	10,2
Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80	80,5
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65	65,5
Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,52	0,515
Pertumbuhan PDRB	persen	5,25	5,5
Gini Rasio	indeks	0,220	0,210
tingkat inflasi	persen	2,80 - 3,60	2,2
Pendapatan perkapita	juta Rp	60	75
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	5,5	5,7
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	persen	16	16,5



Indikator	Satuan	Target	
		2025	2026
Rasio net ekspor terhadap PDRB	persen	15	15,25
Tingkat kemiskinan	persen	4,6	4,5
Tingkat pengangguran terbuka	persen	5,7	5,5
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52	52,5
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52	52,5
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	75	75,2

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025



6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun target kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2:



**Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya**

No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAR DEMOGRAFI			
4)	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85	85,1
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persentase	7,2	7,15
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	352	357
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persentase	72	73
5)	Lingkungan Hidup Berkualitas			
5	Indeks Kualltas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,82	73,04
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase	86	87
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	8.000	15.000
6)	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
9	Pengurangan Intensitas Emisi GRK	Persentase	1%	1,50%
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	132.50	130.25
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.41	0.43
7)	Demografi			
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,75	1,74
13	Rasio Penduduk	Persentase	102,6	102,5
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	83	84
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1)	Kesejahteraan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persentase	5,25	5,50
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,60	4,50
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	60,00	75,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	6	5,98
5	Gini Rasio	Angka	0,168	0,15
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,03	76,5
2)	Kesehatan untuk Semua			
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75	75,2
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.26	0.28
9	Prevalensi Stunting	Persentase	17,5	16,0
3)	Pendidikan Berkualitas yang Merata			
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,1	10,2



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,4
12	Angka Literasi/ Numerasi	Persentase		
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Persentase	96,69	99,59
-	Literasi Membaca	Persentase	102,85	105,7
-	Numerasi	Persentase	90,54	93,49
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	63,50	63,70
4)	Perlindungan Sosial yang Adaptif			
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase	25	19
5)	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75	75,3
6)	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	52	52,3
18	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,83	66,95
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	62,00	62,47
20	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,435	0,427
21	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,17	90,64
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53	53,5
23	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase	1,90	1,85
24	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persentase	2,26	2,24
25	Tingkat produktivitas tenaga kerja	juta rupiah/ orang	106	106,2
27	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	48	50
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
	1) Daya Saing Sumber Daya Manusia			
1	Angka Ketergantungan	Persentase	45,3	45,2
	2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
2	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase	5,5	5,7
3	Kontribusi PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minurn	Persentase	0,9	0,94
4	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	16	16,5
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	0,94	0,96



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
6	Rasio Kewirausahaan	Persentase		
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	74,5	74,7
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,02	67
	3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru			
	4) Transformasi Digital			
	5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp miliar	4,12	4,36
11	Rasio net ekspor terhadap PDRB	Persentase	8,05	8,05
	6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	65	65,5
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	61,70	62,00
14	Persentase Desa Mandiri	Persentase	59,6200	63,4600
	7) Stabilitas Ekonomi Makro			
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase		
16	Tingkat Inflasi	Persentase	2.80-3.60	2,75
17	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	26,82	26,18
18	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	5,44	5,47
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah/orang	73	73,2
20	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persentase	56	60
21	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	90	92
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	44	46
23	Return on Aset (ROA) BUMD	Persentase	0,05764	0,05774
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	61,22	61,6
25	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase	100	100
26	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persentase	5,13	6
27	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	364	400.000
28	Total Kredit/PDRB	Persentase	16,74	17
29	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persentase	2,25	2,31



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
30	Inklusi Keuangan	Persentase	80	81
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang			
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70,1
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,90	4,21
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4	4,15
4	Indeks Integritas Angka	Indeks	3,5	3,55
	2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
5	Persentase Penegakan Perda	Persentase	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persentase	80	80
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks		
	3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
10	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	78
12	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	45,32	47,37
13	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	nilai	78,000	79,000
15	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100
16	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83,5
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	3,55
	4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah/ Indikator Kinerja Kunci			
	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	82,7	83,95
	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	94,69	95,32



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
4	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	85,32	86,72
5	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	25,93	30,03
6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100,00	100,00
7	indeks Pemerataan Guru	Indeks	25,25	23,71
8	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	78,61	80.01
9	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	100	100
10	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	95,32	96,55
11	APK PAUD sederajat	Persentase	75,09	77,80
12	APK SD/Mi sederajat	Persentase	92,01	94,05
13	APK SMP/MTs sederajat	Persentase	88,90	90,03
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	172	160
2	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	15	14
3			17,5	16,0
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	60	65
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	51,7	53
6	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	908	785
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase	85	87
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	100	100



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
9	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	100	100
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	75	77
11	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
12	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
13	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
14	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
15	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
16	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
17	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
18	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
19	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
20	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persentase	100	100
21	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
22	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0,5	1
2	Indeks kinerja sistem irigasi	Indeks	72,80	73,90



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
4	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	Persentase	2	3
5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persentase	90	90,5
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	80	82
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	40	42
14	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	55,08	55,58
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	5	10
16	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persentase	50	50
17	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)	Persentase	50	60
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	Persentase	6,28	7,28
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum}	Persentase	90,28	90,53
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	90	95
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100
4	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	100



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
6	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	menit	15	15
8	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	40	50
9	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persentase	50	60
14	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100
15	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks		
2	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Karban Bencana Pravinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	80	80
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	90	90
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	23	25
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50
8	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZayang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	98,91	99,00
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	-	5
15	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase	100	100
18	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase	-	5
19	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan jatau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100
21	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persentase	100	100
22	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,60	58,40
23	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100
24	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100
25	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100
26	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase	100	100
27	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase	100	100
1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persentase	38,2	40,2



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	94	94,1
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		12.500	13.000
5	Persentase Pekerja Informal	Persentase	59	57,8
8	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya		22.300	22.500
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,8	89,85
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,450	0,440
	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	66,83	66,95
2	Persentase Anggaran Responsif gender	Persentase	4,85	4,88
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100
5	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang baperspektif gender dan hak anak sesuai standart	Persentase	100%	100%
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,57	61,62
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	47,53	52,28
2	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	92	92,2
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	2	2
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	84	85
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks		
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100	100



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	100	100
4	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persentase	100	100
7	persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat	Persentase	52,38	60
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	10	15
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,24	71,44
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92	92,2
5	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	46	47
7	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100
8	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persentase	100	100
9	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100
10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0,00	100
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	10	12
12	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100
13	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	4	20
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	69	90
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	Persentase	100	100



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persentase	100	100
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan	Persentase	100	100
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan	Persentase	100	100
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	50	60
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	96,00	97,00
2	Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase	50,00	60,00
3	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	82,05	85,50
4	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Publik	Nilai	86,5	88,5
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa	Indeks	0,8041	0,8128
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	100	100
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	80	81
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	80	81
4	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	100	100
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	80,28	84,61
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	44,23	48,07
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,05	65,29



No	Indikator outcome	Satuan	2025	2026
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	76,60	79,72
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase	82,70	83,06
4	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	11,20	9,37
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	84,90	86,20
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	45,38	55,77
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Persentase	2,26	2,24
7	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Persentase	14,7	12,9
8	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	72,18	72,50
9	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	9,55	9,15
10	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	85,6	86,36
11	Persentase Kampung KB Mandiri	Persentase	43	48
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	100	100
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase	50	55
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,90	4,21
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	7	8
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	23	25



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
3	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	39	40
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	27	30
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	10	14
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	60	63
7	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	16	18
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	2	2
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100
3	Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	80	83
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Jumlah Perolehan Medali Emas pada event nasional dan provinsi	buah	50	50
4	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	26,61	26,61
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		23,08	23,08
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,50	2,70
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	0	20,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	78,72	82,98
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	57,5	62,5
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	57,5	62,5
6	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	1	1,5
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	indeks	73,75	73,79
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	100	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	96,45	96,50
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	100	100
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	100	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	815	1.230
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	23.300	24.000
3	Luasan Kawasan Konservasi	ha	46	47
4	Angka Konsumsi Ikan	kg/ tahun	44,5	46,2
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-42,94	-42,94
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	38,00	46,00
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	46,84	55,70
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	104,48	104,50



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	101	101
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	101,2337	101,8914
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	99,45	99,45
5	Cakupan Luas Lahan Sawah Dilingdungi (LSD)	Persentase		
6	Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Persentase	59,51	60,23
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase	100,23	100,39
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Persentase	100,00	100,00
9	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	Persentase	75,00	75,00
10	Persentase penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100,00	100,00
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persentase	100,00	100,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	37,83	40,54
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	95	96
4	Nilai Ekspor Barang	Persentase	8,05	8,05
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase	100	100
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	75	80
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Persentase	5,1	5,2
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	90	92



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	100
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	-	-
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	-	-
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	bobot	3,5	3,52
2	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	Persentase	50	55
3	Nilai SAKIP	bobot	68	70
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	80	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN			
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks		
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100
5.02	KEUANGAN			
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	44,53	37,00



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	25,00	35,00
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	95,00	95,00
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	80,00	70,00
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100,00	100,00
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100,00	100,00
5.03	KEPEGAWAIAN			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,7	81,9
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	83	85
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	30	31,5
4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	56	57
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	17	17,5
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	25,5	26
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	20	25
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	n/a	25
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	n/a	25
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	n/a	25
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	n/a	25
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	100	100
9	Pengeluaran Iptek dan Inovasi	Persentase PDRB	0,04	0,05
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1			
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,000	3,000
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,000	3,000
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
	Nilai Sakip Perangkat Daerah			
	Kecamatan Asam Jujuhan	Indeks	74,62	75,96
	Kecamatan Koto Baru	Indeks	78,15	78,61
	Kecamatan Koto Besar	Indeks	73,81	75,36
	Kecamatan Koto Salak	Indeks	69,33	72
	Kecamatan Padang Laweh	Indeks	71,94	73,96
	Kecamatan Pulau Punjung	Indeks	72,09	74,07
	Kecamatan Sembilan Koto	Indeks	62,62	66,96
	Kecamatan Sitiung	Indeks	66,08	69,56
	Kecamatan Sungai Rumbai	Indeks	78,12	78,59
	Kecamatan Timpeh	Indeks	69,89	72,42
	Kecamatan Tiumang	Indeks	69,89	72,42
	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Kecamatan Asam Jujuhan	Indeks	79	82
	Kecamatan Koto Baru	Indeks	79	82
	Kecamatan Koto Besar	Indeks	79	82
	Kecamatan Koto Salak	Indeks	79	82
	Kecamatan Padang Laweh	Indeks	79	82
	Kecamatan Pulau Punjung	Indeks	79	82
	Kecamatan Sembilan Koto	Indeks	79	82
	Kecamatan Sitiung	Indeks	79	82



No	Indikator outcopme	Satuan	2025	2026
	Kecamatan Sungai Rumbai	Indeks	79	82
	Kecamatan Timpeh	Indeks	79	82
	Kecamatan Tiumang	Indeks	79	82
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	50	68
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase		
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	10	10

Sumber : Bapperida Tahun 2025



BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Dalam proses penyusunannya, RKPD Tahun 2026 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2025-2029. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mempedomani RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2026, yang mengacu pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang juga diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan rencana prioritas pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, serta memperhatikan perkiraan capaian tahun 2025 guna merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah serta masing-masing urusan sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2. Direktif/arahan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Periode Tahun 2025-2029 terhadap program prioritas pembangunan Tahun 2026.
3. Permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4. Keselarasan permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat



langsung maupun yang tidak terlibat langsung yang dijamin melalui pendekatan partisipatif.

5. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi Renja seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya serta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD.
6. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi dan Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026.

Dokumen RKPD nantinya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu:

1. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2026;
2. sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun anggaran 2026;
3. menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan;
4. sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAHMADHANI